



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berorientasi pada pencapaian kinerja perencanaan pembangunan secara efektif dan efisien serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
- b. bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah yang menjadi bagian perencanaan pembangunan nasional serta sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraannya, perlu adanya pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan peta proses bisnis pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Bima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.

2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bima.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mekanisme dan tahapan perencanaan daerah yang terdiri dari penyusunan, penetapan, penganggaran, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana untuk menghasilkan rencana-rencana yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan.
10. Perencanaan dan penganggaran daerah adalah perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana struktur tata ruang yang mengatur struktur dan pola tata ruang yang meliputi penyusunan, penetapan rencana tata ruang yang merupakan penjabaran RPJPD dan mengacu pada RTRW Nasional.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota.
22. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
25. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
29. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
32. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

33. Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
34. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
35. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
37. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
38. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
39. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
40. Analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

42. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan, sasaran, program, kegiatan atau sub kegiatan.
43. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
44. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.
45. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
46. Musrenbang Kelurahan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan di tingkat kelurahan.
47. Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan di tingkat kecamatan.
48. Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas, memverifikasi, memvalidasi dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKPD.
49. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.
50. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

## Pasal 2

Pedoman perencanaan pembangunan daerah di maksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam rangka menyusun, merencanakan,

menganggarkan, menetapkan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif dan transparan serta membentuk siklus perencanaan pembangunan yang utuh.

### Pasal 3

Pedoman perencanaan pembangunan daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- g. meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

### Pasal 4

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah adalah:

- a. merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan daerah dengan sistem penganggaran daerah;
- b. perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- c. adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
- d. mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
- e. adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen penganggaran;
- f. dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. responsif;
- e. akuntabel;
- f. transparan;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berkelanjutan;
- j. berwawasan lingkungan.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi pedoman untuk:

- a. penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan RPJMD
- c. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- d. penyusunan RKPD;
- e. penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan Musrenbang.

### BAB III

#### PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama unsur pemangku kepentingan melalui pendekatan:
  - a. teknokratik;

- b. partisipatif;
  - c. politik;
  - d. dari atas ke bawah (*top-down*), dan dari bawah ke atas (*bottom-up*).
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
  - (3) Perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dengan rencana tata ruang.
  - (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi, hasil evaluasi terhadap kondisi dan potensi yang dimiliki daerah serta dinamika lingkungan strategis.
  - (5) Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial.

## BAB IV

### DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

##### Pasal 8

- (1) RPJPD memuat visi, misi, sasaran dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPD Propinsi, RPJMN dan RTRW.
- (2) Arah pembangunan daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan.

##### Pasal 9

RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c. penyusunan rancangan RPJPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- f. penetapan RPJPD.

## Paragraf 1

### Persiapan Penyusunan RPJPD

#### Pasal 10

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
- e. Data dan informasi sebagaimana di maksud pada huruf d, mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## Paragraf 2

### Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan awal sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun melalui tahapan perumusan rancangan awal RPJPD yang mencakup:
  - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
  - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
  - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
  - e. perumusan visi dan misi Daerah;
  - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
  - g. KLHS.

- (2) Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disusun dengan sistematika yang mencakup:
- a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran umum kondisi daerah;
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah;
  - d. Visi dan misi daerah;
  - e. Arah dan kebijakan sasaran pokok daerah;
  - f. Penutup.

#### Pasal 13

Analisis gambaran umum kondisi daerah mencakup:

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah disusun sesuai dengan aspek: geografis dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

#### Pasal 14

- (1) Analisis permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (2) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan lainnya sebagaimana di maksud Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi serta pembangunan antar Daerah.
- (2) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah kebijakan Provinsi yang harus dipedomani oleh Daerah.
- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah

lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

#### Pasal 16

Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengandung makna:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional.
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
- c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
  1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
  4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang sebagaimana di maksud Pasal 12 ayat (1) huruf d dianalisis berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
- (2) Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.
- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional,

nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

- (4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Perumusan visi dan misi daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (3) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah digunakan sebagai pedoman dan arah untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang serta penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.

#### Pasal 20

KLHS sebagaimana di maksud Pasal 12 ayat (1) huruf g, yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

#### Pasal 21

- (1) KLHS sebagaimana di maksud dalam Pasal 20, dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi,

- dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan;
- c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada para Kepala Perangkat Daerah untuk mendapat masukan dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Masukan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda Litbang dan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana di maksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Forum konsultasi publik sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (6) Pelaksanaan forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bappeda Litbang dan diikuti pemangku kepentingan pembangunan daerah.
- (7) Bappeda Litbang mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (8) Konsultasi sebagaimana di maksud pada ayat (7), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

#### Pasal 23

- (1) Walikota menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sesuai hasil konsultasi.

- (2) Bappeda Litbang mengajukan rancangan RPJPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

##### Pasal 24

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (2) Pimpinan atau Anggota DPRD, pejabat dari Provinsi, pejabat dari Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1).

##### Pasal 25

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

### Paragraf 4

#### Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

##### Pasal 26

- (1) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

##### Pasal 27

- (1) Bappeda Litbang menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana di maksud pada ayat (1).

#### Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (3), kepada kepala Bappeda Litbang untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bappeda Litbang menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepada Walikota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana di maksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada Walikota.

#### Pasal 29

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

#### Pasal 30

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
- (2) Walikota menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.

- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

#### Paragraf 5

#### Penetapan RPJPD

#### Pasal 31

Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

#### Pasal 32

- (1) Walikota wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat membantu penyebaran lebih lanjut Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Walikota dan Wakil Walikota untuk periode berkenaan.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

#### Pasal 34

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang berpedoman pada RPJPD, RTRW dan memperhatikan RPJMD Propinsi dan RPJMN yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 35

RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;

- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD;
- f. penetapan RPJMD.

#### Paragraf 1

#### Persiapan Penyusunan RPJMD

#### Pasal 36

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

#### Pasal 37

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 36 huruf e, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- e. perumusan isu strategis daerah.

#### Pasal 38

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD yang disusun sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada para Kepala Perangkat Daerah untuk mendapat masukan.
- (2) Masukan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda Litbang dan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara

kesepakatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) .

#### Pasal 39

Analisis gambaran umum kondisi daerah sebagaimana di maksud Pasal 37 huruf a mencakup:

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah disusun sesuai dengan aspek: geografis dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

#### Pasal 40

- (1) Perumusan gambaran keuangan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 huruf b, harus dapat menjelaskan kinerja keuangan RPJMD tahun sebelumnya dan proyeksi kemampuan keuangan untuk RPJMD tahun berkenaan.
- (2) Proyeksi kemampuan keuangan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan pagu indikatif program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 37 huruf c, harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (2) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan lainnya sebagaimana di maksud Pasal 37 huruf d adalah penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi dengan serta pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan

menelaah kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Kota.

- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

#### Pasal 43

Penelaahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 41 mengandung makna:

- (1) mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah provinsi dengan nasional.
- (2) mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.
- (3) mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan jangka jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) memperhatikan RPJMD Daerah lainnya dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya.
- (5) mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Isu strategis Daerah sebagaimana di maksud Pasal 37 huruf e dianalisis dalam penyusunan berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
- (2) Isu strategis Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), dirumuskan

berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.

- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 36 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- (3) Gambaran umum kondisi daerah sebagaimana di mkasud ayat (2) huruf b, dijabarkan secara jelas dan terukur serta diselaraskan dengan kebutuhan perencanaan daerah.
- (4) Gambaran keuangan daerah sebagaimana di maksud ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah yang dihitung dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.
- (5) Permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana di maksud ayat (2) huruf d, dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat serta skala prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembangunan daerah untuk menggambarkan isu-isu strategis baik skala regional, nasional, maupun internasional yang memengaruhi tujuan pembangunan daerah dimasa datang.

- (6) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Litbang sebagai ketua tim.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

#### Pasal 46

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 huruf b, dimulai sejak Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1), mencakup:
- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
  - b. penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. perumusan tujuan dan sasaran;
  - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
  - e. perumusan program pembangunan Daerah;
  - f. perumusan program Perangkat Daerah;
  - g. KLHS.
- (4) Rancangan awal RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - i. penutup.
- (5) Visi dan misi sebagaimana di maksud ayat (4) huruf e, digunakan untuk menjelaskan kondisi ideal dalam jangka menengah serta menjadi dasar bagi

keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

- (6) Tujuan RPJMD sebagaimana di maksud ayat (4) huruf e, merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
- (7) Sasaran RPJMD sebagaimana di maksud ayat (4) huruf e, disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Walikota terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan dan dapat terhubung dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
- (8) Strategi sebagaimana di maksud ayat (4) huruf f, menjadi sarana utama untuk menghasilkan langkah-langkah yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran melalui arah kebijakan dengan mengacu pada peta proses bisnis setiap tujuan dan sasaran RPJMD.
- (9) Kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagaimana di maksud ayat (4) huruf f, dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.
- (10) Program pembangunan daerah sebagaimana di maksud ayat (4) huruf f, menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- (11) Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah sebagaimana di maksud ayat (4) huruf g, disusun berdasarkan:
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
  - c. urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan/unsur lainnya yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
- (12) Indikator dan target kinerja daerah sebagaimana di maksud ayat (4) huruf h, disusun untuk menjelaskan kinerja strategis daerah dan indicator kinerja kunci yang berhubungan dengan pencapaian keberhasilan sasaran pembangunan serta sebagai sarana uji apakah strategi pembangunan telah tepat dirumuskan.

#### Pasal 47

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 huruf b, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun.
- (3) Pelaksanaan forum konsultasi publik sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda Litbang dan melibatkan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana di maksud pada ayat (2), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana di maksud pada ayat (4).

#### Pasal 48

- (1) Bappeda Litbang mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 ayat (5) kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Walikota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Walikota dan Wakil Walikota dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana di maksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota dan ketua DPRD.
- (6) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana di maksud pada ayat (5) maka Walikota dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

#### Pasal 49

- (1) Walikota mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 ayat (5) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Walikota/ Wakil Walikota dilantik.
- (3) Konsultasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD.
- (4) Masukan sebagaimana di maksud pada ayat (3), dalam bentuk surat kepala Bappeda provinsi.
- (5) Walikota melalui Bappeda Litbang menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan masukan sebagaimana di maksud pada ayat (4).

#### Pasal 50

- (1) Bappeda Litbang menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 49 ayat (5) kepada Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Edaran Walikota.
- (2) Rancangan awal sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi acuan kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Edaran Walikota diterima.
- (4) Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (3) untuk mengintegrasikan dan menjamin keselarasan antara rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan RPJMD

#### Pasal 51

Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renstra Perangkat Daerah.

## Pasal 52

- (1) Bappeda Litbang mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan RPJMD diselesaikan paling lama 70 (tujuh puluh) hari setelah Walikota terpilih dilantik.

## Paragraf 4

### Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

## Pasal 53

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat dari Pemerintah Propinsi, Pejabat dari Bappenas dan kementerian Dalam Negeri atau dari unsur lain terkait diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.
- (4) Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari setelah Walikota terpilih dilantik.

## Pasal 54

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

## Paragraf 5

### Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

## Pasal 55

- (1) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 54 menjadi bahan masukan dalam merumuskan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Bappeda Litbang menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (3) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (2), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (4) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (2).

#### Pasal 56

- (1) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 dikonsultasikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh persetujuan substansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Walikota/Wakil Walikota dilantik.

#### Paragraf 6

#### Penetapan RPJMD

#### Pasal 57

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah memperoleh persetujuan substansi dari Gubernur sebagaimana di maksud dalam pasal 56 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 6 (enam) bulan sejak Walikota/Wakil Walikota terpilih dilantik.
- (2) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas rencana pembangunan tahunan.

## Bagian Ketiga

### Rencana Strategis Perangkat Daerah

#### Pasal 59

Renstra Perangkat daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- f. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
- g. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

#### Paragraf 1

##### Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 60

Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

#### Paragraf 2

##### Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 61

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis perangkat daerah;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan peta proses bisnis dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan

Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

#### Pasal 62

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 huruf b , disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- h. penutup.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 63

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 huruf c.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana di maksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana di maksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana di maksud dalam Pasal 61.

#### Pasal 64

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 63 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana di maksud dalam Pasal 63 ayat (3).

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang.

#### Pasal 67

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 65, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 68

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 63 ayat (2) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 63.

- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.

#### Pasal 69

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### Pasal 70

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - c. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan Surat Edaran Walikota sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 71

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (2) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama pertengahan bulan keempat setelah Walikota terpilih dilantik.

- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

#### Pasal 72

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah dibahas kepada Kepala Bappeda Litbang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Walikota diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Walikota sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 73

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana di maksud dalam Pasal 62.

#### Pasal 74

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 73 ayat (1).

- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

#### Paragraf 5

#### Penetapan Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 75

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 74 ayat (1), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

#### Pasal 76

- (1) Verifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana di maksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana di maksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 77

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 76 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 78

- (1) Bappeda Litbang menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

#### Pasal 79

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana di maksud dalam Pasal 78 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### Bagian Keempat

#### Rencana Kerja Pemerintah Daerah

#### Pasal 80

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD;
- f. penetapan RKPD.

#### Paragraf 1

#### Persiapan Penyusunan RKPD

#### Pasal 81

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

## Paragraf 2

### Penyusunan Rancangan Awal RKPD

#### Pasal 82

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 80 huruf a dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

#### Pasal 83

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

#### Pasal 84

- (1) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana di maksud dalam Pasal 83, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 83 yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
- (3) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 83, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan kota serta program dan kegiatan pembangunan kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

#### Pasal 85

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 80 huruf b, mencakup:
  - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
  - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
  - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
  - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
  - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
  - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2), disampaikan dalam SIPD.
- (4) Kepala Bappeda Litbang menyiapkan kamus pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD.

#### Pasal 86

Rancangan awal RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 85 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit, memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. arah kebijakan pembangunan Daerah;
- f. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- h. penutup.

#### Pasal 87

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 86 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana di maksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda

Litbang dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

#### Pasal 88

Bappeda Litbang menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 ayat (2).

#### Pasal 89

- (1) Bappeda Litbang mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 88, kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana di maksud pada ayat dilengkapi dengan lampiran:
  - a. surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  - b. rancangan awal RKPD.

#### Pasal 90

- (1) Bappeda Litbang menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana di maksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
  - b. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - c. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

#### Pasal 91

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (3) kepada Bappeda Litbang untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan RKPD

#### Pasal 92

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 89 ayat (1) disempurnakan berdasarkan:
  - a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi;
  - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

#### Pasal 93

Bappeda Litbang mengajukan rancangan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 92 ayat (2), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Musrenbang RKPD

#### Pasal 94

- (1) Bappeda Litbang melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang

RKPD.

- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Musrenbang RKPD di kelurahan;
  - b. Musrenbang RKPD di kecamatan;
  - c. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - d. Musrenbang RKPD Tingkat Kota.

#### Paragraf 5

#### Musrenbang RKPD di Kelurahan

#### Pasal 95

Musrenbang kelurahan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan di kelurahan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan masing-masing Rukun Warga (RW) yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan di wilayah kelurahan.

#### Pasal 96

- (1) Musrenbang kelurahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 120, dilaksanakan untuk menyepakati prioritas pembangunan yang akan disampaikan pada Musrenbang Kecamatan;
- (2) Musrenbang kelurahan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lurah bersama Ketua LPM, diikuti oleh seluruh Ketua RW, seluruh Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, Unsur Posyandu, Majelis Taklim, LSM, kelompok profesi, kelompok tani dan organisasi non pemerintah lainnya;
- (3) Bappeda Litbang, Camat, atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber Musrenbang Kelurahan;

#### Pasal 97

- (1) Kegiatan yang dapat diusulkan pada musrenbang kelurahan meliputi:
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
  - b. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
  - c. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jaringan air minum, drainase dan sekolah, persampahan, sumur resapan, jaringan air limbah, alat pemadam api ringan, pompa kebakaran portable, penerangan dan sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya.
- (4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jalan permukiman, jalan poros kelurahan dan sarana prasarana transportasi lainnya.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari MCK umum/komunal, pos pelayanan terpadu dan sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (6) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari taman bacaan, bangunan pendidikan anak usia dini, wahana permainan anak dan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

#### Pasal 98

- (1) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, UMKM, lembaga kemasyarakatan, ketertiban umum serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

#### Pasal 99

- (1) Hasil musrenbang kelurahan dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Lurah, Ketua LPM, perwakilan Ketua RW, perwakilan Ketua RT dan perwakilan dari setiap unsur peserta;
- (2) Seluruh hasil musrenbang kelurahan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dituangkan dalam aplikasi SIPD.

## Paragraf 6

### Musrenbang RKPD di Kecamatan

#### Pasal 100

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh wali kota.
- (6) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
  - a.usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
  - b.kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
  - c.pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

#### Pasal 101

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tingkat Kota dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

#### Paragraf 7

#### Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

#### Pasal 102

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD, atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### Pasal 103

- (1) Peserta forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah antara lain terdiri dari Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (3) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Maret.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### Pasal 104

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 103 ayat (4) dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Kepala Bappeda Litbang sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan April.

#### Paragraf 8

#### Musrenbang RKPD Tingkat Kota

#### Pasal 105

- (1) Musrenbang RKPD tingkat Kota sebagaimana di maksud pada Pasal 94 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
  - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
  - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
  - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
  - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi;
  - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan serta hasil penjangkangan aspirasi melalui reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD.
- (3) Hasil reses DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
  - a. hasil reses kesatu masa sidang tahun berjalan menjadi bahan penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya;
  - b. hasil reses kedua menjadi bahan penyusunan APBD Perubahan tahun berjalan;

- c. hasil reses ketiga untuk mengevaluasi prioritas-prioritas pembangunan tahun berjalan.
- (4) Hasil penjaringan aspirasi melalui reses DPRD sebagaimana di maksud ayat (3) dituangkan dalam pokok-pokok Pikiran DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
  - (5) Hasil penjaringan aspirasi yang diusulkan di luar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat diterima sebagai bahan Musrenbang RKPD.

#### Pasal 106

- (1) Musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (2) Musrenbang RKPD tingkat Kota sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
- (3) Pimpinan atau Anggota DPRD, Pejabat dari Propinsi, Pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber Musrenbang RKPD Kota.
- (4) Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Litbang dan perwakilan dari setiap unsur peserta.
- (5) Seluruh hasil Musrenbang RKPD tingkat Kota sebagaimana di maksud dalam ayat (4) dituangkan dalam aplikasi SIPD.

#### Pasal 107

- (1) Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.
- (2) Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD tingkat Kota sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dijadikan sebagai bahan perumusan RKPD.
- (3) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi dan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD tingkat Kota dikoordinasikan Bappeda Litbang dengan Propinsi guna dibahas dalam Forum Musrenbang Propinsi.

## Paragraf 9

### Perumusan Rancangan Akhir RKPD

#### Pasal 108

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD tingkat Kota.
- (2) RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana di maksud pada ayat (2) untuk memastikan prioritas program dan kegiatan prioritas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan SPM telah tertuang dalam RKPD.

#### Pasal 109

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 108 ayat (1) paling lambat pada minggu ke 3 (ketiga) bulan Mei.

#### Pasal 110

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana di maksud dalam Pasal 108 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana di maksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. surat permohonan fasilitasi dari wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
  - b. rancangan akhir RKPD;
  - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
  - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

- (5) Fasilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubenur melalui kepala Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.

#### Paragraf 10

#### Penetapan RKPD

#### Pasal 111

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 110 ayat (6) disampaikan oleh kepala Bappeda Litbang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD.

#### Pasal 112

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

#### Pasal 113

Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

#### Pasal 114

Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

## Bagian Kelima

### Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 115

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- f. penetapan Renja Perangkat Daerah.

#### Paragraf 1

### Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 116

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

#### Paragraf 2

### Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 117

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

#### Pasal 118

- (1) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 115 huruf b, mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- b. hasil evaluasi Renja tahun lalu.
- (2) rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

##### Pasal 119

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Surat Edaran Walikota sebagaimana di maksud dalam Pasal 90.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (4) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (5) Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda Litbang.

##### Pasal 120

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 102.

### Paragraf 4

#### Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

##### Pasal 121

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 115 huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan walikota tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan

dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam peraturan walikota tentang RKPD.

#### Paragraf 5

#### Penetapan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 122

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) memastikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda Litbang menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Walikota.

#### Pasal 123

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 122 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

### BAB V

#### TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 124

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
  - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun;

- b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 125

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana di maksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
  - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. target sasaran pembangunan Daerah;
  - c. prioritas pembangunan Daerah;
  - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
  - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 126

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

#### Pasal 127

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD;
- c. penetapan.

### Bagian Kedua

#### Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

#### Pasal 128

- (1) Bappeda menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
  - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

#### Pasal 129

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

#### Pasal 130

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 129 huruf a, mencakup:

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
  - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
  - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana di maksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam SIPD dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Walikota.

#### Pasal 129

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. penutup.
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 130

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 129, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

#### Pasal 131

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 130 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala

Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 132

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda Litbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda Litbang sebagaimana di maksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Bappeda Litbang paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

#### Pasal 133

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1).

#### Pasal 134

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam bentuk surat gubenur melalui kepala Bappeda provinsi.
- (5) Walikota menyempurnakan rancangan Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana di maksud ayat (4).

#### Paragraf 3

#### Penetapan Perubahan RKPD

#### Pasal 135

- (1) Rancangan Peraturan Walikota sesuai dengan Pasal 134 ayat (5) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

#### Pasal 136

- (1) Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dijadikan:
  - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
  - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

#### Pasal 137

- (1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 136 ayat (1) kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

- (2) Peraturan Walikota sebagaimana di maksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 138

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 139

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. Rancangan Perubahan RKPD;
  - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

#### Pasal 140

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3), terdiri atas:
  - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
  - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
  - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

#### Pasal 141

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 140 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 142

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana di maksud dalam Pasal 140 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Pasal 143

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Pasal 144

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan

ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana di maksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang.

#### Pasal 145

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 144 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 146

- (1) Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 145 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Perkada sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### Pasal 147

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 146 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

### BAB VI

#### KONDISI KHUSUS

#### Pasal 148

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD ketika belum memiliki RPJMD, berpedoman pada:

- a. sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMD Propinsi dan RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional;
  - b. visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 149

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 150

Ketentuan dan format mengenai:

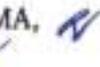
- a. penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan RPJMD;
- c. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- d. penyusunan RKPD;
- e. penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- g. Pelaksanaan Musrenbang.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 151

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 Mei 2021  
WALIKOTA BIMA,  
  
MUHAMMAD LUTFI



Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 656

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH

## PENYAJIAN DOKUMEN RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah.

### 1. Cakupan Penyusunan RPJPD

- Pengumpulan data primer dan sekunder
- Proses Analisis SWOT (*Strenght, Weaknes, Oportunity, Treats*)
- Proses dan analisis kondisi eksisting SDA, SDM, potensi ekonomi, tingkat perkembangan sosial budaya, kondisi politikm hukum serta tingkat keamanan dan ketertiban.
- Proses pengkajian kondisi sektor ekonomi unggulan dalam rangka mendapatkan peta potensi termasuk potensi PAD & kapasitas ekonomi daerah.
- Proses pengkajian produk unggulan, potensi, permasalahan dan prospek ke depan serta konsep pengembangannya.
- Analisis keterkaitan antar sektor dan produk unggulan agar dapat diperoleh peta potensi ekonomi daerah.
- Proses perencanaan pembangunan yang lebih rasional, sistematis, dandapat diukur serta formulasi strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan azas berkelanjutan dan keterpaduan.

### 2. Sistematika dan Ruang lingkup Penyajian RPJMD

Penulisan dan penyajian dokumen RPJPD baik baik rancangan awal maupun rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika sistematika

sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD sehingga substansi dan struktur secara keseluruhan dokumen dapat dipahami dengan baik.

### 1.1. Latar Belakang

Meliputi penjelasan mengenai pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sub bab ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Pada sub bab ini digambarkan mengenai hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan seperti RPJPN, RPJPD provinsi, dan RTRW Kota beserta penjelasannya.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD

### 1.5. Sistematika Penulisan.

Pada sub bab ini menguraikan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

## BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Gambaran umum kondisi daerah yang disajikan adalah data dan informasi yang selaras dan mendukung dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada sub bab ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat disajikan pada sub bab ini.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub bab ini menjelaskan keadaan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan. Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama indikator yang menggambarkan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini diuraikan aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan menurut kewenangan dan urusan pemerintah daerah yang meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum.

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Pada bagian ini menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini merupakan salah satu yang dapat menjelaskan poin penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

#### 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat.

#### 3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

### BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

#### 4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas

tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

#### 4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan *stakeholders* utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Misi diatas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai.

### BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

#### 5.1. Arah Kebijakan Daerah

Pada tahap disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

##### 1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

##### 2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

##### 3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

##### 4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang

menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

## 5.2. Sasaran pokok

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Penuangan sasaran dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

### 5.2.1. Sasaran pokok 1.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

### 5.2.2. Sasaran pokok 2.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

### 5.2.3. Sasaran pokok 3.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

### 5.2.4. Sasaran pokok dst.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

## BAB VI. PENUTUP



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA  
BIMA NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

PENYAJIAN DOKUMEN RPJMD

A. Prinsip Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Strategis

RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Demokratis dan Partisipatif

Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

3. Politis

Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.

4. Perencanaan Bottom-up

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

## 5. Perencanaan Top Down

Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.

### B. Kerangka Analisis RPJMD

Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

### C. Proses Penyusunan RPJMD.

Terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ke 3 alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu.

#### Alur Proses Strategis

merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

#### Alur proses partisipatif

merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakeholder LSM, CSO, atau CBO untuk memberikan kontribusi yang afektif pada setiap kesempatan even perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.

#### Alur Legislasi dan Politis

merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.

#### D. Cakupan Penyusunan RPJMD

- Proses Identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan aktual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan.
- Proses identifikasi dan analisis kondisi, potensi SDA, SDM dan berbagai asset baik *tangible assets (hardware)* maupun *intangible assets (software)* yang dimiliki pemerintah daerah.
- Proses formulasi kebijakan indikatif (*policies formulation*) untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan.
- Penyusunan arah kebijakan dan kordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan.
- Perumusan program lintas kewilayahan dalam pemerintah daerah termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendaan yang bersifat infikatif untuk 5 tahun mendatang.

#### E. Sistematika dan ruang lingkup penyajian

Penulisan dan penyajian dokumen RPJMD baik rancangan awal maupun rancangan akhir RPJMD disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJMD sehingga substansi dan struktur secara keseluruhan dokumen dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1. Latar Belakang

Meliputi penjelasan mengenai pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, alasan mengapa RPJMD ini disusun dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sub bab ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJMD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

#### 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah lainnya

Pada sub bab ini digambarkan mengenai hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan seperti RPJPN, RPJPD provinsi, RPJM Nasional, RPJM Provinsi, RKPD dan RTRW Kota beserta penjelasannya.

#### 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Pada Bagian sub bab ini menjelaskan hubungan RPJMD Kota Bima dengan RPJM Nasional yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

#### 1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi NTB

Bagian dari sub bab ini menjelaskan keterkaitan RPJMD Daerah dengan RPJMD Provinsi yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah.

#### 1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Bagian dari sub bab ini menjelaskan keterkaitan RPJMD Daerah dengan RPJPD dimana selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2008-2028.

#### 1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Bagian dari sub bab ini menjelaskan keterkaitan RPJMD Daerah dengan RTRW Daerah Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.

#### 1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Bagian dari sub bab ini menjelaskan keterkaitan RPJMD Daerah dengan Renstra OPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan.

#### 1.3.6. Hubungan RPJMD dengan RKPD

Bagian dari sub bab ini menjelaskan keterkaitan RPJMD Daerah dengan RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD

#### 1.3.7. Hubungan RPJMD Kota Bima dengan RPJMD Kabupaten Tetangga

Bagian dari sub bab ini menjelaskan mengenai Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan RPJMD Daerah Tahun 2018-2023 Ke RPJMD 2018-2023, sebagai upaya menjaga kesinambungan regional, diperlukan adanya koordinasi pembangunan dengan RPJMD dan

RTRW Kabupaten tetangga yakni Kabupaten Bima

#### 1.3.8. Kebijakan Umum Pembangunan Berkelanjutan

Bagian dari sub bab ini menjelaskan mengenai Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan meliputi mencakup tujuan dan strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan baik skala nasional maupun skala daerah. Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) strategi.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD

#### 1.5. Sistematika Penulisan.

Pada sub bab ini menguraikan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

## BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Gambaran umum kondisi daerah yang disajikan adalah data dan informasi yang selaras dan mendukung dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

### 2.1. Kondisi Umum Daerah

#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1. Aspek Geografi

#### A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 1. Luas dan Batasan Wilayah Administrasi

Pada sub bab ini dijelaskan Batasan administrasi, jumlah Kecamatan, jumlah Kelurahan, serta luasan wilayah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Bima.

*Tabel 2.1.  
Luas Wilayah Kota Bima*

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1			
2			
3			
4			
5			
n			
Jumlah			

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Bagian ini menjelaskan letak atau posisi geografis serta daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bima

## 3. Topografi

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi Topografi yang terdiri dari Ketinggian dan Kelerengan yang ada di Kota Bima, dengan menampilkan tabel-tabel sebagai mana terlihat di bawah ini.

*Tabel 2.2.*

*Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut*

Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut	Luas Tanah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kota Bima (%)
0 - 25		
25 - 50		
> 50		
Jumlah		

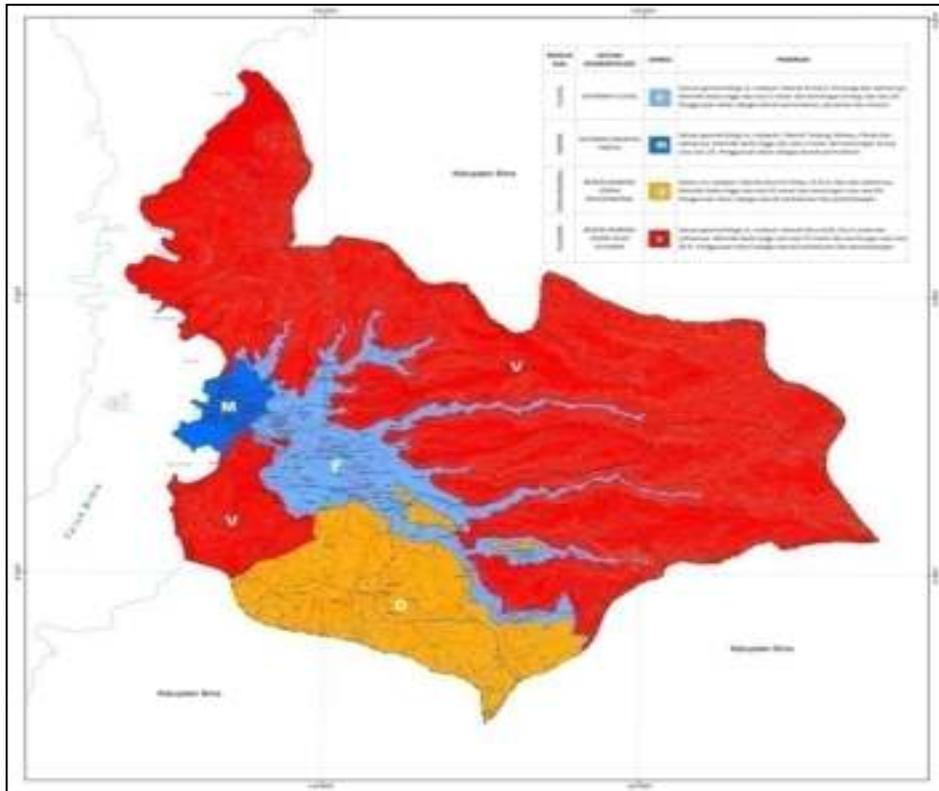
*Tabel 2.3.*

*Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima*

No	Kecamatan	Datar (0 - 2 <sup>o</sup> )	Bergelombang (2 - 15 <sup>o</sup> )	Curam (15 - 40 <sup>o</sup> )	Sangat Curam (> 40 <sup>o</sup> )
1					
2					
3					
4					
5					
N					
Jumlah					

## 4. Geologi

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi geologi baik secara geomorfologi, morfometri, dan secara morfogenesis di Kota Bima. Dengan menampilkan jenis peta Geologi Kota Bima.



Gambar 2.1. Geomorfologi Kota Bima

5. Hidrologi

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi Hidrologi yang terdiri dari Kondisi Sungai, serta Kondisi Mata Air yang ada di Kota Bima.

Tabel 2.4.  
Sungai di Kota Bima

Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
			Hulu	Hilir
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
Jumlah				

6. Klimatologi

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi klimatologi di Kota Bima, dengan menampilkan tabel-tabel sebagai mana terlihat di bawah ini

*Tabel 2.5  
Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari*

Bulan	Suhu Udara (°C)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari				
Pebruari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
Nopvember				
Desember				
Rata-Rata				

*Tabel 2.6  
Keadaan Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kota Bima Tahun...*

Bulan	Kecepatan Angin	Tekanan Udara (mb)
1. Januari		
2. Pebruari		
3. Maret		
4. April		
5. Mei		
6. Juni		
7. Juli		
8. Agustus		
9. September		
10. Oktober		
11. November		
12. Desember		
Rata-Rata		

Sumber:

7. Penggunaan Lahan

Menjelaskan mengenai jenis penggunaan lahan berdasarkan status peruntukan lahan dan luasan dari tiap-tiap penggunaan lahan yang ada di Kota Bima.

Tabel 2.7

*Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Peruntukan Lahan*

Jenis Penggunaan Lahan	Satuan	Tahun				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Perumahan	Ha					
Jasa	Ha					
Perusahaan	Ha					
Industri	Ha					
Pertanian	Ha					
Non Produktif	Ha					
Lain-lain	Ha					
<b>Jumlah</b>	<b>Ha</b>					

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap Potensi pengembangan wilayah Kota Bima dalam pembahasannya mengacu pada arahan rencana penataan ruang Wilayah Kota Bima yang meliputi:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
2. Perwujudan Sistem Transportasi
3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

B. Wilayah Rawan Bencana.

Bagian sub bab ini menjelaskan kondisi, lokasi, dan jenis kebencanaan yang ada di Kota Bima, serta pengembangan ruang evakuasi bencana berdasarkan jenis bencana, serta menampilkan jenis peta rawan bencana di Kota Bima

1. Rawan bencana banjir
2. Rawan bencana gelombang pasang/tsunami
3. Rawan bencana gempa bumi
4. Rawan bencana Kebakaran

Tabel 2.8

*Jumlah Kejadian Bencana*

No.	Jenis Bencana	n-3	n-2	n-1
1	Banjir			
2	Gelombang Pasang/tsunami			
3	Gempa Bumi			
4	Kebakaran			

### 2.1.1.2. Aspek Demografi

Menguraikan aspek kependudukan yang menjadi elemen dasar berkaitan dengan wilayah, serta perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

#### A. Struktur Penduduk

##### 1. Jumlah Penduduk

Bagian ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi demografis yang terdiri dari jumlah penduduk, Kepadatan dan Persebaran penduduk, pertumbuhan penduduk, dan struktur penduduk menurut jenis kelamin,

*Tabel 2.9.  
Jumlah Penduduk Daerah*

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1						
2						
3						
4						
5						
n						
Jumlah						

*Tabel 2.10  
Kepadatan Penduduk Perkecamatan*

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1						
2						
3						
4						
5						
n						
Jumlah						

*Tabel 2.11  
Laju PertumbuhanPenduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%					

*Tabel 2.12*  
*Perkembangan Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin*

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1					
2					
3					
4					
5					

B. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pada bagian ini menjelaskan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur yang menggambarkan jumlah penduduk usia produktif, serta dominasi-dominasi penduduk pada usia tertentu

C. Struktur Menurut Pendidikan

Menjelaskan jumlah penduduk Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, serta menggambarkan jumlah penduduk yang mendominasi pada jenjang pendidikan tertentu.

*Tabel 2.13*  
*Jumlah Penduduk Yang Mencapai Jenjang Pendidikan*

No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Tidak/Blm Sekolah	Jiwa					
2	Belum Tamat SD/Sederajat	Jiwa					
3	Tamat SD/Sederajat	Jiwa					
4	SLTP/Sederajat	Jiwa					
5	SLTA/Sederajat	Jiwa					
6	Diploma I/II	Jiwa					
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	Jiwa					
8	Diploma IV/Strata I	Jiwa					
9	Strata-II	Jiwa					
10	Strata-III	Jiwa					

C. Penduduk Menurut Agama

Menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan kepercayaan yang dianut, baik islam. Kristen, Katholik, Hindu, Budha, atau yang lainnya, hal ini terkait dengan kesediaan sara dan prasarana keagamaan yang tersedia. Dan menggambarkan kondisi mayoritas penduduk dengan agama yang di anutnya.

*Tabel 2.14*  
*Jumlah Pemeluk Agama DI Kota Bima*

No.	Uraian	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Islam	Jiwa					
2	Kristen	Jiwa					
3	Katholik	Jiwa					
4	Hindu	Jiwa					
5	Budha	Jiwa					
6	Konghuchu	Jiwa					
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Jiwa					
Jumlah							

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Tabel 2.15

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha ADHK

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi					
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi					
L	Real Estate					
M,N	Jasa Perusahaan					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan					
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
S,T,U	Jasa Lainnya					
<b>PDRB Kota Bima ADHK</b>						
<b>PDRB Provinsi NTB ADHK (Miliar rupiah)</b>						

Tabel 2.16

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha ADHB

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik dan Gas					

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi					
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi					
L	Real Estate					
M,N	Jasa Perusahaan					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan					
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
S,T,U	Jasa Lainnya					
<b>PDRB Kota Bima ADHB</b>						
<b>PDRB Provinsi NTB ADHB (Miliar rupiah)</b>						

*Tabel 2.17*  
*Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)*

No.	Lapangan Usaha	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi					
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi					
L	Real Estate					
M,N	Jasa Perusahaan					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan					
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
R,S,T,U	Jasa Lainnya					
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>						

*Tabel 2.18*  
*Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK*

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-rata pertumbuhan PDRB per Tahun (%)
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan						
B	Pertambangan dan Penggalian						
C	Industri Pengolahan						
D	Pengadaan Listrik dan Gas						
E	Pengadaan Air, Pengeloraaktaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang						

F	Konstruksi						
	Perdagangan Besar dan						
H	Transportasi dan						
I	Penyediaan Akomodasi dan						
J	Informasi dan Komunikasi						
K	Jasa Keuangan dan Asuransi						
L	Real Estate						
M,N	Jasa Perusahaan						
	Administrasi Pemerintahan,						
P	Jasa Pendidikan						
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan						
R,S	Jasa Lainnya						
<b>Pertumbuhan PDRB Kota Bima</b>							
<b>Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB</b>							

## 2. Laju Inflasi

Pada bagian ini menjelaskan mengenai nilai inflasi berdasarkan indikator nilai barang dan jasa secara umum, yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

*Tabel 2.19  
Inflasi Kota Bima Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)*

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Bahan Makanan							
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok							
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar							
4	Sandang							
5	Kesehatan							
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga							
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan							
<b>Inflasi Kota Bima</b>								
<b>Inflasi Nasional</b>								

## 3. PDRB Perkapita

Menjelaskan indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi

sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

*Tabel 2.20*  
*PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB*

Uraian	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Nilai PDRB (Juta Rp)					
Jumlah Penduduk (jiwa)					
<b>PDRB perkapita (Rupiah/jiwa)</b>					

4. Indeks Gini

Menjelaskan identifikasi menggunakan Indeks Gini terhadap Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Menjelaskan Indikator lain yang dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yang fokus menilai ketimpangan berdasarkan kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut, maka distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Menjelaskan Indikator yang biasa digunakan untuk melihat ketimpangan wilayah adalah Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson Kota Yogyakarta didasarkan pada data PDRB per kapita kecamatan dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan.

*Tabel 2.21*  
*PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Bima*

No	Kecamatan	Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (000 Rp)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Rasanae Barat					
2	Mpunda					
3	Rasanae Timur					
4	Raba					
5	Asakota					
Jumlah						

7. Porsentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

*Tabel 2.22  
Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Kota Bima</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah					
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa					
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)					
<b>Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan</b>	<b>(%)</b>					
<b>Provinsi NTB</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah					
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa					
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)					
<b>Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan</b>	<b>(%)</b>					

#### 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.

*Tabel 2.23  
Indeks Pembangunan Manusia*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
Angka Harapan Hidup	Tahun						
Harapan Lama Sekolah	Tahun						
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun						
Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rp						
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>							

*Tabel 2.24  
Perbandingan Kondisi IPM*

Indikator IPM	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	
Kota Bima						
Provinsi NTB						
Indonesia						

#### 9. Angka Melek Huruf

Menjelaskan Angka Melek Huruf yang merupakan persentase

penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis

*Tabel 2.25  
Angka Melek Huruf*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Angka Melek Huruf	Persen						

10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus,

*Tabel 2.26  
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Jenjang Pendidikan*

No	Indikator	Satuan	n-7	n-6	n-5
1.	SD/MI	Tahun			
2.	SMP/MTs	Tahun			
3.	SMA/MA/SMK	Tahun			

11. Angka Usia Harapan Hidup

Menjelaskan usia harapan hidup untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

12. Persentase Balita Gizi Buruk

Menjelaskan mengenai Persentase gizi buruk yang merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang.

*Tabel 2.27*  
*Persentase Balita Gizi Buruk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Jumlah balita gizi buruk	Anak						
2.	Jumlah balita	Anak						
3.	<b>Persentase balita gizi buruk</b>	<b>Persen</b>						

13. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi kurang berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi kurang di suatu daerah

*Tabel 2.28*  
*Prevalensi Balita Gizi Kurang*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Banyaknya balita gizi kurang	Anak						
2.	Jumlah balita	Anak						
3.	<b>Prevalensi balita gizi kurang</b>	<b>Persen</b>						

14. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan Siaga Aktif adalah kelurahan yang penduduknya dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar, dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan survailans berbasis masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

*Tabel 2.29*  
*Cakupan Kelurahan Siaga Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kelurahan siaga aktif	kelurahan					
2.	Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk	kelurahan					
3.	<b>Cakupan kelurahan siaga aktif</b>	<b>Persen</b>					

15. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Menerangkan Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka

partisipasi angkatan kerja.

*Tabel 2.30*  
*Angka Partisipasi Angkatan Kerja*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas (yang bekerja)	Jiwa						
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Jiwa						
3.	<b>Angka Partisipasi Angkatan Kerja</b>	%						

#### 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selain angka partisipasi angkatan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) juga dapat dihitung dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja menggambarkan persentase angkatan kerja dari keseluruhan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas.

*Tabel 2.31*  
*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Angkatan Kerja 15 thn ke atas	Jiwa						
2.	Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	Jiwa						
3.	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	%						

#### 17. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menjelaskan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja, dimana pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja

*Tabel 2.32*  
*Tingkat Pengangguran Terbuka*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah pengangguran terbuka	Orang						

2.	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang						
3.	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%						

### 18. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja.

*Tabel 2.33  
Rasio Penduduk yang Bekerja*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Penduduk yang Bekerja	Jiwa						
2.	Angkatan Kerja	Jiwa						
3.	<b>Rasio penduduk yang Bekerja</b>							

### 19. Pertumbuhan PDRB Per tenaga Kerja

Menjelaskan Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja yang merupakan besar pertumbuhan PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menggambarkan semakin efektif tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja.

*Tabel 2.34  
Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Menurut BPS*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	PDRB ADHB	Juta rupiah						
2.	Jumlah tenaga kerja	Jiwa						
3.	<b>PDRB per tenaga kerja</b>	<b>Juta rupiah/jiwa</b>						

*Tabel 2.35  
Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Menurut Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan.*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	PDRB ADHB	Juta rupiah						

2.	Jumlah tenaga kerja	Jiwa						
3.	PDRB per tenaga kerja	Juta rupiah/jiwa						

20. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas adalah indikator yang membandingkan jumlah total kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, rasio ini akan menggambarkan besar kesempatan kerja bagi penduduk usia 15 tahun ke atas.

*Tabel 2.36*  
*Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Kesempatan Kerja	Orang						
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Orang						
3.	<b>Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas</b>	%						

21. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

*Tabel 2.37*  
*Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat*

No.	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat					
2.	<b>Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat</b>					

22. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan  
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan besaran pendapatan daerah yang dapat digali dari dalam wilayah

sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

*Tabel 2.38  
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Juta Rupiah						
2.	Total Pendapatan Daerah	Juta Rupiah						
3.	Persentase PAD	%						

### 23. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat juga termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Pola Pangan Harian (PPH) menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam analisis kesejahteraan masyarakat. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal 100.

### 24. Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan berfungsi untuk memastikan pada kabupaten/kota tertentu setiap tahunnya agar mempunyai inventarisasi cadangan pangan sebesar 100 ton bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Indikator penguatan cadangan pangan mendorong setiap wilayah untuk dapat mencapai besaran cadangan pangan minimal

*Tabel 2.39*  
*Persentase Cadangan Pangan Per 100 Ton*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Jumlah cadangan pangan	Ton					
<b>Persentase cadangan pangan</b>	<b>%</b>					

25. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

*Tabel 2.40*  
*Penanganan Daerah Rawan Pangan*

No.	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan	Daerah					
2	Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku	Daerah					
3	<b>Persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku</b>	<b>%</b>					

26. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB ADHB menggambarkan posisi sektor pertanian dan perkebunan dalam struktur perekonomian wilayah.

*Tabel 2.41*  
*Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor pertanian dan perkebunan	Juta Rupiah						
PDRB Kota Yogyakarta	Juta Rupiah						
<b>Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan</b>	<b>%</b>						

27. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB menggambarkan besaran yang disumbangkan oleh sektor tanaman pangan ke dalam sektor pertanian dan perkebunan secara umum.

*Tabel 2.42  
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor pertanian (palawija)	Juta Rupiah						
PDRB sektor pertanian dan perkebunan	Juta Rupiah						
<b>Kontribusi sektor pertanian (palawija)</b>	<b>%</b>						

28. Produksi Sektor Pertanian

produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di suatu daerah sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

29. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor pariwisata dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam PDRB, sektor pariwisata diwakili dalam lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

*Tabel 2.43  
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Juta Rupiah						
PDRB ADHB Kota Yogyakarta	Juta Rupiah						
<b>Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum</b>	<b>%</b>						

30. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perikanan dalam struktur

perekonomian wilayah. Dalam struktur PDRB, sektor perikanan termasuk dalam lapangan usaha A, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

*Tabel 2.44*  
*Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor perikanan	Juta Rupiah						
PDRB ADHB Kota Yogyakarta	Juta Rupiah						
<b>Kontribusi sektor perikanan</b>	<b>%</b>						

### 31. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian wilayah.

*Tabel 2.45*  
*Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Juta rupiah						
PDRB ADHB Daerah	<b>Juta rupiah</b>						
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	<b>%</b>						

### 32. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah.

*Tabel 2.46*  
*Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor industri pengolahan	Juta rupiah						

PDRB ADHB Daerah	Juta rupiah						
<b>Kontribusi sektor industri pegolahan</b>	<b>%</b>						

### 33. Pertumbuhan Industri

Menjelaskan jumlah unit industry yang ada pada suatu daerah yang menggambarkan kondisi pertumbuhan sektor industry.

*Tabel 2.47  
Pertumbuhan Industri Kecil*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Unit usaha industri kecil	Unit					
<b>Pertumbuhan</b>	<b>%</b>					

#### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

##### 2.1.3.1. Fokus Urusan Wajib Layanan Dasar

###### A. Pendidikan

###### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PUD)

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang menjalani pra pendidikan dasar, seperti sekolah di TK.

*Tabel 2.48  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak	Jiwa						
2.	Jumlah anak usia 4 - 6 tahun	Jiwa						
3.	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persen</b>						

###### 2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya

serap penduduk usia sekolah di masing- masing jenjang pendidikan.

### 3. Angka Pendidikan Yang di Tamatkan

Merupakan suatu indikator yang menghitung persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga nantinya dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu

*Tabel 2.49*  
*Angka Pendidikan yang Ditamatkan*

No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Tidak/Belum Sekolah	Persen						
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	Persen						
3.	Tamat SD/Sederajat	Persen						
4.	SMP/Sederajat	Persen						
5.	SMA/Sederajat	Persen						
6.	Diploma I/II	Persen						
7.	Diploma III/Akademi/Sarjana Muda	Persen						
8.	Diploma IV/Strata I	Persen						
9.	Strata II	Persen						
10.	Strata III	Persen						

### 4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu.

### 5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

### 6. Angka Putus Sekolah

Menghitung perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu.

Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan.

*Tabel 2.50*  
*Angka Putus Sekolah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	SD/MI	Persen						
2.	SMP/MTs	Persen						
3.	SMA/MA/SMK	Persen						

#### 7. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut.

*Tabel 2.51*  
*Angka Kelulusan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	SD/MI	Persen						
2.	SMP/MTs	Persen						
3.	SMA/MA/SMK	Persen						

#### 8. Angka Melanjutkan

Menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

*Tabel 2.52*  
*Angka Melanjutkan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen						
2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Persen						

#### 9. Fasilitas Pendidikan

Menjelaskan Jumlah sekolah atau unit bangunan sekolah dalam kondisi baik dengan melakukan berperbandingan antara gedung

atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan.

a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan Baik

Menjelaskan Jumlah sekolah atau unit bangunan sekolah berdasarkan tingkat SD/MI dalam kondisi baik pada suatu daerah.

Tabel 2.53

*Ruang Kelas SD/MI dengan Kondisi Baik*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah SD/MI Kondisi Baik	Unit					
2	Jumlah Seluruh SD/MI	Unit					
3	<b>Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik</b>	<b>Unit</b>					

b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Menjelaskan Jumlah sekolah atau unit bangunan sekolah berdasarkan tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik pada suatu daerah.

Tabel 2.54

*Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA dengan Kondisi Baik*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Ruang Kelas SMP/MTs</b>							
1	Jumlah SMP/MTs Kondisi Baik	Unit					
2	Jumlah SMP/MTs	Unit					
3	Persentase SMP/MTs Kondisi Baik	Persen					
<b>Ruang Kelas SMA/SMK/MA</b>							
1	Jumlah SMA/SMK/MA Kondisi Baik	Unit					
2	Jumlah SMA/SMK/MA	Unit					
3	Persentase SMA/SMK/MA kondisi baik	Persen					

10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Menjelaskan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah dalam setiap 10.000 penduduk. Penghitungan rasio ini menggunakan perbandingan jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun.

*Tabel 2.55*  
*Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit						
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Jiwa						
3.	<b>Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar</b>							

11. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah

Menjelaskan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini perhitungannya melibatkan angka jumlah sekolah SMA/SMK/MA dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

*Tabel 2.56*  
*Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SMA/SMK/MA	Unit						
2.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Jiwa						
3.	<b>Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA</b>	<b>Unit/ 10.000 jiwa</b>						

12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Pada perhitungan ini, yang dihitung adalah jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SMP/MTs, baik swasta maupun PNS.

13. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada level SMA/SMK/MA. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah murid yang ideal untuk satu

guru agar tercapai mutu pengajarannya

Tabel 2.57

*Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru SMA/SMK/MA	Orang						
2.	Jumlah murid SMA/SMK/MA	Orang						
3.	<b>Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah</b>							

14. Rasio Guru/Murid PerKelas Rata-Rata Sekolah Dasar

Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan dasar yang dimaksud adalah SD/MI.

Tabel 2.58

*Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah guru SD per kelas	Orang					
2.	Jumlah murid SD	Orang					
3.	<b>Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar</b>						

15. Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-Rata Sekolah Menengah

Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan menengah yang dimaksud adalah SMP/MTs,

Tabel 2.59

*Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah guru SMP per kelas	Orang					
2.	Jumlah murid pendidikan SMP	Orang					
3.	<b>Rasio guru/murid per kelas rata-rata</b>						

16. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Perbandingan antara banyaknya lulusan siswa SD dengan banyaknya penduduk yang berusia 12 tahun (usia rata-rata lulus SD). Indikator ini digunakan untuk melihat banyaknya siswa yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasar.

*Tabel 2.60*  
*Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Banyaknya lulusan SD	Orang						
2.	Banyaknya penduduk usia 12 tahun	Orang						
3.	<b>Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar</b>	%						

17. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik

*Tabel 2.61*  
*Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Orang						
2.	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Orang						
3.	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>	%						

18. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Menggambarkan proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan baik tingkat SD maupun SMP.

*Tabel 2.62*  
*Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun N-1*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	

19. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan  
Menggambarkan Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)  
bidang pendidikan

*Tabel 2.63*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase SD terakreditasi A	%					
2	Persentase SMP terakreditasi A	%					
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%					
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	%					
5	Angka partisipasi kasar SD	%					
6	Angka partisipasi kasar SMP	%					
7	Angka rata-rata lama sekolah	tahun					
8	Persentase guru sesuai kualifikasi	%					

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup.  
menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi

*Tabel 2.64*  
*Angka Kematian Bayi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi						
2.	Jumlah kelahiran hidup	bayi						
3.	<b>Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)</b>	<b>per 1.000 kelahiran hidup</b>						

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi  
Menggambarkan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

*Tabel 2.65*  
*Angka Kelangsungan Hidup Bayi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)						
2.	<b>Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) → (1000-AKB)</b>						

3. Angka Kematian Balita Per1000 Kelahiran

Menggambarkan angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup.

*Tabel 2.66  
Angka Kematian Balita*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita						
2.	Jumlah kelahiran hidup	balita						
3.	<b>Angka kematian balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)</b>							

4. Angka Kematian Neontal Per1000 Kelahiran

Menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup.

*Tabel 2.67  
Angka Kematian Neonatus*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	Bayi						
2.	Jumlah kelahiran hidup	Bayi						
3.	<b>Angka kematian neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup)</b>							

5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Menjelaskan angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

*Tabel 2.68  
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	orang						
2.	Jumlah kelahiran hidup							
3.	<b>Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup</b>							

6. Rasio Posyandu PerSatuan Balita

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi warga kota (terutama ibu dan anak), sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Tabel 2.69  
Rasio Posyandu Per Satuan Balita

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Posyandu	Unit						
2.	Jumlah Balita	Anak						
3.	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/ anak						

7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas

Tabel 2.70  
Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Puskesmas	Unit						
	Puskesmas Pembantu	Unit						
	Klinik	Unit						
	Jumlah puskesmas, pustu, dan klinik	Unit						
2.	Jumlah penduduk	Jiwa						
3.	Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk							

8. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk adalah Perbandingan antara ketersediaan unit rumah sakit dengan jumlah penduduk dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Tabel 2.71  
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)

1.	Jumlah Rumah Sakit	unit						
2.	Jumlah penduduk	jiwa						
3.	<b>Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk</b>							

9. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Menggambarkan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan pada satu daerah

*Tabel 2.72  
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Dokter Umum	Orang						
2.	Dokter Spesialis	Orang						
3.	Dokter Gigi	Orang						
4.	<b>Jumlah Dokter</b>	<b>Orang</b>						
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa						
6.	<b>Rasio per satuan penduduk</b>							

10. Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk

Menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan.

*Tabel 2.73  
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah Perawat	Orang						
2	Jumlah Perawat gigi	Orang						
3	Jumlah Bidan	Orang						
4	<b>Jumlah Total</b>	<b>Orang</b>						
5	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Orang</b>						
6	Rasio Perawat	per 1000						
7	Rasio Perawat gigi	per 1.000						
8	Rasio Bidan	per 1.000						
	<b>Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk</b>	<b>per 1.000</b>						

11. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.

*Tabel 2.74*  
*Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Orang						
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang						
3.	<b>Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani</b>	<b>Persen</b>						

12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar

*Tabel 2.75*  
*Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Orang					
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Orang					
3.	<b>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</b>	<b>Persen</b>					

13. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*

Universal Child Immunization (UCI) adalah istilah untuk tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan.

*Tabel 2.76*  
*Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Kelurahan UCI	Unit					
2.	Jumlah Seluruh Kelurahan	Unit					
3.	<b>Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i></b>	<b>Persen</b>					

14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.77  
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Anak					
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak					
3.	<b>Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan</b>	<b>Persen</b>					

15. Presentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Tabel 2.78  
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1.	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	anak						
2.	Jumlah anak usia 1 tahun	anak						
3.	<b>Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak</b>	<b>persen</b>						

16. Non polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk  
Cakupan Penemuan jumlah kasus SFP non polio yang di laporkan berbanding jumlah penduduk dibawah 15 tahun, untuk mengetahui kasus non polio AFT rate per 100.000 penduduk. pengukuran indikator *non polio AFP rate* ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.

Tabel 2.79  
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	orang					
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	orang					
3.	<b>Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk</b>						

17. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Menjelaskan Cakupan balita pneumonia yang ditangani dan diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

*Tabel 2.80  
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	Anak					
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Anak					
3.	<b>Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani</b>	<b>Persen</b>					

18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama.

*Tabel 2.81  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Orang					
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Orang					
3.	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA</b>	<b>Persen</b>					

19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk.

*Tabel 2.82  
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang					
2.	Jumlah Penduduk	Orang					
3.	<b>Tingkat prevalensi Tuberkulosis</b>	<b>Per 100.000 penduduk</b>					

20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TB) adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk

dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000.

*Tabel 2.83*  
*Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Pasien TB yang meninggal	Orang					
2.	Jumlah Penduduk	Orang					
3.	<b>Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis</b>	<b>Per 100.000 penduduk</b>					

21. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Menjelaskan Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS . dengan membandingkan Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS dengan Jumlah pasien baru TB paru BTA

*Tabel 2.84*  
*Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang					
2.	Jumlah pasien baru TB paru BTA	Orang					
3.	<b>Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS</b>	<b>Persen</b>					

22. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati yang dinyatakan dalam persen.

*Tabel 2.85*  
*Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Orang					
2.	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	Orang					
3.	<b>Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS</b>	<b>Persen</b>					

23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah presentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di

suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF).

*Tabel 2.86  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa					
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa					
3.	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</b>	<b>Persen</b>					

24. Penderita Diare Yang Ditangani

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun, Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, pustu, RS, balai pengobatan, praktek dokter).

*Tabel 2.87  
Penderita Diare yang Ditangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader						
2.	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)						
3.	<b>Penderita diare yang ditangani</b>						

25. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama.

*Tabel 2.88  
Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Jiwa					
2.	Jumlah penduduk	Jiwa					
3.	<b>Prevalensi HIV/AIDS</b>	<b>Persen</b>					

26. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS. Digunakan untuk mengukur efektifitas program penyebarluasan informasi, pendidikan, program komunikasi, dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan penularan penyakit HIV dan AIDS, khususnya pada populasi orang muda berusia 15-24 tahun.

*Tabel 2.89*  
*Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS	Jiwa					
2.	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun	Jiwa					
3.	<b>Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS</b>	<b>Persen</b>					

27. Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan, tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

*Tabel 2.90*  
*Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular*

No.	Jenis Penyakit	Tahun				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penyakit Jantung					
2.	Kanker					
3.	Gangguan Jiwa Berat					
4.	Gagal Ginjal					
5.	Anemia					
6.	Stroke					
7.	Asma					
8.	Diabetes					
9.	Hipertensi					

28. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin  
Cakupan rujukan pasien miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata satu pada kurun waktu tertentu (lama dan baru). Jumlah kunjungan tersebut meliputi pasien rawat

jalan dan rawat inap tingkat lanjut.

Tabel 2.91

*Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n-5
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	jiwa						
2.	Jumlah masyarakat miskin	jiwa						
3.	<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin</b>	<b>Persen</b>						

29. Cakupan Kunjungan Bayi

Bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar persentase jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Indikator cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator cakupan kunjungan bayi yang dihitung ini kemudian dapat diketahui efektivitas, continuum of care, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.

Tabel 2.92

*Cakupan Kunjungan Bayi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					
2.	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	orang					
3.	<b>Cakupan kunjungan bayi</b>	<b>Persen</b>					

30. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah kecamatan. Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

Tabel 2.93

*Cakupan Puskesmas*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah puskesmas	Unit					
2.	Jumlah kecamatan	Unit					

3.	Cakupan puskesmas	Persen					
----	-------------------	--------	--	--	--	--	--

31. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

Tabel 2.94  
Cakupan Pembantu Puskesmas

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pembantu puskesmas	Unit					
2.	Jumlah kelurahan	Unit					
3.	<b>Cakupan puskesmas pembantu</b>	<b>Persen</b>					

32. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kelahiran. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

Tabel 2.95  
Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4						
2.	Jumlah sasaran ibu hamil						
3.	<b>Cakupan kunjungan ibu hamil K4</b>						

33. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Masa nifas adalah periode mulai dari

enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya tiga kali, pada enam jam pasca persalinan sampai dengan tiga hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya tiga kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

*Tabel 2.96  
Cakupan Pelayanan Nifas*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	orang					
2.	Jumlah seluruh ibu nifas	orang					
3.	<b>Cakupan pelayanan nifas</b>	<b>Persen</b>					

34. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian.

*Tabel 2.97  
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Orang					
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Orang					
3.	<b>Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani</b>	<b>Persen</b>					

35. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya

*Tabel 2.98*  
*Cakupan Pelayanan Anak Balita*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Orang					
2.	Jumlah seluruh anak balita	Orang					
3.	<b>Cakupan pelayanan anak balita</b>	<b>Persen</b>					

36. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Kriteria dan keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah kabupaten /kota setempat. MP ASI yang diberikan adalah makanan seperti bubur kacang hijau dan makanan lain seperti yang ada di POSYANDU.

*Tabel 2.99*  
*Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Anak					
2.	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Anak					
3.	<b>Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin</b>	<b>%</b>					

37. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

*Tabel 2.100*  
*Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Anak					
2.	Jumlah murid SD dan setingkat	Anak					
3.	<b>Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat</b>	<b>Persen</b>					

38. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah

dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Jumlah kunjungan pasien ini meliputi jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama.

*Tabel 2.101*  
*Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	Jiwa					
2.	Jumlah seluruh masyarakat miskin	jiwa					
3.	<b>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin</b>	<b>Persen</b>					

39. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS (General Emergency Life Support) dan/atau ATLS (Advance Trauma Life Support) + ACLS (Advance Cardiac Life Support), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

*Tabel 2.102*  
*Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)*

No	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n-5
1.	Pelayanan gawat darurat level 1						
2.	Jumlah RS						
3.	<b>Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)</b>						

40. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Sedangkan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.

*Tabel 2.103*  
*Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
----	-----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

1.	Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani >24 jam	kasus					
2.	Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	kasus					
3.	<b>Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi &lt;24 jam</b>	<b>Persen</b>					

#### 41. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Menjelaskan Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan berdasarkan Jenis Pelayanan, Indikator, serta persentase capaian SPM pada suatu daerah.

Tabel 2.104

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun n-1

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	

#### 42. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan

Tabel 2.105

Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan

Tahun n-2 – n-1

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	%					
2	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	%					

3	Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang	%					
4	Prevalensi stunting	%					
5	Jumlah kematian ibu	Orang					
6	Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup					
7	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%					
8	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/ransgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDc	%					
9	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%					
10	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%					
11	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%					
12	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	%					
13	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	%					
14	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	%					
15	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	%					

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Berdasarkan survei dan analisa data di lapangan serta berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Kepala Daerah.

*Tabel 2.106  
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah panjang jalan*	Km						
2.	Jumlah penduduk	Jiwa						
3.	<b>Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk</b>	<b>Km/1000</b>						

2. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)

Persentase jalan dengan kondisi mantap merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan kondisi mantap dengan panjang keseluruhan jalan yang ada pada suatu daerah.

*Tabel 2.107  
Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km						
2.	Panjang seluruh jalan	Km						
3.	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen						
4.	<b>SPM (Standar Pelayanan Minimal) Nasional</b>	<b>Persen</b>						

3. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (Minimal 1,5 m)

Permendagri Nomor 86/2017 menyebutkan bahwa perhitungan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) dilakukan dengan membagi panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m) dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.108  
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km						
2.	Panjang seluruh jalan kota	Km						
3.	<b>Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)</b>	<b>%</b>						

4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi dihitung dari jumlah rumah berakses sanitasi dibandingkan dengan jumlah rumah tinggal dalam persen.

*Tabel 2.109*  
*Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah rumah berakses sanitasi	Unit						
2.	Jumlah rumah tinggal	Unit						
3.	<b>Persentase rumah tinggal bersanitasi</b>	%						

5. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
- Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

*Tabel 2.10*  
*Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Panjang Drainase Kondisi Baik	Km						
2.	Panjang Seluruh Drainase	Km						
3.	<b>Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat</b>	%						

6. Persentase Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan Tidak Lebih Dari 2 Kali Setahun

Indikator selanjutnya adalah persentase tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) tidak lebih dari 2 kali setahun. Persentase tersebut didapatkan dari perbandingan antara total luasan daerah yang tergenang dengan luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.111*  
*Persentase Tidak Terjadi Genangan (Lebih Dari 30 Cm, Selama 2 Jam) dan Tidak Lebih Dari 2 Kali Setahun*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Total luasan yang tergenang	Ha						
2.	Total luasan daerah rawan genangan	Ha						

3.	Persentase Tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%						
----	--	---	--	--	--	--	--	--

### 7. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator persentase penduduk berakses air minum didapatkan dari persentase jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk keseluruhan. Sumber air minum layak dapat berupa sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air terlindungi, PDAM, dan BPPSPAM.

*Tabel 2.112  
Persentase Penduduk Berakses Air Minum*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Penduduk berakses air minum	Jiwa						
2.	Jumlah penduduk	Unit						
3.	<b>Persentase Penduduk Berakses Air Minum</b>	<b>%</b>						

### 8. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Indikator areal kawasan kumuh ini didapatkan dengan perbandingan antara data luas kawasan kumuh di suatu daerah dengan luasan wilayah keseluruhan daerah tersebut. Indikator ini dapat merepresentasikan persentase luasan kumuh yang ada secara time series yaitu pada tahun n-5 sampai dengan tahun n-1.

*Tabel 2.113  
Persentase Areal Kawasan Kumuh*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Kawasan Kumuh	Ha						
2.	Luas Wilayah	Ha						
3.	<b>Persentase Areal Kawasan Kumuh</b>	<b>Persen</b>						

### 9. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk umum, yang berada dibawah pengawasan, pengurusan, dan pengelolaan pemerintah daerah.

*Tabel 2.114*  
*Kapasitas Pemakaman Umum*

No.	Nama TPU	Lokasi		Luas Area (Ha)	Daya Tampung (Unit) *per 2018
		Kelurahan	Kecamatan		
1.					
2.					
3.					
4.					

*Tabel 2.115*  
*Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Unit						
2.	Jumlah penduduk	Jiwa						
3.	<b>Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk</b>							

10. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikalikan 1000.

*Tabel 2.116*  
*Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Tempat Ibadah :							
	a. Masjid	Unit						
	b. Mushola	Unit						
	c. Gereja Kristen	Unit						
	d. Gereja Katolik	Unit						
	e. Pura	Unit						
	f. Vihara	Unit						
	g. Klenteng	Unit						
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa						
3.	<b>Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk</b>							
	a. Masjid	Unit/1000 Jiwa						
	b. Mushola	Unit/1000 Jiwa						
	c. Gereja Kristen	Unit/1000 Jiwa						
	d. Gereja Katolik	Unit/1000 Jiwa						
	e. Pura	Unit/1000 Jiwa						
	f. Vihara	Unit/1000 Jiwa						
	g. Klenteng	Unit/1000 Jiwa						

11. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Menjelaskan rasio Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan HPL dan HGB dibandingkan dengan luas keseluruhan RTH.

*Tabel 2.117*  
*Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha						
2.	Luas wilayah ber HPL	Ha						
3.	Luas wilayah ber HGB	Ha						
4.	<b>Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL</b>							
5.	<b>Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HGB</b>							

12. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Indikator luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan ini didapatkan dari pembagian luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dengan luas wilayah, Indikator ini dihitung untuk melihat kesesuaian luasan RTH publik di Kota Yogyakarta dengan peraturan yang berlaku.

*Tabel 2.118*  
*Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Ha						
2.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan	Ha						
3.	Luas Wilayah	Ha						
4.	<b>Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan</b>	%						

13. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru,

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

*Tabel 2.119*  
*Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	Unit						
2.	Jumlah Bangunan	Unit						
3.	<b>Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan</b>							

14. Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya

Perhitungan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah ruang publik yang berubah fungsi dengan jumlah ruang publik yang tersedia.

*Tabel 2.120*  
*Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	m <sup>2</sup>					

15. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Indikator rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan diperoleh dengan membagi data luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara dengan luas daratan.

*Tabel 2.121*  
*Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	Ha					
2.	Luas daratan	Ha					
3.	<b>Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan</b>						

16. Ketaatan Terhadap RTRW

Indikator ketaatan terhadap RTRW ini didapatkan dengan membagi antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan dikalikan

dengan angka 100,

17. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum

Tabel 2.122

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Tahun *n-1*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	

18. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pekerjaan umum

Tabel 2.123

Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	%					
2	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	%					

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

rasio rumah layak huni sebagai perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di daerah tersebut

Tabel 2.124

Rasio Rumah Layak Huni

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah rumah layak huni	Unit						
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa						
3.	<b>Rasio rumah layak huni</b>							

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan

perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasio permukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman.

*Tabel 2.125*  
*Rasio Permukiman Layak Huni*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Permukiman Layak Huni	Ha						
2.	Luas Wilayah Permukiman	Ha						
3.	<b>Rasio permukiman layak huni</b>							

### 3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ini didapatkan dengan membandingkan data jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan dikalikan dengan 100.

*Tabel 2.126*  
*Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit						
2.	Jumlah seluruh rumah	Unit						
3.	<b>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</b>	%						

*Tabel 2.127*  
*umlah Rumah Tidak Layak Huni*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Rumah tidak Layak Huni	Unit					

### 4. Persentase Permukiman yang Tertata

Luas permukiman yang tertata dihitung dengan melihat luas area permukiman yang ada dikurangi dengan luas permukiman kumuh/tidak layak huni yang cenderung tidak teratur, dan memiliki kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Persentase luas permukiman yang

tertata dihitung dengan membandingkan luas permukiman yang tertata dengan luas area permukiman keseluruhan dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.128*  
*Persentase Luas Permukiman yang Tertata*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas area permukiman yang tertata	Ha						
2.	Luas keseluruhan area permukiman	Ha						
3.	<b>Persentase luas permukiman yang tertata</b>	%						

5. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Indikator persentase lingkungan permukiman kumuh ini didapatkan dengan pembagian antara data luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah suatu daerah, dikalikan dengan 100. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan persentase permukiman kumuh yang ada di Kota Yogyakarta.

*Tabel 2.129*  
*Lingkungan Permukiman Kumuh*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha						
2.	Luas wilayah	Ha						
3.	<b>Lingkungan permukiman kumuh</b>	%						

6. Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Indikator luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan ini didapatkan dari pembagian data luasan permukiman kumuh yang tertangani dengan luasan permukiman kumuh kemudian dikalikan dengan 100. Indikator ini dapat menunjukkan persentase luasan permukiman kumuh yang telah tertangani oleh pemerintah

*Tabel 2.130*  
*Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	Ha						

2.	Luas permukiman kumuh	Ha						
3.	<b>Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan</b>	%						

7. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat  
 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat tahun n-1

*Tabel 2.131*

*Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Tahun n-1*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	-

- E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas

*Tabel 2.132*

*Cakupan Petugas Linmas*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Linmas	Orang					
2	Jumlah Penduduk	Jiwa					
3	Jumlah wilayah kerja kota	Jiwa					
4	<b>Cakupan</b>	%					

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di wilayah Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) berkaitan dengan seberapa kondusif situasi dan

kondisi di suatu wilayah. Semakin banyak pelanggaran K3 terjadi, maka semakin tidak kondusif situasi dan kondisi di wilayah tersebut.

*Tabel 2.133*  
*Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus					
2	Jumlah Pelanggaran K3	Kasus					
3	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</b>	%					

3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

*Tabel 2.134*  
*Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km <sup>2</sup>					
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	km <sup>2</sup>					
3.	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota</b>	<b>Persen</b>					

4. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah di daerah perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya bencana kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari adanya penanganan yang cepat dari petugas Dinas Kebakaran yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan WMK. Tingkat waktu tanggap yaitu kurang dari atau sama dengan 15 menit setelah adanya laporan bencana kebakaran.

*Tabel 2.135*  
*Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) ≤ 15 menit	Kejadian					
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian					

3.	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manaiemen Kebakaran (WMK)	Persen					
4.	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manaiemen Kebakaran (WMK)	menit					

5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda terhadap pelanggarannya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat, dan optimal dalam mengatur suatu subyek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu, terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

Tabel 2.136  
Persentase Peningkatan Penegakan PERDA

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus					
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus					
3	Penegakan PERDA	Persen					

6. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun n-1

Tabel 2.137  
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun n-1

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

7. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

*Tabel 2.138  
Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Ketenteraman,  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase kampung tangguh bencana	%					
2	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana <i>tanggapan darurat lengkap</i>	%					
3	Persentase edukasi proteksi kebakaran	%					
4	Angka kriminalitas	Kejadian					

## F. Sosial

### 1. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

*Tabel 2.139  
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang						
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang						
3.	<b>PMKS yang memperoleh bantuan</b>	<b>Persen</b>						

2. PMKS Yang Tertangani

Indikator ini merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada.

*Tabel 2.140  
Persentase PMKS yang Tertangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang						
2.	Jumlah PMKS yang ada	Orang						
3.	Persentase PMKS yang tertangani	%						

3. PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (bansos) dalam jangka waktu satu tahun

*Tabel 2.141  
Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 tahun	Orang						
2.	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang						
3.	<b>Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</b>	%						

4. PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial lainnya

Tabel 2.142

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang					
2.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang					
3.	<b>Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya</b>	%					

5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini merupakan perhitungan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan sejauh mana panti sosial berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.143

Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	unit					
2.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	unit					
3.	<b>Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan</b>	%					

6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini adalah untuk melihat persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.144

*Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah WKBSM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit						
2.	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit						
3.	<b>Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</b>	%						

7. Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial.

Tabel 2.145

*Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosia*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang					
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang					
3.	<b>Korban bencana yang menerima bantuan sosial</b>	%					

8. Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Indikator ini merupakan persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

Tabel 2.146

*Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang					
2.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang					

3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%					
----	---	---	--	--	--	--	--

9. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial.

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar penerima jaminan sosial bagi para penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial.

Tabel 2.147

*Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang					
2.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang					
3.	<b>Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</b>	%					

10. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada tahun n-1

Tabel 2.148

*Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tahun n-1*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar anak terlantar diluar panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut gelandangan dan pengemis	
5	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah Kabupaten/Kota	

11. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Sosial

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang sosial

Tabel 2.149

*Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Sosial*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Angka kemiskinan	%					

2	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%						
3	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	%						

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### A. Tenaga Kerja

##### 1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

*Tabel 2.150  
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus						
2.	Jumlah Perusahaan	Unit						
3.	<b>Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja</b>	%						

##### 2. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun n.

*Tabel 2.151  
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus						
2.	Jumlah kasus yang tercatat	Kasus						
3.	Tingkat penyelesaian kasus	%						

3. **Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan**  
 Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar.

*Tabel 2.152  
 Pencari Kerja yang Ditempatkan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang						
2.	Pencari kerja yang mendaftar	Orang						
3.	<b>Pencari kerja yang ditempatkan</b>	%						

4. **Keselamatan dan Perlindungan**  
 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Indikator ini akan menghitung persentase perusahaan yang menerapkan K3 dari keseluruhan jumlah perusahaan yang terdaftar dengan melihat jumlah perusahaan yang memiliki P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

*Tabel 2.153  
 Keselamatan dan Perlindungan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit						
2.	Jumlah perusahaan	Unit						
3.	<b>Keselamatan dan Perlindungan</b>	%						

5. **Besaran Pekerjaan/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek**  
 Besaran pekrja/buruh yang menjadi peerta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekrja yang terdaftar sebagai peserta pekerja yang terdaftarsebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja.

Tabel 2.154

*Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta IAMSOSTEK	Orang						
2.	Jumlah seluruh pekerja	Orang						
3.	<b>Persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek</b>	%						

## 6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah mengenai upah minimum kota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya.

Tabel 2.155

*Perselisihan Buruh dan Pengusaha*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penyelesaian perselisihan	Kasus						
2.	Jumlah kejadian perselisihan	Kasus						
3.	<b>Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha</b>	%						

## 7. Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan perusahaan adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah perusahaan yang telah diperiksa baik pemeriksaan pertama, berkala, ulang, maupun khusus dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di daerah.

Tabel 2.156

*Besaran Pemeriksaan Perusahaan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	Unit						
2.	Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar	Unit						
3.	<b>Persentase pemeriksaan perusahaan</b>	%						

8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan perusahaan adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah peralatan perusahaan yang telah diuji dan memiliki surat izin beroperasi dari keseluruhan peralatan perusahaan yang terdaftar di seluruh wilayah satu daerah

*Tabel 2.157  
Besaran Pengujian Peralatan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah peralatan yang telah diuji	Unit						
2.	Jumlah seluruh peralatan yang terdaftar	Unit						
3.	<b>Persentase pengujian peralatan</b>	%						

9. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan skill-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi supaya lebih menguasai bidangnya.

*Tabel 2.158  
Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang						
2.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang						
3.	<b>Persentase tenaga kerja terbina kompetensi</b>	%						

10. Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3

menggambarkan besaran penduduk didaerah yang memiliki latar belakang pendidikan baik sehingga meningkatkan kualitas pencari kerja didaerah.

*Tabel 2.159  
Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3*

No	Kategori/Jenjang Pendidikan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	jiwa						
2.	Jumlah Seluruh Penduduk	jiwa						
3.	<b>Rasio lulusan S1/S2/S3</b>							

11. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Tenaga Kerja  
Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang tenaga kerja

*Tabel 2.160*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Tenaga Kerja*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan upah minimum kota	%					
2	Persentase jumlah penganggur	%					
3	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	%					

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan.

*Tabel 2.161*  
*Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang					
2.	Jumlah pekerja perempuan	Orang					
3.	<b>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b>	%					

2. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perempuan yang menduduki kursi DPRD dalam kurun waktu tertentu

*Tabel 2.162*  
*Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang					
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang					
3.	<b>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD</b>	%					

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di satu

daerah.

*Tabel 2.163*  
*Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang					
2.	Jumlah pekerja perempuan	Orang					
3.	<b>Partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	%					

4. Rasio KDRT

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di suatu daerah. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga.

*Tabel 2.164*  
*Rasio KDRT*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah KDRT	Orang						
2.	Jumlah rumah tangga	Orang						
3.	<b>Rasio KDRT</b>	%						

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

*Tabel 2.165*  
*Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen					

6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak

perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT.

Tabel 2.166

*Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang					
2.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang					
3.	<b>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu</b>	%					

7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Indikator ini bertujuan untuk melihat besarnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di suatu daerah.

Tabel 2.167

*Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu	Orang					
2.	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS	Orang					
3.	<b>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di</b>	%					

8. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum merupakan

indikator yang didapatkan dari hasil perbandingan jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum.

*Tabel 2.168*  
*Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Orang					
2.	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang					
3.	<b>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</b>	%					

9. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

*Tabel 2.169*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%					
2	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	Persen					
3	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%					

C. Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Menerangkan jumlah ketersediaan pangan utama yang berdasarkan pada jumlah penduduk pada suatu daerah

*Tabel 2.170*  
*Ketersediaan Pangan Utama*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama	Kg						
2	Jumlah Penduduk	Jiwa						
3	<b>Ketersediaan Pangan Utama</b>	kg/jiwa						

2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi

kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita

*Tabel 2.171*  
*Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>							
1	Energi	Kkal					
2	Protein	Gram					
<b>Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>							
3	Energi	Kkal					
4	Protein	Gram					
<b>Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>							
5	Energi	%					
6	Protein	%					

### 3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

*Tabel 2.172*  
*Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi	Sampel					
2	Jumlah sampel pangan yang diambil	Sampel					
3	<b>Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b>	%					

### D. Pertanian

#### 1. Persentase Luas lahan Bersertifikat

Indikator persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan luas wilayah dikalikan dengan bilangan 100. Luas lahan bersertifikat yang ditampilkan pada data berikut merupakan tanah umum, sultan ground dan pakualaman ground.

*Tabel 2.173*  
*Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas lahan bersertifikat	Ha						
2.	Luas Wilayah	Ha						
3.	<b>Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah</b>	%						

2. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Menghitung penyelesaian kasus tanah negara adalah dengan membandingkan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.174  
Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus						
2.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus						
3.	<b>Penyelesaian kasus sengketa tanah</b>	%						

3. Penyelesaian Izin Lokasi

perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.175  
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah izin lokasi	Unit					
2.	Permohonan izin lokasi	Unit					
3.	<b>Penyelesaian izin lokasi</b>	%					

E. Lingkungan Hidup

1. Tersusunnya RPPLH

Indikator tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kota dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya Dokumen RPPLH

*Tabel 2.176  
Tersusunnya RPPLH*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Tersusunnya RPPLH Kota	Ada/Tidak Ada					

2. Trintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Indikator terintegrasinya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam rencana pembangunan daerah adalah indikator lanjutan dari indikator sebelumnya yang berisi tentang ada atau tidaknya RPPLH

*Tabel 2.177  
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Daerah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota	Ada / Tidak Ada					

3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah  
Indikator terselenggaranya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tingkat daerah kota akan menunjukkan ada atau tidaknya dokumen atau kajian tersebut di suatu daerah

Tabel 2.178

*Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota	Ada/Tidak Ada					

4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air  
Indikator hasil pengukuran indeks kualitas air ini menurut Lampiran Permendagri 86/2017 didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus indeks pencemaran.

Tabel 2.179

*Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	IKA						

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara  
Indikator hasil pengukuran indeks kualitas udara ini didapatkan melalui sebuah formula sesuai dengan Lampiran Permendagri 86/2017 yaitu  $IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$ .

Tabel 2.180

*Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	IKU						

6. Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan  
Indeks tutupan lahan yang dimaksud pada Permendagri 86/2017 ini adalah hasil dari pengukuran dengan formula tertentu yang tertuang dalam Lampiran Permendagri 86/2017. Formula tersebut sama dengan formula yang digunakan untuk menentukan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) pada dokumen IKLH

*Tabel 2.181*  
*Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	ITV						

7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota

Indikator pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota ini didapatkan dengan membagi data jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota yang ditangani dengan data total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota kemudian dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.182*  
*Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditangani	Laporan						
2.	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Pemantauan Perusahaan						
3.	<b>Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota</b>	%						

8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup  
Indikator terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ini adalah indikator terkait pemberian penghargaan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat atas jasanya melestarikan lingkungan

*Tabel 2.183*  
*Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada					

9. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya

Indikator ini didapatkan dari pembagian jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase berapa persen pengaduan masalah yang dapat ditangani oleh dinas terkait

*Tabel 2.184*  
*Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah, Lokasi Usaha, dan Dampaknya*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	pengaduan						
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	pengaduan						
3.	<b>Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah</b>	%						

10. Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurangnya Melalui 3R  
Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R telah disesuaikan dengan kondisi wilayah yang menuju sistem

zero waste. Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah kota dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.185*  
*Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/ tahun)
1.	Jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain- lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	Ton/hr						
2.	Total timbulan sampah	Ton/hr						
3.	<b>Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R</b>	%						

*Tabel 2.186*  
*Kelompok Bank Sampah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah kelompok bank sampah	Kelompok						

#### 11. Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Ketempat Pembuangan Akhir (TPA)

Indikator timbulan sampah yang ditangani dan indikator persentase jumlah sampah yang tertangani didapat dari perbandingan volume sampah yang ditangani dengan jumlah timbulan sampah dikalikan 100. Yang dimaksud volume sampah yang ditangani adalah volume sampah yang dibuang ke TPA.

*Tabel 2.187*  
*Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)	ton/hari						
2.	Perkiraan timbulan sampah	ton/hari						
3.	<b>Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA</b>	%						

12. Persentase Cakupan Areal Pelayanan

Indikator persentase cakupan area pelayanan ini didapatkan dari pembagian data luas area pelayanan pengelolaan sampah dengan luas area kota dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan melihat seberapa besar cakupan area pengelolaan sampah di daerah

Tabel 2.188  
Persentase Cakupan Area Pelayanan

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km <sup>2</sup> /ha					
2.	Luas area Kota	km <sup>2</sup> /ha					
3.	<b>Persentase Cakupan Area Pelayanan</b>	<b>%</b>					

13. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA

Indikator operasionalisasi TPA/TPST/SPA di daerah ini adalah indikator yang bertujuan untuk menunjukkan nilai TPA dari program adipura di suatu wilayah

Tabel 2.189  
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Nilai TPA (Program Adipura)						

14. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Lingkungan Hidup  
Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.190  
Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Lingkungan Hidup

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Udara						
2	Indeks Kualitas Air						
3	Persentase pengangkutan sampah	%					
4	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	%					
5	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%					
6	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%					
7	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen	%					
8	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap	%					

F. Administrasu Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk

Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

*Tabel 2.191*  
*Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang						
2.	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang						
3.	<b>Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk</b>							

2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

*Tabel 2.192*  
*Rasio Bayi Berakta Kelahiran*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah bayi berakta kelahiran	Orang						
2.	Jumlah bayi	Orang						
3.	<b>Rasio Bayi Berakta Kelahiran</b>							

3. Rasio Pasangan Barakta Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah

*Tabel 2.193*  
*Rasio Pasangan Berakte Nikah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Orang					
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Orang					
3.	<b>Rasio pasangan berakte nikah</b>						

4. Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Daerah  
Basis data atau database merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Ketersediaan database akan memudahkan stakeholder untuk mengambil, mencari, atau menganalisis data kependudukan.

*Tabel 2.194*  
*Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala*

No	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala kota					

5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK  
KTP berbasis NIK sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana

*Tabel 2.195*  
*Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK*

No	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK					

6. Cakupan Penerbitan KTP  
Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah KTP yang diterbitkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya sudah memiliki KTP.

*Tabel 2.196*  
*Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Kartu					
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	Orang					
3.	<b>Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</b>	%					

7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran  
Indikator cakupan penerbitan akta kelahiran merupakan hasil perbandingan antara jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dengan jumlah kelahiran di tahun bersangkutan.

*Tabel 2.197*  
*Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Orang					
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Kelahiran					
3.	<b>Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran</b>	%					

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Cakupan Sarana Prasarana Pekantoran Pemerintahan Kelurahan Yang Baik

Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor kelurahan di daerah. Kualitas perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat.

*Tabel 2.198*  
*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat Baik	Kantor					
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Baik	Kantor					
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang Baik	Kantor					
Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan	Kantor					
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik	Persen					

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Indikator jumlah kelompok binaan LPM tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. LPM pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan.

*Tabel 2.199*  
*Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	kelompok					
2.	Jumlah LPM	kelompok					
3.	<b>Rata-rata binaan LPM</b>						

3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

*Tabel 2.200  
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma)	Kelompok					
2.	Jumlah PKK	Kelompok					
3.	<b>Rata-rata binaan PKK</b>						

4. Persentase LSM Aktif

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM berfungsi untuk melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.

*Tabel 2.201  
Persentase LSM Aktif*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah LSM yang Aktif	unit					
2.	Jumlah seluruh LSM	Unit					
3.	<b>Persentase LSM aktif</b>	%					

5. Persentas LPM Berprestasi

Ajang kompetisi dan mengoptimalkan daya saing perlu ditumbuhkan di tengah kelembagaan sosial masyarakat. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberi rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di daerah untuk mendapatkan LPMK berprestasi.

*Tabel 2.202*  
*Jumlah LPMK Berprestasi*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah LPMK Berprestasi	Kelompok					
2.	Jumlah LPMK	Kelompok					
3.	<b>Persentase LPM Berprestasi</b>	<b>%</b>					

6. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup paling kecil. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup paling kecil

*Tabel 2.203*  
*Jumlah PKK Aktif*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta	kelompok					
2.	Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta	kelompok					
3.	Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta	kelompok					
4.	Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta	kelompok					
5.	Jumlah kel. PKK RT	kelompok					
6.	Jumlah kel. Dasawisma	kelompok					

7. Persentase Posyandu Aktif

Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada.

*Tabel 2.204*  
*Posyandu Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah posyandu aktif	Unit					
2.	Jumlah seluruh posyandu	Unit					
3.	<b>Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>					

8. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat, menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, makin kecilnya jumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

*Tabel 2.205*  
*Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Swadaya Masyarakat	Rupiah					
2.	Total Program	Rupiah					
3.	<b>Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program</b>	<b>Persen</b>					

9. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat. Setelah program pemberdayaan dihentikan oleh pemerintah, maka diharapkan

program-program yang sudah ada dapat dipelihara dan diteruskan oleh masyarakat agar dapat terus bermanfaat meskipun pemerintah sudah tidak menjalankan program tersebut.

*Tabel 2.206*  
*Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat	Buah					
2.	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Buah					
3.	<b>Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persen</b>					

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Menjelaskan jumlah dan Dinas/Badan (Organisasi Perangkat Daerah) yang berperanaktif di kampung KB

2. Jumlah Perangkat Daerah yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Kependudukan

Menjelaskan kesepakatan kerjasama olah OPD terkait dengan OPD yang berada di suatu daerah dalam rangka pemanfaatan data kependudukan yang di tuangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS).

3. Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga

Indikator rata-rata anak per keluarga menggambarkan keberhasilan keluarga berencana. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi rasio anak seluruhnya dengan rasio keluarga. Rasio anak adalah rasio seluruh penduduk usia 0-18 tahun.

*Tabel 2.207*  
*Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anak	Orang					
2.	Jumlah keluarga	keluarga					
3.	<b>Rata-rata jumlah anak per keluarga</b>	<b>anak</b>					

4. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah

seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB adalah Rasio akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama

*Tabel 2.208  
Rasio Akseptor KB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah akseptor KB	Pasangan					
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan					
3.	<b>Rasio akseptor KB</b>	<b>%</b>					

5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu juga termasuk di dalamnya peserta KB baru pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif

*Tabel 2.209  
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah peserta KB aktif	Pasangan					
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan					
3.	<b>Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun</b>	<b>%</b>					

*Tabel 2.210  
Cakupan Peserta KB Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah peserta KB aktif	Pasangan					
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan					
3	<b>Cakupan peserta KB aktif</b>	<b>%</b>					

6. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASRF) 15-19 Tahun

ASFR (Age Specific Fertility Rate) adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya

Tabel 2.211

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun	Kelahiran					
2	Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	Orang					
3	<b>Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun</b>	<b>Per 1.000 wanita</b>					

7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari program Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasaan usia kawin pertama.

Tabel 2.212

Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th	Pasangan					
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan					
3.	<b>Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun</b>	<b>%</b>					

8. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

*Unmet need* adalah pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi

kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB. Sehingga cakupan ini digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.

*Tabel 2.213*  
*Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi + Jumlah PUS yang ingin anak tunda	Pasangan					
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan					
3.	<b>Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)</b>	%					

9. **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**  
Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, menurut BKKBN, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit, serta metode yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Jenis MKJP adalah IUD, Implan atau susuk, tubektomi, atau vasektomi.

*Tabel 2.214*  
*Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MJKP	Pasangan					
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan					
3.	<b>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</b>	%					

10. **Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**  
Persentase ketidaklangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi (contraceptive discontinuation rate) adalah proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (exposure) karena berbagai alasan, seperti kegagalan atau mengalami efek samping. Angka ini juga bisa disebut dengan kejadian drop out KB.

*Tabel 2.215*  
*Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan					
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan					
3.	<b>Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi</b>	%					

11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

*Tabel 2.216*  
*Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Orang					
2.	Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS	Orang					
3.	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB</b>	%					

12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Cakupan anggota BKR ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKR yang merupakan PUS dan berKB dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota BKR.

*Tabel 2.217*  
*Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Orang					
2.	Jumlah anggota kelompok BKR yang berstatus PUS	Orang					
3.	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB</b>	%					

13. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Cakupan anggota BKL ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKL yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah kelompok BKL seluruhnya.

*Tabel 2.218*  
*Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Orang					
2.	Jumlah anggota kelompok BKL yang berstatus PUS	Orang					
3.	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB</b>	%					

14. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberikan layanan data/informasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, konseling, bimbingan maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat. Keberadaan PPKS dapat membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan dalam hal pelayanan dan informasi serta rujukan bagi permasalahan yang dihadapi keluarga

*Tabel 2.219*  
*Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah PPKS	Unit					
2.	Jumlah Kecamatan	Wilayah					
3.	<b>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan</b>	%					

15. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe (generasi berencana), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (life skills), gender dan keterampilan advokasi dan KIE.

*Tabel 2.220*  
*Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah PIK R/M	Kelompok					
2.	Jumlah kecamatan	Wilayah					
3.	<b>Cakupan Remaja Dalam PIK Remaja/Mahasiswa</b>	%					

16. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk.

Cakupan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan KB) yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

17. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.

*Tabel 2.222*

*Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB	Orang	2.359	2.327	1.890	1.706	1.613
2.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS	Orang	2.914	2.690	2.165	1.919	1.919
3.	<b>Cakupan PUS Peserta KB UPPKS</b>	%	<b>80,95</b>	<b>86,51</b>	<b>87,30</b>	<b>88,90</b>	<b>84,05</b>

18. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

*Tabel 2.223*

*Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa	Orang					
2.	Jumlah kelurahan	Wilayah					

3.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan	%					
----	---	---	--	--	--	--	--

19. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Dalam rangka mendukung kesuksesan program Keluarga Berencana (KB) di daerah, maka salah satu faktor yang sangat penting adalah dengan adanya jaminan ketersediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi hak-hak reproduksi pasangan usia subur. Melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi, diharapkan dapat menekan angka kelahiran di daerah tersebut

*Tabel 2.224  
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi  
Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota	IUD	Unit				
		Kondom					
		Pil KB					
		Suntikan					
		Susuk KB/Implan					
		<b>Total</b>					
2.	Perkiraan permintaan masyarakat	IUD	Unit				
		Kondom					
		Pil KB					
		Suntikan					
		Susuk KB/Implan					
		<b>Total</b>					
3.	<b>Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat</b>	%					

20. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan.

Berdasarkan aturan baru yang termuat dalam Perpres no.19 tahun 2016 bahwa peserta BPJS saat ini dapat menggunakan layanan KB secara gratis, yang sebelumnya layanan ini belum ditanggung BPJS. Beberapa pelayanan KB yang ditanggung oleh BPJS adalah Vasektomi & Tubektomi, pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan dan pelepasan alat KB spiral, dan KB suntik. Layanan ini merupakan kerjasama BPJS dengan faskes dan jejaringnya untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

*Tabel 2.225*  
*Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	Unit					
2.	Jumlah faskes dan jejaring	Unit					
3.	<b>Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama Dengan BPJS</b>	%					

21. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan dan pembangunan keluarga dilakukan melalui penguatan Delapan Fungsi Keluarga. Delapan Fungsi Keluarga yang dimaksud antara lain Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta dan Kasih Sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Lingkungan.

*Tabel 2.226*  
*Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok					
2.	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok					
3.	<b>Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga</b>	%					

22. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase pembiayaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melalui APBD.

*Tabel 2.227*  
*Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	Rp.					
2.	Jumlah APBD	Rp.					

3.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD	%					
----	--	---	--	--	--	--	--

### 23. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB disajikan dalam tabel berikut ini.

*Tabel 2.228  
Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	CPR ( <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> )	%					
2	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)						
3	<i>Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)</i>	%					

#### I. Perhubungan

##### 1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.

*Tabel 2.229  
Jumlah Penumpang Angkutan Umum*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penumpang bis (yang masuk terminal)	Jiwa						

##### 2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Adalah Jumlah Pengujian meliputi

(1) Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap

rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan

(2) Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

*Tabel 2.230  
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit						

### 3. Jumlah Terminal dan Pelabuhan

Indikator ini memperlihatkan perkembangan jumlah terminal maupun pelabuhan serta aktifitasnya dalam menaik turunkan orang dan barang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan.

*Tabel 2.231  
Jumlah Terminal Bus*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Terminal Bus	Unit					
2.	Jumlah Pelabuhan	Unit					

### 4. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator ini akan memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

*Tabel 2.232  
Persentase Layanan Angkutan Darat*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah angkutan darat	Unit						
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	Jiwa						
3.	<b>Persentase layanan angkutan darat</b>	%						

5. **Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**  
 menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dua (karena setiap tahun satu angkutan umum uji KIR dua kali).

*Tabel 2.233*  
*Kepemilikan KIR Angkutan Umum*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum	Unit						
2.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit						
3.	<b>Kepemilikan KIR angkutan umum</b>	%						

6. **Pemasangan Rambu-Rambu**  
 perhitungan indikator pemasangan rambu- rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.234*  
*Pemasangan Rambu-Rambu*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Rambu-rambu Terpasang	Unit						
2.	Jumlah Rambu-rambu yang Seharusnya Tersedia	Unit						
3.	<b>Persentase Pemasangan Rambu-rambu</b>	%						

7. **Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan**  
 Menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

*Tabel 2.235*  
*Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang Jalan	Km						
2.	Jumlah Kendaraan	Unit						
3.	<b>Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan</b>	<b>km/unit</b>						

8. Jumlah Orang dan Barang Melalui Terminal dan Stasiun Pertahun

Menjelaskan aktifitas pada terminal dan pelabuhan pada suatu daerah baik jumlah penumpang ataupun barang yang terangkut dan yang di turunkan.

*Tabel 2.236*  
*Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
Jumlah penumpang/orang bis / Kapal (yang masuk terminal dan Pelabuhan)								
1.	Jumlah penumpang bis (yang masuk terminal)	Jiwa						
2.	Jumlah penumpang Kapal (yang masuk Pelabuhan)	Jiwa						
Jumlah Barang (yang masuk terminal dan Pelabuhan)								
1	Jumlah Barang yang masuk terminal	Ton						
2	Jumlah Barang Masuk Pelabuhan	Ton						

*Tabel 2.237*  
*Jumlah Orang dan Barang yang Turun*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
Jumlah penumpang/orang bis / Kapal (yang Turun terminal dan Pelabuhan)								
1.	Jumlah penumpang bis (yang Turun di terminal)	Jiwa						
2.	Jumlah penumpang Kapal (yang Turun Di Pelabuhan)	Jiwa						
Jumlah Barang (yang masuk terminal dan Pelabuhan)								
1	Jumlah Barang yang Turun di terminal	Ton						
2	Jumlah Barang Turun/ Bongkar di Pelabuhan	Ton						

J. Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator cakupan layanan telekomunikasi ini didapatkan dari pembagian luas wilayah yang tercoverage dengan luas wilayah keseluruhan. Indikator ini akan memperlihatkan seberapa luas cakupan yang telah ada di suatu daerah terkait layanan telekomunikasi.

*Tabel 2.238  
Tabel Cakupan Layanan Telekomunikasi*

No	Indikator	Satuan	n-3	n-2	n-1
1.	Luas Wilayah Yang Tercoverage	Km			
2.	Luas Wilayah Keseluruhan	Km			
3.	<b>Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>				

2. Indeks Layanan Informasi Publik

Indeks Layanan Informasi Publik menjadi salah satu indikator SDGs dengan capaian pada waktu tertentu atau n-1

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

*Tabel 2.239  
Persentase Koperasi Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah Koperasi Aktif	unit						
2	Jumlah Seluruh Koperasi	unit						
3	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	%						

2. Persentase BPR/LKM Aktiif

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil

*Tabel 2.240  
Jumlah BPR/LKM*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam	Unit						
2.	Badan Usaha Kredit Pedesaan	Unit						
3.	Koperasi Simpan Pinjam	Unit						
	<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>						

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

*Tabel 2.241  
Persentase Usaha Mikro dan Kecil*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
Jumlah usaha mikro dan kecil	unit						
Jumlah seluruh UKM	unit						
<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>	<b>%</b>						

4. Nilai Omset UKM Yang Dibina

Indikator yang menjelaskan mengenai perkembangan nilai omset UKM pada tahun n-2 dan n-1

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang

berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

*Tabel 2.242  
Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA*

No	Jenis Perusahaan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Investor PMA	Unit						
2	Investor PMDN	Unit						
	<b>Total</b>	<b>Unit</b>						

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)  
Menjelaskan jumlah nilai investasi PMDN/PMA pada suatu daerah

*Tabel 2.243  
Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA*

No	Jenis Perusahaan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	PMA	Juta Rp						
2	PMDN	Juta Rp						
	<b>Total</b>	<b>Juta Rp</b>						

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja  
Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja.

*Tabel 2.244  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA*

No	Variabel	Satuan	n-3	n-2	n-1
<b>Penanam Modal Asing (PMA)</b>					
1	Tenaga Kerja	Jiwa			
2	Perusahaan	Unit			
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				
<b>Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)</b>					
1	Tenaga Kerja	Jiwa			
2	Perusahaan	Unit			
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				
<b>Total Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>					

- M. Kepemudaan dan Olah Raga
  1. Organisasi Pemuda Yang Aktif  
Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat

akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

*Tabel 2.245  
Persentase Organisasi Pemuda Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1.	Jumlah organisasi pemuda aktif	organisasi						
2.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	organisasi						
3.	<b>Persentase organisasi pemuda aktif</b>	<b>%</b>						

## 2. Wirausaha Muda

Wirausaha adalah salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu kota. Wirausaha selain dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain.

*Tabel 2.246  
Persentase Wirausaha Muda*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah wirausaha muda	Jiwa					
2	Jumlah seluruh wirausaha	jiwa					
3	<b>Persentase wirausaha muda</b>	<b>%</b>					

## 3. Cakupan Pembinaan Olah Raga

Indikator ini menggambarkan perkembangan cabang olahraga yang dibina, dari beberapa tahun sebelumnya

*Tabel 2.247  
Cakupan Pembinaan Olahraga*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Unit					
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftar	Unit					
3	<b>Persentase cakupan pembinaan olahraga</b>	<b>%</b>					

## 4. Cakupan Pelatihan Yang Bersertifikasi

Indikator ini menggambarkan pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A,B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

*Tabel 2.248*  
*Cakupan Pelatih Bersertifikasi*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah pelatih bersertifikasi	Jiwa					
2	Jumlah seluruh pelatih	jiwa					
3	<b>Persentase cakupan pelatih bersertifikasi</b>	%					

5. Cakupan Peminaan Atlet Muda

Indikator ini bertujuan untuk melihat persentase atlet pelajar yang dibina jika dibandingkan dengan seluruh atlet pelajar.

*Tabel 2.249*  
*Cakupan Pembinaan Atlet Muda*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Jiwa					
2	Jumlah seluruh atlet pelajar	jiwa					
3	<b>Persentase cakupan pembinaan atlet muda</b>	%					

6. Jumlah Atlet Berprestasi

jumlah kejuaraan atau prestasi yang diperoleh dari cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun.

*Tabel 2.250*  
*Jumlah Atlet Berprestasi*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jiwa					

7. Jumlah Prestasi Olah Raga

Menjelaskan jumlah kejuaraan atau prestasi yang diperoleh dari cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun.

*Tabel 2.251*  
*Jumlah Prestasi Olahraga*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	Kejuaraan					

N. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi data semestinya disajikan secara progresif hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun, sebaliknya yang terjadi, seringkali

buku statistik terbit harus lengkap, sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang update.

*Tabel 2.252*  
*Daerah Dalam Angka*

No.	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Buku Kota dalam Angka					
2.	Buku PDRB Kota					

0. Persandian

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

*Tabel 2.253*  
*Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD					
2.	Jumlah total perangkat daerah	OPD					
3.	<b>Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah</b>	%					

P. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Menjabarkan penyelenggaraan festival seni budaya yang diselenggarakan pada suatu daerah

*Tabel 2.254*  
*Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	Hari					

2. Banda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan  
Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs

dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

*Tabel 2.255  
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit					
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki	Unit					
3.	<b>Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	%					

3. Persentase Rintisan Kelurahan Budaya Yang Aktif

Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif menjadi salah satu indikator SDGs

Q. Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

*Tabel 2.256  
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Kunjungan					
2	Jumlah pengunjung	Jiwa					
3	Jumlah populasi yang harus dilayani	Jiwa					
4	<b>Rasio (1/3)</b>						

2. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan

ketertarikan bagi masyarakat suatu daerah untuk berkunjung mencari bahan pustaka.

*Tabel 2.257*  
*Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul					
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar					
3	<b>Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah</b>						

### 3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Dengan peran krusial yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat, jumlah perpustakaan juga dapat menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu penting juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

*Tabel 2.258*  
*Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah perpustakaan	unit					
2	Jumlah Penduduk	jiwa					
3	<b>Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk</b>						

### 4. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Dari data mengenai jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya, dapat diambil rata-rata jumlah pengunjung. Hal ini untuk dapat mengetahui jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat dalam lima tahun terakhir.

*Tabel 2.259*  
*Jumlah Pengunjung Perpustakaan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah pengunjung	Jiwa					
2	Rata-rata jumlah pengunjung	Jiwa					

### 5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat.

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat.

*Tabel 2.260*  
*Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah pustakawan bersertifikat	Orang					
	Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat*	Orang					
	Total	Orang					
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai	Orang					
3	<b>Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat</b>	<b>%</b>					

## R. Kearsipan

### 1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

*Tabel 2.261*  
*Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah OPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	Unit					
2.	Jumlah OPD	Unit					
3.	<b>Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku</b>	<b>Persen</b>					

### 2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pengelola kearsipan dilakukan oleh arsiparis. Arsiparis merupakan SDM kearsipan yang memang secara teknis melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan baik statis maupun dinamis dan melakukan pembinaan. Arsiparis dituntut untuk selalu profesional sehingga kemampuan dan kualitas senantiasa selalu ditingkatkan melalui kegiatan sertifikasi.

*Tabel 2.262*  
*Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	kali					

### 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### A. Pariwisata

##### 1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu daerah. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain potensi historis atau karakter budaya yang menarik wisatawan, daerah juga harus menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

*Tabel 2.263*  
*Jumlah Kunjungan Wisatawan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Kunjungan Wisman	Kunjungan						
2	Kunjungan Wisnu	Kunjungan						
	<b>Jumlah</b>	<b>Kunjungan</b>						

##### 2. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata juga sangat mempengaruhi keberhasilan sektor pariwisata. Lama kunjungan wisata akan menentukan produktifitas sektor usaha, salah satunya jasa penginapan.

*Tabel 2.264*  
*Lama Kunjungan Wisata*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Lama Kunjungan Wisata	hari						

##### 3. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada obyek pariwisata di suatu daerah

Tabel 2.265  
PAD Sektor Pariwisata

No.	Komponen	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Pajak Hotel						
2.	Pajak Restoran						
3.	Pajak Hiburan						
4.	BLUD Taman Pintar						
5.	<b>Total Sektor Pariwisata</b>						
6.	<b>Total PAD</b>						
7.	<b>Persentase (%)</b>						

4. Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata

Indeks kualitas atraksi pariwisata dihitung berdasarkan sembilan indeks, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan petugas, respon/kecepatan pelayanan, keunikan, dan tarif.

Tabel 2.266  
Indeks Atraksi Pariwisata

No.	Daya Tarik Wisata	Nilai Indeks								
		Keamanan	Ketertiban	Kebersihan	Kesejukan	Keindahan	Keramahan	Pelayanan	Keunikan	Tarif
1	Kraton									
2	Taman Pintar									
3	Gembira Loka									
4	Taman Sari									
5	Benteng Vredeburg									
6	XT Square									
7	Indeks Atraksi									

Tabel 2.267  
Indeks Atraksi Pariwisata

Nilai Indeks Tahun 2018									
Daya Tarik Wisata	Kemanan	Ketertiban	Kebersihan	Kesejukan	Keindahan	Keramahan Perugas	Respon/Kecepatan pelayanan	Keunikan	Tarif
<b>Indeks Atraksi Kualitas DTW</b>									<b>78,47</b>
Nilai Indeks Tahun 2019									
Daya Tarik Wisata	Kemanan	Ketertiban	Kebersihan	Kesejukan	Keindahan	Keramahan Perugas	Respon/Kecepatan pelayanan	Keunikan	Tarif
<b>Indeks Atraksi Kualitas DTW</b>									<b>85,5</b>

B. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokasi Lainnya  
 produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

*Tabel 2.268*  
*Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Produksi Padi	Ton						
2.	Luas Panen Padi	Ha						
3.	<b>Produktivitas Lahan</b>	<b>Ton/Ha</b>						

2. Cakupan Bina Kelompok Petani  
 Menjelaskan cakupan kelompok tani yang mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

*Tabel 2.269*  
*Cakupan Bina Kelompok Petani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Kelompok petani yang mendapat bantuan pemda	Kelompok						
2	Total kelompok petani/ cakupan bina kelompok tani	Kelompok						
3	<b>Cakupan bina kelompok petani</b>	<b>Persen</b>						

### C. Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Persentas Rumah Tangga Pengguna Listrik  
 Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Yogyakarta. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga.

*Tabel 2.270*  
*Rumah Tangga Pengguna Listrik*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT						
2.	Jumlah rumah tangga	RT						

3.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%						
----	--	---	--	--	--	--	--	--

2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.271  
Persentase Ketersediaan Daya Listrik

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Daya listrik terpasang	MVA						
2.	Daya terkontrak Provinsi	MVA						
3.	<b>Persentase ketersediaan daya listrik</b>	<b>%</b>						

D. Perdagangan

1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah.

Tabel 2.272  
Ekspor Bersih Perdagangan

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Nilai Ekspor	US \$						
2	Nilai Impor	US \$						
	<b>Ekspor Bersih Perdagangan</b>	<b>US \$</b>						

2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal

Kelompok pedagang/usaha informal merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan perdagangan di sebuah daerah, sektor informal berperan sangat besar bagi perekonomian kota ini. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal akan mempermudah koordinasi dan pengembangan sektor ini.

Tabel 2.273  
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
----	-----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

1	Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Unit					
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Unit					
3	<b>Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal</b>	%					

### 3. Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian

Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian dihitung dari gabungan kinerja revitalisasi pasar, kinerja pembinaan UKM, kinerja penertiban PKL, dan kinerja pembinaan IKM. Kinerja revitalisasi pasar dihitung dari persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat, kinerja pembinaan UKM dihitung dari persentase peningkatan Omset UKM yang dibina, kinerja penertiban PKL dihitung dari persentase titik lokasi PKL yang tertata, dan kinerja pembinaan IKM dihitung dari persentase peningkatan omset IKM yang dibina.

*Tabel 2.274  
Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian*

No.	Indikator	n-3	n-2	n-1
1	Kinerja revitalisasi pasar			
2	Kinerja pembinaan UKM			
3	Kinerja penertiban PKL			
4	Kinerja publikasi harga bahan pokok			
5	<b>Kinerja pembinaan IKM</b>			

### E. Perindustrian

#### 1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang potensial untuk dibina. Bantuan yang diberikan oleh Pemda kepada kelompok pengrajin bukan berupa barang melainkan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pameran. Jumlah fasilitas yang diberikan bergantung pada dinamika industri di suatu daerah

*Tabel 2.275  
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	kelompok					
2	Total Kelompok Pengrajin	kelompok					
3	<b>Persentase bina kelompok pengrajin</b>	%					

### G. Transmigrasi

#### 1. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak

memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri dengan mendapatkan bimbingan dari pemerintah.

Tabel 2.276  
Persentase Transmigran Swakarsa

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah transmigran swakarsa	Orang					
2.	Jumlah seluruh transmigran	Orang					
3.	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

Tabel 2.277  
Jumlah Transmigran Swakarsa

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	<b>Transmigrasi Swakarsa</b>						
	Kepala Keluarga	KK					
	Individu	Jiwa					
2	<b>Transmigrasi Umum</b>						
	Kepala Keluarga	KK					
	Individu	Jiwa					
3	<b>Jumlah Total Transmigrasi</b>						
	<b>Kepala Keluarga</b>	<b>KK</b>					
	<b>Individu</b>	<b>Jiwa</b>					

#### G. Kalautan dan Perikanan

##### 1. Produksi Perikanan Darat dan Laut

Cakupan produksi perikanan darat (yang di budidayakan oleh masyarakat pada suatu daerah baik kolam maupun karamba) serta Produksi Perikanan Laut

Tabel 2.278  
Produksi Perikanan Budidaya

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Produksi Ikan	Kg						
2	Target Daerah	Kg						
	<b>Tingkat Realisasi</b>	<b>%</b>						

Tabel 2.279  
Produksi Perikanan Laut

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Produksi Ikan	Kg						
2	Target Daerah	Kg						
	<b>Tingkat Realisasi</b>	<b>%</b>						

##### 2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula

kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya.

*Tabel 2.280  
Konsumsi Ikan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Ton						
2	Target Daerah	Ton						
<b>Tingkat Realisasi</b>		<b>%</b>						

### 3. Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah cakupan bina kelompok pengusaha perikanan budidaya dan nelayan. Pembinaan terhadap perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan budidaya, penangkapan, Jumlah produksi, pengolahan sampai pemasaran.

*Tabel 2.281  
Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Perikanan*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Kelompok Pengusaha Budidaya Ikan yang mendapat bantuan pemda	Kelompok					
2	Total kelompok pengusaha budidaya perikanan	Kelompok					
3	<b>Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan</b>	<b>%</b>					

#### 2.1.3.4. Aspek Penunjang Urusan

##### A. Perencanaan Pembangunan

##### 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

*Tabel 2.282*  
*Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak					

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

*Tabel 2.283*  
*Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak					

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda.

*Tabel 2.284*

*Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak					

4. Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

*Tabel 2.285  
Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak					

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100

*Tabel 2.286  
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program					
2.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program					
3.	<b>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD</b>	<b>Program</b>					

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD Selanjutnya

Data terkait penjabaran program RKPD ke dalam APBD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program APBD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan

bilangan 100

Tabel 2.287

*Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Program					
2.	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program					
3.	<b>Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD</b>	<b>Program</b>					

7. Indeks Perencanaan Pembangunan

Menjelaskan Capaian Indeks perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu indikator SDGs

Tabel 2.288

*Indeks Perencanaan Pembangunan*

No.	Indikator RAD	Tahun Dasar	n-2		n-1	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks perencanaan pembangunan					

B. Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan penilaian profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Tabel 2.289

*Opini BPK "WTP"*

No.	Indikator	n-6	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Opini BPK "WTP"						

2. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. SILPA tahun berjalan akan menjadi SILPA di tahun yang akan datang. SILPA sebaiknya bernilai "0" (nol) karena kebiasaan menyalakan anggaran berarti perencanaan dan realisasi anggaran daerah belum berjalan secara efektif.

Tabel 2.290

*Persentase SILPA*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Total SILPA	Rp					
2.	Total APBD	Rp					
3.	<b>Persentase SILPA</b>	<b>%</b>					

3. Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Dalam analisis aspek ekonomi dalam urusan penunjang, program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD sebaiknya dilaksanakan secara keseluruhan, ketika ada satu atau beberapa jumlah program atau kegiatan dalam rencana yang tidak terlaksana tentu akan mengurangi hasil yang akan didapatkan.

*Tabel 2.291  
Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana	Program					
2.	Jumlah program dalam APBD	Program					
3.	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

4. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

*Tabel 2.292  
Persentase Belanja Pendidikan*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah belanja urusan pendidikan	Rupiah					
2.	Total APBD	Rupiah					
3.	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase Belanja Kesehatan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja kesehatan daerah sebanyak 10% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

*Tabel 2.293  
Persentase Belanja Kesehatan*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah belanja urusan Kesehatan	Rupiah					
2.	Total APBD	Rupiah					
3.	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

6. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah, khususnya belanja langsung dan belanja

tidak langsung.

*Tabel 2.294  
Proporsi Belanja Daerah*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah belanja langsung	Rupiah					
2.	Total APBD	Rupiah					
	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					
1.	Jumlah belanja tidak langsung	Rupiah					
2.	Total APBD	Rupiah					
	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

#### 7. Penetapan APBD

Ketepatan waktu dalam menetapkan APBD juga menjadi indikator dalam analisis urusan penunjang. Keterlambatan waktu dalam menetapkan APBD dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

*Tabel 2.295  
Penetapan APBD*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu					

#### 8. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Keuangan Menjelaskan Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang keuangan.

*Tabel 2.296  
Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Keuangan*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%					
2	Pendapatan Asli Daerah	%					
3	Nilai Pajak Daerah	%					

#### C. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

##### 1. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai bidang dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi

para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

*Tabel 2.297*

*Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jpl					

2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Data didapatkan dengan membandingkan antara jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan jumlah total ASN.

*Tabel 2.298*

*Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang					
2	Jumlah total ASN	Orang					
3	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Data yang ada didapatkan dengan membandingkan antara jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan jumlah total ASN.

*Tabel 2.299*

*Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat structural	Orang					
2	Jumlah total ASN	Orang					
3	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat

persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara.

*Tabel 2.300*  
*Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang					

5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
- Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

*Tabel 2.301*  
*Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang					

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah
- Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ASN terdiri dari dua macam jabatan yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

*Tabel 2.302*  
*Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang					

- D. Penelitian dan Pengembangan
- Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan program Penelitian dan Pengembangan dengan tiga kegiatan utama yaitu Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah, Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis, dan Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah.
- E. Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Dalam proses kinerja pemerintah kota, diperlukan adanya sistem pengawasan yang dapat menindaklanjuti pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut.

*Tabel 2.303  
Persentase Tindak Lanjut Temuan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi					
2	Jumlah total temuan	Rekomendasi					
3	<b>Persentase</b>	<b>Persen</b>					

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Dengan adanya fungsi pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) maka diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggar dan pelanggaran serta pemberian sanksi tindak lanjut dalam kinerja pemerintah

*Tabel 2.304  
Persentase Pelanggaran Pegawai*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang					
2	Jumlah total ASN	Orang					
3	<b>Persentase</b>	<b>Persen</b>					

F. Sekretariat Dewan

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD

Dalam melaksanakan kerjanya selama lima tahun, DPRD membutuhkan panduan kerja untuk dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang sesuai. Untuk itu diperlukan adanya rencana kerja tahunan sebagai pedoman kerja dalam mencapai tujuan.

*Tabel 2.305  
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/tidak					

2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap RPJMD dan RKPD

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, DPRD perlu menyusun dan mengintegrasikan program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah. Pada setiap tahunnya, DPRD akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam melakukan penyusunan dan pengintegrasian program-program tersebut dalam melaksanakan aspek fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi anggaran.

*Tabel 2.306  
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD  
terhadap RPJMD dan RKPD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/tidak					

3. Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan

Selain penyusunan dan pengintegrasian program kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD, diperlukan pula pengintegrasian terhadap anggaran pembangunan yang dimiliki kota. Pengintegrasian ini juga dilakukan bersama dengan BAPPEDA dalam rangka penyesuaian serta melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat dewan DPRD.

*Tabel 2.307  
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD  
Terhadap Anggaran Pembangunan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak					

G. Sekretariat Daerah

Capaian kinerja nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik dan indeks pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu indikator SDGs

*Tabel 2.308*  
*Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah*

No.	Indikator RAD	Tahun Dasar	n-2		n-1	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah					
2	Indeks Reformasi Birokrasi					
3	Indeks pelayanan publik					
4	Indeks pelaksanaan pembangunan					

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

##### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi pangan dan non pangan.

*Tabel 2.309*  
*Pengeluaran Menurut Kelompok Barang*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pengeluaran pangan	Juta Rupiah						
Pengeluaran non pangan	Juta Rupiah						
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah						
Jumlah Penduduk	Jiwa						
<b>Pengeluaran per kapita per tahun</b>	<b>Juta Rupiah</b>						
<b>Pengeluaran per kapita per bulan</b>	<b>Juta Rupiah</b>						

##### 2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enam kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

*Tabel 2.310*  
*Persentase Konsumsi Non pangan Per Kapita*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pengeluaran non pangan	Juta Rupiah						
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah						
Persentase Pengeluaran Non Pangan	%						

### 3. Produktifitas Total Daerah

Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam tiga sektor besar yaitu agriculture, manufacture, dan services.

*Tabel 2.311  
Produktivitas Total*

Lapangan Usaha	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Nilai PDRB ADHK</b>						
<i>Agriculture</i>	juta rupiah					
<i>Manufacture</i>	juta rupiah					
<i>Service</i>	juta rupiah					
<b>Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja</b>						
<i>Agriculture</i>	Jiwa					
<i>Manufacture</i>	Jiwa					
<i>Service</i>	Jiwa					
<b>Total Produktivitas</b>						
<i>Agriculture</i>	juta rupiah/ jiwa					
<i>Manufacture</i>	juta rupiah/ jiwa					
<i>Service</i>	juta rupiah/ jiwa					

### 4. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB adalah perbandingan jumlah ekspor dan impor terhadap jumlah PDRB. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa kegiatan ekspor dan impor sudah berperan besar terhadap perekonomian suatu wilayah.

*Tabel 2.312  
Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa	Juta rupiah						
2	Jumlah PDRB	Juta rupiah						
3.	<b>Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB</b>							

### 5. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu bank umum pemerintah, bank umum

swasta, bank pembangunan, dan bank pengkreditan rakyat.

Berikut ini jumlah bank yang beroperasi

*Tabel 2.313  
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang*

No	Jenis Bank	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	KC Bank Umum	unit						
2	KCP Bank Umum	unit						
3	KK Bank Umum	unit						
4	KP BPR	unit						
5	KC BPR	unit						
6	KK BPR	unit						
	<b>Jumlah</b>	<b>unit</b>						

6. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Dan BPR  
Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum maupun BPR adalah perbandingan jumlah pinjaman terhadap simpanan nasabah di bank.

*Tabel 2.314  
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah pinjaman di bank umum dan BPR	Juta rupiah						
2	Dana pihak ketiga di bank umum dan BPR	Juta rupiah						
3	<b>Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR</b>							

7. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum BPR

Simpanan Masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing yang berbentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka.

*Tabel 2.315  
Jenis Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR*

No	Jenis Simpanan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Giro	Juta Rp.					
		rekening					
		%					
	Simpanan	Juta Rp.					
		rekening					

2.	Berjangka	%					
3.	Tabungan	Juta Rp.					
		bilyet					
		%					
4	<b>Total Simpanan</b>	<b>Juta Rp.</b>					

#### 8. Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum dan PBR Menurut Lapangan Usaha

Pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia.

*Tabel 2.316  
Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha*

No	Sektor Ekonomi	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha</b>							
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Juta Rp.					
		%					
2	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.					
		%					
3	Industri Pengolahan	Juta Rp.					
		%					
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp.					
		%					
5	Konstruksi	Juta Rp.					
		%					
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp.					
		%					
7	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rp.					
		%					
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Juta Rp.					
		%					
9	Jasa-jasa	Juta Rp.					
		%					
10	Informasi Dan Komunikasi	Rp Juta					
		%					
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	Rp Juta					
		%					
12	Real Estate	Rp Juta					
		%					
13	Jasa Perusahaan	Rp Juta					
		%					
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Rp Juta					
		%					
15	Jasa Pendidikan	Rp Juta					
		%					
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	Rp Juta					
		%					
17	Jasa Lainnya	Rp Juta					
		%					
<b>Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha</b>							
18	Rumah Tinggal	Juta Rp.					
		%					
19	Flat dan Apartemen	Juta Rp.					
		%					

20	Ruko dan Rukan	Juta Rp.					
		%					
21	Kendaraan Bermotor	Juta Rp.					
		%					
22	Lainnya	Juta Rp.					
		%					
<b>Total Pinjaman</b>		<b>Juta Rp</b>					

#### 9. Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan

Sama dengan posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut lapangan usaha, pengertian posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut jenis penggunaan merupakan pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pinjaman yang diberikan di bank umum dan BPR berdasarkan jenis penggunaannya dibedakan menjadi tiga, yakni modal kerja, investasi, dan konsumsi.

*Tabel 2.317  
Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR*

No	Jenis Penggunaan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Modal Kerja	Juta Rp. %					
2.	Investasi	Juta Rp. %					
3.	Konsumsi	Juta Rp. %					
	<b>Total Pinjaman</b>	<b>Juta Rp.</b>					

#### 10. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum dan BPR

Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan

hasil penjualan tahunan

*Tabel 2.318  
Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR  
Berdasarkan Skala Usaha*

No	Skala Usaha	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Mikro	Juta Rp. %					
2.	Kecil	Juta Rp. %					
3.	Menengah	Juta Rp. %					
	<b>Total Kredit</b>	<b>Juta Rp.</b>					

*Tabel 2.319  
Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR  
Berdasarkan Penggunaan*

No	Jenis Penggunaan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Modal Kerja	Juta Rp. %					
2.	Investasi	Juta Rp. %					
	<b>Total Kredit</b>	<b>Juta Rp.</b>					

*Tabel 2.320  
Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut  
Lapangan Usaha*

No	Sektor Ekonomi	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Juta Rp.					
		%					
2.	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.					
		%					
3.	Industri Pengolahan	Juta Rp.					
		%					
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp.					
		%					
5.	Konstruksi	Juta Rp.					
		%					
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp.					
		%					
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rp.					
		%					
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Juta Rp.					
		%					
9.	Jasa-jasa	Juta Rp.					
		%					
10	Informasi Dan Komunikasi	Juta Rp.					
		%					
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	Juta Rp.					
		%					
12	Real Estate	Juta Rp.					
		%					
13	Jasa Perusahaan	Juta Rp.					
		%					
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rp.					
		%					
15	Jasa Pendidikan	Juta Rp.					
		%					
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	Juta Rp.					
		%					

17	Jasa Lainnya	Juta Rp.					
		%					
<b>Total Kredit</b>		<b>Juta Rp.</b>					

### 11. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan. Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas, maka hal itu mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di suatu daerah

*Tabel 2.321  
Angka Kriminalitas yang Tertangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas	Kasus					
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas	Kasus					
3.	<b>Angka Kriminalitas yang Tertangani</b>	<b>%</b>					

*Tabel 2.322  
Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Narkoba	Kasus					
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas Narkoba	Kasus					
3.	<b>Angka Kriminalitas yang Tertangani</b>	<b>%</b>					

*Tabel 2.323  
Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	913	880	695	698	547
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	409.487	411.282	412.692	413.961	414.055
3.	<b>Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk</b>	<b>Kasus</b>	<b>22,30</b>	<b>21,40</b>	<b>16,84</b>	<b>16,86</b>	<b>13,12</b>

### 12. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Dimana pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah.

*Tabel 2.324  
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah*

No	Jenis Pendapatan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
----	------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

1	Pajak	Jenis						
2	Retribusi	Jenis						
	<b>Jumlah</b>	<b>Jenis</b>						

### 13. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu goodwill dan political will pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan

*Tabel 2.325  
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah Perda terkait perijinan	Buah						
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	Buah						
3	<b>Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan</b>	<b>Buah</b>						

### 14. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) pada satu daerah.

*Tabel 2.326  
Rasio Ketergantungan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Penduduk usia <15th + usia >64th	Jiwa						
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa						
3	<b>Rasio ketergantungan</b>	<b>%</b>						

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun n-1 berdasarkan pada RPJMD Tahun tahun berjalan

Tabel 2.327  
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun n-1

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Angka Kemiskinan			
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Indeks Keberdayaan Masyarakat			
3	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Pola Pangan Harapan			
4	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Angka Pertumbuhan Ekonomi			
6	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Angka Kriminalitas Jumlah Pelanggaran Perda			
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah Angka harapan lama sekolah			
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup			
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif			
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks infrastruktur Wilayah			
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			
		Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah			

1. Sasaran Kemiskinan Masyarakat Menurun

Penghitungan pencapaian sasaran berdasarkan pada angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Yang menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian kemiskinan di daerah.

Dalam Pencapaian Sasaran ini terdapat Faktor pendorong dan factor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

2. Sasaran Keberdayaan Masyarakat Meningkat

Indikator sasaran ini adalah Indeks Keberdayaan Masyarakat. Indikator Keberdayaan Masyarakat didapat dari komposit indeks pemberdayaan kampung serta persentase perempuan dan anak yang tidak mengalami kekerasan. Pemberdayaan kampung dilihat dari kampung yang sudah diberdayakan melalui deklarasi kampung yakni Kampung

Ramah Anak, Kampung Panca Tertib, Kampung Tangguh Bencana/ KTB, Kampung Gerbang Mas/JBM, Kampung Wisata, Kampung Budaya, Kampung Bebas Asap Rokok, Kampung Anti Vandalisme, Kampung Pintar, Kawasan Tanpa Rokok, PHBS, STBM, Kampung Bebas Narkoba, Kampung Hijau, Kampung Siaga Bencana, Kampung Bebas Jentik Nyamuk/Community Deal PSN-DBD, Kampung Dongeng, Kampung KB, Kampung Literasi, Kampung Jogowargo, Kampung Sadar Gender, Kampung Kesehatan Reproduksi Remaja, Kampung Sayur, Kampung Cyber, Kelurahan Budaya, Kampung Sains dan Literasi, Kampung Cakruk Multi Fungsi, dan Kampung Bebas Pekat. Dan dalam sasaran ini Menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian keberdayaan masyarakat di daerah

Dalam Pencapaian Sasaran Keberdayaan Masyarakat meningkat terdapat Faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

### 3. Sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

Ketahanan pangan masyarakat meningkat dilihat dari indikator Pola Pangan Harapan. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

*Tabel 2.328  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun n-1*

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi Aktual	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian								
2.	Umbi-umbian								
3.	Pangan Hewani								
4.	Minyak dan Lemak								
5.	Buah/biji berminyak								
6.	Kacang-kacangan								
7.	Gula								
8.	Sayuran dan buah								
9.	Lain-lain								
	<b>Jumlah</b>								

Dalam Pencapaian Sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat

Meningkat terdapat Faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

4. Sasaran Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun dilihat dari indikator Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) yang merupakan angka dari BPS, Indeks Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Dalam sasaran ini Menjelaskan mengenai target indeks gini realisasi serta capaiannya.

Dalam Pencapaian Sasaran Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun terdapat Faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

5. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan

Sasaran kelima memiliki indikator Angka Pertumbuhan Ekonomi. Angka Pertumbuhan Ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas harga konstan yang diterbitkan BPS, pembahasan sasaran ini Menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap pertumbuhan ekonomi

Dalam Pencapaian Sasaran Pertumbuhan ekonomi meningkat terdapat Faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

6. Sasaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun

Sasaran ini memiliki dua indikator, yaitu Angka Kriminalitas dan Jumlah Pelanggaran Perda. Kriminalitas termasuk faktor yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan

kesejahteraan penduduk. Kriminalitas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sasaran ini juga menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap angka kriminalitas, serta pelanggaran perda.

Berdasarkan sasaran gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga diuraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

7. Sasaran Kualitas Pendidikan Meningkat

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Yang menjelaskan target realisasi serta capaian kualitas pendidikan. dalam sasaran ini menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Dari Sasaran Kualitas Pendidikan meningkat terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga diuraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

8. Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sasaran ini memiliki indikator Angka Harapan Hidup, Angka harapan hidup merupakan lama hidup manusia di dunia. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk Angka harapan hidup merupakan lama hidup manusia di dunia. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk di pengaruhi oleh adalah pola makan, penyakit menular, penyakit bawaan lahir, lingkungan tempat tinggal, stres atau tekanan. Sasaran ini menjelaskan target realisasi serta capaian terhadap Harapan hidup masyarakat daerah.

Dari Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan

situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

9. Sasaran Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Indikator sasaran ini adalah Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif. Aktivitas Rintisan Kelurahan Budaya yang menjadi indikator keaktifan pada tahun n-1 meliputi dialog budaya (seminar/workshop budaya), keaktifan dalam forum, Aktualisasi Seni Budaya, Gelar Potensi Seni Budaya, Pentas Seni, keikutsertaan dalam pameran yang menampilkan kekayaan kuliner dan produk-produk UMKM dari setiap Rintisan Kelurahan Budaya, Pawai, dan Penyelenggaraan Upacara Adat. Dan yang utama dalam sasaran ini menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian keaktifan rintisan kelurahan budaya.

Berdasarkan Sasaran Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

10. Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat

Indikator sasaran ini adalah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat. dalam sasaran ini juga menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang.

*Tabel 2.329  
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun n-1*

No.	Fungsi	Rencana (Ha)	Eksisting (Ha)	Selisih (Ha)
1.	Hunian			
2.	Perdagangan dan Jasa			
3.	Perkantoran			
4.	Industri			
5.	Sarana Pendidikan			
6.	Sarana Kesehatan dan Keagamaan			
7.	Sarana OR dan Rekreasi			
8.	Sarana Transportasi			
9.	Cagar Budaya			
10.	Pariwisata			
11.	RTH			
12.	RTH Khusus			
13.	Sempadan Sungai			
14.	Sungai			

15.	Jalan			
16.	Lahan Kosong			
17.	Sawah			
18.	Tanah Produktif			
	<b>Total</b>			
	<b>Ketidaksesuaian</b>			
	<b>Kesesuaian</b>			

Berdasarkan Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

11. Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan

Indikator sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Menjelaskan mengenai target dan realisasi serta capaian pada sasaran ini dimana Ruang Lingkup IKLH meliputi analisis indeks kualitas air, kualitas udara, dan indeks tutupan vegetasi. sasaran ini menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di daerah.

*Tabel 2.330  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*

No.	Indikator	Parameter	Bobot	Realisasi	Perhitungan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, Total Coliform			
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub>			
3	Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)	Luas Tutupan Lahan dan Dinamikasi Vegetasi			
<b>IKLH : (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x ITV)</b>					

Berdasarkan Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

12. Sasaran Infrastruktur Wilayah Meningkatkan

Sasaran ini memiliki indikator Indeks Infrastruktur Wilayah yang dihitung melalui komposit Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Permukiman (Dinas PUPKP), Indeks Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup), Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Service) (Dinas Perhubungan), Indeks Kapasitas Daerah dalam

Penanggulangan Bencana (BPBD) serta Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran (Dinas Kebakaran); yang dihitung dari  $[40\% \times [70\% \{ \text{Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum} \} + \{30\% \text{ Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman} \}] + [20\% \{50\% \text{ pengurangan sampah} + 50\% \text{ pengangkutan sampah} \}] + 30\% \text{ Level of Service} + [10\% (\text{Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana} + \text{Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran})/2]$ . Serta menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian pada sasaran ini.

Berdasarkan Sasaran Infrastruktur Wilayah Meningkatkan terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

13. Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. dalam sasaran ini juga menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Berdasarkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJMD Daerah sampai dengan Tahun n-1

*Tabel 2.331*  
*Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan*

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018				2019				Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
		Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>URUSAN :</b>																
<b>1. Pendidikan</b>																
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi A															
	Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional															

### 2.2.3. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Daerah

#### ➤ Kinerja Fisik

Menjabarkan tentang pencapaian kinerja fisik yang di peroleh dari pelaporan masing-masing perangkat daerah, untuk mengetahui besaran realisasi dan capaian pada tahun n-1 dari target fisik yang telah di tentukan,

*Tabel 2.332  
Target dan Realisasi Fisik Tahun n-2 - n-1*

		TW I	TW II	TW III	TW IV
n-2	Target Realisasi				
n-1	Target Realisasi				

Kemudian di lakukan perbandingan realisasi pada tahun n-1 dengan realisasi tahun n-2, yang menghasilkan perolehan nilai deviasi, dan di jabarkan penyebab terjadinya deviasi.

#### ➤ Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan kegiatan diperoleh melalui pelaporan masing- masing perangkat daerah, untuk mengetahui realisasi terhadap kinerja keuangan, dimana sebelumnya di lakukan perbandingan antara realisasi tahun n-1 dengan realisasi tahun n-2, yang menghasilkan perolehan nilai deviasi, dan di jabarkan penyebab terjadinya deviasi.

*Tabel 2.333  
Target dan Realisasi Keuangan n-2 - n-1*

		TW I	TW II	TW III	TW IV
n-2	Target Realisasi				
n-1	Target Realisasi				

Untuk capaian keuangan keseluruhan OPD di daerah tentunya terdapat OPD yang memiliki capaian predikat kinerja sangat tinggi, tinggi, dan predikat rendah, dengan klasifikasi range sebagai berikut.

#### *Proporsi capaian Keuangan Perangkat Daerah*

Range Nilai	Predikat Kinerja
$x > 90\%$	Sangat Tinggi
$75\% < x \leq 90\%$	Tinggi
$65\% < x \leq 75\%$	Sedang
$50\% < x \leq 65\%$	Rendah
$x \leq 50\%$	Sangat Rendah

*Tabel 2.334*  
*Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD*

No	OPD/Bagian/ Kecamatan	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja OPD		Kinerja	Realisasi Renja OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)				
1							
2							
...	....	....	.....	....	....	....	....

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

#### 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pada bagian ini menjabarkan mengenai isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta permasalahan yang terkait dengan suatu keadaan luar biasa yang dapat menimbulkan permasalahan baru, serta yang mengharuskan mendapat penanganan yang cepat, karena dapat berdampak pada kestabilan perekonomian daerah, nasional, bahkan global.

#### 2.3.2. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Menjabarkan mengenai permasalahan daerah terkait urusan pemerintah daerah berdasarkan urusan yang diampuh oleh perangkat daerah (berdasarkan OPD yang ada pada suatu daerah), serta permasalahan terkait dengan fungsi penunjangnya seperti :

1. Belum efektif dan efisiennya penyusunan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran
2. Belum seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti
3. Jumlah pelanggaran pegawai semakin meningkat
4. Belum terpenuhinya penataan kebutuhan ASN Pemerintah Daerah

5. Masih terdapat ASN yang tidak lulus dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
6. Realisasi pelaksanaan kegiatan belum tepat sesuai target 100%
7. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah memiliki tepat struktur tepat fungsi

### 2.3.3. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Sasaran dan Program Perangkat daerah

Bagian ini disajikan penjabaran permasalahan Pemerintah daerah berdasarkan sasaran dan Program yang di ampuh oleh Perangkat daerah, yang berkenaan dengan sasaran OPD terhadap beberapa misi yang ada.

## BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup: kinerja pelaksanaan APBD yang menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Kemudian uraian mengenai Neraca Daerah yang sekurang-kurangnya menggambarkan perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan serta kerangka pendanaan.

### 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pada sub bab ini menjelaskan kondisi keuangan dimasa lalu. diukur dari kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Neraca Daerah

#### 1.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menjelaskan terhadap kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang dapat di tinjau dari aspek tingkat realisasi atau

penyerapan APBD setiap tahunnya

#### 1.1.1.1. Pendapatan Daerah

Menjelaskan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima secara serial dalam kurun lima tahun terakhir

*Tabel 3.1.  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah  
Pemerintah Kota Bima*

No.	Uraian	n-5 (Rp)	n-4 (Rp)	n-3 (Rp)	n-2 (Rp)	n-1 (Rp)	Rata-rata Pertumbu- han (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>						
1.1.1	Pajak daerah						
1.1.2	Retribusi daerah						
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah						
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>						
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak						
1.2.2	Dana alokasi umum						
1.2.3	Dana alokasi khusus						
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus						
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
1.3.6	Pendapatan Lainnya						

#### 1.1.1.2. Belanja Daerah

Menjelaskan mengenai pertumbuhan realisasi belanja daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun, dimana Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

*Tabel 3.2.  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah  
Pemerintah Kota Bima*

No.	Uraian	n-5 (Rp)	n-4 (Rp)	n-3 (Rp)	n-2 (Rp)	n-1 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Bunga						
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah						
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.6	Belanja Bagi Hasil						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga						
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						

#### 1.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Bagian ini menjelaskan mengenai rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan Pemerintah Kota Bima yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

*Tabel 3.3.  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Pemerintah Daerah*

No.	Uraian	n-5 (Rp)	n-4 (Rp)	n-3 (Rp)	n-2 (Rp)	n-1 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)						

#### 1.1.2. Neraca Daerah

Bagian neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah

Daerah Kota Bima yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada waktu tertentu.

*Tabel 3.4.  
Pertumbuhan Neraca  
Pemerintah Kota Bima*

Uraian	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata Pertumbu- han (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	3	4	5	6	7	8
<b>A S E T</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
<b>Kas</b>						
Kas di Kas Daerah						
Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP						
Kas di Kas Bendahara Penerimaan						
Kas di Kas Bendahara Pengeluaran						
Kas di Kas Dana BOS						
Kas Lainnya - di Bendahara Pengeluaran						
Kas Lainnya - Kas Dana Bantuan						
<b>Jumlah Kas</b>						
<b>Piutang</b>						
Piutang Pajak						
Penyisihan Piutang Pajak						
Piutang Pajak Neto						
Piutang Retribusi						
Penyisihan Piutang Retribusi						
Piutang Retribusi Neto						
Piutang Dana Bagi Hasil						
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil						
Piutang Dana Bagi Hasil Netto						
Piutang Deviden						
Piutang Lainnya						
Penyisihan Piutang Lainnya						
Piutang Lainnya Netto						
Belanja Dibayar Dimuka						
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto						
<b>Jumlah Piutang</b>						
<b>Persediaan</b>						
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>						
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
<b>Investasi Non Permanen</b>						
Investasi Dana Bergulir						
Dana Bergulir Diragukan Tertagih						

Uraian	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>						
<b>Investasi Permanen</b>						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah						
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>						
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
<b>ASET TETAP</b>						
Tanah						
Peralatan dan Mesin						
Gedung dan Bangunan						
Jalan, Irigasi, Jaringan						
Aset Tetap Lainnya						
Konstruksi Dalam Pengerjaan						
Akumulasi Penyusutan						
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>						
<b>ASET LAINNYA</b>						
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
Aset Tak Berwujud						
Amortisasi Aset Tak Berwujud						
Aset Lain-lain						
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>						
<b>JUMLAH ASET</b>						
<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)						
Pendapatan Diterima Dimuka						
Utang Belanja						
Utang Jangka Pendek Lainnya						
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan						
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>						
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>						
<b>EKUITAS</b>						
Ekuitas						
<b>JUMLAH EKUITAS</b>						
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>						

#### 1.1.2.1. Aset

Pada bagian aset menjelaskan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### 1.1.2.2. Kewajiban

Menjelaskan atas kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah Kota Bima.

*Tabel 3.5.  
Analisa Rasio Keuangan  
Pemerintah Kota Bima*

No	Uraian	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>Rasio Likuiditas</b>							
1	Rasio Lancar						
2	Rasio Quick						
3	Rasio Kas						
<b>Rasio Solvabilitas</b>							
1	Rasio Hutang terhadap Aset						
2	Rasio Hutang terhadap Modal						

#### 1.1.2.3. Ekuitas

Menjelaskan terkait kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Menjelaskan mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat

#### 1) Kebijakan Pendapatan

Menjelaskan terkait kebijakan pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima yang di arahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan.

2) Kebijakan Belanja

Menjelaskan terkait kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Bima, yang di kelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

3) Kebijakan Pembiayaan

Menjelaskan terkait kebijakan pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Menjelaskan terkait proporsi penggunaan anggaran dari realisasi kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bima pada periode tahun anggaran sebelumnya

*Tabel 3.6.  
Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Pemerintah Kota Bima*

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	Tahun Anggaran n-5			
2	Tahun Anggaran n-4			
3	Tahun Anggaran n-3			
4	Tahun Anggaran n-2			
5	Tahun Anggaran n-1			

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Menjelaskan mengenai analisis pembiayaan daerah dimana pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang mana jika terjadi defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

*Tabel 3.7.  
Defisit Riil Anggaran*

*Pemerintah Kota Bima*

No.	Uraian	n-5 (Rp)	n-4 (Rp)	n-3 (Rp)	n-2 (Rp)	n-1 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah					
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah					
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
<b>Surplus/Defisit riil</b>						

*Tabel 3.8.  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran  
Pemerintah Kota Bima*

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		n-5 (Rp)	n-4 (Rp)	n-3 (Rp)	n-2 (Rp)	n-1 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya					
2	Koreksi					
3	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir					
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
5	Penerimaan Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
7	Penerimaan Piutang Daerah					

*Tabel 3.9.  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Pemerintah Kota Bima*

No.	Uraian	n-5 (Rp)	n-4 (Rp)	n-3 (Rp)	n-2 (Rp)	n-1 (Rp)
1	Jumlah SiLPA					
2	Pelampauan penerimaan PAD					
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan					
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah					
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya					
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan					
7	Kegiatan lanjutan					

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Menjelaskan analisis kerangka pendanaan terhadap kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Dimana Kapasitas keuangan daerah merupakan total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

#### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Menjelaskan mengenai proyeksi pendapatan dan belanja pemerintah Kota Bima, dimana Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan/pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

*Tabel 3.10.  
Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Pemerintah Kota Bima*

No.	Uraian	Realisasi APBD		APBD
		n-2	n-1	n
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.1	Pajak daerah			
1.1.2	Retribusi daerah			
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah			
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>			
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak			
1.2.2	Dana alokasi umum			
1.2.3	Dana alokasi khusus			
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
	Pendapatan Lainnya			
1.3.2	Pendapatan Dana darurat			
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya			
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3.1.2	Pengembalian Dana Bergulir			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>				

Tabel 3.11.

*Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Pemerintah Kota Bima*

No.	Uraian	APBD	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		n+1	n+2	n+3	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
4.1.01	Pajak daerah				
4.1.02	Retribusi daerah				
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan				
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah				
4.2	<b>Pendapatan Transfer</b>				
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat				
4.2.02	Transfer Antar Daerah				
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1	<b>Belanja Operasi</b>				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5.2	<b>Belanja Modal</b>				
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.3	<b>Belanja Tak Terduga</b>				
5.3.01	Belanja Tak Terduga				
	<b>Surplus/(Defisit)</b>				
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
	Pengembalian Dana Bergulir				
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal				

No.	Uraian	APBD	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		n+1	n+2	n+3	
	Daerah				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				

### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan mengenai Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### 1) Proyeksi Sisa Labih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

Menjelaskan mengenai proyeksi SILPA yang berdasarkan pertumbuhan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya.

*Tabel 3.12.*

*Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)  
Pemerintah Kota Bima*

Uraian	APBD				Proyeksi	
	n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SILPA)						

#### 2) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Menjelaskan mengenai belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2018 sampai dengan 2019 menggunakan data realisasi APBD dan tahun 2020 menggunakan data APBD serta tahun 2022-2023 menggunakan proyeksi yang bersumber dari APBD tahun 2021.

*Tabel 3.13.*

*Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan*

*yang Wajib dan Mengikat  
Pemerintah Kota Bima*

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi
		n-2	n-1	n
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan			
2	Tambahan Penghasilan PNS			
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah			
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD			
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
1	Penyertaan Modal Daerah			
<b>Total Belanja Wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (A+B)</b>				

Tabel 3.14.  
*Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Pemerintah Kota Bima*

No	Uraian	APBD	Proyeksi	
		n+1	n+2	n+3
<b>A</b>	<b>Belanja Mengikat</b>			
1	Belanja Pegawai			
<b>B</b>	<b>Belanja Wajib</b>			
1	Pendidikan			
2	Kesehatan			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman			
5	Polisi Pamong Praja			
6	Penanggulangan Bencana Daerah			
7	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
8	Sosial			
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
1	Penyertaan Modal			
<b>Total Belanja Wajib dan Meringkat (A+B+C)</b>				

3) Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Menjelaskan terhadap Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta belanja tidak langsung.

*Tabel 3.15.  
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Pemerintah Kota Bima*

No.	Uraian	Realisasi APBD		APBD
		n-2	n-1	n
1	Pendapatan			
2	Penerimaan Dana Bergulir			
3	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)			
4	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran			
	Total penerimaan			
	Dikurangi:			
5	Belanja Tidak Langsung			
6	Pengeluaran Pembiayaan			
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>			

*Tabel 3.16.  
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Pemerintah Kota Bima*

No	Uraian	APBD	Proyeksi	
		n+1	n+2	n+3
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1	<b>Belanja Operasi</b>			
5.1.1	Belanja Pegawai			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.5	Belanja Hibah			
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial			
5.2	<b>Belanja Modal</b>			
5.2.1	Belanja Modal Tanah			
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
5.3	<b>Belanja Tak Terduga</b>			
5.3.1	Belanja Tak Terduga			
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	<b>Total</b>			

#### 4) Kebijakan Alokasi Anggaran

Menjelaskan mengenai kapasitas riil kemampuan keangan daerah yang dikelompokkan kedalam skala prioritas daerah

*Tabel 3.17.  
Realisasi dan Rencana Penggunaan  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Pemerintah Kota Bima*

Uraian	Realisasi APBD		APBD
	n-2	n-1	n
Kapasitas riil kemampuan keuangan			
Prioritas I			
Prioritas II			

*Tabel 3.18.  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Pemerintah Kota Bima*

Uraian	APBD	Proyeksi	
	n+1	n+2	n+3
Kapasitas riil kemampuan keuangan			
Prioritas I			
Prioritas II			

#### BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

##### 4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara pencapaian kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat diperoleh dari hasil pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Selain itu permasalahan dapat diperoleh melalui penelaahan kondisi lingkungan strategis baik regional, nasional maupun internasional yang mungkin akan mempengaruhi rencana pembangunan Kota Bima pada lima tahun yang akan datang.

Tabel 4.1  
Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Nasional, Provinsi NTB  
dan Kota Bima

No	Urusan	Rumusan Permasalahan				
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima
1	2	3	4	5		
	<b>Urusan Wajib</b>					
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
	<b>Urusan Wajib Bidang Pendidikan</b>					
	<b>Urusan Wajib Bidang Kesehatan</b>					
	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	Urusan Wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
	Urusan Wajib Bidang Sosial					
	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>					
	Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Urusan Wajib Bidang Pangan					
	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup					
	Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					

No	Urusan	Rumusan Permasalahan				
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima
1	2	3		4		5
	Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Urusan Wajib Bidang Perhubungan					
	Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan					
	Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika					
	Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
	Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal					
	Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
	Urusan Wajib Bidang Kebudayaan					
	Urusan Perpustakaan					
	Urusan Kearsipan					
	<b>Urusan Pilihan</b>					
	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan					
	Urusan Pilihan Bidang Pariwisata					
	Urusan Pilihan Bidang Pertanian					
	Urusan Pilihan Bidang Kehutanan					
	Urusan Pilihan Bidang ESDM					
	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan					

No	Urusan	Rumusan Permasalahan				
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima
1	2	3		4		5
	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian					
	Urusan Penunjang					
	Bidang Administrasi Pemerintahan					
	Bidang Perencanaan					
	Bidang Keuangan					
	Bidang Pengawasan					

#### 4.1.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan

#### 4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan yang berhasil diidentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPJMD.

*Tabel 4.2.  
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah*

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR -FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>				
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>			
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.2	Angka			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	partisipasi kasar			
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan			
1.4	Angka Partisipasi Murni			
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B			
1.5	Angka partisipasi sekolah			
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	➤		
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B			
1.6	Angka Putus Sekolah:			
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI			
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs			
1.7	Angka Kelulusan:			
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI			
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			
1.8	Angka Melanjutkan (AM):			
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs			
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA			
1.9	Fasilitas Pendidikan:			
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik			
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar			
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar			
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki			
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)			
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup			
2.6	Rasio posyandu per satuan balita			
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk			
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk			
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	ditangani			
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			
2.13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)			
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak			
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS			
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			
2.25	Penderita diare yang ditangani			
2.26	Angka kejadian Malaria			
2.27	Tingkat kematian akibat malaria			
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi			
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			
2.34	Cakupan kunjungan bayi			
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4			
2.38	Cakupan pelayanan nifas			
2.42	Cakupan penjangkaran			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	kesehatan siswa SD dan setingkat			
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin			
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
3.1	Pekerjaan Umum:			
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk			
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4			
3.1.4	Persentase jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)			
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)			
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi			
3.1.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar			
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat			
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun			
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	sungai rawan longsor			
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi			
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum			
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh			
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan			
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			
3.2	Penataan Ruang:			
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB			
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan			
3.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan			
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW			
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>			
4.1	Rasio rumah layak huni			
4.2	Rasio permukiman layak huni			
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>			
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)			
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota			
5.4	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			
5.5	Persentase Penegakan PERDA			
5.6	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik			
5.7	Persentase gejala konflik yang diatasi			
5.8	Persentase cakupan wilayah potensi konflik			
5.9	Jumlah konflik social			
5.10	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas			
5.11	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat			
<b>6</b>	<b>Sosial</b>			
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social			
6.2	Persentase PMKS yang tertangani			
6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya			
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social			
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap			
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social			
	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>			
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun			
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			
1.4	Keselamatan dan perlindungan			
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	pelatihan berbasis masyarakat			
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD			
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta			
2.4	Rasio KDRT			
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur			
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.			
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			
<b>3</b>	<b>Pangan</b>			
3.1	Ketersediaan pangan utama			
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita			
	Ketersediaan energy			
	Ketersediaan protein			
3.4	Skor Pola Pangan Harapan			
3.5	Penguatan cadangan pangan			
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>			
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat			
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara			
4.3	Penyelesaian izin lokasi			
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
5.26	Tersusunnya RPPLH Kota			
5.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota			
5.28	Terselenggaranya KLHS untuk			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	K/R/P tingkat daerah			
5.29	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air			
5.30	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara			
5.31	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan			
5.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup			
	Adiwiyata			
	Permata			
	Semi Kalpataru			
	Kebersihan Lingkungan			
	Eco Office			
5.43	Timbulan sampah yang ditangani			
5.44	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R			
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk			
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran			
6.3	Rasio pasangan berakte nikah			
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran			
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	pemerintahan desa yang baik			
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK			
7.4	Persentase LSM aktif			
7.5	Persentase LPM Berprestasi			
7.6	Persentase PKK aktif			
7.7	Persentase Posyandu aktif			
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat			
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)			
8.2	Total Fertility Rate (TFR)			
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB			
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga			
8.9	Ratio Akseptor KB			
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )			
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi			
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita			
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD			
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>			
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum			
9.2	Rasio ijin trayek			
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum			
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis			
9.5	Persentase layanan angkutan darat			
9.7	Pemasangan Rambu- rambu			
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi			
10.6	Pelaksanaan Desiminasi Informasi			
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>			
11.1	Persentase koperasi aktif			
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif			
11.3	Persentase BPR/LKM aktif			
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil			
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja			
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif			
13.2	Persentase wirausaha muda			
13.3	Cakupan pembinaan olahraga			
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi			
13.6	Jumlah atlet berprestasi			
13.7	Jumlah prestasi olahraga			
<b>14</b>	<b>Statistik</b>			
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (SIPD)			
14.2	Buku "kota bima dalam angka"			
14.3	Buku "PDRB"			
14.4	Tersedianya Data Statistik Sektoral			
14.5	Terbentuknya Kota Bima Satu Data			
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya			
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	inventarisasi			
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu			
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>			
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun			
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah			
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk			
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun			
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan			
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat			
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>			
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku			
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan			
<b>Layanan Urusan Pilihan</b>				
<b>1. Pariwisata</b>				
1.1	Kunjungan wisata			
1.2	Lama kunjungan Wisata			
1.3	PAD sektor pariwisata			
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>			
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB			
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB			
2.3	Kontribusi Pertanian Hortikultura Terhadap PDRB			
2.3.1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB			
2.3.2	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB			
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	
2.6	Cakupan bina kelompok petani				
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>				
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan				
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal				
<b>6</b>	<b>Perindustrian</b>				
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin				
<b>8. Kelautan dan Perikanan</b>					
8.1	Produksi perikanan				
8.1.1	Produksi Perikanan Tangkap				
8.1.2	Produksi Perikanan Budidaya				
8.2	Konsumsi ikan				
	Jumlah produk Olahan yang dihasilkan				
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan				
8.3.1	Jumlah Kelompok Pemula				
8.3.2	Jumlah Kelompok Madya				
8.3.3	Jumlah Kelompok Utama				
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan				
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial				
8.7	Nilai tukar nelayan				
<b>Penunjang Urusan</b>					
<b>1. Perencanaan Pembangunan</b>					
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA				
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA				
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKP				
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKP kedalam APBD				
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW				
<b>2. Keuangan</b>					
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	=	WTP		Kepatutan terhadap regulasi
2.2	Persentase SILPA	<			
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD				
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana				
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)				

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)				
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung				
2.9	Penetapan APBD				
<b>3.Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>					
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				
	Pim TK. II				
	Pim TK. III				
	Pim TK. IV				
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah				
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah				
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah				
<b>4.Penelitian dan pengembangan</b>					
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.				
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.				
	Penerapan SIDA:				
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.				
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.				

#### 4.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

#### 4.2.1. Analisis Isu Strategis Global

Menjelaskan terkait analisis terhadap isu strategis global yang berkenaan dengan visi bersama nega-negara ASEAN, dimana tujuan dari visi ini menjadikan kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dan pengembangan serta pemerataan ekonomi di setiap negara anggota ASEAN.

##### a. Pasar Tunggal dan Basis Produksi

Menganalisis isu ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran modal yang lebih bebas, serta (v) aliran bebas tenaga kerja terampil

##### b. Kawasan Ekonomi yang Kompetitif

Menganalisis Isu Dalam upaya menciptakan sebuah kawasan yang kompetitif, antara lain: perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.

##### c. Pembangunan Ekonomi yang Setara

Menganalisis Isu mengenai rencana kerja strategis untuk pemerataan pembangunan ekonomi melalui: Pengembangan UKM dan Inisiatif Integrasi ASEAN.

##### d. Integrasi Kedalam Ekonomi Global

Menganalisis pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara internasional, dan menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global (*global supply chain*), serta agar pasar ASEAN tetap menarik bagi para investor asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain di luar MEA

e. Sustainable Development Goals (SDGs)

Menjelaskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.

*Tabel 4.3  
Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah*

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANG-AN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Cakupan jenis pelayanan dasar SPM Sosial	sosial
2	Dst												

f. Kejadian Luar Biasa

Menganalisis kejadian luar biasa dalam penerapan kebijakan atas kejadian luar biasa agar tidak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Global serta mengurangi dampak yang buruk di masyarakat.

4.2.2. Analisis Isu Strategis Nasional

Menganalisis Isu-Isu Strategis Nasional berdasarkan RPJMN terhadap pembangunan daerah terkait peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, dan Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta Agenda Pembangunan Nasional yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Kota Bima

Selain hal tersebut diatas terdapat arahan Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN dengan indikator kinerja dan target nasional yang memerlukan dukungan daerah.

*Tabel 4.4.  
Arahan Presiden Beserta Indikator Kinerja dan Target Nasional yang Memerlukan Dukungan Daerah*

<b>NASIONAL</b>			<b>DAERAH</b>
<b>No</b>	<b>ARAHAN PRESIDEN DALAM RPJMN TAHUN n - n5</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERLU DUKUNGAN DAERAH</b>

Tabel 4.5.  
*Agenda Pembangunan Nasional yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Kota Bima*

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline n-1	Target n+4	Dukungan RPJMD Kota Bima
1					
A					
1.					
2					
3					

#### 4.2.3. Analisis Isu Starategis Provinsi NTB 2018-2023

Penjelasan mengenai analisis Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023, sebelum memasukan aspek politis dari kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

#### 4.2.4. Hasil Telaahan RPJPD Kota Bima

Menjelaskan hasil telaahan RPJMD yang disusun berdasarkan RPJPD terkait visi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan.

#### 4.2.5. Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Menjelaskan mengenai telaahan Kajian Lingkungan Hidup Startegis terhadap RPJMD untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, yang bertujuan mengidentifikasi pengaruh kebijakan, rencana dan program pembangunan Kota Bima terhadap berbagai aspek dan komponen lingkungan hidup untuk kemudian diintegrasikan ke dalam rancangan akhir dokumen RPJMD.

*Tabel 4.6  
Rekomendasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Hasil KLHS*

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional		-	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.		-	
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		-	
3.8.2.(a)	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		-	
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.		-	
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan		-	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
	perempuan.			
5.2.1*	perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		-	
5.2.2*	perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		-	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		-	
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.		-	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		-	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.		-	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.		-	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.		-	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.		-	
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		-	
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		-	
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		-	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		-	

4.2.6. Hasil Telaahan terhadap RTRW

Menjelaskan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, dimana Pengembangan ruang Kota Bima mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan selaras dengan RTRW Provinsi.

Tabel 4.7.

*Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bima*

No	Kebijakan	Startegi
1		

Tabel 4.8.

*Rencana Pusat Pelayanan dan Sistem Perkotaan Kota Bima*

Hirarki dan sistem kota-kota			
Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Pelayanan Kota	Sub Pusat Pelayanan Kota	Pusat Pelayanan Lingkungan
	•		

Tabel 4.9.

*Fungsi dan Kegiatan Utama Pelayanan di Kota Bima*

Fungsi Kawasan	Lokasi	Kegiatan Utama	Peran dan fungsi
	•		•
	-		•
			•
			•
			•
			•
			•

Fungsi Kawasan	Lokasi	Kegiatan Utama	Peran dan fungsi
			•

Tabel 4.10  
Arahan Pemanfaatan Struktur Ruang Kota Bima

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM						
A. Perwujudan Pusat Pelayanan						
B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah						

Tabel 4.11  
Arahan Pemanfaatan Pola Ruang Kota Bima

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1	2	3	4	5	6	7
ARAHAN PEMANFAATA RUANG/ INDIKASI PROGRAM						

#### 4.2.7. Hasil Telaahan Terhadap RPJMD Daerah Sekitarnya

Menjelaskan telaahan RPJMD daerah sekitar atau yang berdekatan terkait aspek-aspek penting yang ada dalam RPJMD daerah sekitar yang berpengaruh terhadap isu strategis pembangunan Kota Bima.

*Tabel 4.12*  
*Identifikasi Kebijakan RPJMD Daerah Tetangga yang Mempengaruhi*  
*Pencapaian Sasaran Strategis Daerah*

<b>No.</b>	<b>Daerah Lain</b>	<b>Periode RPJMD</b>	<b>Kebijakan Terkait</b>	<b>Keterangan</b>
1				
2				
3				
4				

#### 4.2.8. Analisis Isu Strategis Kota Bima

Menjelaskan analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan Kota Bima pada tiap urusan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

*Tabel 4.13.*  
*Isu Strategis Pembangunan Kota Bima pada tiap urusan*

<b>Urusan</b>	<b>Isu Strategis Urusan</b>
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
Pendidikan	
Kesehatan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
Sosial	
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
Tenaga Kerja	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pangan	
Pertanahan	
Lingkungan Hidup	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Perhubungan	
Komunikasi dan Informatika	
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	
Penanaman Modal	

<b>Urusan</b>	<b>Isu Strategis Urusan</b>
Kepemudaan dan Olah Raga	
Statistik	
Persandian	
Kebudayaan	
Perpustakaan	
Kearsipan	
<b>Urusan Pilihan</b>	
Kelautan dan Perikanan	
Pariwisata	
Pertanian	
Perdagangan	
Perindustrian	
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	
Pengawasan	
Perencanaan Pembangunan	
Keuangan	
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, maka berikut ditampilkan table matriks sinkronisasi isu-isu pembangunan global, nasional, provinsi dan Kota Bima.

*Tabel 4.14.  
Matriks sinkronisasi isu Strategis Pembangunan Global, Nasional,  
Provinsi NTB dan Kota Bima*

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019</b>	<b>ISU STRATEGIS PROVINSI NTB</b>	<b>ISU STRATEGIS KOTA BIMA</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>dst</b>				

## BAB V. VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Menyajikan penjelasan terhadap visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dengan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

### 5.1 Visi Pembangunan Kota Bima

Penjelasan perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan.

*Tabel 5.1  
Perumusan Penjelasan Visi*

<b>Visi</b>	<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
.....	..	...
	..	..
	..	..
	..	..
	..	..
	..	..
	..	..

### 1.2. Misi Pembangunan Kota Bima

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan stakeholders utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Misi diatas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai.

*Tabel 5.2  
Perumusan Penjelasan Misi*

<b>No</b>	<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Penjelasan Misi</b>

*Tabel 5.3  
Keselarasan Misi Pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan  
Kota Bima*

No	RPJMD Kota Bima Tahun n s/dn+4	RPJMD NTB Tahun n s/dn+4	RPJMN Tahun n s/d n+4
<b>MISI</b>			
1			
2			

### 5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima 2018-2023

Menjelaskan tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tabel 5.4  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun  $n$  s/d  $n+4$

**VISI :**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target				Kondisi Akhir	
						n-2	n-1		n	n+1	n+2		n+3
							Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	

Keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bima dengan Provinsi NTB serta arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional digambarkan dalam tabel berikut.

*Tabel 5.5*  
*Keselarasan Tujuan Pembangunan Kota Bima dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Arahannya Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024*

<b>RPJMD Kota Bima Tahun n s/d n+4</b>			<b>Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun n s/d n+4</b>	<b>ARAHAN PRESIDEN Tahun n s/d n+4</b>	<b>AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL Tahun n s/d n+4</b>
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>			

#### 5.4. Peta Proses Bisnis Sasaran RPJMD

Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan sasaran RPJMD. Penyusunan peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan daerah dan menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran organisasi secara lebih terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien

### BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan cara atau metode pendekatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima, yang merupakan bagian dari rumusan perencanaan komprehensif dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah.

#### 1.1. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi

Untuk menentukan strategi, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang

*Tabel 6.1.  
Analisa SWOT Bagi Perumusan Strategi Pembangunan*

MISI 1:			
TUJUAN 1:			
SASARAN 1.1.:			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN		MEMBANGUN KEKUATAN	
KELEMAHAN		MENGATASI KELEMAHAN	
PELUANG		MENANGKAP PELUANG	
ANCAMAN		MEREDUKSI ANCAMAN	
STRATEGI			

*Tabel 6.2.  
Strategi Pembangunan*

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Misi 1:			
Misi 2.:			
Misi 3:			



## 6.2. Arah Kebijakan

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Namun demikian pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Bima juga mengacu kepada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

*Tabel 6.4*  
*Arah Kebijakan Pembangunan*

No	Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
				n-1	n	n+1	n+2	n+3

*Tabel 6.5  
Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Bima*

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
<b>Misi No..</b>						

### 6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima. Selain output yang diharapkan, program pembangunan daerah juga tentunya memberikan dampak terhadap berbagai aspek dan komponen lingkungan hidup. Hal ini dianalisis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selanjutnya menjadi acuan dan terintegrasi kedalam RPJMD Kota Bima.

*Tabel 6.6.  
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif*

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
					2019		2020		2021		2022		2023		TARGE T	RP (000)	
			2017	2018	TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Misi 1:</b>																	
Tujuan 1.1.																	
Sasaran 1.1.1.																	
Program 1																	
Dst.																	

*Tabel 6.7  
Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah*

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
1					
2					
3					
N..					



BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJMD Tahun Berjalan terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

*Tabel 7.1  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah*

No	Uraian	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>					
5.1	<b>Belanja Operasi</b>					
5.1.01	Belanja Pegawai					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.05	Belanja Hibah					
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					
5.2	<b>Belanja Modal</b>					
5.2.01	Belanja Modal Tanah					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi					
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
5.3	<b>Belanja Tak Terduga</b>					
5.3.01	Belanja Tak Terduga					

*Tabel 7.2.  
Program Pembangunan Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif*

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PR OGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PR OGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050- 3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050- 3708 Tahun 2020)	SATU AN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		
					n		n+1		n+2		N+3		n+4				
					n-1	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TAR GET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%													
2.																	
3.Dst	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
Dinas Kesehatan	DINAS KESEHATAN																
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%													
2.																	
3.Dst	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Tabel 8.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bima

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			n-1		n	n+1	n+2	n+3	n+4	
			Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Angka Harapan Hidup									
2	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar									
3	Persentase peningkatan mutu pendidikan									
4	Pengeluaran Per Kapita									
5	Indeks Ketahanan Pangan									
6	Pertumbuhan PDRB									
7	Angka Kemiskinan									
8	Tingkat Pengangguran Terbuka									
9	Nilai SAKIP									
10	Skor LPPD									
11	Opini BPK									
12	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan									
13	Rata-rata skor IKM									
14	Persentase Kesesuaian Tata Ruang									
15	Indeks kualitas lingkungan hidup									
16	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik									
17	Indeks Ketahanan Daerah									

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			n-1		n	n+1	n+2	n+3	n+4	
			Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Persentase penurunan angka kriminalitas									
19	Persentase penurunan Angka Konflik Sosial									
20	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina									
21	Indeks kerukunan umat beragama									

Tabel 8.2  
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat  
Outcome Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1	<b>Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi</b>							
1.1.	Pertumbuhan ekonomi							
1.2.	Pengeluaran Per Kapita							
1.3.	PMKS yang tertangani							
1.4.	Angka pengangguran terbuka							
1.5.	Angka kriminalitas yang tertangani							
1.6.	Indeks kerukunan umat beragama							
2	<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>							
2.1.	<b>Pendidikan</b>							
2.1.1.	Angka melek huruf							
2.1.2.	Angka rata-rata lama sekolah							
2.1.3.	Angka Harapan lama Sekolah							
2.2.	<b>Kesehatan</b>							
2.2.1.	Angka Harapan Hidup							
2.3	<b>Fokus Seni Budaya</b>							
2.3.1.	Cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang lestari							
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>								
1	<b>Pendidikan</b>							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1.2	Angka partisipasi kasar							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan							
1.4	Angka Partisipasi Murni							
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A							
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B							
1.5	Angka partisipasi sekolah							
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A							
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B							
1.6	Angka Putus Sekolah:							
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI							
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs							
1.7	Angka Kelulusan:							
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI							
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs							
1.8	Angka Melanjutkan (AM):							
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs							
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA							
1.9.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik							
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar							
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar							
1.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah							
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup							
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup							
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup							
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup							
2.6	Rasio posyandu per satuan balita							
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk							
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk							
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan							
2.13	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>							
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan							
2.15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak							
2.16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk							
2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani							
2.189	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA							
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
3.1	Pekerjaan Umum:							
3.1.1	Persentase rumah tangga bersanitasi layak							
3.1.2	Persentase rumah tangga pengguna air bersih							
3.1.4	Persentase jaringan irigasi teknis							
3.1.5	Persentase panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik							
3.1.8	Persentase meningkatnya kelancaran saluran drainase							
3.1.9	Persentase panjang sungai yang tertangani							
3.1.10	Persentase cakupan Layanan air minum dan air limbah							
3.1.11	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap							
3.1.12	Persentase konektivitas jalan kota							
3.1.13	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik diluar kawasan kumuh							
3.1.14	Persentase panjang sungai yang berfungsi baik							
3.2	Penataan Ruang:							
3.2.1	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang							
3.2.2	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB							
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>							
4.1	Persentase peningkatan rumah layak huni							
4.2	Persentase KK yang memiliki rumah layak huni							
4.3	Persentase rumah tidak layak huni akibat bencana alam/sosial yang ditangani							
4.4	Persentase kawasan permukiman kumuh							
4.5	Persentase masyarakat yang terkena relokasi							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni							
4.6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan							
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>							
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)							
5.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota							
5.3	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)							
5.4	Persentase Penegakan PERDA							
<b>6</b>	<b>Sosial</b>							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial							
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar							
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya							
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial							
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap							
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun							
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)							
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan							
1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi							
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat							
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan							
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah							
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta							
2.4	Rasio KDRT							
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur							
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan							
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit							
<b>3</b>	<b>Pangan</b>							
3.1	Ketersediaan pangan utama							
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita							
	Ketersediaan energi							
	Ketersediaan protein							
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>							
4.1	Persentase asset tanah pemerintah yang bersertifikat							
4.2	Persentase Tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik							
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
5.1	Persentase Pelayanan Persampahan							
5.1.1.	<b>Persentase sampah yang tertangani</b>							
5.2	Porsentase Luas RTH Publik							
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk							
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran							
6.3	Rasio pasangan berakte nikah							
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	provinsi							
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK							
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)							
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran							
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
7.1	Cakupan sarana prasarana kelurahan							
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)							
8.2	Total Fertility Rate (TFR)							
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB							
8.4	Rata-rata jumlah anak per keluarga							
8.5	Ratio Akseptor KB							
8.6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49							
8.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)							
8.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun							
8.9	Rata-rata usia kawin pertama wanita							
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>							
9.1	Angka kecelakaan transportasi darat							
9.2	Persentase indeks pengendalian dan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pengamanan lalu lintas							
9.3	Cakupan pelayanan angkutan umum yang layak							
9.4	Persentase indeks kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor							
9.5	Persentase peningkatan pelayanan angkutan							
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
10.1	Persentase pemanfaatan layanan publik berbasis TIK							
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>							
11.1	Persentase koperasi aktif							
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif							
11.3	Persentase BPR/LKM aktif							
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil							
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)							
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)							
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja							
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>							
13.1	Persentase cabor yang meraih medali di tingkat propinsi dan nasional							
<b>14</b>	<b>Statistik</b>							
14.1	Tersedianya Data Statistik Sektoral							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>15</b>	<b>Persandian</b>							
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah							
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya							
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan							
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi							
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>							
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun							
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah							
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk							
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>							
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku							
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan							
<b>Layanan Urusan Pilihan</b>								
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>							
1.1	Kunjungan wisata							
1.2	Lama kunjungan Wisata							
1.3	PAD sektor pariwisata							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>							
2.1	Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan							
2.2.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani							
2.4.	Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan							
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>							
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan							
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal							
<b>6</b>	<b>Perindustrian</b>							
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin							
<b>7</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
8.1	Produksi perikanan							
8.1.1	Produksi Perikanan Tangkap							
8.1.2	Produksi Perikanan Budidaya							
8.2	Konsumsi ikan							
8.3	Jumlah produk Olahan yang dihasilkan							
<b>Penunjang Urusan</b>								
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
1.1	Persentase program Renja SKPD bidang pemerintahan dan sosial yang selaras dengan RKPD							
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA							
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang telah ditetapkan dengan PERKADA							
1.4	Persentase Program RKPD yang Selaras dengan RPJMD							
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan							
<b>3</b>	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>							
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural							
	Pim TK. II							
	Pim TK. III							
	Pim TK. IV							
<b>4</b>	<b>Penelitian dan pengembangan</b>							
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.							
<b>ASPEK DAYA SAING</b>								
	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan							
	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
	<b>Perhubungan</b>							
9.1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan							
9.2	Persentase Pengelolaan pelayanan jasa terminal							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		n-2	n-1	n	n+1	n+2	n+3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Penataan Ruang</b>							
3.2.3	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan							
3.2.4	Persentase Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan							
3.2.5	Persentase kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF							
4	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>							
4.1.	Rata-tata lama pelayanan perijinan							
5.	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
5.1.	Angka pengangguran terbuka							

*Tabel 8.3.*  
*Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Bima*

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN

Tabel 8.4.  
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal per Urusan

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja										
			n-1		n		n+1		n+2		n+3		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
<b>I</b>	<b>PENDIDIKAN</b>												
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)											
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan											
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD											
<b>II</b>	<b>KESEHATAN</b>												
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu \hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan											
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan											

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja										
			n-1		n		n+1		n+2		n+3		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan											
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan											
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan											
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan											
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan											
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan											
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan											

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja										
			n-1		n		n+1		n+2		n+3		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan											
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	CDR											
		CURRE RATE (KESEMBUHAN)											
		SUCCESSION RATE (KEBERHASILAN PENGOBATAN)											
12	Pelayanan kesehatan orang dengan terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan											
<b>III</b>	<b>SEKSI GIZI</b>												
1	Perbaikan Gizi Masyarakat	cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan dapat ASI Eksklusif											
		Presentasi balita underweight											
		Presentase balita stunting											
		presentase balita wasting											
		presentase Ibu Hamil anemia											
		Presentasi BBLR											

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja											
			n-1		n		n+1		n+2		n+3			
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
		Presentasi bayi usia < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif												
2	Pencegahan & penanggulangan Gizi Mikro (KVA, AGB, GAKY)	Presentase Ibu Hamil dapat tablet tambah darah minimal 90 tablet maksimal 270 tablet												
		Presentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan makanan tambahan												
		Presentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan												
		Presentase Remaja Putri mendapat Tablet tambah Darah												
		Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini												
		Presentase balita yang ditimbang berat badannya												
		Presentase Balita yang mempunyai buku KIA/KMS												

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja										
			n-1		n		n+1		n+2		n+3		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
		Presentase Balita ditimbang yang naik berat badannya											
		Presentase balita ditimbang yang tdk naik berat badannya 2 kali berturut-turut (2T)											
		Presentase balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul vitamin A											
		Presentase Ibu Nifas mendapat kapsul vitamin A											
		Presentase Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium											
		Presentase kasus balita gizi buruk yg mendapat perawatan											
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>												
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari											
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik											
<b>IV</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>												

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja										
			n-1		n		n+1		n+2		n+3		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni											
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi peyedidiaan rumah yang layak huni											
<b>V</b>	<b>TRANTIBUMLINMAS</b>												
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakanhukum Perda dan perkara											
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana											
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana											
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana											

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja										
			n-1		n		n+1		n+2		n+3		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasikorban kebakaran											
<b>VI</b>	<b>SOSIAL</b>												
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti											
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang Memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti											
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti											
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti											
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagikorban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial											
<b>VII</b>	<b>SUB-URUSAN BENCANA</b>												

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja										
			n-1		n		n+1		n+2		n+3		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Pelayanan Ketentramana dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh Pelayanan akibat dari penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota per Jumlah warga Negara yang dilakukan penegakkan Peraturan Daerah /Peraturan Walikota kali 100%											
2	pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana per seluruh penduduk di kawasna rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana kali 100%											
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap adap bencana	Jumlah aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan tambah jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops tambah Jumlah Warga Negara dikawasan rawan bencana kali 100%											

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			n-1		n		n+1		n+2		n+3	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB tambah Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana tambah Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana tambah Jumlah Korban yang berhasil dicari ,ditolong dan dievakuasi per Jumlah seluruh penetapan status KLB tambah Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana tambah Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana tambah perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana kali 100%										

## BAB IX. PENUTUP

Berisikan uraian penutup dokumen yang kemudian ditandatangani oleh kepala daerah.



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 24 TAHUN 2021  
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
 DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 DAERAH

PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD yang dalam penyusunannya dilakukan penyusunan Cascading untuk masing-masing perangkat Daerah.

Contoh keterkaitan antara RPJMD Kota Bima dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dapat dilihat pada gambar berikut:



## POHON KINERJA (CASCADING)

Cascading dalam bahasa Indonesia bermakna penurunan adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Disamping dilakukan penurunan juga dilakukan penyelarasan (*Alignment*) adalah proses penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara horizontal antar unit/pegawai yang selevel.

### A. Sasaran Strategis Cascading

Sasaran Strategis *Cascading* adalah Sasaran Strategis yang diturunkan atau dijabarkan dari level unit yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Perumusan SS *cascading* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. *Cascading* Sasaran Strategis dapat dilakukan secara *direct*
2. Sasaran Strategis *direct cascading* merupakan Sasaran Strategis yang memiliki kalimat, deskripsi dan ruang lingkup yang sama secara keseluruhan. *Cascading* secara *direct* hanya dilakukan ke satu unit/pegawai di bawahnya. Misalnya: SS “Pengendalian Mutu dan Penegakan Hukum yang Efektif” di-*cascade* dengan nama SS “Pengendalian Mutu dan Penegakan Hukum yang Efektif”.

*Contoh Direct Cascading pada Dinas Lingkungan Hidup*



3. Sasaran strategis *indirect cascading* merupakan Sasaran Strategis yang memiliki deskripsi atau ruang lingkup yang lebih sempit. Kalimat Sasaran Strategis dapat sama atau berbeda, disesuaikan dengan ruang lingkungannya. *Cascading* secara *indirect* dilakukan ke dua

unit/pegawai atau lebih di bawahnya. Misalnya: SS “Pengendalian Mutu dan Penegakan Hukum yang Efektif” di-*cascade* dengan nama SS “Pengendalian Mutu yang Efektif”.

Contoh indirect cascading seperti ditunjukkan dalam gambar berikut yang merupakan Tujuan Strategis Inspektorat Kota Bima



4. Pada unit pemilik peta strategi, Sasaran Strategis yang di-*cascade* ke unit/pegawai lebih rendah harus diletakkan pada perspektif yang sama atau lebih tinggi dari perspektif dimana Sasaran Strategis tersebut berasal (unit yang lebih tinggi) sebagaimana terlihat dalam gambar diatas gambar di bawah ini.

#### B. Indikator Kinerja Utama “Cascading”

Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan proses penjabaran dan penyelarasan IKU dan target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Proses *cascading* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu *direct* dan *indirect*.

##### Metode Direct

Kalimat dan definisi IKU pada unit/pegawai yang lebih tinggi diadopsi secara penuh oleh unit/pegawai yang lebih rendah. IKU *cascading* menggunakan metode *direct* harus memiliki *output* yang identik/sama pada tiap level.

Proses cascading ini dilakukan kepada:

1. Satu unit/pegawai pada level yang lebih rendah; atau.
2. Dua atau lebih unit/pegawai pada level yang lebih rendah karena sifat pekerjaan yang memerlukan *teamwork* dan tanggung jawab

pencahayaan target bersifat tanggung renteng serta tidak didistribusikan.

Manual IKU unit/pegawai yang lebih tinggi dan unit/pegawai yang lebih rendah harus memiliki kesamaan pada komponen:

1. nama IKU, target, satuan pengukuran dan aspek target;
2. definisi dan formula perhitungan;
3. polarisasi;
4. konsolidasi periode; dan
5. periode pelaporan.

Contoh proses cascade pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dapat dilihat pada gambar berikut



Setelah melakukan Cascade Indikator Kinerja Utama maka akan dilakukan penjabaran dan Indikator Sasaran Strategis (IKU) ke dalam Program, Kegiatan serta anggaran pada tahun berkenaan seperti pada gambar hasil cascade sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dibawah ini.

**CASCADING RENSTRA OPD 2020**  
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

SABARAN 1	PROGRAM	KEGIATAN	ANUSANSAN
Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara Kabupaten T. S. Kota Tegal 40	A. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengolahan Persampahan	Rp. 220.000.000,00
		2. Peningkatan Optimalisasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Rp. 3.500.000.000,00
	3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 800.000.000,00	
	B. Pengendalian Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Hidup	1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 100.000.000,00
2. Koordinasi Pengelolaan Perkebun/keperikanan		Rp. 40.000.000,00	
3. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan LH		Rp. 50.000.000,00	
Indikator 3 Ketersediaan Informasi	A. Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sida Dan LH	1. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Rp. 20.000.000,00
	B. Peningkatan Pengendalian Polusi	1. Pengujian Emisipolusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Rp. 20.000.000,00
		2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 20.000.000,00

**CASCADING RENSTRA OPD 2020**  
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

SABARAN 2	PROGRAM	KEGIATAN	ANUSANSAN
Meningkatnya Kualitas Tumbuhan Vegetasi Kabupaten T. S. Loka MTH Publik	A. Peningkatan Area Pemukiman	1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemukiman	Rp. 2.000.000.000,00
	B. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	1. Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Pertamanan Koordinasi Pengelolaan Perkebun/keperikanan	Rp. 4.000.000.000,00
Indikator 3 T. Loka Kawasan Industri	A. Perlindungan Dan Konservasi Sida	1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air	Rp. 100.000.000,00
		2. Program Kampung Iklim	Rp. 200.000.000,00
		3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Rp. 100.000.000,00

Metode Indirect

Kalimat dan definisi IKU dari unit/pegawai yang lebih tinggi diadopsi atau dikembangkan oleh unit/pegawai yang lebih rendah sesuai tugas, fungsi dan ruang lingkup unit/pegawai yang bersangkutan.

Target IKU diturunkan (dibagi habis) kepada dua atau lebih unit/pegawai di level yang lebih rendah sesuai dengan proporsi masing-masing unit/pegawai (target didistribusikan).

Ketentuan mengenai penamaan IKU adalah:

1. Menggunakan kalimat yang identik dengan kalimat IKU pada level yang lebih tinggi serta target dari unit/pegawai yang lebih tinggi

didistribusikan kepada level yang lebih rendah dan tanggung jawab pencapaian target bersifat tidak tanggung renteng; atau

2. Kalimat berbeda sesuai ruang lingkup tanggung jawab unit/pegawai yang lebih rendah;
3. Apabila ruang lingkup hanya dibedakan berdasarkan wilayah geografis maka penamaan IKU menggunakan kalimat yang identik dengan kalimat pada level yang lebih tinggi.

Manual IKU unit/pegawai yang lebih tinggi dan unit/pegawai yang lebih rendah harus memiliki kesamaan pada komponen:

1. satuan pengukuran;
2. aspek target;
3. polarisasi;
4. konsolidasi periode; dan
5. periode pelaporan.

Dari Kedua Methode ini dapat digunakan secara kombinasi pada penyusunan Cascading perencanaan strategis tingkat Pemerintah Kota Bima maupun pada perangkat Daerah yang dituangkan dalam bentuk matriks seperti dibawah ini.

Tabel 1.4: Cascading OPD

MISI RPJMD	SASARAN KOTA	IKU KOTA	TARGET	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA (IKU SKPD)	TARGET	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Keterangan Cara Pengisian :

- a. Kolom 1 : Diisi dengan Misi yang Sesuai dengan RPJMD
- b. Kolom 2 : Diisi dengan Sasaran yang Sesuai dengan Tupoksi Organisasi Kota Bima
- c. Kolom 3 : Diisi dengan Indikator Sasaran RPJMD yang Sesuai dengan Tupoksi Organisasi Kota Bima
- d. Kolom 4 : Diisi dengan Target yang ada dalam RPJMD
- e. Kolom 5 : Diisi dengan Tujuan yang sesuai dengan Sasaran Strategis RPJMD
- f. Kolom 6 : Diisi dengan Indikator Tujuan yang sesuai dengan Sasaran Strategis RPJMD
- g. Kolom 7 : Diisi dengan Target yang sesuai dengan Target Organisasi yang ada di RPJMD
- h. Kolom 8 : Diisi dengan Sasaran Strategis OPD
- i. Kolom 9 : Diisi dengan Indikator Kinerja OPD
- j. Kolom 10 : Diisi dengan Target dari indicator Sasaran
- k. Kolom 11 : Diisi dengan Program yang mendukung capaian tiap Indikator
- l. Kolom 12 : Diisi dengan Sasaran Program yang Dirumuskan OPD
- m. Kolom 13 : Diisi dengan Indikator Program yang Dirumuskan OPD
- n. Kolom 14 : Diisi dengan Target yang Dirumuskan OPD
- o. Kolom 15 : Diisi dengan Kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Program
- p. Kolom 16 : Diisi dengan Sasaran Kegiatan yang Dirumuskan OPD
- q. Kolom 17 : Diisi dengan Indikator Kegiatan yang Dirumuskan OPD
- r. Kolom 18 : Diisi dengan Target yang Dirumuskan OPD
- s. Kolom 19 : Diisi dengan Jumlah Anggaran yang dibutuhkan untuk Pencapaian Indikator Kegiatan

Penulisan dokumen rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah \*).....  
Kota Bima

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20....  
Kepala Perangkat Daerah .....

Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat  
 Daerah\* ..... Kota Bima

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Anggaran			Realisasi dari Tahun ke			Rata-rata pertumbuhan	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
(1)																		

\*)diisikan dengan nama Perangkat Daerah

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel 2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel 2.2 interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah\*)  
Kota Bima Tahun .....s/d Tahun.....

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					

### 4.2 Penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada Bagian ini dikemukakan penjelasan terkait definisi operasional dari Indikator tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran berikut formulasi perhitungan serta tata cara penetapan target. Penetapan target yang baik dapat dilakukan dengan cara:

1. Benchmarking antar waktu:  
Perbandingan pencapaian kinerja di masa lalu (time series)
2. Benchmarking antar kegiatan /SKPD:  
Perbandingan dng kegiatan yg sama dalam program
3. Nilai target ideal yg minimal harus diwujudkan;  
Seperti target SPM yang dilakukan dengan forecasting technique (teknik peramalan) seperti ditunjukkan oleh gambar dibawah ini



**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1.

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	4. Strategi 2.1 5. Strategi 2.2 6. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst ....			

Tabel 5.1. dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1.

Tabel 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah .....\*)  
Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																
Tujuan 2																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																

\*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.

## BAB VII PENUTUP



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA  
BIMA NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERECANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH

## PENYAJIAN DOKUMEN RKPД

Penulisan dan penyajian dokumen RKPД baik rancangan awal maupun rancangan akhir RKPД disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RKPД sehingga substansi dan struktur secara keseluruhan dokumen dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1. Latar Belakang

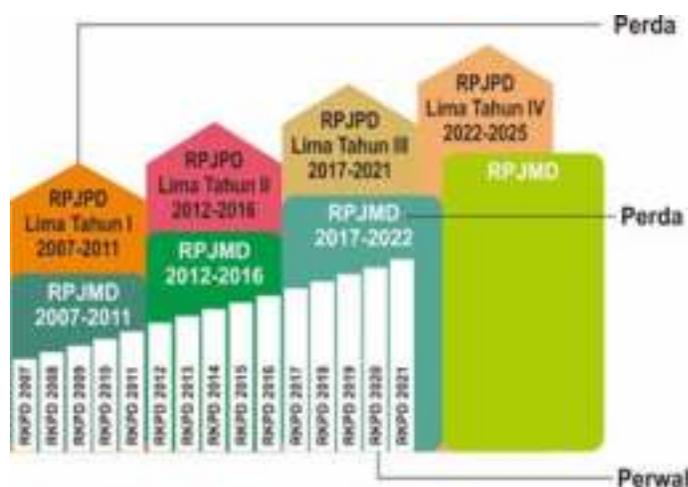
Meliputi penjelasan mengenai pengertian ringkas tentang RKPД, proses penyusunan RKPД, alasan mengapa RKPД ini disusun dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sub bab ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RKPД pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

#### 1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPД dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Pada sub bab ini digambarkan mengenai hubungan RKPД dengan dokumen lain yang relevan seperti RPJPD serta RPJMD.



Gambar 1.1. Hubungan Antara RPJPD, dan RKPД

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Pada sub bab ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD dan tujuan penyusunan dokumen RKPD

#### 1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

Pada sub bab ini menguraikan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

### BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Gambaran umum kondisi daerah yang disajikan adalah data dan informasi yang selaras dan mendukung dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

#### 2.1. Kondisi Umum Daerah

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1. Aspek Geografi

#### A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 1. Luas dan Batasan Wilayah Administrasi

Pada sub bab ini dijelaskan Batasan administrasi, Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan, serta luasan wilayah kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Bima.

*Tabel 2.1.  
Luas Wilayah Kota Bima*

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1			
2			
3			
4			
5			
n			

2. Letak dan Kondisi Geografis

Bagian ini menjelaskan letak atau posisi geografis serta daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bima

3. Topografi

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi Topografi yang terdiri dari Ketinggian dan Kelerengan yang ada di Kota Bima, dengan menampilkan tabel-tabel sebagai mana terlihat di bawah ini.

*Tabel 2.2.*

*Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut*

Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut	Luas Tanah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kota Bima (%)
0 - 25		
25 - 50		
> 50		
Jumlah		

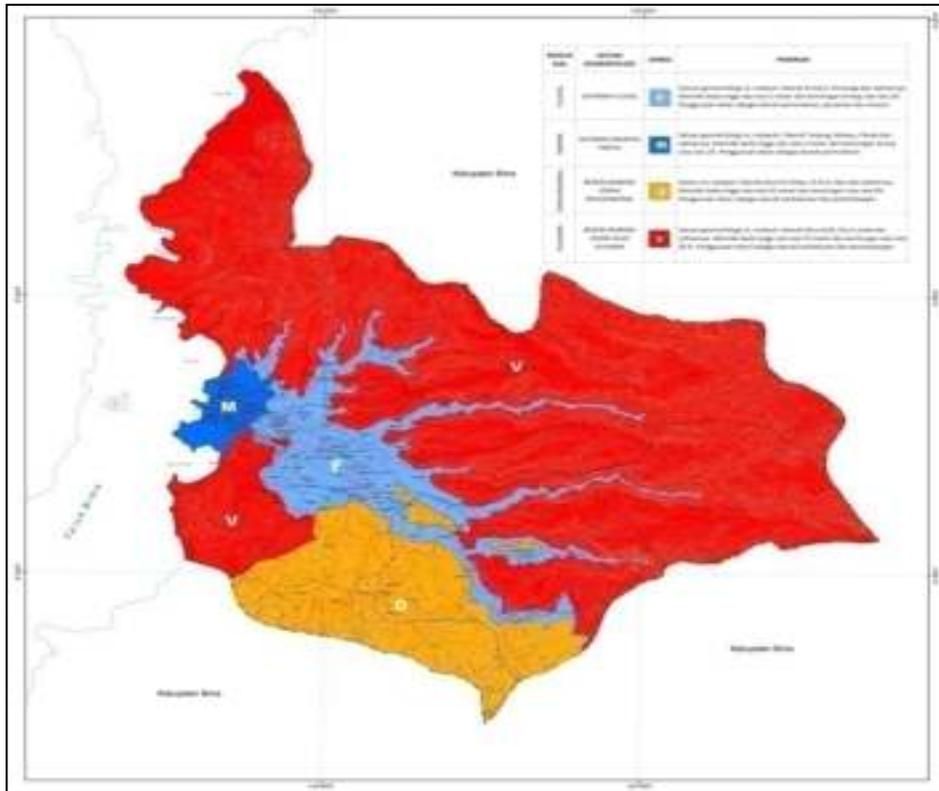
*Tabel 2.3.*

*Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima*

No	Kecamatan	Datar (0 - 2°)	Bergelombang (2 - 15°)	Curam (15 - 40°)	Sangat Curam (> 40°)
1	Rasanae Barat				
2	Mpunda				
3	Rasanae Timur				
4	Raba				
5	Asakota				
Jumlah					

4. Geologi

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi geologi baik secara geomorfologi, morfometri, dan secara morfogenesis di Kota Bima. Dengan menampilkan jenis peta Geologi Kota Bima.



Gambar 2.1. Geomorfologi Kota Bima

5. Hidrologi

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi Hidrologi yang terdiri dari Kondisi Sungai, serta Kondisi Mata Air yang ada di Kota Bima.

Tabel 2.4.  
Sungai di Kota Bima

	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
				Hulu	Hilir
1	Sungai Lampe				
2	Sungai Dodu				
3	Sungai Nungga				
4	Sungai Kendo				
5	Sungai Ntobo				
6	Sungai Jatiwangi				
7	Sungai Romo				

6. Klimatologi

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi klimatologi di Kota Bima, dengan menampilkan tabel-tabel sebagai mana terlihat di bawah ini

*Tabel 2.5  
Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari*

Bulan	Suhu Udara (°C)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari				
Pebruari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
Nopvember				
Desember				
Rata-Rata				

*Tabel 2.6  
Keadaan Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kota Bima*

Bulan	Kecepatan Angin	Tekanan Udara (mb)
1. Januari		
2. Pebruari		
3. Maret		
4. April		
5. Mei		
6. Juni		
7. Juli		
8. Agustus		
9. September		
10. Oktober		
11. November		
12. Desember		
Rata-Rata		

7. Penggunaan Lahan

Menjelaskan mengenai jenis penggunaan lahan berdasarkan status peruntukan lahan dan luasan dari tiap-tipa penggunaan lahan yang ada di Kota Bima.

*Tabel 2.7*  
*Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Peruntukan Lahan*

Jenis Penggunaan Lahan	Satuan	Tahun				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Perumahan	Ha					
Jasa	Ha					
Perusahaan	Ha					
Industri	Ha					
Pertanian	Ha					
Non Produktif	Ha					
Lain-lain	Ha					
<b>Jumlah</b>	<b>Ha</b>					

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap Potensi pengembangan wilayah Kota Bima dalam pembahasannya mengacu pada arahan rencana penataan ruang Wilayah Kota Bima yang meliputi:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
2. Perwujudan Sistem Transportasi
3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

B. Wilayah Rawan Bencana.

Bagian sub bab ini menjelaskan kondisi, lokasi, dan jenis kebencanaan yang ada di Kota Bima, serta pengembangan ruang evakuasi bencana berdasarkan jenis bencana, serta menampilkan jenis peta rawan bencana di Kota Bima

1. Rawan bencana banjir
2. Rawan bencana gelombang pasang/tsunami
3. Rawan bencana gempa bumi
4. Rawan bencana Kebakaran

*Tabel 2.8*  
*Jumlah Kejadian Bencana*

No.	Jenis Bencana	n-3	n-2	n-1
1	Banjir			
2	Gelombang Pasang/tsunami			
3	Gempa Bumi			
4	Kebakaran			

### 2.1.1.2. Aspek Demografi

Menguraikan Aspek kependudukan yang menjadi elemen dasar berkaitan dengan wilayah, serta Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

#### A. Struktur Penduduk

##### 1. Jumlah Penduduk

Bagian Sub bab ini menjelaskan gambaran terhadap kondisi demografis Yang terdiri dari jumlah penduduk, Kepadatan dan Persebaran penduduk, pertumbuhan penduduk, dan struktur penduduk menurut jenis kelamin.

*Tabel 2.9.  
Jumlah Penduduk Kota Bima*

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Rasanae Barat					
2	Mpunda					
3	Rasanae Timur					
4	Raba					
5	Asakota					
Jumlah						

*Tabel 2.10  
Kepadatan Penduduk Perkecamatan*

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Rasanae Barat					
2	Mpunda					
3	Rasanae Timur					
4	Raba					
5	Asakota					
Jumlah						

*Tabel 2.11  
Laju PertumbuhanPenduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%					

*Tabel 2.12*  
*Perkembangan Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin*

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2015				
2	2016				
3	2017				
4	2018				
5	2019				

B. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pada bagian ini menjelaskan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur yang menggambarkan jumlah penduduk usia produktif, serta dominasi-dominasi penduduk pada usia tertentu

C. Struktur Menurut Pendidikan

Menjelaskan jumlah penduduk Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, serta menggambarkan jumlah penduduk yang mendominasi pada jenjang pendidikan tertentu.

*Tabel 2.13*  
*Jumlah Penduduk Yang Mencapai Jenjang Pendidikan*

No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Tidak/Blm Sekolah	Jiwa					
2	Belum Tamat SD/Sederajat	Jiwa					
3	Tamat SD/Sederajat	Jiwa					
4	SLTP/Sederajat	Jiwa					
5	SLTA/Sederajat	Jiwa					
6	Diploma I/II	Jiwa					
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	Jiwa					
8	Diploma IV/Strata I	Jiwa					
9	Strata-II	Jiwa					
10	Strata-III	Jiwa					

C. Penduduk Menurut Agama

Menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan kepercayaan yang dianut, baik islam. Kristen, Katholik, Hindu, Budha, atau yang lainnya, hal ini terkait dengan kesediaan sara dan prasarana keagamaan yang tersedia. Dan menggambarkan kondisi mayoritas penduduk dengan agama yang di anutnya.

*Tabel 2.14*  
*Jumlah Pemeluk Agama DI Kota Bima*

No.	Uraian	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Islam	Jiwa					
2	Kristen	Jiwa					

3	Katholik	Jiwa					
4	Hindu	Jiwa					
5	Budha	Jiwa					
6	Konghuchu	Jiwa					
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Jiwa					

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Tabel 2.15

*Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha ADHK*

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi					
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi					
L	Real Estate					
M,N	Jasa Perusahaan					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan					
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
S,T,U	Jasa Lainnya					
<b>PDRB Kota Bima ADHK</b>						
<b>PDRB Provinsi NTB ADHK (Miliar rupiah)</b>						

*Tabel 2.16*  
*Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha ADHB*

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi					
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi					
L	Real Estate					
M,N	Jasa Perusahaan					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan					
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
S,T,U	Jasa Lainnya					
<b>PDRB Kota Bima ADHB</b>						
<b>PDRB Provinsi NTB ADHB (Miliar rupiah)</b>						

*Tabel 2.17*  
*Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)*

No.	Lapangan Usaha	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi					
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi					
L	Real Estate					
M,N	Jasa Perusahaan					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan					
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
R,S,T,U	Jasa Lainnya					
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>						

*Tabel 2.18*  
*Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK*

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-rata pertumbuhan PDRB per Tahun (%)
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan						
B	Pertambangan dan Penggalian						
C	Industri Pengolahan						
D	Pengadaan Listrik dan Gas						
E	Pengadaan Air, Pengelompokan Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
F	Konstruksi						
	Perdagangan Besar dan						
H	Transportasi dan						
I	Penyediaan Akomodasi dan						
J	Informasi dan Komunikasi						
K	Jasa Keuangan dan Asuransi						
L	Real Estate						
M,N	Jasa Perusahaan						
	Administrasi Pemerintahan,						
P	Jasa Pendidikan						
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan						
R,S	Jasa Lainnya						
<b>Pertumbuhan PDRB Kota Bima</b>							
<b>Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB</b>							

## 2. Laju Inflasi

Pada bagian ini menjelaskan mengenai nilai inflasi berdasarkan indikator nilai barang dan jasa secara umum, yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

*Tabel 2.19*  
*Inflasi Kota Bima Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)*

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Bahan Makanan							
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok							
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar							
4	Sandang							
5	Kesehatan							
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga							
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan							
<b>Inflasi Kota Bima</b>								
<b>Inflasi Nasional</b>								

### 3. PDRB Perkapita

Menjelaska indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

*Tabel 2.20*  
*PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB*

<b>Uraian</b>	<b>n-5</b>	<b>n-4</b>	<b>n-3</b>	<b>n-2</b>	<b>n-1</b>
Nilai PDRB (Juta Rp)					
Jumlah Penduduk (jiwa)					
<b>PDRB perkapita (Rupiah/jiwa)</b>					

### 4. Indeks Gini

Menjelaskan identifikasi menggunakan Indeks Gini terhadap Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah

### 5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Menjelaskan Indikator lain yang dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yang fokus menilai ketimpangan berdasarkan kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut, maka distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

### 6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Menjelaskan Indikator yang biasa digunakan untuk melihat ketimpangan wilayah adalah Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson Kota Bima didasarkan pada data PDRB per kapita kecamatan dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan.

*Tabel 2.21*  
*PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Bima*

No	Kecamatan	Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (000 Rp)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Rasanae Barat					
2	Mpunda					
3	Rasanae Timur					
4	Raba					
5	Asakota					
Jumlah						

7. Porsentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

*Tabel 2.22*  
*Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Kota Bima</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah					
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa					
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)					
<b>Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan</b>	<b>(%)</b>					
<b>Provinsi NTB</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah					
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa					
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)					
<b>Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan</b>	<b>(%)</b>					

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.

*Tabel 2.23*  
*Indeks Pembangunan Manusia*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
Angka Harapan Hidup	Tahun						
Harapan Lama Sekolah	Tahun						

Rata-rata Lama Sekolah	Tahun						
Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rp						
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>							

*Tabel 2.24  
Perbandingan Kondisi IPM*

Indikator IPM	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	
Kota Bima						
Provinsi NTB						
Indonesia						

#### 9. Angka Melek Huruf

Menjelaskan Angka Melek Huruf yang merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis

*Tabel 2.25  
Angka Melek Huruf*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Angka Melek Huruf	Persen						

#### 10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus,

*Tabel 2.26  
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Jenjang Pendidikan*

No	Indikator	Satuan	n-7	n-6	n-5
1.	SD/MI	Tahun			
2.	SMP/MTs	Tahun			
3.	SMA/MA/SMK	Tahun			

11. Angka Usia Harapan Hidup

Menjelaskan usia harapan hidup untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

12. Persentase Balita Gizi Buruk

Menjelaskan mengenai Persentase gizi buruk yang merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang.

*Tabel 2.27  
Persentase Balita Gizi Buruk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Jumlah balita gizi buruk	Anak						
2.	Jumlah balita	Anak						
3.	<b>Persentase balita gizi buruk</b>	<b>Persen</b>						

13. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi kurang berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi kurang di suatu daerah

*Tabel 2.28  
Prevalensi Balita Gizi Kurang*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Banyaknya balita gizi kurang	Anak						
2.	Jumlah balita	Anak						
3.	<b>Prevalensi balita gizi kurang</b>	<b>Persen</b>						

14. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan Siaga Aktif adalah kelurahan yang penduduknya dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar, dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan survailans berbasis masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

*Tabel 2.29*  
*Cakupan Kelurahan Siaga Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kelurahan siaga aktif	kelurahan					
2.	Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk	kelurahan					
3.	<b>Cakupan kelurahan siaga aktif</b>	<b>Persen</b>					

15. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Menerangkan Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka partisipasi angkatan kerja.

*Tabel 2.30*  
*Angka Partisipasi Angkatan Kerja*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas (yang bekerja)	Jiwa						
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Jiwa						
3.	<b>Angka Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>%</b>						

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selain angka partisipasi angkatan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) juga dapat dihitung dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja menggambarkan persentase angkatan kerja dari keseluruhan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas.

*Tabel 2.31*  
*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Angkatan Kerja 15 thn ke atas	Jiwa						
2.	Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	Jiwa						
3.	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>%</b>						

17. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menjelaskan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan

angkatan kerja, dimana pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja

*Tabel 2.32  
Tingkat Pengangguran Terbuka*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah pengangguran terbuka	Orang						
2.	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang						
3.	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%						

#### 18. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja.

*Tabel 2.33  
Rasio Penduduk yang Bekerja*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Penduduk yang Bekerja	Jiwa						
2.	Angkatan Kerja	Jiwa						
3.	<b>Rasio penduduk yang Bekerja</b>							

#### 19. Pertumbuhan PDRB Pertenaga Kerja

Menjelaskan Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja yang merupakan besar pertumbuhan PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menggambarkan semakin efektif tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja.

*Tabel 2.34*  
*Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Menurut BPS*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	PDRB ADHB	Juta rupiah						
2.	Jumlah tenaga kerja	Jiwa						
3.	<b>PDRB per tenaga kerja</b>	<b>Juta rupiah/jiwa</b>						

*Tabel 2.35*  
*Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Menurut Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan.*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	PDRB ADHB	Juta rupiah						
2.	Jumlah tenaga kerja	Jiwa						
3.	<b>PDRB per tenaga kerja</b>	<b>Juta rupiah/jiwa</b>						

20. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas adalah indikator yang membandingkan jumlah total kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, rasio ini akan menggambarkan besar kesempatan kerja bagi penduduk usia 15 tahun ke atas.

*Tabel 2.36*  
*Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Kesempatan Kerja	Orang						
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Orang						
3.	<b>Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas</b>	<b>%</b>						

21. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya

Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

*Tabel 2.37*  
*Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat*

No.	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat					
2.	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat					

22. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan  
 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan besaran pendapatan daerah yang dapat digali dari dalam wilayah sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

*Tabel 2.38*  
*Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Juta Rupiah						
2.	Total Pendapatan Daerah	Juta Rupiah						
3.	Persentase PAD	%						

23. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  
 Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat juga termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Pola Pangan Harian (PPH) menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam analisis kesejahteraan masyarakat. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal 100.

24. Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan berfungsi untuk memastikan pada kabupaten/kota tertentu setiap tahunnya agar mempunyai inventarisasi cadangan pangan sebesar 100 ton bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Indikator penguatan cadangan pangan mendorong setiap wilayah untuk dapat mencapai besaran cadangan pangan minimal

Tabel 2.39  
Persentase Cadangan Pangan Per 100 Ton

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Jumlah cadangan pangan	Ton					
<b>Persentase cadangan pangan</b>	<b>%</b>					

25. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

Tabel 2.40  
Penanganan Daerah Rawan Pangan

No.	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan	Daerah					
2	Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku	Daerah					
3	<b>Persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku</b>	<b>%</b>					

26. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB ADHB

menggambarkan posisi sektor pertanian dan perkebunan dalam struktur perekonomian wilayah.

*Tabel 2.41*  
*Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor pertanian dan perkebunan	Juta Rupiah						
PDRB Kota Bma	Juta Rupiah						
<b>Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan</b>	<b>%</b>						

27. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB menggambarkan besaran yang disumbangkan oleh sektor tanaman pangan ke dalam sektor pertanian dan perkebunan secara umum.

*Tabel 2.42*  
*Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor pertanian (palawija)	Juta Rupiah						
PDRB sektor pertanian dan perkebunan	Juta Rupiah						
<b>Kontribusi sektor pertanian (palawija)</b>	<b>%</b>						

28. Produksi Sektor Pertanian

produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di suatu daerah sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

29. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor pariwisata dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam PDRB, sektor pariwisata diwakili dalam lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

*Tabel 2.43*  
*Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Juta Rupiah						
PDRB ADHB Kota Bima	Juta Rupiah						
<b>Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum</b>	%						

30. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perikanan dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam struktur PDRB, sektor perikanan termasuk dalam lapangan usaha A, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

*Tabel 2.44*  
*Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor perikanan	Juta Rupiah						
PDRB ADHB Kota Bima	Juta Rupiah						
<b>Kontribusi sektor perikanan</b>	%						

31. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian wilayah.

*Tabel 2.45*  
*Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB*

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Juta rupiah						

PDRB ADHB Daerah	Juta rupiah						
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%						

### 32. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah.

Tabel 2.46  
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
PDRB sektor industri pengolahan	Juta rupiah						
PDRB ADHB Daerah	Juta rupiah						
<b>Kontribusi sektor industri pengolahan</b>	<b>%</b>						

### 33. Pertumbuhan Industri

Menjelaskan jumlah unit industry yang ada pada suatu daerah yang menggambarkan kondisi pertumbuhan sektor industry.

Tabel 2.47  
Pertumbuhan Industri Kecil

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Unit usaha industri kecil	Unit					
<b>Pertumbuhan</b>	<b>%</b>					

#### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

##### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

###### A. Pendidikan

###### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PUD)

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang menjalani pra pendidikan dasar, seperti sekolah di TK.

*Tabel 2.48*  
*Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak	Jiwa						
2.	Jumlah anak usia 4 - 6 tahun	Jiwa						
3.	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persen</b>						

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing- masing jenjang pendidikan.

3. Angka Pendidikan Yang di Tamatkan

Merupakan suatu indikator yang menghitung persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga nantinya dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu

*Tabel 2.49*  
*Angka Pendidikan yang Ditamatkan*

No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Tidak/Belum Sekolah	Persen						
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	Persen						
3.	Tamat SD/Sederajat	Persen						
4.	SMP/Sederajat	Persen						
5.	SMA/Sederajat	Persen						
6.	Diploma I/II	Persen						
7.	Diploma III/Akademi/Sarjana Muda	Persen						
8.	Diploma IV/Strata I	Persen						
9.	Strata II	Persen						

10.	Strata III	Persen						
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu.

5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

6. Angka Putus Sekolah

Menghitung perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan.

*Tabel 2.50  
Angka Putus Sekolah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	SD/MI	Persen						
2.	SMP/MTs	Persen						
3.	SMA/MA/SMK	Persen						

7. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut.

*Tabel 2.51  
Angka Kelulusan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	SD/MI	Persen						
2.	SMP/MTs	Persen						
3.	SMA/MA/SMK	Persen						

8. Angka Melanjutkan

menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

*Tabel 2.52  
Angka Melanjutkan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen						
2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Persen						

9. Fasilitas Pendidikan

Menjelaskan Jumlah sekolah atau unit bangunan sekolah dalam kondisi baik dengan melakukan berperbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan.

a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan Baik

Menjelaskan Jumlah sekolah atau unit bangunan sekolah berdasarkan tingkat SD/MI dalam kondisi baik pada suatu daerah.

*Tabel 2.53  
Ruang Kelas SD/MI dengan Kondisi Baik*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah SD/MI Kondisi Baik	Unit					
2	Jumlah Seluruh SD/MI	Unit					
3	Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik	Unit					

b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Menjelaskan Jumlah sekolah atau unit bangunan sekolah berdasarkan tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik pada suatu daerah.

*Tabel 2.54*  
*Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA dengan Kondisi Baik*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Ruang Kelas SMP/MTs</b>							
1	Jumlah SMP/MTs Kondisi Baik	Unit					
2	Jumlah SMP/MTs	Unit					
3	Persentase SMP/MTs Kondisi Baik	Persen					
<b>Ruang Kelas SMA/SMK/MA</b>							
1	Jumlah SMA/SMK/MA Kondisi Baik	Unit					
2	Jumlah SMA/SMK/MA	Unit					
3	Persentase SMA/SMK/MA kondisi baik	Persen					

10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Menjelaskan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah dalam setiap 10.000 penduduk. Penghitungan rasio ini menggunakan perbandingan jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun.

*Tabel 2.55*  
*Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit						
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Jiwa						
3.	<b>Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar</b>							

11. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah

Menjelaskan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini perhitungannya melibatkan angka jumlah sekolah SMA/SMK/MA dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

*Tabel 2.56*  
*Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SMA/SMK/MA	Unit						
2.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Jiwa						

3.	Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA	Unit/10.000 jiwa						
----	---------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Pada perhitungan ini, yang dihitung adalah jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SMP/MTs, baik swasta maupun PNS.

13. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada level SMA/SMK/MA. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah murid yang ideal untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya

*Tabel 2.57  
Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru SMA/SMK/MA	Orang						
2.	Jumlah murid SMA/SMK/MA	Orang						
3.	<b>Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah</b>							

14. Rasio Guru/Murid PerKelas Rata-Rata Sekolah Dasar

Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan dasar yang dimaksud adalah SD/MI.

*Tabel 2.58  
Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah guru SD per kelas	Orang					
2.	Jumlah murid SD	Orang					
3.	<b>Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar</b>						

15. Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-Rata Sekolah Menengah  
Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan menengah yang dimaksud adalah SMP/MTs,

*Tabel 2.59*  
*Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah guru SMP per kelas	Orang					
2.	Jumlah murid pendidikan SMP	Orang					
3.	<b>Rasio guru/murid per kelas rata-rata</b>						

16. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar  
Perbandingan antara banyaknya lulusan siswa SD dengan banyaknya penduduk yang berusia 12 tahun (usia rata-rata lulus SD). Indikator ini digunakan untuk melihat banyaknya siswa yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasar.

*Tabel 2.60*  
*Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Banyaknya lulusan SD	Orang						
2.	Banyaknya penduduk usia 12 tahun	Orang						
3.	<b>Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar</b>	%						

17. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV  
Menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik

*Tabel 2.61*  
*Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Orang						
2.	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Orang						
3.	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b>	%						

18. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Menggambarkan proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana- prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan baik tingkat SD maupun SMP.

*Tabel 2.62*  
*Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun N-1*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	

19. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan

Menggambarkan Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pendidikan

*Tabel 2.63*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase SD terakreditasi A	%					
2	Persentase SMP terakreditasi A	%					
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%					
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	%					
5	Angka partisipasi kasar SD	%					
6	Angka partisipasi kasar SMP	%					
7	Angka rata-rata lama sekolah	tahun					
8	Persentase guru sesuai kualifikasi	%					

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup.

menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi

*Tabel 2.64  
Angka Kematian Bayi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi						
2.	Jumlah kelahiran hidup	bayi						
3.	<b>Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)</b>	<b>per 1.000 kelahiran hidup</b>						

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Menggambarkan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

*Tabel 2.65  
Angka Kelangsungan Hidup Bayi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)						
2.	<b>Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) → (1000-AKB)</b>						

3. Angka Kematian Balita Per1000 Kelahiran

Menggambarkan angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup.

*Tabel 2.66  
Angka Kematian Balita*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita						
2.	Jumlah kelahiran hidup	balita						
3.	<b>Angka kematian balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)</b>							

4. Angka Kematian Neonatal Per1000 Kelahiran

Menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.67  
Angka Kematian Neonatus

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	Bayi						
2.	Jumlah kelahiran hidup	Bayi						
3.	<b>Angka kematian neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup)</b>							

5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Menjelaskan angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Tabel 2.68  
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	orang						
2.	Jumlah kelahiran hidup							
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup							

6. Rasio Posyandu PerSatuan Balita

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi warga kota (terutama ibu dan anak), sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

*Tabel 2.69*  
*Rasio Posyandu Per Satuan Balita*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Posyandu	Unit						
2.	Jumlah Balita	Anak						
3.	<b>Rasio posyandu per satuan balita</b>	<b>Unit/ anak</b>						

7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas

*Tabel 2.70*  
*Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Puskesmas	Unit						
	Puskesmas Pembantu	Unit						
	Klinik	Unit						
	<b>Jumlah puskesmas, pustu, dan klinik</b>	<b>Unit</b>						
2.	Jumlah penduduk	Jiwa						
3.	<b>Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk</b>							

8. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk adalah Perbandingan antara ketersediaan unit rumah sakit dengan jumlah penduduk dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan

*Tabel 2.71*  
*Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Rumah Sakit	unit						
2.	Jumlah penduduk	jiwa						
3.	<b>Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk</b>							

9. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Menggambarkan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan pada satu daerah

Tabel 2.72  
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Dokter Umum	Orang						
2.	Dokter Spesialis	Orang						
3.	Dokter Gigi	Orang						
4.	<b>Jumlah Dokter</b>	<b>Orang</b>						
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa						
6.	<b>Rasio per satuan penduduk</b>							

10. Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk

Menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan.

Tabel 2.73  
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah Perawat	Orang						
2	Jumlah Perawat gigi	Orang						
3	Jumlah Bidan	Orang						
4	<b>Jumlah Total</b>	<b>Orang</b>						
5	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Orang</b>						
6	Rasio Perawat	per 1000						
7	Rasio Perawat gigi	per 1.000						
8	Rasio Bidan	per 1.000						
	<b>Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk</b>	<b>per 1.000</b>						

11. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.

*Tabel 2.74*  
*Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Orang						
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang						
3.	<b>Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani</b>	<b>Persen</b>						

12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar

*Tabel 2.75*  
*Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Orang					
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Orang					
3.	<b>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</b>	<b>Persen</b>					

13. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*

Universal Child Immunization (UCI) adalah istilah untuk tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan.

*Tabel 2.76*  
*Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Kelurahan UCI	Unit					
2.	Jumlah Seluruh Kelurahan	Unit					

3.	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen					
----	--	--------	--	--	--	--	--

14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.77  
*Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Anak					
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak					
3.	<b>Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan</b>	<b>Persen</b>					

15. Presentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Tabel 2.78  
*Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1.	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	anak						
2.	Jumlah anak usia 1 tahun	anak						
3.	<b>Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak</b>	<b>persen</b>						

16. Non polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Cakupan Penemuan jumlah kasus SFP non polio yang di laporkan berbanding jumlah penduduk dibawah 15 tahun, untuk mengetahui kasus non polio AFT rate per 100.000 penduduk. pengukuran indikator *non polio AFP rate* ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.

*Tabel 2.79*  
*Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	orang					
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	orang					
3.	<b>Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk</b>						

17. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Menjelaskan Cakupan balita pneumonia yang ditangani dan diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

*Tabel 2.80*  
*Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	Anak					
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Anak					
3.	<b>Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani</b>	<b>Persen</b>					

18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama.

*Tabel 2.81*  
*Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Orang					
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Orang					
3.	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA</b>	<b>Persen</b>					

19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk.

*Tabel 2.82*  
*Tingkat Prevalensi Tuberkulosis*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang					
2.	Jumlah Penduduk	Orang					
3.	<b>Tingkat prevalensi Tuberkulosis</b>	<b>Per 100.000 penduduk</b>					

20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TB) adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000.

*Tabel 2.83*  
*Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Pasien TB yang meninggal	Orang					
2.	Jumlah Penduduk	Orang					
3.	<b>Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis</b>	<b>Per 100.000 penduduk</b>					

21. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Menjelaskan Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS . dengan membandingkan Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS dengan Jumlah pasien baru TB paru BTA

*Tabel 2.84*  
*Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang					
2.	Jumlah pasien baru TB paru BTA	Orang					
3.	<b>Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS</b>	<b>Persen</b>					

22. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberkulosis paru BTA

yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati yang dinyatakan dalam persen.

*Tabel 2.85*  
*Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Orang					
2.	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	Orang					
3.	<b>Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS</b>	<b>Persen</b>					

23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah presentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF).

*Tabel 2.86*  
*Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa					
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa					
3.	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</b>	<b>Persen</b>					

24. Penderita Diare Yang Ditangani

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun, Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, pustu, RS, balai pengobatan, praktek dokter).

*Tabel 2.87*  
*Penderita Diare yang Ditangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader						

2.	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)						
3.	<b>Penderita diare yang ditangani</b>						

25. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama.

*Tabel 2.88  
Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Jiwa					
2.	Jumlah penduduk	Jiwa					
3.	<b>Prevalensi HIV/AIDS</b>	<b>Persen</b>					

26. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS. Digunakan untuk mengukur efektifitas program penyebarluasan informasi, pendidikan, program komunikasi, dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan penularan penyakit HIV dan AIDS, khususnya pada populasi orang muda berusia 15-24 tahun.

*Tabel 2.89  
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS	Jiwa					
2.	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun	Jiwa					
3.	<b>Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS</b>	<b>Persen</b>					

27. Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat merupakan beban ganda

dalam pelayanan kesehatan, tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

*Tabel 2.90  
Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular*

No.	Jenis Penyakit	Tahun				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penyakit Jantung					
2.	Kanker					
3.	Gangguan Jiwa Berat					
4.	Gagal Ginjal					
5.	Anemia					
6.	Stroke					
7.	Asma					
8.	Diabetes					
9.	Hipertensi					

28. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin  
Cakupan rujukan pasien miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata satu pada kurun waktu tertentu (lama dan baru). Jumlah kunjungan tersebut meliputi pasien rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut.

*Tabel 2.91  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n-5
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	jiwa						
2.	Jumlah masyarakat miskin	jiwa						
3.	<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin</b>	<b>Persen</b>						

29. Cakupan Kunjungan Bayi  
Bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar persentase jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Indikator cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator cakupan kunjungan bayi yang dihitung ini kemudian dapat diketahui efektivitas, continuum of care, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.

*Tabel 2.92*  
*Cakupan Kunjungan Bayi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					
2.	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	orang					
3.	<b>Cakupan kunjungan bayi</b>	<b>Persen</b>					

### 30. Cakupan Pukesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah kecamatan. Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

*Tabel 2.93*  
*Cakupan Puskesmas*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah puskesmas	Unit					
2.	Jumlah kecamatan	Unit					
3.	<b>Cakupan puskesmas</b>	<b>Persen</b>					

### 31. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

*Tabel 2.94*  
*Cakupan Pembantu Puskesmas*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pembantu puskesmas	Unit					
2.	Jumlah kelurahan	Unit					
3.	<b>Cakupan puskesmas pembantu</b>	<b>Persen</b>					

### 32. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang

telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kelahiran. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

*Tabel 2.95  
Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4						
2.	Jumlah sasaran ibu hamil						
3.	<b>Cakupan kunjungan ibu hamil K4</b>						

### 33. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Masa nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya tiga kali, pada enam jam pasca persalinan sampai dengan tiga hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya tiga kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

*Tabel 2.96  
Cakupan Pelayanan Nifas*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	orang					
2.	Jumlah seluruh ibu nifas	orang					
3.	<b>Cakupan pelayanan nifas</b>	<b>Persen</b>					

34. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian.

*Tabel 2.97  
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Orang					
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Orang					
3.	<b>Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani</b>	<b>Persen</b>					

35. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya

*Tabel 2.98  
Cakupan Pelayanan Anak Balita*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Orang					
2.	Jumlah seluruh anak balita	Orang					
3.	<b>Cakupan pelayanan anak balita</b>	<b>Persen</b>					

36. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Kriteria dan keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah kabupaten /kota setempat. MP ASI yang diberikan adalah makanan seperti bubur kacang hijau dan makanan lain seperti yang ada di POSYANDU.

*Tabel 2.99*  
*Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24*  
*Bulan Keluarga Miskin*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Anak					
2.	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Anak					
3.	<b>Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin</b>	%					

37. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

*Tabel 2.100*  
*Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Anak					
2.	Jumlah murid SD dan setingkat	Anak					
3.	<b>Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat</b>	Persen					

38. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Jumlah kunjungan pasien ini meliputi jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama.

*Tabel 2.101*  
*Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	Jiwa					
2.	Jumlah seluruh masyarakat miskin	jiwa					
3.	<b>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin</b>	Persen					

39. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat

yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS (General Emergency Life Support) dan/atau ATLS (Advance Trauma Life Support) + ACLS (Advance Cardiac Life Support), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

*Tabel 2.102  
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)*

No	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n-5
1.	Pelayanan gawat darurat level 1						
2.	Jumlah RS						
3.	<b>Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)</b>						

40. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Sedangkan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.

*Tabel 2.103  
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani >24 jam	kasus					
2.	Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	kasus					
3.	<b>Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi &lt;24 jam</b>	<b>Persen</b>					

41. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Menjelaskan Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan berdasarkan Jenis Pelayanan, Indikator, serta persentase capaian SPM pada suatu daerah.

*Tabel 2.104*  
*Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tahun n-1*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	

42. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan

*Tabel 2.105*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan*  
*Tahun n-2 – n-1*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	%					
2	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	%					
3	Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang	%					
4	Prevalensi stunting	%					
5	Jumlah kematian ibu	Orang					
6	Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup					
7	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%					

8	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/ransgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan <u>Pemeriksaan HIV AiDs</u>	%					
9	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%					
10	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%					
11	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%					
12	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	%					
13	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	%					
14	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	%					
15	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	%					

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Berdasarkan survei dan analisa data di lapangan serta berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Kepala Daerah.

*Tabel 2.106*  
*Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah panjang jalan*	Km						
2.	Jumlah penduduk	Jiwa						
3.	<b>Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk</b>	<b>Km/1000</b>						

#### 2. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)

Persentase jalan dengan kondisi mantap merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan kondisi mantap dengan panjang keseluruhan jalan yang ada pada suatu daera.

*Tabel 2.107*  
*Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km						
2.	Panjang seluruh jalan	Km						
3.	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen						
4.	<b>SPM (Standar Pelayanan Minimal) Nasional</b>	<b>Persen</b>						

3. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (Minimal 1,5 m)

Permendagri Nomor 86/2017 menyebutkan bahwa perhitungan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) dilakukan dengan membagi panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m) dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.108*  
*Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km						
2.	Panjang seluruh jalan kota	Km						
3.	<b>Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 m)</b>	<b>%</b>						

4. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi dihitung dari jumlah rumah berakses sanitasi dibandingkan dengan jumlah rumah tinggal dalam persen.

*Tabel 2.109*  
*Persentase Rumah Tangga Bersanitasi*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah rumah berakses sanitasi	Unit						
2.	Jumlah rumah tinggal	Unit						

3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%						
----	--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

5. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

*Tabel 2.10  
Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Panjang Drainase Kondisi Baik	Km						
2.	Panjang Seluruh Drainase	Km						
3.	<b>Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat</b>	%						

1. Persentase Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan Tidak Lebih Dari 2 Kali Setahun

Indikator selanjutnya adalah persentase tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) tidak lebih dari 2 kali setahun. Persentase tersebut didapatkan dari perbandingan antara total luasan daerah yang tergenang dengan luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.111  
Persentase Tidak Terjadi Genangan (Lebih Dari 30 Cm, Selama 2 Jam) dan Tidak Lebih Dari 2 Kali Setahun*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Total luasan yang tergenang	Ha						
2.	Total luasan daerah rawan genangan	Ha						
3.	<b>Persentase Tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun</b>	%						

2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator persentase penduduk berakses air minum didapatkan dari persentase jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk keseluruhan. Sumber air minum layak dapat berupa sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air terlindungi, PDAM, dan BPPSPAM.

*Tabel 2.112  
Persentase Penduduk Berakses Air Minum*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Penduduk berakses air minum	Jiwa						
2.	Jumlah penduduk	Unit						
3.	<b>Persentase Penduduk Berakses Air Minum</b>	<b>%</b>						

3. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Indikator areal kawasan kumuh ini didapatkan dengan perbandingan antara data luas kawasan kumuh di suatu daerah dengan luasan wilayah keseluruhan daerah tersebut. Indikator ini dapat merepresentasikan persentase luasan kumuh yang ada secara time series yaitu pada tahun n-5 sampai dengan tahun n-1.

*Tabel 2.113  
Persentase Areal Kawasan Kumuh*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Kawasan Kumuh	Ha						
2.	Luas Wilayah	Ha						
3.	<b>Persentase Areal Kawasan Kumuh</b>	<b>Persen</b>						

4. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk umum, yang berada dibawah pengawasan, pengurusan, dan pengelolaan pemerintah daerah.

*Tabel 2.114*  
*Kapasitas Pemakaman Umum*

No.	Nama TPU	Lokasi		Luas Area (Ha)	Daya Tampung (Unit) *per 2018
		Kelurahan	Kecamatan		
1.					
2.					
3.					
4.					

*Tabel 2.115*  
*Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Unit						
2.	Jumlah penduduk	Jiwa						
3.	<b>Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk</b>							

5. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikalikan 1000.

*Tabel 2.116*  
*Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Tempat Ibadah :							
	a. Masjid	Unit						
	b. Mushola	Unit						
	c. Gereja Kristen	Unit						
	d. Gereja Katolik	Unit						
	e. Pura	Unit						
	f. Vihara	Unit						
3.	<b>Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk</b>							
	a. Masjid	Unit/1000 Jiwa						
	b. Mushola	Unit/1000 Jiwa						
	c. Gereja Kristen	Unit/1000 Jiwa						
	d. Gereja Katolik	Unit/1000 Jiwa						
	e. Pura	Unit/1000 Jiwa						
	f. Vihara	Unit/1000 Jiwa						
	g. Klenteng	Unit/1000 Jiwa						

6. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Menjelaskan rasio Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan HPL dan HGB dibandingkan dengan luas keseluruhan RTH.

Tabel 2.117

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha						
2.	Luas wilayah ber HPL	Ha						
3.	Luas wilayah ber HGB	Ha						
4.	<b>Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL</b>							
5.	<b>Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HGB</b>							

7. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Indikator luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan ini didapatkan dari pembagian luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dengan luas wilayah, Indikator ini dihitung untuk melihat kesesuaian luasan RTH publik di Kota Bima dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.118

Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Ha						
2.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan	Ha						
3.	Luas Wilayah	Ha						
4.	<b>Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan</b>	%						

8. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung

adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

*Tabel 2.119*  
*Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Bangunan ber- IMB	Unit						
2.	Jumlah Bangunan	Unit						
3.	<b>Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan</b>							

9. Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya

Perhitungan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah ruang publik yang berubah fungsi dengan jumlah ruang publik yang tersedia.

*Tabel 2.120*  
*Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	m <sup>2</sup>					

10. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Indikator rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan diperoleh dengan membagi data luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara dengan luas daratan.

*Tabel 2.121*  
*Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	Ha					
2.	Luas daratan	Ha					

3.	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan						
----	--	--	--	--	--	--	--

11. Ketaatan Terhadap RTRW

Indikator ketaatan terhadap RTRW ini didapatkan dengan membagi antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan dikalikan dengan angka 100,

12. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum

Tabel 2.122

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Tahun n-1

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	

13. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pekerjaan umum

Tabel 2.123

Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	%					
2	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	%					

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

rasio rumah layak huni sebagai perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di daerah tersebut

Tabel 2.124

Rasio Rumah Layak Huni

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
-----	-----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

1.	Jumlah rumah layak huni	Unit						
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa						
3.	<b>Rasio rumah layak huni</b>							

## 2. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasio permukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman.

*Tabel 2.125  
Rasio Permukiman Layak Huni*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Permukiman Layak Huni	Ha						
2.	Luas Wilayah Permukiman	Ha						
3.	<b>Rasio permukiman layak huni</b>							

## 3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ini didapatkan dengan membandingkan data jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan dikalikan dengan 100.

*Tabel 2.126  
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit						
2.	Jumlah seluruh rumah	Unit						
3.	<b>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</b>	%						

*Tabel 2.127*  
*umlah Rumah Tidak Layak Huni*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Rumah tidak Layak Huni	Unit					

4. Persentase Permukiman yang Tertata

Luas permukiman yang tertata dihitung dengan melihat luas area permukiman yang ada dikurangi dengan luas permukiman kumuh/tidak layak huni yang cenderung tidak teratur, dan memiliki kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Persentase luas permukiman yang tertata dihitung dengan membandingkan luas permukiman yang tertata dengan luas area permukiman keseluruhan dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.128*  
*Persentase Luas Permukiman yang Tertata*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas area permukiman yang tertata	Ha						
2.	Luas keseluruhan area permukiman	Ha						
3.	<b>Persentase luas permukiman yang tertata</b>	%						

5. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Indikator persentase lingkungan permukiman kumuh ini didapatkan dengan pembagian antara data luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah suatu daerah, dikalikan dengan 100. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan persentase permukiman kumuh yang ada di Kota Bima.

*Tabel 2.129*  
*Lingkungan Permukiman Kumuh*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha						
2.	Luas wilayah	Ha						
3.	<b>Lingkungan permukiman kumuh</b>	%						

6. Persentase luasan permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan  
Indikator luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan ini didapatkan dari pembagian data luasan permukiman kumuh yang tertangani dengan luasan permukiman kumuh kemudian dikalikan dengan 100. Indikator ini dapat menunjukkan persentase luasan permukiman kumuh yang telah tertangani oleh pemerintah

*Tabel 2.130*  
*Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha						
2.	Luas permukiman kumuh	Ha						
3.	<b>Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan</b>	%						

7. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat  
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat tahun n-1

*Tabel 2.131*  
*Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Tahun n-1*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	-

- E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)  
Peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusakan, bentrok, maupun konflik lain.

Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas

*Tabel 2.132*  
*Cakupan Petugas Linmas*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Linmas	Orang					
2	Jumlah Penduduk	Jiwa					
3	Jumlah wilayah kerja kota	Jiwa					
4	<b>Cakupan</b>	%					

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di wilayah Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) berkaitan dengan seberapa kondusif situasi dan kondisi di suatu wilayah. Semakin banyak pelanggaran K3 terjadi, maka semakin tidak kondusif situasi dan kondisi di wilayah tersebut.

*Tabel 2.133*  
*Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus					
2	Jumlah Pelanggaran K3	Kasus					
3	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</b>	%					

3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

*Tabel 2.134*  
*Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km <sup>2</sup>					
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	km <sup>2</sup>					
3.	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota</b>	<b>Persen</b>					

4. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah di daerah perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya bencana kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari adanya penanganan yang cepat dari petugas Dinas Kebakaran yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan WMK. Tingkat waktu tanggap yaitu kurang dari atau sama dengan 15 menit setelah adanya laporan bencana kebakaran.

*Tabel 2.135*  
*Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) ≤ 15 menit	Kejadian					
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian					
3.	<b>Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)</b>	<b>Persen</b>					
4.	<b>Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)</b>	<b>menit</b>					

5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda terhadap pelanggarannya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat, dan optimal dalam mengatur suatu subyek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu, terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

*Tabel 2.136*  
*Persentase Peningkatan Penegakan PERDA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus					
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus					
3	<b>Penegakan PERDA</b>	<b>Persen</b>					

6. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun n-1

*Tabel 2.137*  
*Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun n-1*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

7. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

*Tabel 2.138*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase kampung tangguh bencana	%					
2	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana <i>tanggapan darurat lengkap</i>	%					
3	Persentase edukasi proteksi kebakaran	%					
4	Angka kriminalitas	Kejadian					

F. Sosial

1. PMKS Yanga Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keteringgalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

*Tabel 2.139  
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang						
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang						
3.	<b>PMKS yang memperoleh bantuan</b>	<b>Persen</b>						

2. PMKS Yang Tertangani

Indikator ini merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada.

*Tabel 2.140  
Persentase PMKS yang Tertangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang						
2.	Jumlah PMKS yang ada	Orang						
3.	Persentase PMKS yang tertangani	%						

3. PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (bansos) dalam jangka waktu satu tahun

*Tabel 2.141  
Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 tahun	Orang						
2.	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang						
3.	<b>Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</b>	%						

4. PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial lainnya

*Tabel 2.142  
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang					
2.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang					

3.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%					
----	--	---	--	--	--	--	--

5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini merupakan perhitungan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan sejauh mana panti sosial berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

*Tabel 2.143  
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana  
Pelayanan Kesehatan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	unit					
2.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	unit					
3.	<b>Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan</b>	%					

6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini adalah untuk melihat persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

*Tabel 2.144  
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)  
yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah WKBSM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit						
2.	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit						

3.	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%						
----	---	---	--	--	--	--	--	--

7. Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial.

*Tabel 2.145  
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosia*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang					
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang					
3.	<b>Korban bencana yang menerima bantuan sosial</b>	%					

8. Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Indikator ini merupakan persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

*Tabel 2.146  
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang					
2.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang					
3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%					

9. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial.

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar penerima jaminan sosial bagi para penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial.

*Tabel 2.147*  
*Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang					
2.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang					
3.	<b>Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</b>	%					

10. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada tahun n-1

*Tabel 2.148*  
*Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tahun n-1*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar anak terlantar diluar panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut gelandangan dan pengemis	
5	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah Kabupaten/Kota	

11. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Sosial

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang sosial

*Tabel 2.149*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Sosial*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Angka kemiskinan	%					
2	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%					
3	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	%					

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

*Tabel 2.150*  
*Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus						
2.	Jumlah Perusahaan	Unit						
3.	<b>Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja</b>	%						

2. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)  
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun n.

*Tabel 2.151*  
*Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus						
2.	Jumlah kasus yang tercatat	Kasus						
3.	Tingkat penyelesaian kasus	%						

3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan  
Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar.

*Tabel 2.152*  
*Pencari Kerja yang Ditempatkan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang						
2.	Pencari kerja yang mendaftar	Orang						
3.	<b>Pencari kerja yang ditempatkan</b>	%						

4. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Indikator ini akan menghitung persentase perusahaan yang menerapkan K3 dari keseluruhan jumlah perusahaan yang terdaftar dengan melihat jumlah perusahaan yang memiliki P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

*Tabel 2.153*  
*Keselamatan dan Perlindungan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit						
2.	Jumlah perusahaan	Unit						
3.	<b>Keselamatan dan Perlindungan</b>	%						

5. Besaran Pekerjaan/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekrja/buruh yang menjadi peerta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekrja yang terdaftar sebagai peserta pekerja yang terdaftarsebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja.

*Tabel 2.154*  
*Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta IAMSOSTEK	Orang						
2.	Jumlah seluruh pekerja	Orang						
3.	<b>Persentase tenaga kerja yang mengikuti program Iamsostek</b>	%						

#### 6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah mengenai upah minimum kota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya.

*Tabel 2.155  
Perselisihan Buruh dan Pengusaha*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penyelesaian perselisihan	Kasus						
2.	Jumlah kejadian perselisihan	Kasus						
3.	<b>Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha</b>	%						

#### 7. Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan perusahaan adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah perusahaan yang telah diperiksa baik pemeriksaan pertama, berkala, ulang, maupun khusus dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di daerah.

*Tabel 2.156  
Besaran Pemeriksaan Perusahaan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	Unit						
2.	Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar	Unit						
3.	<b>Persentase pemeriksaan perusahaan</b>	%						

8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan perusahaan adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah peralatan perusahaan yang telah diuji dan memiliki surat izin beroperasi dari keseluruhan peralatan perusahaan yang terdaftar di seluruh wilayah satu daerah

*Tabel 2.157  
Besaran Pengujian Peralatan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah peralatan yang telah diuji	Unit						
2.	Jumlah seluruh peralatan yang terdaftar	Unit						
3.	<b>Persentase pengujian peralatan</b>	%						

9. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan skill-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi supaya lebih menguasai bidangnya.

*Tabel 2.158  
Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang						
2.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang						
3.	<b>Persentase tenaga kerja terbina kompetensi</b>	%						

10. Rasio Jumlah Lulusan Si/S2/S3

menggambarkan besaran penduduk didaerah yang memiliki latar belakang pendidikan baik sehingga meningkatkan kualitas pencari kerja didaerah.

*Tabel 2.159*  
*Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3*

No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	jiwa						
2.	Jumlah Seluruh Penduduk	jiwa						
3.	<b>Rasio lulusan S1/S2/S3</b>							

11. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Tenaga Kerja  
Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang tenaga kerja

*Tabel 2.160*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Tenaga Kerja*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan upah minimum kota	%					
2	Persentase jumlah penganggur	%					
3	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	%					

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan.

*Tabel 2.161*  
*Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang					
2.	Jumlah pekerja perempuan	Orang					
3.	<b>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b>	%					

2. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perempuan

yang menduduki kursi DPRD dalam kurun waktu tertentu

Tabel 2.162

*Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang					
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang					
3.	<b>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD</b>	%					

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di satu daerah.

Tabel 2.163

*Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang					
2.	Jumlah pekerja perempuan	Orang					
3.	<b>Partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	%					

4. Rasio KDRT

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di suatu daerah. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga.

Tabel 2.164

*Rasio KDRT*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah KDRT	Orang						
2.	Jumlah rumah tangga	Orang						
3.	<b>Rasio KDRT</b>	%						

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja

perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

*Tabel 2.165  
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen					

6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT.

*Tabel 2.166  
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang					
2.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang					
3.	<b>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu</b>	%					

7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Indikator ini bertujuan untuk melihat besarnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di suatu daerah.

Tabel 2.167

*Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu	Orang					
2.	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS	Orang					
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di	%					

8. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum merupakan indikator yang didapatkan dari hasil perbandingan jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum.

Tabel 2.168

*Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Orang					
2.	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang					
3.	<b>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</b>	%					

9. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.169

*Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%					

2	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	Persen						
3	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%						

### C. Pangan

#### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Menerangkan jumlah ketersediaan pangan utama yang berdasarkan pada jumlah penduduk pada suatu daerah

*Tabel 2.170  
Ketersediaan Pangan Utama*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama	Kg						
2	Jumlah Penduduk	Jiwa						
3	<b>Ketersediaan Pangan Utama</b>	<b>kg/jiwa</b>						

#### 2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita

*Tabel 2.171  
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>							
1	Energi	Kkal					
2	Protein	Gram					
<b>Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>							
3	Energi	Kkal					
4	Protein	Gram					
<b>Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>							
5	Energi	%					
6	Protein	%					

#### 3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu,

merugikan, dan membahayakan manusia.

*Tabel 2.172  
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi	Sampel					
2	Jumlah sampel pangan yang diambil	Sampel					
3	<b>Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b>	%					

#### D. Pertanian

##### 1. Persentase Luas lahan Bersertifikat

Indikator persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan luas wilayah dikalikan dengan bilangan 100. Luas lahan bersertifikat yang ditampilkan pada data berikut merupakan tanah umum, sultan ground dan pakualaman ground.

*Tabel 2.173  
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas lahan bersertifikat	Ha						
2.	Luas Wilayah	Ha						
3.	<b>Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah</b>	%						

##### 2. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Menghitung penyelesaian kasus tanah negara adalah dengan membandingkan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.174  
Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus						
2.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus						
3.	<b>Penyelesaian kasus sengketa tanah</b>	%						

##### 3. Penyelesaian Izin Lokasi

perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah

permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.175  
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah izin lokasi	Unit					
2.	Permohonan izin lokasi	Unit					
3.	<b>Penyelesaian izin lokasi</b>	%					

E. Lingkungan Hidup

1. Tersusunnya RPPLH

Indikator tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kota dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya Dokumen RPPLH

*Tabel 2.176  
Tersusunnya RPPLH*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Tersusunnya RPPLH Kota	Ada/Tidak Ada					

2. Trintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Indikator terintegrasinya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam rencana pembangunan daerah adalah indikator lanjutan dari indikator sebelumnya yang berisi tentang ada atau tidaknya RPPLH

*Tabel 2.177  
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Daerah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota	Ada / Tidak Ada					

3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah

Indikator terselenggaranya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tingkat daerah kota akan menunjukkan ada atau tidaknya dokumen atau kajian tersebut di suatu daerah

*Tabel 2.178  
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota	Ada/Tidak Ada					

4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas air ini menurut Lampiran Permendagri 86/2017 didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus indeks pencemaran.

*Tabel 2.179*  
*Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	IKA						

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas udara ini didapatkan melalui sebuah formula sesuai dengan Lampiran Permendagri 86/2017 yaitu  $IKU = 100 - (50/0,9 \times (Ieu - 0,1))$ .

*Tabel 2.180*  
*Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	IKU						

6. Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan

Indeks tutupan lahan yang dimaksud pada Permendagri 86/2017 ini adalah hasil dari pengukuran dengan formula tertentu yang tertuang dalam Lampiran Permendagri 86/2017. Formula tersebut sama dengan formula yang digunakan untuk menentukan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) pada dokumen IKLH

*Tabel 2.181*  
*Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	ITV						

7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh

Pemerintah Daerah Kota

Indikator pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota ini didapatkan dengan membagi data jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota yang ditangani dengan data total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota kemudian dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.182*  
*Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditangani	Laporan						
2.	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Pemantauan Perusahaan						
3.	<b>Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota</b>	%						

8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Indikator terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ini adalah indikator terkait pemberian penghargaan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat atas jasanya melestarikan lingkungan

*Tabel 2.183*  
*Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada					

9. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya

Indikator ini didapatkan dari pembagian jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase berapa persen pengaduan masalah yang dapat ditangani oleh dinas terkait

*Tabel 2.184*  
*Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah, Lokasi Usaha, dan Dampaknya*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	pengaduan						
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	pengaduan						
3.	<b>Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah</b>	%						

10. Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R

Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R telah disesuaikan dengan kondisi wilayah yang menuju sistem zero waste. Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah kota dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.185*  
*Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/ tahun)
1.	Jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain- lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	Ton/hr						
2.	Total timbulan sampah	Ton/hr						
3.	<b>Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R</b>	%						

*Tabel 2.186*  
*Kelompok Bank Sampah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah kelompok bank sampah	Kelompok						

11. Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Ketempat Pembuangan Akhir (TPA)

Indikator timbulan sampah yang ditangani dan indikator persentase jumlah sampah yang tertangani didapat dari perbandingan volume sampah yang ditangani dengan jumlah timbulan sampah dikalikan 100. Yang dimaksud volume sampah yang ditangani adalah volume sampah yang dibuang ke TPA.

*Tabel 2.187*  
*Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)	ton/hari						
2.	Perkiraan timbulan sampah	ton/hari						
3.	<b>Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA</b>	%						

12. Persentase Cakupan Areal Pelayanan

Indikator persentase cakupan area pelayanan ini didapatkan dari pembagian data luas area pelayanan pengelolaan sampah

dengan luas area kota dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan melihat seberapa besar cakupan area pengelolaan sampah di daerah

*Tabel 2.188*  
*Persentase Cakupan Area Pelayanan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km <sup>2</sup> /ha					
2.	Luas area Kota	km <sup>2</sup> /ha					
3.	<b>Persentase Cakupan Area Pelayanan</b>	<b>%</b>					

13. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA

Indikator operasionalisasi TPA/TPST/SPA di daerah ini adalah indikator yang bertujuan untuk menunjukkan nilai TPA dari program adipura di suatu wilayah

*Tabel 2.189*  
*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Nilai TPA (Program Adipura)						

14. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Lingkungan Hidup  
Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Lingkungan Hidup

*Tabel 2.190*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Lingkungan Hidup*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Udara						
2	Indeks Kualitas Air						
3	Persentase pengangkutan sampah	%					
4	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Bima	%					
5	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%					
6	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%					
7	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen	%					
8	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap	%					

F. Administrasu Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk

Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

*Tabel 2.191*  
*Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang						
2.	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang						
3.	<b>Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk</b>							

2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

*Tabel 2.192*  
*Rasio Bayi Berakta Kelahiran*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah bayi berakta kelahiran	Orang						
2.	Jumlah bayi	Orang						
3.	<b>Rasio Bayi Berakta Kelahiran</b>							

3. Rasio Pasangan Barakta Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah

*Tabel 2.193*  
*Rasio Pasangan Berakte Nikah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Orang					
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Orang					
3.	<b>Rasio pasangan berakte nikah</b>						

4. Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Daerah  
Basis data atau database merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Ketersediaan database akan memudahkan stakeholder untuk mengambil, mencari, atau menganalisis data kependudukan.

*Tabel 2.194*  
*Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala*

No	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala kota					

5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK  
KTP berbasis NIK sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana

*Tabel 2.195*  
*Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK*

No	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK					

6. Cakupan Penerbitan KTP  
Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah KTP yang diterbitkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya sudah memiliki KTP.

*Tabel 2.196*  
*Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Kartu					
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	Orang					
3.	<b>Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</b>	%					

7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran  
Indikator cakupan penerbitan akta kelahiran merupakan hasil perbandingan antara jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dengan jumlah kelahiran

di tahun bersangkutan.

*Tabel 2.197  
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Orang					
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Kelahiran					
3.	<b>Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran</b>	%					

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Cakupan Sarana Prasarana Pekantoran Pemerintahan Kelurahan Yang Baik

Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor kelurahan di daerah. Kualitas perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat.

*Tabel 2.198  
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat Baik	Kantor					
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Baik	Kantor					
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang Baik	Kantor					
Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan	Kantor					
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik	Persen					

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Indikator jumlah kelompok binaan LPM tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. LPM pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan.

*Tabel 2.199  
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	kelompok					
2.	Jumlah LPM	kelompok					

3.	Rata-rata binaan LPM						
----	----------------------	--	--	--	--	--	--

### 3. Rata-rat Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

*Tabel 2.200*  
*Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma)	Kelompok					
2.	Jumlah PKK	Kelompok					
3.	<b>Rata-rata binaan PKK</b>						

### 4. Persentase LSM Aktif

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM berfungsi untuk melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.

*Tabel 2.201*  
*Persentase LSM Aktif*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah LSM yang Aktif	unit					
2.	Jumlah seluruh LSM	Unit					
3.	<b>Persentase LSM aktif</b>	%					

### 5. Persentas LPM Berprestasi

Ajang kompetisi dan mengoptimalkan daya saing perlu ditumbuhkan di tengah kelembagaan sosial masyarakat. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberi rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap

LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di daerah untuk mendapatkan LPMK berprestasi.

*Tabel 2.202*  
*Jumlah LPMK Berprestasi*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah LPMK Berprestasi	Kelompok					
2.	Jumlah LPMK	Kelompok					
3.	Persentase LPM Berprestasi	%					

#### 6. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup paling kecil. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup paling kecil

*Tabel 2.203*  
*Jumlah PKK Aktif*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah TP PKK Kota Bima	kelompok					
2.	Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Bima	kelompok					
3.	Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Bima	kelompok					
4.	Jumlah kel. PKK RW se Kota Bima	kelompok					
5.	Jumlah kel. PKK RT	kelompok					
6.	Jumlah kel. Dasawisma	kelompok					

7. Persentase Posyandu Aktif

Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada.

*Tabel 2.204  
Posyandu Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah posyandu aktif	Unit					
2.	Jumlah seluruh posyandu	Unit					
3.	<b>Posyandu Aktif</b>	<b>Persen</b>					

8. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat, menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, makin kecilnya jumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

*Tabel 2.205  
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Swadaya Masyarakat	Rupiah					
2.	Total Program	Rupiah					
3.	<b>Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program</b>	<b>Persen</b>					

9. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat. Setelah program pemberdayaan dihentikan oleh pemerintah, maka diharapkan program-program yang sudah ada dapat dipelihara dan diteruskan oleh masyarakat agar dapat terus bermanfaat meskipun pemerintah sudah tidak menjalankan program tersebut.

*Tabel 2.206*  
*Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat	Buah					
2.	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Buah					
3.	<b>Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persen</b>					

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB  
Menjelaskan jumlah dan Dinas/Badan (Organisasi Perangkat Daerah) yang berperanaktif di kampung KB
2. Jumlah Perangkat Daerah yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Kependudukan  
Menjelaskan kesepakatan kerjasama olah OPD terkait dengan OPD yang berada di suatu daerah dalam rangka pemanfaatan data kependudukan yang di tuangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS).
3. Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga  
Indikator rata-rata anak per keluarga menggambarkan keberhasilan keluarga berencana. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi rasio anak seluruhnya dengan rasio keluarga. Rasio anak adalah rasio seluruh penduduk usia 0- 18 tahun.

*Tabel 2.207*  
*Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anak	Orang					
2.	Jumlah keluarga	keluarga					

3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak					
----	------------------------------------	------	--	--	--	--	--

4. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB adalah Rasio akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama

*Tabel 2.208  
Rasio Akseptor KB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah akseptor KB	Pasangan					
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan					
3.	<b>Rasio akseptor KB</b>	<b>%</b>					

5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu juga termasuk di dalamnya peserta KB baru pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif

*Tabel 2.209  
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah peserta KB aktif	Pasangan					
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan					
3.	<b>Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun</b>	<b>%</b>					

*Tabel 2.210  
Cakupan Peserta KB Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah peserta KB aktif	Pasangan					
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasangan					

3	Cakupan peserta KB aktif	%					
---	--------------------------	---	--	--	--	--	--

6. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASRF) 15-19 Tahun

ASFR (Age Specific Fertility Rate) adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya

*Tabel 2.211  
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun	Kelahiran					
2	Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	Orang					
3	<b>Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun</b>	<b>Per 1.000 wanita</b>					

7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari program Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasaan usia kawin pertama.

*Tabel 2.212  
Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th	Pasangan					
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan					
3.	<b>Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun</b>	<b>%</b>					

8. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

*Unmet need* adalah pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB. Sehingga cakupan ini digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.

Tabel 2.213  
*Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi + Jumlah PUS yang ingin anak tunda	Pasangan					
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan					
3.	<b>Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)</b>	%					

9. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  
Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, menurut BKKBN, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit, serta metode yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Jenis MKJP adalah IUD, Implan atau susuk, tubektomi, atau vasektomi.

Tabel 2.214  
*Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MJKP	Pasangan					
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan					
3.	<b>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</b>	%					

10. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi  
 Persentase ketidaklangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi (contraceptive discontinuation rate) adalah proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (exposure) karena berbagai alasan, seperti kegagalan atau mengalami efek samping. Angka ini juga bisa disebut dengan kejadian drop out KB.

*Tabel 2.215*  
*Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan					
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan					
3.	<b>Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi</b>	%					

11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB  
 Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

*Tabel 2.216*  
*Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Orang					
2.	Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS	Orang					
3.	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB</b>	%					

12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB  
 Cakupan anggota BKR ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKR yang merupakan PUS dan berKB dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota BKR.

*Tabel 2.217*  
*Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Orang					
2.	Jumlah anggota kelompok BKR yang berstatus PUS	Orang					
3.	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB</b>	%					

13. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Cakupan anggota BKL ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKL yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah kelompok BKL seluruhnya.

*Tabel 2.218*  
*Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Orang					
2.	Jumlah anggota kelompok BKL yang berstatus PUS	Orang					
3.	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB</b>	%					

14. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberikan layanan data/informasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, konseling, bimbingan maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat. Keberadaan PPKS dapat membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan dalam hal pelayanan dan informasi serta rujukan bagi permasalahan yang dihadapi keluarga

*Tabel 2.219*  
*Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah PPKS	Unit					
2.	Jumlah Kecamatan	Wilayah					
3.	<b>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan</b>	%					

15. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah

salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe (generasi berencana), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (life skills), gender dan keterampilan advokasi dan KIE.

*Tabel 2.220*  
*Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah PIK R/M	Kelompok					
2.	Jumlah kecamatan	Wilayah					
3.	<b>Cakupan Remaja Dalam PIK Remaja/Mahasiswa</b>	%					

16. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk.

Cakupan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan KB) yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

17. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.

*Tabel 2.222*  
*Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB	Orang	2.359	2.327	1.890	1.706	1.613
2.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS	Orang	2.914	2.690	2.165	1.919	1.919

3.	Cakupan PUS Peserta KB UPPKS	%	80,95	86,51	87,30	88,90	84,05
----	------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

18. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

*Tabel 2.223  
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)  
Setiap Kelurahan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa	Orang					
2.	Jumlah kelurahan	Wilayah					
3.	<b>Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan</b>	%					

19. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Dalam rangka mendukung kesuksesan program Keluarga Berencana (KB) di daerah, maka salah satu faktor yang sangat penting adalah dengan adanya jaminan ketersediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi hak-hak reproduksi pasangan usia subur. Melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi, diharapkan dapat menekan angka kelahiran di daerah tersebut

*Tabel 2.224  
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi  
Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat*

No	Indikator		Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota	IUD	Unit					
		Kondom						
		Pil KB						
		Suntikan						
		Susuk KB/Implan						
		<b>Total</b>						
2.	Perkiraan permintaan	IUD	Unit					
		Kondom						
		Pil KB						
		Suntikan						

	masyarakat	Susuk KB/Implan						
		<b>Total</b>						
3.	<b>Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat</b>		%					

20. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan.

Berdasarkan aturan baru yang termuat dalam Perpres no.19 tahun 2016 bahwa peserta BPJS saat ini dapat menggunakan layanan KB secara gratis, yang sebelumnya layanan ini belum ditanggung BPJS. Beberapa pelayanan KB yang ditanggung oleh BPJS adalah Vasektomi & Tubektomi, pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan dan pelepasan alat KB spiral, dan KB suntik. Layanan ini merupakan kerjasama BPJS dengan faskes dan jejaringnya untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

*Tabel 2.225*

*Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	Unit					
2.	Jumlah faskes dan jejaring	Unit					
3.	<b>Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama Dengan BPJS</b>	%					

21. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan dan pembangunan keluarga dilakukan melalui penguatan Delapan Fungsi Keluarga. Delapan Fungsi Keluarga yang dimaksud antara lain Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta dan Kasih Sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Lingkungan.

*Tabel 2.226*  
*Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok					
2.	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok					
3.	<b>Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga</b>	%					

22. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase pembiayaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melalui APBD.

*Tabel 2.227*  
*Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	Rp.					
2.	Jumlah APBD	Rp.					
3.	<b>Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD</b>	%					

23. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB disajikan dalam tabel berikut ini.

*Tabel 2.228*  
*Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	CPR ( <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> )	%					
2	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)						
3	<i>Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)</i>	%					

I. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.

*Tabel 2.229*  
*Jumlah Penumpang Angkutan Umum*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penumpang bis (yang masuk terminal)	Jiwa						

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Adalah Jumlah Pengujian meliputi

(1) Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan

(2) Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

*Tabel 2.230*  
*Jumlah Uji KIR Angkutan Umum*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit						

3. Jumlah Terminal dan Pelabuhan

Indikator ini memperlihatkan perkembangan jumlah terminal maupun pelabuhan serta aktifitasnya dalam menaik turunkan orang dan barang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan.

*Tabel 2.231  
Jumlah Terminal Bus*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Terminal Bus	Unit					
2.	Jumlah Pelabuhan	Unit					

4. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator ini akan memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

*Tabel 2.232  
Persentase Layanan Angkutan Darat*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah angkutan darat	Unit						
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	Jiwa						
3.	<b>Persentase layanan angkutan darat</b>	%						

5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dua (karena setiap tahun satu angkutan umum uji KIR dua kali).

*Tabel 2.233*  
*Kepemilikan KIR Angkutan Umum*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum	Unit						
2.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit						
3.	<b>Kepemilikan KIR angkutan umum</b>	%						

6. Pemasangan Rambu-Rambu  
 perhitungan indikator pemasangan rambu- rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100.

*Tabel 2.234*  
*Pemasangan Rambu-Rambu*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Rambu-rambu Terpasang	Unit						
2.	Jumlah Rambu-rambu yang Seharusnya Tersedia	Unit						
3.	<b>Persentase Pemasangan Rambu-rambu</b>	%						

7. Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan  
 Menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

*Tabel 2.235*  
*Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang Jalan	Km						
2.	Jumlah Kendaraan	Unit						

3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan	km/unit						
----	---	---------	--	--	--	--	--	--

## 8. Jumlah Orang dan Barang Melalui Terminal dan Stasiun Tahun

Menjelaskan aktifitas pada terminal dan pelabuhan pada suatu daerah baik jumlah penumpang ataupun barang yang terangkut dan yang di turunkan.

*Tabel 2.236  
Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
Jumlah penumpang/orang bis / Kapal (yang masuk terminal dan Pelabuhan)								
1.	Jumlah penumpang bis (yang masuk terminal)	Jiwa						
2.	Jumlah penumpang Kapal (yang masuk Pelabuhan)	Jiwa						
Jumlah Barang (yang masuk terminal dan Pelabuhan)								
1	Jumlah Barang yang masuk terminal	Ton						
2	Jumlah Barang Masuk Pelabuhan	Ton						

*Tabel 2.237  
Jumlah Orang dan Barang yang Turun*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
Jumlah penumpang/orang bis / Kapal (yang Turun terminal dan Pelabuhan)								
1.	Jumlah penumpang bis (yang Turun di terminal)	Jiwa						
2.	Jumlah penumpang Kapal (yang Turun Di Pelabuhan)	Jiwa						
Jumlah Barang (yang masuk terminal dan Pelabuhan)								
1	Jumlah Barang yang Turun di terminal	Ton						
2	Jumlah Barang Turun/ Bongkar di Pelabuhan	Ton						

## J. Komunikasi dan Informatika

### 1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator cakupan layanan telekomunikasi ini didapatkan dari pembagian luas wilayah yang tercoverage dengan luas wilayah keseluruhan. Indikator ini akan memperlihatkan seberapa luas cakupan yang telah ada di suatu daerah terkait layanan telekomunikasi.

*Tabel 2.238*  
*Tabel Cakupan Layanan Telekomunikasi*

No	Indikator	Satuan	n-3	n-2	n-1
1.	Luas Wilayah Yang Tercoverage	Km			
2.	Luas Wilayah Keseluruhan	Km			
3.	<b>Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>				

2. Indeks Layanan Informasi Publik

Indeks Layanan Informasi Publik menjadi salah satu indikator SDGs dengan capaian pada waktu tertentu atau n-1

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

*Tabel 2.239*  
*Persentase Koperasi Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah Koperasi Aktif	unit						
2	Jumlah Seluruh Koperasi	unit						
3	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	%						

2. Persentase BPR/LKM Aktiif

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil

*Tabel 2.240  
Jumlah BPR/LKM*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam	Unit						
2.	Badan Usaha Kredit Pedesaan	Unit						
3.	Koperasi Simpan Pinjam	Unit						
	<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>						

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

*Tabel 2.241  
Persentase Usaha Mikro dan Kecil*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
Jumlah usaha mikro dan kecil	unit						
Jumlah seluruh UKM	unit						
<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>	<b>%</b>						

4. Nilai Omset UKM Yang Dibina

Indikator yang menjelaskan mengenai perkembangan nilai omset UKM pada tahun n-2 dan n-1

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya

pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

*Tabel 2.242  
Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA*

No	Jenis Perusahaan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Investor PMA	Unit						
2	Investor PMDN	Unit						
	<b>Total</b>	<b>Unit</b>						

- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)  
Menjelaskan jumlah nilai investasi PMDN/PMA pada suatu daerah

*Tabel 2.243  
Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA*

No	Jenis Perusahaan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	PMA	Juta Rp						
2	PMDN	Juta Rp						
	<b>Total</b>	<b>Juta Rp</b>						

- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja  
Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja.

*Tabel 2.244  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA*

No	Variabel	Satuan	n-3	n-2	n-1
<b>Penanam Modal Asing (PMA)</b>					
1	Tenaga Kerja	Jiwa			
2	Perusahaan	Unit			
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				
<b>Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)</b>					
1	Tenaga Kerja	Jiwa			
2	Perusahaan	Unit			
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				
<b>Total Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>					

M. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Organisasi Pemuda Yang Aktif

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

*Tabel 2.245  
Persentase Organisasi Pemuda Aktif*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1.	Jumlah organisasi pemuda aktif	organisasi						
2.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	organisasi						
3.	<b>Persentase organisasi pemuda aktif</b>	<b>%</b>						

2. Wirausaha Muda

Wirausaha adalah salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu kota. Wirausaha selain dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain.

*Tabel 2.246  
Persentase Wirausaha Muda*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah wirausaha muda	Jiwa					
2	Jumlah seluruh wirausaha	jiwa					
3	<b>Persentase wirausaha muda</b>	<b>%</b>					

3. Cakupan Pembinaan Olah Raga

Indikator ini menggambarkan perkembangan cabang olahraga yang dibina, dari beberapa tahun sebelumnya

*Tabel 2.247  
Cakupan Pembinaan Olahraga*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Unit					

2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftar	Unit					
3	<b>Persentase cakupan pembinaan olahraga</b>	<b>%</b>					

4. Cakupan Pelatihan Yang Bersertifikasi

Indikator ini menggambarkan pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A,B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

*Tabel 2.248  
Cakupan Pelatih Bersertifikasi*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah pelatih bersertifikasi	Jiwa					
2	Jumlah seluruh pelatih	jiwa					
3	<b>Persentase cakupan pelatih bersertifikasi</b>	<b>%</b>					

5. Cakupan Peminaan Atlet Muda

Indikator ini bertujuan untuk melihat persentase atlet pelajar yang dibina jika dibandingkan dengan seluruh atlet pelajar.

*Tabel 2.249  
Cakupan Pembinaan Atlet Muda*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Jiwa					
2	Jumlah seluruh atlet pelajar	jiwa					
3	<b>Persentase cakupan pembinaan atlet muda</b>	<b>%</b>					

6. Jumlah Atlet Berprestasi

jumlah kejuaraan atau prestasi yang diperoleh dari cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun.

*Tabel 2.250  
Jumlah Atlet Berprestasi*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jiwa					

7. Jumlah Prestasi Olah Raga

Menjelaskan jumlah kejuaraan atau prestasi yang diperoleh dari cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun.

*Tabel 2.251*  
*Jumlah Prestasi Olahraga*

No	Indikator Kinerja	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	Kejuaraan					

N. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi data semestinya disajikan secara progresif hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun, sebaliknya yang terjadi, seringkali buku statistik terbit harus lengkap, sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang update.

*Tabel 2.252*  
*Daerah Dalam Angka*

No.	Indikator	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Buku Kota dalam Angka					
2.	Buku PDRB Kota					

0. Persandian

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

*Tabel 2.253*  
*Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD					
2.	Jumlah total perangkat daerah	OPD					

3.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%					
----	--	---	--	--	--	--	--

P. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Menjabarkan penyelenggaraan festival seni budaya yang diselenggarakan pada suatu daerah

Tabel 2.254

*Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	Hari					

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan  
Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

Tabel 2.255

*Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit					
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki	Unit					
3.	<b>Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	%					

3. Persentase Rintisan Kelurahan Budaya Yang Aktif

Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif menjadi salah satu indikator SDGs

Q. Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per

tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

*Tabel 2.256*  
*Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Kunjungan					
2	Jumlah pengunjung	Jiwa					
3	Jumlah populasi yang harus dilayani	Jiwa					
4	<b>Rasio (1/3)</b>						

2. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat sautu daerah untuk berkunjung mencari bahan pustaka.

*Tabel 2.257*  
*Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul					
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar					
3	<b>Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah</b>						

3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Dengan peran krusial yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat, jumlah perpustakaan juga dapat menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu penting juga

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

*Tabel 2.258*  
*Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah perpustakaan	unit					
2	Jumlah Penduduk	jiwa					
3	<b>Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk</b>						

4. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun  
 Dari data mengenai jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya, dapat diambil rata-rata jumlah pengunjung. Hal ini untuk dapat mengetahui jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat dalam lima tahun terakhir.

*Tabel 2.259*  
*Jumlah Pengunjung Perpustakaan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah pengunjung	Jiwa					
2	Rata-rata jumlah pengunjung	Jiwa					

5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat.

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat.

*Tabel 2.260*  
*Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah pustakawan bersertifikat	Orang					
	Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat*	Orang					
	Total	Orang					
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai	Orang					
3	<b>Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat</b>	%					

## R. Kearsipan

### 1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

*Tabel 2.261*  
*Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah OPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	Unit					
2.	Jumlah OPD	Unit					
3.	<b>Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku</b>	<b>Persen</b>					

### 2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pengelola kearsipan dilakukan oleh arsiparis. Arsiparis merupakan SDM kearsipan yang memang secara teknis melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan baik statis maupun dinamis dan melakukan pembinaan. Arsiparis dituntut untuk selalu profesional sehingga kemampuan dan kualitas senantiasa selalu ditingkatkan melalui kegiatan sertifikasi.

*Tabel 2.262*  
*Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	kali					

#### 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

##### A. Pariwisata

### 1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu daerah. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai

stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain potensi historis atau karakter budaya yang menarik wisatawan, daerah juga harus menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

*Tabel 2.263  
Jumlah Kunjungan Wisatawan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Kunjungan Wisman	Kunjungan						
2	Kunjungan Wisnu	Kunjungan						
	<b>Jumlah</b>	<b>Kunjungan</b>						

## 2. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata juga sangat mempengaruhi keberhasilan sektor pariwisata. Lama kunjungan wisata akan menentukan produktifitas sektor usaha, salah satunya jasa penginapan.

*Tabel 2.264  
Lama Kunjungan Wisata*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Lama Kunjungan Wisata	hari						

## 3. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada obyek pariwisata di suatu daerah

*Tabel 2.265  
PAD Sektor Pariwisata*

No.	Komponen	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Pajak Hotel						
2.	Pajak Restoran						
3.	Pajak Hiburan						
4.	BLUD Taman Pintar						
5.	<b>Total Sektor Pariwisata</b>						
6.	<b>Total PAD</b>						
7.	<b>Persentase (%)</b>						

4. Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata

Indeks kualitas atraksi pariwisata dihitung berdasarkan sembilan indeks, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan petugas, respon/kecepatan pelayanan, keunikan, dan tarif.

Tabel 2.266  
Indeks Atraksi Pariwisata

No.	Daya Tarik Wisata	Nilai Indeks								
		Keamanan	Ketertiban	Kebersihan	Kesejukan	Keindahan	Keramahan	Pelayanan	Keunikan	Tarif
1	Kraton									
2	Taman Pintar									
3	Gembira Loka									
4	Taman Sari									
5	Benteng Vredeburg									
6	XT Square									
7	Indeks Atraksi									

Tabel 2.267  
Indeks Atraksi Pariwisata

Nilai Indeks Tahun 2018									
Daya Tarik Wisata	Kemanan	Ketertiban	Kebersihan	Kesejukan	Keindahan	Keramahan Perugas	Respon/Kecepatan pelayanan	Keunikan	Tarif
<b>Indeks Atraksi Kualitas DTW</b>									<b>78,47</b>
Nilai Indeks Tahun 2019									
Daya Tarik Wisata	Kemanan	Ketertiban	Kebersihan	Kesejukan	Keindahan	Keramahan Perugas	Respon/Kecepatan pelayanan	Keunikan	Tarif
<b>Indeks Atraksi Kualitas DTW</b>									<b>85,5</b>

B. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokasi Lainnya

produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi

produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Indonesia sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

Tabel 2.268  
Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Produksi Padi	Ton						
2.	Luas Panen Padi	Ha						
3.	<b>Produktivitas Lahan</b>	<b>Ton/Ha</b>						

## 2. Cakupan Bina Kelompok Petani

Menjelaskan cakupan kelompok tani yang mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

Tabel 2.269  
Cakupan Bina Kelompok Petani

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Kelompok petani yang mendapat bantuan pemda	Kelompok						
2	Total kelompok petani/ cakupan bina kelompok tani	Kelompok						
3	<b>Cakupan bina kelompok petani</b>	<b>Persen</b>						

## C. Energi dan Sumberdaya Mineral

### 1. Persentas Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Bima. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga.

Tabel 2.270  
Rumah Tangga Pengguna Listrik

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT						
2.	Jumlah rumah tangga	RT						
3.	<b>Persentase rumah tangga pengguna listrik</b>	<b>%</b>						

2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.271  
Persentase Ketersediaan Daya Listrik

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Daya listrik terpasang	MVA						
2.	Daya terkontrak Provinsi	MVA						
3.	<b>Persentase ketersediaan daya listrik</b>	%						

D. Perdagangan

1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah.

Tabel 2.272  
Ekspor Bersih Perdagangan

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Nilai Ekspor	US \$						
2	Nilai Impor	US \$						
	<b>Ekspor Bersih Perdagangan</b>	<b>US \$</b>						

2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal

Kelompok pedagang/usaha informal merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan perdagangan di sebuah daerah, sektor informal berperan sangat besar bagi perekonomian kota ini. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal akan mempermudah koordinasi dan pengembangan sektor ini.

*Tabel 2.273*  
*Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Unit					
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Unit					
3	<b>Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal</b>	%					

3. Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian

Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian dihitung dari gabungan kinerja revitalisasi pasar, kinerja pembinaan UKM, kinerja penertiban PKL, dan kinerja pembinaan IKM. Kinerja revitalisasi pasar dihitung dari persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat, kinerja pembinaan UKM dihitung dari persentase peningkatan Omset UKM yang dibina, kinerja penertiban PKL dihitung dari persentase titik lokasi PKL yang tertata, dan kinerja pembinaan IKM dihitung dari persentase peningkatan omset IKM yang dibina.

*Tabel 2.274*  
*Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian*

No.	Indikator	n-3	n-2	n-1
1	Kinerja revitalisasi pasar			
2	Kinerja pembinaan UKM			
3	Kinerja penertiban PKL			
4	Kinerja publikasi harga bahan pokok			
5	<b>Kinerja pembinaan IKM</b>			

E. Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang potensial untuk dibina. Bantuan yang diberikan oleh Pemda kepada kelompok pengrajin bukan berupa barang melainkan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pameran. Jumlah fasilitas yang diberikan bergantung pada dinamika industri di suatu daerah

*Tabel 2.275*  
*Cakupan Bina Kelompok Pengrajin*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	kelompok					
2	Total Kelompok Pengrajin	kelompok					

3	Persentase bina kelompok pengrajin	%					
---	------------------------------------	---	--	--	--	--	--

## G. Transmigrasi

### 1. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri dengan mendapatkan bimbingan dari pemerintah.

*Tabel 2.276  
Persentase Transmigran Swakarsa*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah transmigran swakarsa	Orang					
2.	Jumlah seluruh transmigran	Orang					
3.	Persentase	%					

*Tabel 2.277  
Jumlah Transmigran Swakarsa*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	<b>Transmigrasi Swakarsa</b>						
	Kepala Keluarga	KK					
	Individu	Jiwa					
2	<b>Transmigrasi Umum</b>						
	Kepala Keluarga	KK					
	Individu	Jiwa					
3	<b>Jumlah Total Transmigrasi</b>						
	Kepala Keluarga	KK					
	Individu	Jiwa					

## G. Kalautan dan Perikanan

### 1. Produksi Perikanan Darat dan Laut

Cakupan produksi perikanan darat (yang di budidayakan oleh masyarakat pada suatu daerah baik kolam maupun karamba) serta Produksi Perikanan Laut

*Tabel 2.278  
Produksi Perikanan Budidaya*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
----	-----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

1	Produksi Ikan	Kg	
2	Target Daerah	Kg	
<b>Tingkat Realisasi</b>		<b>%</b>	

*Tabel 2.279*  
*Produksi Perikanan Laut*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Produksi Ikan	Kg						
2	Target Daerah	Kg						
<b>Tingkat Realisasi</b>		<b>%</b>						

## 2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya.

*Tabel 2.280*  
*Konsumsi Ikan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Ton						
2	Target Daerah	Ton						
<b>Tingkat Realisasi</b>		<b>%</b>						

## 3. Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah cakupan bina kelompok pengusaha perikanan budidaya dan nelayan. Pembinaan terhadap perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan budidaya, penangkapan, Jumlah produksi, pengolahan sampai pemasaran.

*Tabel 2.281*  
*Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Perikanan*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Kelompok Pengusaha Budidaya Ikan yang mendapat bantuan pmda	Kelompok					
2	Total kelompok pengusaha budidaya perikanan	Kelompok					
3	<b>Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan</b>	<b>%</b>					

#### 2.1.3.4. Aspek Penunjang Urusan

##### A. Perencanaan Pembangunan

#### 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

*Tabel 2.282  
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak					

#### 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

*Tabel 2.283  
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
----	-----------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak					
----	--	-----------	--	--	--	--	--

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda.

*Tabel 2.284  
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak					

4. Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

*Tabel 2.285  
Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak					

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD

tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100

*Tabel 2.286  
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program					
2.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program					
3.	<b>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD</b>	<b>Program</b>					

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD Selanjutnya

Data terkait penjabaran program RKPD ke dalam APBD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program APBD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100

*Tabel 2.287  
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Program					
2.	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program					
3.	<b>Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD</b>	<b>Program</b>					

7. Indeks Perencanaan Pembangunan

Menjelaskan Capaian Indeks perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu indikator SDGs

*Tabel 2.288  
Indeks Perencanaan Pembangunan*

No.	Indikator RAD	Tahun Dasar	n-2		n-1	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks perencanaan pembangunan	91	97,58	107,00	98,84	108,14

B. Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan penilaian profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

*Tabel 2.289  
Opini BPK “WTP”*

No.	Indikator	n-6	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Opini BPK “WTP”	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. SILPA tahun berjalan akan menjadi SILPA di tahun yang akan datang. SILPA sebaiknya bernilai “0” (nol) karena kebiasaan menyisakan anggaran berarti perencanaan dan realisasi anggaran daerah belum berjalan secara efektif.

*Tabel 2.290  
Persentase SILPA*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Total SILPA	Rp					
2.	Total APBD	Rp					
3.	Persentase SILPA	%					

3. Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Dalam analisis aspek ekonomi dalam urusan penunjang, program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD sebaiknya dilaksanakan secara keseluruhan, ketika ada satu atau beberapa jumlah program atau kegiatan dalam rencana yang tidak terlaksana tentu akan mengurangi hasil yang akan didapatkan.

*Tabel 2.291  
Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana	Program					
2.	Jumlah program dalam APBD	Program					
3.	Persentase	%					

4. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk

meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

*Tabel 2.292*  
*Persentase Belanja Pendidikan*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah belanja urusan pendidikan	Rupiah					
2.	Total APBD	Rupiah					
3.	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase Belanja Kesehatan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja kesehatan daerah sebanyak 10% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

*Tabel 2.293*  
*Persentase Belanja Kesehatan*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah belanja urusan Kesehatan	Rupiah					
2.	Total APBD	Rupiah					
3.	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

6. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah, khususnya belanja langsung dan belanja tidak langsung.

*Tabel 2.294*  
*Proporsi Belanja Daerah*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah belanja langsung	Rupiah					
2.	Total APBD	Rupiah					
	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					
1.	Jumlah belanja tidak langsung	Rupiah					
2.	Total APBD	Rupiah					
	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

7. Penetapan APBD

Ketepatan waktu dalam menetapkan APBD juga menjadi indikator dalam analisis urusan penunjang. Keterlambatan

waktu dalam menetapkan APBD dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

*Tabel 2.295  
Penetapan APBD*

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu					

8. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Keuangan  
Menjelaskan Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang keuangan.

*Tabel 2.296  
Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Keuangan*

No.	Indikator RAD	Satuan	Tahun Dasar	n-2		n-1	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%					
2	Pendapatan Asli Daerah	%					
3	Nilai Pajak Daerah	%					

C. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai bidang dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

*Tabel 2.297  
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jpl					

2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Data didapatkan dengan membandingkan antara jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan jumlah total ASN.

Tabel 2.298

*Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang					
2	Jumlah total ASN	Orang					
3	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

3. **Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**

Data yang ada didapatkan dengan membandingkan antara jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan jumlah total ASN.

Tabel 2.299

*Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang					
2	Jumlah total ASN	Orang					
3	<b>Persentase</b>	<b>%</b>					

4. **Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah**  
 Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara.

Tabel 2.300

*Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang					

5. **Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah**  
 Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

*Tabel 2.301*  
*Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang					

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ASN terdiri dari dua macam jabatan yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

*Tabel 2.302*  
*Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah*

No.	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang					

D. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan program Penelitian dan Pengembangan dengan tiga kegiatan utama yaitu Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah, Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis, dan Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah.

E. Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Dalam proses kinerja pemerintah kota, diperlukan adanya sistem pengawasan yang dapat menindaklanjuti pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung

jawab yang seharusnya dikerjakan. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut.

*Tabel 2.303  
Persentase Tindak Lanjut Temuan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi					
2	Jumlah total temuan	Rekomendasi					
3	<b>Persentase</b>	<b>Persen</b>					

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Dengan adanya fungsi pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) maka diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggar dan pelanggaran serta pemberian sanksi tindak lanjut dalam kinerja pemerintah

*Tabel 2.304  
Persentase Pelanggaran Pegawai*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang					
2	Jumlah total ASN	Orang					
3	<b>Persentase</b>	<b>Persen</b>					

F. Sekretariat Dewan

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD

Dalam melaksanakan kinerjanya selama lima tahun, DPRD membutuhkan panduan kerja untuk dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang sesuai. Untuk itu diperlukan adanya rencana kerja tahunan sebagai pedoman kerja dalam mencapai tujuan.

*Tabel 2.305  
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/tidak					

2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap RPJMD dan RKPD

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, DPRD perlu menyusun dan mengintegrasikan program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah. Pada setiap tahunnya, DPRD akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam melakukan penyusunan dan pengintegrasian program-program tersebut dalam melaksanakan aspek fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi anggaran.

*Tabel 2.306  
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD  
terhadap RPJMD dan RKPD*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/tidak					

3. Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan

Selain penyusunan dan pengintegrasian program kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD, diperlukan pula pengintegrasian terhadap anggaran pembangunan yang dimiliki kota. Pengintegrasian ini juga dilakukan bersama dengan BAPPEDA dalam rangka penyesuaian serta melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat dewan DPRD.

*Tabel 2.307  
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD  
Terhadap Anggaran Pembangunan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak					

G. Sekretariat Daerah

Capaian kinerja nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik dan

indeks pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu indikator SDGs

*Tabel 2.308  
Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah*

No.	Indikator RAD	Tahun Dasar	n-2		n-1	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah					
2	Indeks Reformasi Birokrasi					
3	Indeks pelayanan publik					
4	Indeks pelaksanaan pembangunan					

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

##### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi pangan dan non pangan.

*Tabel 2.309  
Pengeluaran Menurut Kelompok Barang*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pengeluaran pangan	Juta Rupiah						
Pengeluaran non pangan	Juta Rupiah						
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah						
Jumlah Penduduk	Jiwa						
<b>Pengeluaran per kapita per tahun</b>	<b>Juta Rupiah</b>						
<b>Pengeluaran per kapita per bulan</b>	<b>Juta Rupiah</b>						

##### 2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerKapita

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enam kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat

diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

*Tabel 2.310  
Persentase Konsumsi Non pangan Per Kapita*

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pengeluaran non pangan	Juta Rupiah						
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah						
Persentase Pengeluaran Non Pangan	%						

### 3. Produktifitas Total Daerah

Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam tiga sektor besar yaitu agriculture, manufacture, dan services.

*Tabel 2.311  
Produktivitas Total*

Lapangan Usaha	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Nilai PDRB ADHK</b>						
<i>Agriculture</i>	juta rupiah					
<i>Manufacture</i>	juta rupiah					
<i>Service</i>	juta rupiah					
<b>Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja</b>						
<i>Agriculture</i>	Jiwa					
<i>Manufacture</i>	Jiwa					
<i>Service</i>	Jiwa					
<b>Total Produktivitas</b>						
<i>Agriculture</i>	juta rupiah/ jiwa					
<i>Manufacture</i>	juta rupiah/ jiwa					
<i>Service</i>	juta rupiah/ jiwa					

### 4. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB adalah perbandingan jumlah ekspor dan impor terhadap jumlah PDRB. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa kegiatan ekspor dan impor sudah berperan besar terhadap perekonomian suatu wilayah.

*Tabel 2.312*  
*Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa	Juta rupiah						
2	Jumlah PDRB	Juta rupiah						
3.	<b>Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB</b>							

5. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan, dan bank pengkreditan rakyat. Berikut ini jumlah bank yang beroperasi

*Tabel 2.313*  
*Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang*

No	Jenis Bank	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	KC Bank Umum	unit						
2	KCP Bank Umum	unit						
3	KK Bank Umum	unit						
4	KP BPR	unit						
5	KC BPR	unit						
6	KK BPR	unit						
	<b>Jumlah</b>	<b>unit</b>						

6. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Dan BPR

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum maupun BPR adalah perbandingan jumlah pinjaman terhadap simpanan nasabah di bank.

*Tabel 2.314*  
*Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah pinjaman di bank umum dan BPR	Juta rupiah						
2	Dana pihak ketiga di bank umum dan BPR	Juta rupiah						
3	<b>Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR</b>							

7. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum BPR

Simpanan Masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing yang berbentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka.

*Tabel 2.315  
Jenis Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR*

No	Jenis Simpanan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Giro	Juta Rp.					
		rekening					
		%					
2.	Simpanan Berjangka	Juta Rp.					
		rekening					
		%					
3.	Tabungan	Juta Rp.					
		bilyet					
		%					
4	<b>Total Simpanan</b>	<b>Juta Rp.</b>					

8. Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum dan PBR Menurut Lapangan Usaha

Pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia.

*Tabel 2.316  
Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha*

No	Sektor Ekonomi	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
<b>Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha</b>							
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Juta Rp.					
		%					
2	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.					
		%					
3	Industri Pengolahan	Juta Rp.					
		%					
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp.					
		%					

5	Konstruksi	Juta Rp.					
		%					
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp.					
		%					
7	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rp.					
		%					
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Juta Rp.					
		%					
9	Jasa-jasa	Juta Rp.					
		%					
10	Informasi Dan Komunikasi	Rp Juta					
		%					
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	Rp Juta					
		%					
12	Real Estate	Rp Juta					
		%					
13	Jasa Perusahaan	Rp Juta					
		%					
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Rp Juta					
		%					
15	Jasa Pendidikan	Rp Juta					
		%					
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	Rp Juta					
		%					
17	Jasa Lainnya	Rp Juta					
		%					
<b>Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha</b>							
18	Rumah Tinggal	Juta Rp.					
		%					
19	Flat dan Apartemen	Juta Rp.					
		%					
20	Ruko dan Rukan	Juta Rp.					
		%					
21	Kendaraan Bermotor	Juta Rp.					
		%					
22	Lainnya	Juta Rp.					
		%					
<b>Total Pinjaman</b>		<b>Juta Rp</b>					

#### 9. Posisi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan

Sama dengan posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut lapangan usaha, pengertian posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut jenis penggunaan merupakan pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pinjaman yang diberikan di bank umum dan BPR berdasarkan jenis penggunaannya

dibedakan menjadi tiga, yakni modal kerja, investasi, dan konsumsi.

*Tabel 2.317  
Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR*

No	Jenis Penggunaan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Modal Kerja	Juta Rp. %					
2.	Investasi	Juta Rp. %					
3.	Konsumsi	Juta Rp. %					
	<b>Total Pinjaman</b>	<b>Juta Rp.</b>					

10. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum dan BPR

Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan

*Tabel 2.318  
Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR  
Berdasarkan Skala Usaha*

No	Skala Usaha	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Mikro	Juta Rp. %					
2.	Kecil	Juta Rp. %					
3.	Menengah	Juta Rp. %					
	<b>Total Kredit</b>	<b>Juta Rp.</b>					

*Tabel 2.319  
Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR  
Berdasarkan Penggunaan*

No	Jenis Penggunaan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Modal Kerja	Juta Rp. %					
2.	Investasi	Juta Rp. %					
	<b>Total Kredit</b>	<b>Juta Rp.</b>					

*Tabel 2.320*  
*Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut*  
*Lapangan Usaha*

No	Sektor Ekonomi	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Juta Rp.					
		%					
2.	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.					
		%					
3.	Industri Pengolahan	Juta Rp.					
		%					
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp.					
		%					
5.	Konstruksi	Juta Rp.					
		%					
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp.					
		%					
7.	Pengkangkutan dan Komunikasi	Juta Rp.					
		%					
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Juta Rp.					
		%					
9.	Jasa-jasa	Juta Rp.					
		%					
10	Informasi Dan Komunikasi	Juta Rp.					
		%					
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	Juta Rp.					
		%					
12	Real Estate	Juta Rp.					
		%					
13	Jasa Perusahaan	Juta Rp.					
		%					
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rp.					
		%					
15	Jasa Pendidikan	Juta Rp.					
		%					
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	Juta Rp.					
		%					
17	Jasa Lainnya	Juta Rp.					
		%					
<b>Total Kredit</b>		<b>Juta Rp.</b>					

#### 11. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan. Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas, maka hal itu mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di suatu daerah

*Tabel 2.321*  
*Angka Kriminalitas yang Tertangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas	Kasus					
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas	Kasus					
3.	<b>Angka Kriminalitas yang Tertangani</b>	<b>%</b>					

*Tabel 2.322*  
*Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Narkoba	Kasus					
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas Narkoba	Kasus					
3.	<b>Angka Kriminalitas yang Tertangani</b>	<b>%</b>					

*Tabel 2.323*  
*Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	913	880	695	698	547
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	409.487	411.282	412.692	413.961	414.055
3.	<b>Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk</b>	<b>Kasus</b>	<b>22,30</b>	<b>21,40</b>	<b>16,84</b>	<b>16,86</b>	<b>13,12</b>

## 12. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Dimana pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah.

*Tabel 2.324*  
*Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah*

No	Jenis Pendapatan	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Pajak	Jenis						
2	Retribusi	Jenis						
	<b>Jumlah</b>	<b>Jenis</b>						

## 13. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu goodwill dan political will pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Perda yang mendukung

iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan

*Tabel 2.325  
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah Perda terkait perizinan	Buah						
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	Buah						
3	<b>Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan</b>	<b>Buah</b>						

#### 14. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) pada satu daerah.

*Tabel 2.326  
Rasio Ketergantungan*

No	Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Penduduk usia <15th + usia >64th	Jiwa						
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa						
3	<b>Rasio ketergantungan</b>	<b>%</b>						

#### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

##### 2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun n-1 mendasarkan pada RPJMD Tahun tahun berjalan

*Tabel 2.327  
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun n-1*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Angka Kemiskinan			

2	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Indeks Keberdayaan Masyarakat			
3	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Pola Pangan Harapan			
4	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Angka Pertumbuhan Ekonomi			
6	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Angka Kriminalitas			
		Jumlah Pelanggaran Perda			
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah			
		Angka harapan lama sekolah			
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup			
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif			
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks infrastruktur Wilayah			
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah			
		Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah			

#### 1. Sasaran Kemiskinan Masyarakat Menurun

Penghitungan pencapaian sasaran berdasarkan pada angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Yang menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian kemiskinan di daerah.

Dalam Pencapaian Sasaran ini terdapat Faktor pendorong dan factor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

#### 2. Sasaran Keberdayaan Masyarakat Meningkat

Indikator sasaran ini adalah Indeks Keberdayaan Masyarakat. Indikator Keberdayaan Masyarakat didapat dari komposit indeks pemberdayaan kampung serta persentase perempuan dan anak yang tidak mengalami kekerasan. Pemberdayaan kampung dilihat dari kampung yang sudah diberdayakan melalui deklarasi kampung yakni Kampung Ramah Anak, Kampung Panca Tertib, Kampung Tangguh Bencana/ KTB, Kampung Gerbang Mas/JBM, Kampung Wisata, Kampung Budaya, Kampung Bebas Asap Rokok, Kampung Anti Vandalisme, Kampung Pintar, Kawasan Tanpa Rokok, PHBS, STBM, Kampung Bebas Narkoba, Kampung

Hijau, Kampung Siaga Bencana, Kampung Bebas Jentik Nyamuk/Community Deal PSN-DBD, Kampung Dongeng, Kampung KB, Kampung Literasi, Kampung Jogowargo, Kampung Sadar Gender, Kampung Kesehatan Reproduksi Remaja, Kampung Sayur, Kampung Cyber, Kelurahan Budaya, Kampung Sains dan Literasi, Kampung Cakruk Multi Fungsi, dan Kampung Bebas Pekat. Dan dalam sasaran ini Menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian keberdayaan masyarakat di daerah

Dalam Pencapaian Sasaran Keberdayaan Masyarakat meningkat terdapat Faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

3. Sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

Ketahanan pangan masyarakat meningkat dilihat dari indikator Pola Pangan Harapan. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Tabel 2.328  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun n-1

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi Aktual	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian								
2.	Umbi-umbian								
3.	Pangan Hewani								
4.	Minyak dan Lemak								
5.	Buah/biji berminyak								
6.	Kacang-kacangan								
7.	Gula								
8.	Sayuran dan buah								
9.	Lain-lain								
	<b>Jumlah</b>								

Dalam Pencapaian Sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat terdapat Faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

4. Sasaran Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun  
Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun dilihat dari indikator Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) yang merupakan angka dari BPS, Indeks Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Dalam sasaran ini Menjelaskan mengenai target indeks gini realisasi serta capaiannya.  
Dalam Pencapaian Sasaran Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun terdapat Faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.
5. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Meningkat  
Sasaran kelima memiliki indikator Angka Pertumbuhan Ekonomi. Angka Pertumbuhan Ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas harga konstan yang diterbitkan BPS, pembahasan sasaran ini Menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap pertumbuhan ekonomi  
Dalam Pencapaian Sasaran Pertumbuhan ekonomi meningkat terdapat Faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu penjabaran berdasarkan situasi dan kondisi daerah terkini, Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.
6. Sasaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun  
Sasaran ini memiliki dua indikator, yaitu Angka Kriminalitas dan Jumlah Pelanggaran Perda. Kriminalitas termasuk faktor yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk. Kriminalitas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sasaran ini juga menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap angka

kriminalitas, serta pelanggaran perda.

Berdasarkan sasaran gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga diuraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

7. Sasaran Kualitas Pendidikan Meningkat

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Yang menjelaskan target realisasi serta capaian kualitas pendidikan. dalam sasaran ini menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Dari Sasaran Kualitas Pendidikan meningkat terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga diuraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

8. Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sasaran ini memiliki indikator Angka Harapan Hidup, Angka harapan hidup merupakan lama hidup manusia di dunia. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk Angka harapan hidup merupakan lama hidup manusia di dunia. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk di pengaruhi oleh adalah pola makan, penyakit menular, penyakit bawaan lahir, lingkungan tempat tinggal, stres atau tekanan. Sasaran ini menjelaskan target realisasi serta capaian terhadap Harapan hidup masyarakat daerah.

Dari Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga diuraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

9. Sasaran Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Indikator sasaran ini adalah Persentase Rintisan Kelurahan

Budaya yang Aktif. Aktivitas Rintisan Kelurahan Budaya yang menjadi indikator keaktifan pada tahun n-1 meliputi dialog budaya (seminar/workshop budaya), keaktifan dalam forum, Aktualisasi Seni Budaya, Gelar Potensi Seni Budaya, Pentas Seni, keikutsertaan dalam pameran yang menampilkan kekayaan kuliner dan produk-produk UMKM dari setiap Rintisan Kelurahan Budaya, Pawai, dan Penyelenggaraan Upacara Adat. Dan yang utama dalam sasaran ini menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian keaktifan rintisan kelurahan budaya.

Berdasarkan Sasaran Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

10. Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan

Indikator sasaran ini adalah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan. dalam sasaran ini juga menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang.

*Tabel 2.329  
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun n-1*

No.	Fungsi	Rencana (Ha)	Eksisting (Ha)	Selisih (Ha)
1.	Hunian			
2.	Perdagangan dan Jasa			
3.	Perkantoran			
4.	Industri			
5.	Sarana Pendidikan			
6.	Sarana Kesehatan dan Keagamaan			
7.	Sarana OR dan Rekreasi			
8.	Sarana Transportasi			
9.	Cagar Budaya			
10.	Pariwisata			
11.	RTH			
12.	RTH Khusus			
13.	Sempadan Sungai			
14.	Sungai			
15.	Jalan			
16.	Lahan Kosong			
17.	Sawah			
18.	Tanah Produktif			
	<b>Total</b>			
	<b>Ketidaksesuaian</b>			
	<b>Kesesuaian</b>			

Berdasarkan Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Meningkat terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

11. Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan

Indikator sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Menjelaskan mengenai target dan realisasi serta capaian pada sasaran ini dimana Ruang Lingkup IKLH meliputi analisis indeks kualitas air, kualitas udara, dan indeks tutupan vegetasi. sasaran ini menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di daerah.

Tabel 2.330  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No.	Indikator	Parameter	Bobot	Realisasi	Perhitungan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, Total Coliform			
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub>			
3	Indeks Tutupan Vegetasi (ITV)	Luas Tutupan Lahan dan Dinamikasi Vegetasi			
<b>IKLH : (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x ITV)</b>					

Berdasarkan Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

12. Sasaran Infrastruktur Wilayah Meningkatkan

Sasaran ini memiliki indikator Indeks Infrastruktur Wilayah yang dihitung melalui komposit Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Permukiman (Dinas PUPKP), Indeks Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup), Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Service) (Dinas Perhubungan), Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana (BPBD) serta Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran (Dinas Kebakaran); yang dihitung dari [40% x {70% {Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum} + {30% Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman}} + [20% {50% pengurangan sampah + 50%

pengangkutan sampah}] + 30% Level of Service + [10% (Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana + Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran)/2]. Serta menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian pada sasaran ini.

Berdasarkan Sasaran Infrastruktur Wilayah Meningkatkan terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

13. Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. dalam sasaran ini juga menjelaskan mengenai target realisasi serta capaian terhadap kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Berdasarkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang perlu penjabaran lebih lanjut bersesuaian dengan kondisi dan situasi terkini. Selain itu juga di uraikan OPD mana saja pendukung dari sasaran ini.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJMD Daerah sampai dengan Tahun n-1

Tabel 2.331

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019				Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)			
		Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan (Rp)					Tingkat Realisasi Fisik (%)	Tingkat Realisasi Keuangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN WAJIB																
...																

### 2.2.3. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Daerah

#### ➤ Kinerja Fisik

Menjabarkan tentang pencapaian kinerja fisik yang di peroleh dari pelaporan masing-masing perangkat daerah, untuk mengetahui besaran realisasi dan capaian pada tahun n-1 dari target fisik yang telah di tentukan,

*Tabel 2.332  
Target dan Realisasi Fisik Tahun n-2 - n-1*

		TW I	TW II	TW III	TW IV
n-2	Target Realisasi				
n-1	Target Realisasi				

Kemudian di lakukan perbandingan realisasi pada tahun n-1 dengan realisasi tahun n-2, yang menghasilkan perolehan nilai deviasi, dan di jabarkan penyebab terjadinya deviasi.

#### ➤ Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan kegiatan diperoleh melalui pelaporan masing- masing perangkat daerah, untuk mengetahui realisasi terhadap kinerja keuangan, dimana sebelumnya di lakukan perbandingan antara realisasi tahun n-1 dengan realisasi tahun n-2, yang menghasilkan perolehan nilai deviasi, dan di jabarkan penyebab terjadinya deviasi.

*Tabel 2.333  
Target dan Realisasi Keuangan n-2 - n-1*

		TW I	TW II	TW III	TW IV
n-2	Target Realisasi				
n-1	Target Realisasi				

Untuk capaian keuangan keseluruhan OPD di daerah tentunya terdapat OPD yang memiliki capaian predikat kinerja sangat tinggi, tinggi, dan predikat rendah, dengan klasifikasi range sebagai berikut.

#### *Proporsi capaian Keuangan Perangkat Daerah*

Range Nilai	Predikat Kinerja
$x > 90\%$	Sangat Tinggi
$75\% < x \leq 90\%$	Tinggi
$65\% < x \leq 75\%$	Sedang
$50\% < x \leq 65\%$	Rendah
$x \leq 50\%$	Sangat Rendah

*Tabel 2.334*  
*Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD*

No	OPD/Bagian/ Kecamatan	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja OPD		Kinerja	Realisasi Renja OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)				
1							
2							
...	....	....	....	....	....	....	....

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

#### 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pada bagian ini menjabarkan mengenai isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta permasalahan yang terkait dengan suatu keadaan luar biasa yang dapat menimbulkan permasalahan baru, serta yang mengharuskan mendapat penanganan yang cepat, karena dapat berdampak pada kestabilan perekonomian daerah, nasional, bahkan global.

#### 2.3.2. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Menjabarkan mengenai permasalahan daerah terkait urusan pemerintah daerah berdasarkan urusan yang diampuh oleh perangkat daerah (berdasarkan OPD yang ada pada suatu daerah), serta permasalahan terkait dengan fungsi penunjangnya seperti :

1. Belum efektif dan efisiennya penyusunan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran
2. Belum seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti
3. Jumlah pelanggaran pegawai semakin meningkat
4. Belum terpenuhinya penataan kebutuhan ASN Pemerintah Daerah

5. Masih terdapat ASN yang tidak lulus dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
6. Realisasi pelaksanaan kegiatan belum tepat sesuai target 100%
7. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah memiliki tepat struktur tepat fungsi

### 2.3.3. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Sasaran dan Program Perangkat daerah

Bagian ini disajikan penjabaran permasalahan Pemerintah daerah berdasarkan sasaran dan Program yang di ampuh oleh Perangkat daerah, yang berkenaan dengan sasaran OPD terhadap beberapa misi yang ada.

## BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi dan perkiraan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menguraikan tentang arah kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah daerah yang sejalan dengan arah kebijakan provinsi dan pusat, yang ditujukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan penguatan ekonomi wilayah.

#### 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Menjelaskan mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan,

untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

*Tabel 3.1*  
*DRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha*

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan					
D	Pengadaan Listrik dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi					
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi					
K	Jasa Keuangan dan Asuransi					
L	Real Estate					
M,N	Jasa Perusahaan					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan					
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
S,T,U	Jasa Lainnya					
<b>PDRB Kota Bima ADHB</b>						
<b>PDRB Provinsi NTB ADHB (Miliar Rupiah)</b>						

### 3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Menjelaskan dimana Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia

terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

#### 3.1.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah tersebut. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan.

#### 3.1.4. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kestabilan inflasi menjadi penting bagi perekonomian dengan pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

#### 3.1.5. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

#### 3.1.6. Kemiskinan

Menjabarkan mengenai garis kemiskinan penduduk yang ada dalam suatu daerah. dimana kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk miskin.

### 3.1.7. Ketimpangan Pendapatan

Menjelaskan mengenai ketimpangan pendapatan atau ketidakmerataan pendapatan penduduk suatu wilayah, Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Gini, dimana penurunan Indeks Gini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin kecil.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjabarkan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, dimana Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

*Tabel 3.2*  
*Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan*

NO.	URAIAN	REALISASI			APBD Tahun Berjalan	NO.	URAIAN	Proyeksi/Target Tahun Rencana
		n-3 (Audited)	n-2 (Audited)	n-1 (Audited)	n			n+1
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>							
1.1.1.	Pajak Daerah							
1.1.2.	Retribusi Daerah							
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>							
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak							
1.2.2.	Dana Alokasi Umum							
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus							
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>							
1.3.1.	Hibah							
1.3.2.	Dana Darurat							
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya							
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus							
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya							

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Menguraikan tentang Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

#### 3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menjabarkan mengenai Sumber-sumber PAD yang ada di suatu daerah, dimana Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang Sah. Selaian hal tersebut dijabarkan pula tentang arah kebijakan pendapatan asli daerah padat tahun anggaran berjalan.

*Tabel 3.3.*  
*Capaian Target Pendapatan Asli Daerah*

No.	URAIAN	n-3 (Audited)			n-2 (Audited)			n-1 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1.1.	Pajak Daerah									
1.1.2.	Retribusi Daerah									
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan									
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah									
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>										

### 3.2.1.2. Dana Perimbangan

Menjabarkan mengenai adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama yang meliputi: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (b) Dana Alokasi Umum; dan (c) Dana Alokasi Khusus.

*Tabel 3.4  
Capaian Dana Perimbangan*

No.	URAIAN	n-3 (Audited)			n-2 (Audited)			n-1 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak									
1.2.2.	Dana Alokasi Umum									
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus									
<b>Dana Perimbangan</b>										

### 3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Menjabarkan mengenai lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Secara umum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu mencapai target yang ditetapkan.

*Tabel 3.5  
Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah*

No.	URAIAN	n-3 (Audited)			n-2 (Audited)			n-1 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.3.1.	Hibah									
1.3.2.	Dana Darurat									
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya									
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus									
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya									
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>										

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Bagian ini menjelaskan Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

*Tabel 3.6  
Capaian Target Belanja Daerah*

No.	URAIAN	n-3 (Audited)			n-2 (Audited)			n-1 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>									
2.1.1.	Belanja Pegawai									
2.1.2.	Belanja Bunga									
2.1.3.	Belanja Subsidi									
2.1.4.	Belanja Hibah									
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial									
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota									
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kepada Partai									
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga									
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>									
2.2.1.	Belanja Pegawai									
2.2.2.	Belanja Barang dan									
2.2.3.	Belanja Modal									
	<b>Belanja Daerah</b>									

#### 3.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Menjelaskan tentang kebijakan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

### 3.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Menjelaskan tentang kebijakan belanja langsung yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Alokasi belanja langsung dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.
2. Alokasi belanja langsung dalam rangka pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social.
3. Alokasi dalam rangka kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
4. Alokasi belanja terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan-peraturan yang ada.

*Tabel 3.7  
Proyeksi/Target Belanja*

NO.	URAIAN	Proyeksi/Target Tahun Rencana
		n+1
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	
2.1.1.	Belanja Pegawai	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.3.	Belanja Bunga	
2.1.4.	Belanja Subsidi	
2.1.5.	Belanja Hibah	
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	
<b>2.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	
<b>2.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Menguraikan tentang Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

*Tabel 3.8*  
*Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah*

NO.	URAIAN	Proyeksi/Target Tahun Rencana
		n+1
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	-

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran n+1 sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja n+1

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
1.1.1.	Pajak Daerah	
1.1.2.	Retribusi Daerah	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
<b>1.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	
1.3.1.	Hibah	
1.3.2.	Dana Darurat	
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	
2.1.1.	Belanja Pegawai	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.3.	Belanja Bunga	
2.1.4.	Belanja Subsidi	
2.1.5.	Belanja Hibah	
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	
<b>2.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	
<b>2.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	
	<b>Jumlah Belanja</b>	
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	-

#### BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

##### 4.1, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

*Tabel 4.1  
Hubungan Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan*

Misi	Tujuan	Sasaran

#### 4.2. Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah.

Menjelaskan penyesuaian arahan kebijakan sasaran dan target makro pembangunan nasional, provinsi, dan daerah

*Tabel 4.2  
Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional Provinsi, dan Daerah*

No	Indikator	Target n+1		
		Nasional	Provinsi	Kab/Kota
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)			
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
3.	Indeks Gini			
4.	IPM (%)			
5.	Angka Kemiskinan (%)			

*Tabel 4.3  
Penyesuaian Sasaran dan Target RKP n+1*

No.	Indikator	Proyeksi Tahun n+1
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5 - 8,2
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 - 9,7
4.	Rasio Gini	0,377-0,379
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 - 72,90

Penyesuaian target pembangunan daerah disusun berdasarkan 3 skenario, yaitu skenario pesimis, moderat, dan optimis.

*Tabel 4.4  
Asumsi Makro dan Penyesuaian Target RKPD*

No.	Indikator	n			N+1			N+2		
		Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis	Pesimis	Moderat	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)									
2.	Tingkat Kemiskinan (%)									
3.	Rasio Gini									
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									

##### 4.2.1. Penyesuaian Target Pertumbuhan Ekonomi

Menjelaskan mengenai penyesuaian terhadap target pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan dengan dinamika kondisi yang terjadi, atau pun yang di akibatkan oleh suatu keadaan luar biasa yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian.

##### 4.2.2. Penyesuaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPP)

Menjelaskan mengenai penyesuaian terhadap tingkat pengangguran

terbuka yang diakibatkan oleh suatu dinamika kondisi yang terjadi, atau pun yang di akibatkan oleh suatu keadaan luar biasa yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian.

#### 4.2.3. Penyesuaian Persentase Penduduk Miskin

Menjelaskan penyesuaian persentase penduduk miskin yang diakibatkan oleh suatu dinamika kondisi yang terjadi, atau pun yang di akibatkan oleh suatu keadaan luar biasa yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian.

#### 4.2.4. Prediksi Gini Ratio Daerah

Gini Ratio menjadi alat ukur pemerataan distribusi pendapatan perkapita. Dinama nilai gini ratio menurun yang berarti tingkat ketimpangan penduduk semakin kecil. Nilai ini dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antarkelompok penduduk, apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan mengecil.

*Tabel 4.5  
Penyesuaian Sasaran dan Target Makro*

No.	Indikator	Penyesuaian Target n+1		
		Nasional	Prov	Kab/Kota
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)			
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
3.	Indeks Gini			
4.	IPM			
5.	Angka Kemiskinan (%)			

#### 4.3. Tema Pembangunan

Menjelaskan tentang tema pembangunan terkait kebijakan RKPD daerah yang memperhatikan tema rencana kerja pembangunan nasional.

#### 4.4. Hubungan Tematik Pembangunan Dengan Visi Pembangunan Daerah.

Menjelaskan tentang hubungan Tematik pembangunan yang dengan visi pembangunan daerah sebagai percepatan pemulihan sosial ekonomi Dengan mempertahankan standart pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih mengkondisikan masyarakat untuk tetap menjaga kualitas sumber daya manusia.

#### 4.5. Prioritas dan sasaran Pembangunan

Menjelaskan mengenai prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan memfokuskan pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Provinsi. Dimana Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden,

#### 4.6. Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan mengenai target sasaran pembangunan daerah pada tahun  $n+1$  dengan menentukan indikator sasaran dari sasaran pembangunan daerah, dan menentukan target terhadap indikator sasaran pada tahun  $n+1$

*Tabel 4.6  
Penetapan Indikator Kinerja Tahun  $n+1$*

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1			
2			
3			
4	.....	.....	.....

Berdasarkan penetapan indikator kinerja daerah, kemudian dijabarkan aspek-aspek dalam rangka peningkatan ataupun penurunan pencapaian target daerah beserta OPD pelaksana dari tiap aspek sasaran pembangunan daerah.

*Tabel 4.7  
Aspek dan Perangkat daerah Untuk Pencapaian Target Pembangunan Daerah*

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
1			
2			
3			
4	.....	.....	.....

#### 4.7. Sinkronisasi Dengan Tematik Pembangunan Provinsi

Pada bagian ini menjelaskan mengenai tematik pembangunan Provinsi yang di sinkronkan dengan program kegiatan yang

dilaksanakan atau di dukung oleh daerah (Kabupaten/Kota) berdasarkan OPD pelaksana.

- 4.8. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial.

*Tabel 4.8  
Sinkronisasi SPM dan Prioritas Daerah n+1*

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM	Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
1	Pendidikan			
2	Kesehatan			
3	Pekerjaan Umum			
4	Perumahan Rakyat			
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
6	Sosial			

#### 4.9. Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Kab/Kota)

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang.

##### 4.9.1 Tujuan Pokok-Pokok Piran DPRD (Kab/Kota)

Menjabarkan mengenai tujuan disusunnya poko-pokok pikiran DPRD terhadap penyusunan Dokumen RKPD, RPJPD, RPJMD, serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

#### 4.9.2. Rekomendasi DPRD (Kab/Kota) Untuk Perencanaan Pembangunan n+1

Menjelaskan rekomendasi DPRD (Kab/Kota) yang tertuang dalam Poko-pokok pikiran DPRD serta sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah (kab/kota)

### BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tidak meninggalkan indikator dan target yang tercantum dalam RPJMD tahun berjalan.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program, kegiatan, sub kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun n+1. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun n+1 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Kab/Kota) untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Selain SPM, Sustainable Development Goals (SDG's) yang sudah menjadi komitmen bersama.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data

dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun  $n+1$ . Prioritas Program dalam RKPD tahun  $n+1$  terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Di sisi lain, dalam RKPD juga memuat mengenai program dan kegiatan dengan pendanaan

Tabel 5.1  
Usulan Program dan Kegiatan Daerah (Kab/ Kota) Tahun Anggaran n+1

No.	OPD	NAMA PROGRAM (RPJMD Daerah)	NAMA PROGRAM (RKPD Daerah n+1)	Kegiatan	KEGIATAN (RKPD DAERAH n+1)	SUB KEGIATAN (RKPD DAERAH n+1)	KELUARAN		USULAN ANGGARAN	KETERANGAN
							TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>URUSAN TATA RUANG</b>										
1										
2										
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
								<b>JUMLAH</b>		
<b>URUSAN PERTANAHAN</b>										
1										
2										
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
								<b>JUMLAH</b>		
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>										
1										
2										
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
								<b>JUMLAH</b>		
<b>URUSAN KELEMBAGAAN</b>										
1										
2										
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
								<b>JUMLAH</b>		



## BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menjelaskan mengenai indikator kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

*Tabel 6.1*  
*Indikator Kinerja dan Target Daerah Tahun  $n+1$*

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	....	....	....

Tabel 6.2  
Indikator Kinerja dan Target Perangkat Daerah Tahun n+1

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	<b>URUSAN WAJIB</b>			
	<b>PENDIDIKAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KESEHATAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KETAHANAN PANGAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>SOSIAL</b>			
1				

2				
3	....	....	....	....
	<b>TENAGA KERJA</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PERTANAHAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
1				
2				

3	....	....	....	....
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PERHUBUNGAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PENANAMAN MODAL</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PERSANDIAN</b>			
1				

2				
3	....	....	....	....
	<b>KEBUDAYAAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PERPUSTAKAAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KEARSIPAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
	<b>PARIWISATA</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PERTANIAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PERDAGANGAN</b>			

1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>PERINDUSTRIAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>TRANSMIGRASI</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>URUSAN PENUNJANG</b>			
	<b>PERENCANAAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KEUANGAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....

	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>INSPEKTORAT</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
1				
2				
3	....	....	....	....

## BAB VII Penutup

Berisikan uraian penutup dokumen yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Daerah.



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH

PENYAJIAN DOKUMEN RENJA

Renja PD Tahun Tahun berjalan disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun tahun berkenan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan dan tema pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif Renja PD disesuaikan dengan program prioritas PD.
2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana strategis Perangkat Daerah  
Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementerian/ Lembaga) dan PD Provinsi  
Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD provinsi.

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun berkenan dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih. Sebagai contoh disajikan Visi Kepala Daerah Tahun 2018-2023 "Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri". Dengan Misi Kepala Daerah:

1. Mewujudkan masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing
2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan

pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan

3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais

Dalam merumuskan tema pembangunan Kota Bima tahun berkenaan juga memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai contoh tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi NTB sebagai berikut:

- a. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2018

“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

- b. Tema Pembangunan NTB (RKPD NTB) Tahun 2018

“Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Dengan Memantapkan Infrastruktur dan Memacu Investasi yang Berkelanjutan”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kota Bima juga harus memperhatikan tema pembangunan dari Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum dalam penyusunan Renja PD agar substansi yang dibahas pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa subbab meliputi:

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen PD, Renstra PD, dengan Renja K/L, dan Renja PD provinsi, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja PD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu ( $n-2$ ) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun  $n-1$ ), mengacu pada APBD tahun tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun  $n-2$  yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan tahun  $n-2$  yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

3. Realisasi program dan kegiatan tahun n-2 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun n-2;
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun berjalan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1. yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun .... (tahun berjalan)\* Kota Bima

Nama Perangkat Daerah: .....

Lembar: .....

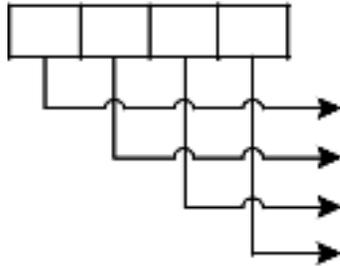
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun .....	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan .....									
1 01	Bidang Urusan .....									
1 01 01	Program .....									
1 01 01 01	Kegiatan.....									
1 01 01 02	Kegiatan.....									
1 01 01 03	Dst....									
1 01 02	Program .....									
1 01 02 01	Kegiatan.....									
1 01 02 02	Kegiatan.....									
1 01 02 03	Dst .....									
1 01 03	Program .....									
1 01 03 01	Kegiatan.....									
1 01 03 02	Kegiatan.....									
1 01 03 03	Dst .....									

....., 20....

Kepala Perangkat Daerah \*) .....

**Cara Pengisian:**

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) diisi sebagai berikut:

uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra PD.
- Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
- Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut:

Program: "Program Pendidikan Dasar SD"

Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM) SD"

Kegiatan 1: "Pembangunan gedung SD/MI".

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah gedung sekolah yang terbangun"

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra PD pada akhir tahun Renstra PD (menyesuaikan karakteristik data target).
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra PD pada akhir tahun Renstra PD (menyesuaikan karakteristik data target).
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra PD.
- Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra PD.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun n-3.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun n-3.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD tahun n-2.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD tahun n-2.

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja PD tahun n-2 yang telah dilaksanakan.
- b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD.
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realiasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD.

Kolom (8) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD dalam bentuk persentase.
- b. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD dalam bentuk persentase.
- c. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
- d. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap PD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk PD tahun berikutnya.

Kolom (9) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja renja Perangkat Daerah tahun n-1.
- b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja renja Perangkat Daerah tahun n-1.

Kolom (10) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran perkiraan realisasi capaian program s/d tahun berjalan (n-1).
- b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran perkiraan realisasi capaian program s/d tahun berjalan (n-1).
- c. kolom (10) = kolom (5) + kolom (7) + kolom (9)

Kolom (11) diisi sebagai berikut:

- a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi capaian program s/d tahun berjalan (tahun n-1) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam reuiu rancangan Renstra PD atau rancangan Renstra PD dengan target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) tahun ..... dalam bentuk persentase.
- b. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi capaian kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam reuiu rancangan Renstra PD atau rancangan Renstra PD dengan target kinerja capaian kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) tahun ..... dalam bentuk persentase.
- c. Kolom (11) = (kolom 10/kolom 4) x 100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU (Indikator kinerja Utama), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Dalam bab ini juga memuat indikator kinerja dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Kerja PD Tahun 2017. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel disesuaikan menurut PD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... Kota Bima

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (tnn n)	Tahun .... (thn n+1)	Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (thn n)	Tahun .... (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Cara pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan rumusan indikator.

Kolom (3) diisi dengan rumusan SPM/standar nasional.

Kolom (4) diisi dengan rumusan IKK.

Kolom (5,6, 7, dan 8) diisi dengan target pada masing-masing tahun sesuai rewiu rancangan Renstra PD atau rancangan Renstra PD.

Kolom (9) diisi dengan realisasi capaian target tahun n-2.

Kolom (10) diisi dengan realisasi capaian target tahun n-1.

Kolom (11) diisi dengan proyeksi capaian target tahun n.

Kolom (12) diisi dengan proyeksi caaian target tahun n+1.

Kolom (13) diisi catatan analisis terkait capaian kinerja dibandingkan target yang telah ditetapkan. Contoh: alasan apabila target yang ditetapkan belum tercapai.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Isu-isu penting tersebut mencakup:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Sajikan hasil pengerjaan dalam bentuk tabel 2.3 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ..... Kota Bima

Nama Perangkat Daerah:.....

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Catatan:

- Tempatkan jenis program/kegiatan yang sama antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada baris yang sama.

Cara Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan nama program dan kegiatan untuk PD terkait yang direncanakan untuk tahun rencana, sesuai arahan rancangan awal RKPD;
- Kolom (3) diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal RKPD.
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut rancangan awal RKPD;
- Kolom (5) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut rancangan awal RKPD;
- Kolom (6) diisi dengan pagu indikatif yang direncanakan menurut program/kegiatan menurut rancangan awal RKPD;
- Kolom (7) diisi dengan nama program dan kegiatan untuk PD terkait yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (8) diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan menurut hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (10) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan menurut analisis kebutuhan;
- Kolom (11) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan menurut hasil analisis kebutuhan; dan
- Kolom (12) diisi dengan catatan penting yang merupakan hasil kajian antara arahan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 2.5.1 Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2.5.2 Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2.5.3 Sajikan tabel penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...  
Kota Bima

Nama Perangkat Daerah: .....

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Cara pengisian :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai urutan program dan kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan nama program dan kegiatan untuk PD terkait yang sesuai dengan usulan masyarakat/ pemangku kepentingan;

Kolom (3) diisi dengan lokasi kegiatan yang diusulkan masyarakat/pemangku kepentingan;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target volume program/kegiatan yang direncanakan;

Kolom (6) diisi dengan identitas masyarakat/ pemangku kepentingan pengusul.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan SKPD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan nasional dikaitkan dengan prioritas nasional, sedangkan telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan Tema pembangunan Nusa Tenggara Barat.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
1					
2					
3					

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran
	Tujuan:		
1	..... dst	.....	.....
	Sasaran		
1	..... dst	.....	.....

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, seperti disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.xx(nomor sesuaikan kebutuhan)  
Indikator Kinerja Utama PD

No	IKU	Indikator IKU	Target Kinerja IKU
1			
2			
3			
dst			

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
  - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
  - b. Prioritas pembangunan
  - c. Pencapaian SDGs;
  - d. Pengurangan kemiskinan;

- e. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
  - f. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
  - g. Pencapaian IKU
  - h. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
  - i. Pengembangan wilayah miskin;
  - j. Dan sebagainya, dapat ditambahkan sesuai kondisi masing-masing.
- Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.1 dengan format sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1	Sasaran 1 .....	<b>Program</b> ..... Kegiatan ..... <b>Program</b> ..... Kegiatan .....
2	Sasaran 2 .....	<b>Program</b> ..... Kegiatan ..... <b>Program</b> ..... Kegiatan .....
	dst.	

- B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
  - c. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
  - d. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan  
Kota Bima

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.000)	Ket
1	Prioritas 1	<b>Program</b> ..... Kegiatan ..... <b>Program</b> ..... Kegiatan .....		
2	Prioritas 2	<b>Program</b> ..... Kegiatan ..... <b>Program</b> ..... Kegiatan .....		
3	Prioritas 3	<b>Program</b> ..... Kegiatan ..... <b>Program</b> ..... Kegiatan .....		
4	Prioritas 4	<b>Program</b> ..... Kegiatan ..... <b>Program</b> ..... Kegiatan .....		
	dst			

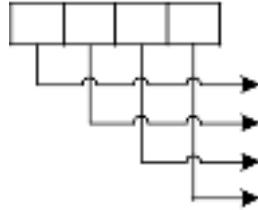
C. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

D. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:



Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan sesuai database program/kegiatan baru.

Kolom (3) diisi indikator kinerja program/kegiatan.

Kolom (4) diisi lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kolom (5) diisi target capaian kinerja.

Kolom (6) diisi kebutuhan dana/pagu indikatif.

Kolom (7) diisi dengan sumber dana.

Kolom (8) diisi catatan penting yang perlu diketahui dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kolom (9) diisi target capaian kinerja tahun  $n+1$ .

Kolom (10) diisi kebutuhan dana/pagu indikatif tahun  $n+1$ .

## BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH

FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

A. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

1. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renstra

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan satu dan/atau lebih dari dua Renstra Perangkat Daerah dibawah koordinasi kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah diselenggarakan setelah Kepala Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Walikota tentang penyusunan rancangan Renstra yang dilampirkan dengan rancangan awal RPJMD. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan forum penting guna membantu memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah tersebut.

Forum ini menjadi semacam uji publik atas rancangan kebijakan pelayanan Perangkat Daerah dalam menangani dinamika kebutuhan dan aspirasi pelayanan para pemangku kepentingan Perangkat Daerah tersebut untuk 5 (lima) tahun mendatang. Forum ini juga menjadi media komunikasi antara Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingannya untuk menyepakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang belum dapat dilakukan Perangkat Daerah melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Tujuan penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah untuk:

- a) Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh Perangkat Daerah atas kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah untuk lima tahun mendatang.
- b) Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan tentang:
  - a. Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun mendatang;
  - b. Tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah jangka menengah;
  - c. Strategi dan kebijakan pelayanan;
  - d. Program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang; dan
  - e. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan awal RPJMD.

Kesepakatan yang dihasilkan oleh forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini menjadi acuan bagi tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Keluaran yang harus dihasilkan oleh forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah materi kesepakatan dengan para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah tentang masukan-masukan bagi penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan ini kemudian disampaikan kepada BAPPEDA LITBANG sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan demikian, forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebelum disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.

#### 1) Materi yang Perlu Disiapkan

Materi yang perlu disiapkan bagi pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini sekurang-kurangnya adalah:

- a. Ringkasan hasil kajian/analisis dan hasil perumusan substansi Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan oleh Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Ringkasan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, dan kecamatan.
- c. Rancangan Awal RPJMD.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah:

(1) Peserta

Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berfungsi sebagai pengambil keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terdiri dari:

Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah;

- a) Kelompok yang memperoleh manfaat/dampak tidak langsung dari pelayanan Perangkat Daerah;
- b) Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- c) Perangkat Daerah yang memperoleh manfaat/dampak langsung/tidak langsung dari pelayanan Perangkat Daerah.

(2) Narasumber

Narasumber forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berfungsi memberikan informasi yang perlu diketahui peserta untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Fasilitator

Fasilitator yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi. Fasilitator bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap kelompok diskusi.

(4) Tim Penyelenggara Forum

Tim penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

adalah tim penyusun Renstra Perangkat Daerah. Tugas Tim Penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah:

- Menyiapkan materi yang diperlukan bagi pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Menyusun jadwal, agenda dan daftar kebutuhan logistik/kelengkapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Mengidentifikasi fasilitator yang akan memandu pembahasan;
- Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Merangkum berita acara kesepakatan hasil penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Menyusun hasil penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
- Menyampaikan kepada BAPPEDA rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

2) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Tahap Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah:

- (1) Menyiapkan materi yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- (2) Menyiapkan jadwal, agenda, tempat dan logistik pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- (3) Menyiapkan tata cara pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah meliputi peserta, narasumber, fasilitator yang akan terlibat, agenda acara, pembagian diskusi kelompok, kriteria prioritas program Perangkat Daerah jangka menengah, dan perumusan kesepakatan dan berita acara;
- (4) Mengumumkan secara terbuka minimal 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

- (5) Mempublikasikan pokok-pokok substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui media masa, minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pokok-pokok substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah sedikitnya memuat:
- Gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya;
  - Isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah untuk ditangani pada 5 tahun mendatang.
  - Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
  - Strategi dan kebijakan pelayanan jangka menengah perangkat daerah.
  - Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
  - Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (6) Mengundang fasilitator yang dinilai memenuhi kualifikasi berikut: memiliki pemahaman yang memadai atas substansi yang akan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, dan memiliki pengalaman yang memadai dalam memfasilitasi diskusi dan penyepakatan hasil;
- (7) Mengundang narasumber yang telah dipilih berdasarkan kompetensi atas bidang pelayanan Perangkat Daerah;
- (8) Menyusun tata tertib pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- (9) Menerima pendaftaran peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan forum Perangkat Daerah. Saat mendaftar, peserta menginformasikan pada kelompok diskusi yang mana dia akan bergabung; dan
- (10) Menyusun daftar pembagian peserta berdasarkan butir

Tahap diskusi dan pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terdiri dari:

A. Pembukaan oleh Kepala Perangkat Daerah;

B. Sidang Pleno I meliputi:

- 1) Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal RPJMD yang sekurang-kurangnya meliputi isu strategis pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah, indikasi

rencana program prioritas daerah, indikator keluaran program, dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- 2) Pemaparan pokok-pokok materi rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Pemaparan materi lainnya sesuai kebutuhan; dan
- 4) Tanggapan umum peserta atas materi yang dipaparkan

C. Sidang kelompok diskusi membahas:

- 1) kriteria prioritas program Perangkat Daerah jangka menengah, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif Perangkat Daerah, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah;
- 2) Pembahasan untuk memperoleh saran, tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari peserta kelompok diskusi;
- 3) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi; dan
- 4) Materi yang disepakati kelompok diskusi diformulasikan kedalam rancangan rumusan hasil keputusan/kesepakatan kelompok diskusi.

D. Sidang Pleno II berisikan pemaparan rancangan hasil sidang kelompok antara lain:

- 1) Hasil penajaman isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
- 2) Berdasarkan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi hasil diskusi kelompok, diambil keputusan untuk disepakati menjadi keputusan sidang pleno II atas setiap materi kelompok diskusi pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
- 3) Perumusan rancangan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yaitu:
  - Merangkum seluruh tanggapan dan saran serta keputusan atas penajaman, dan klarifikasi terkait dengan aspek keterpaduan,

keselarasan, dan keterkaitan antar program dalam sidang pleno II. Dalam kaitan ini dapat dibentuk tim perumus yang berunsurkan fasilitator, wakil-wakil kelompok, narasumber, sesuai dengan kebutuhan; dan

- Rangkuman hasil keputusan sidang pleno II dirumuskan kedalam rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

E. Penutupan mencakup:

- 1) Pembacaan rumusan rancangan berita acara hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 2) Meminta tanggapan akhir dari peserta terhadap rumusan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dibacakan untuk pengambilan keputusan kesepakatan; dan
- 3) Pengambilan keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.

F. Tahap Perumusan Hasil

Perumusan hasil dilakukan dengan sebagai berikut:

- 1) Tim perumus merangkum seluruh hasil pembahasan materi pada sidang pleno I, kelompok diskusi, sidang pleno II, dan sidang pleno III sebagai lampiran dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 2) Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah disetujui ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 3) Berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah yang telah ditandatangani beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang akan disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- 4) Format berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah beserta lampirannya terdiri dari:
  - Rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat

Daerah;

- Rekapitulasi hasil pembahasan kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra Perangkat Daerah;
- Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah;
- Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- Hasil kesepakatan sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Dengan contoh format sebagai berikut:

Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah

HASIL KESEPAKATAN  
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT KOTA BIMA  
PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....

KOTA BIMA

Pada hari .....tanggal..... sampai dengan hari ..... tanggal bulan .....tahun .....telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ..... yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....

J a m : .....

Tempat : .....

forum Perangkat Daerah Kota Bima:

MENYEPAKATI

KESATU: Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah..... Kota Bima. ...Tahun .... - .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA: Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah..... Kota Bima Tahun .... - .... yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA: Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT: Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... Kota Bima Tahun.....- ..... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA: Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah ..... Kota Bima Tahun .....-  
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Kepala Perangkat Daerah  
selaku pimpinan sidang Forum  
Perangkat Daerah.....  
Tanda tangan  
( Nama)

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... Kota Bima

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat

Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL  
KESEPAKATAN FORUM  
PERANGKAT  
DAERAH/LINTAS  
PERANGKAT DAERAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
..... Kota Bima

Tanggal : .....

Tempat : .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst..				

- b. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL  
KESEPAKATAN FORUM  
PERANGKAT  
DAERAH/LINTAS  
PERANGKAT DAERAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah ..... Tahun ..... - .....

Tanggal: .....

Tempat: .....

ISU STRATEGIS:			
1.			
2.			
Dst			
VISI :			
MISI I : .....			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : .....			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst ....			

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN  
 FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS  
 PERANGKAT DAERAH  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... terhadap Isu Strategis,  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah ..... Tahun ..... - .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program .....																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program .....																

						Kegiatan.....															
						Dst .....															
Tujuan 2	Sasaran 1					Program .....															
						Kegiatan.....															
						Program .....															

- d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL  
KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT  
DAERAH/LINTAS PERANGKAT  
DAERAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima

Tanggal : .....

Tempat : .....

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

e. Hasil Kesepakatan Sidang kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL  
KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT  
DAERAH/LINTAS PERANGKAT  
DAERAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

Hasil Kesepakatan Sidang Kelompok ..... Forum Perangkat Daerah/Lintas  
Perangkat Daerah ..... Kota Bima

Tanggal : .....

Tempat : .....

ISU STRATEGIS:			
VISI : .....			
MISI : .....			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1	1. Strategi 1.1	1. Kebijakan 1.1
	2. Sasaran 1.2	2. Strategi 1.2	2. Kebijakan 1.2
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1	1. Strategi 2.1	1. Kebijakan 2.1
	2. Sasaran 2.2	2. Strategi 2.2	2. Kebijakan 2.2
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

Tabel. F.7  
 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah..... Tahun.....— .....  
 Kota Bima terkait dengan pokok bahasan Misi .....

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program .....																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program .....																
				Kegiatan.....																
				Dst .....																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program ....																
				Kegiatan.....																
				Program ....																

Tabel. F.8 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima terkait dengan Pokok Bahasan Misi ....

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

Tabel. F.9 Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

No	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
1.	
2.	
3.	
4.	
Dst....	

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)

Tabel. F.10 Daftar Anggota Sidang Kelompok.....Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi.....Tahun ....-....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan Dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

## 2. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Renja

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia

usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renja dilaksanakan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Walikota tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah membahas rancangan Renja Perangkat Daerah, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Tujuan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD.

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi paling lama pada minggu terakhir bulan Maret dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dengan oleh gubernur, sedangkan Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota paling lama pada minggu terakhir bulan Februari dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur oleh bupati/wali kota.

Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi BAPPEDA.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah:

(1) Peserta

Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota antara lain terdiri dari unsur BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Narasumber

Narasumber forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dapat berasal dari BAPPEDA, Perangkat Daerah, DPRD dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat.

(3) Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
2. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

1. Penyiapan tim penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
2. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
3. Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja Perangkat Daerah, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerah yang akan dibahas;
4. Kepala Perangkat Daerah melaporkan rencana pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kepada Wali Kota cq. kepala BAPPEDA; dan
5. Penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator, dan peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

#### Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

1. Acara pembukaan secara resmi forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
2. Pleno I pemaparan materi antara lain:
  - a. Kebijakan pemerintah kota terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan materi lain yang dianggap perlu;
  - b. Pemaparan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
  - c. Tanggapan dan masukan dari peserta.
3. Sidang kelompok antara lain:

Membahas program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
4. Sidang Pleno II antara lain:
  - a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil siding kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
  - b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah.
5. Penutupan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah antara lain:
  - a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

- b. Tanggapan dan masukan peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
  - c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
6. Rumusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
- a. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - b. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  - c. Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah.  
dengan contoh format sebagai berikut:

Format Berita Acara Kesepakatan  
Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  
..... KOTA BIMA

Pada hari ..... tanggal ..... sampai dengan hari ..... tanggal .....  
bulan ..... tahun ..... telah diselenggarakan forum Perangkat  
Daerah/Lintas Perangkat Daerah ..... Kota ..... yang dihadiri  
pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum  
dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah .....Kota Bima  
Tahun .....

MENYEPAKATI

KESATU: Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah;

KEDUA: Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah .....

Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KETIGA: Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KEEMPAT: Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ini; dan

KELIMA: Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Tahun .....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Pimpinan Sidang (Nama Jabatan)

Tanda tangan

(Nama)

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur BAPPEDA		
3.		Unsur Perangkat Daerah		
4.		Unsur Masyarakat		
5.		Dst ....		

a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
 FORUM PERANGKAT DAERAH  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

Tabel. F.9 DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH .....

Kota : .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp	Tanda tangan

b. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
 FORUM PERANGKAT DAERAH  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

Tabel. F.10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun .....Dan Prakiraan Maju Tahun..... Kota Bima.\*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1

c. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN III : BERTITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
FORUM PERANGKAT DAERAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

Tabel. F. 11 Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah Perangkat Daerah.....Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana;
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas;
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;
- Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh: 10 km<sup>2</sup>, 100 orang, dsb; dan
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.



LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH

PELAKSANAAN MUSRENBANG

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

1. Musrenbang RPJPD

- a. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD.
- b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RPJPD sebagai berikut:

a) Peserta

Peserta musrenbang terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, Kepala BAPPEDA dan Perangkat Daerah, pejabat instansi vertikal di Kota, Camat dan Lurah, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah Kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJPD.

c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJPD.

c. Mekanisme penyelenggaraan musrenbang meliputi:

1. Acara pembukaan;
2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber (Pusat dan Daerah);
3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi.
4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RPJPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RPJPD;
5. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RPJPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RPJPD;  
Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RPJPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
  - a. daftar hadir peserta musrenbang RPJPD;
  - b. kesepakatan visi dan misi jangka panjang RPJPD; dan
  - c. kesepakatan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang dibagi menjadi 4 (empat) periodisasi RPJMD.
6. Acara penutupan musrenbang RPJPD.

2. Musrenbang RPJMD

- a. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari sejak pelantikan kepala daerah.
- b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RPJMD sebagai

berikut:

a) Peserta

Peserta musrenbang terdiri dari wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah tingkat kota, para camat dan lurah ,para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJMD.

c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJMD.

c. Mekanisme penyelenggaraan

1. Acara pembukaan musrenbang
2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para narasumber (Pusat dan Daerah);
3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi kabupaten/kota;
4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RPJMD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RPJMD.

5. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RPJMD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RPJMD.
  6. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
    - a. Daftar hadir peserta musrenbang RPJMD.
    - b. Kesepakatan terhadap misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
    - c. Kesepakatan terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta perangkat daerah; dan
    - d. Kesepakatan terhadap program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan.
  7. Acara penutupan musrenbang RPJMD.
3. Musrenbang RKPD
- a. Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
  - b. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD sebagai berikut:
    - a) Peserta  
Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDALITBANG dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah Kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.
    - b) Narasumber  
Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat

Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD.

c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJMD

c. Mekanisme penyelenggaraan

1. Acara pembukaan musrenbang;
2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para narasumber (Pusat dan Daerah);
3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi kabupaten/kota;
4. Materi yang dibahas antara lain terdiri dari:
  - a. Hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
  - b. Berita acara hasil musrenbang kecamatan
  - c. kesepakatan pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD;
6. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD;  
Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
  - a. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
  - b. kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan

daerah; dan

c. kesepakatan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.

d. kesepakatan terhadap program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD.

7. Acara penutupan musrenbang RKPD.

4. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang

Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang dokumen rencana daerah:

RANCANGAN BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD KOTA BIMA

Tahun .....-.....

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....bertempat di ....., telah diselenggarakan musrenbang RPJPD ..... yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RPJPD.
2. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RPJPD, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....

J a m : .....

Tempat : .....

seluruh peserta musrenbang RPJPD Kota Bima

MENYEPAKATI

KESATU: visi dan misi jangka panjang daerah, dalam rancangan RPJPD provinsi/kabupaten/Kota Bima Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..

KEDUA: arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan RPJPD kota Bima Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

KETIGA: rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RPJPD Kota Bima Tahun....-.... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJPD Kota Bima Tahun....-....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Wali kota Bima

Selaku pimpinan sidang  
musrenbang RPJPD  
Kota Bima

Tanda tangan

( Nama)

Mewakili peserta musrenbang RPJPD Kota Bima .....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

- Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJPD Kota Bima

LAMPIRAN I :BERITA ACARA KESEPAKATANHASIL  
MUSRENBANG RPJPD KOTA BIMA  
NOMOR :  
TANGGAL :

TABEL. F.12 DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RPJPD KOTA BIMA

Provinsi: .....

Tanggal: .....

Tempat: .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

- Format kesepakatan visi dan misi jangka panjang daerah dalam RPJPD Kota Bima

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATANHASIL  
MUSRENBANG RPJPD KOTA BIMA  
NOMOR :  
TANGGAL :

TABEL. F.13 VISI DAN MISI  
JANGKA PANJANG RPJPD  
KOTA BIMA TAHUN ..... - .....

Visi	Misi

- Format kesepakatan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bima

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATANHASIL

MUSRENBANG RPJPD KOTA BIMA

NOMOR :

TANGGAL :

TABEL. F.14 TARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK RPJPD

KOTA BIMA TAHUN ..... - .....

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode I			
1. Sasaran Pokok..... 2. Dst ..... 3. Dst ..... 4. Dst .....			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode II			
1. Sasaran Pokok..... 2. Dst ..... 3. Dst ..... 4. Dst .....			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode III			
1. Sasaran Pokok..... 2. Dst ..... 3. Dst ..... 4. Dst .....			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode IV			
1. Sasaran Pokok..... 2. Dst ..... 3. Dst ..... 4. Dst .....			

RANCANGAN BERITA ACARA  
 HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD KOTA BIMA

Tahun .....-.....

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....bertempat di ....., telah diselenggarakan musrenbang RPJMD Kota Bima yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RPJMD.
- Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJMD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RPJMD, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....

seluruh peserta musrenbang RPJMD Kota Bima

#### MENYEPAKATI

KESATU: tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD Kota Bima Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..

KEDUA: strategi dan program pembangunan daerah dalam rancangan RPJMD.Kota Bima Tahun....-.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

KETIGA: rumusan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD Kota Bima Tahun....-.... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD Kota Bima

Tahun....-....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Wali kota Bima

selaku pimpinan sidang

musrenbang RPJMD

Kota Bima

Tanda tangan

( Nama)

Mewakili peserta musrenbang RPJMD Kota Bima

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJMD Kota Bima

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANGRPJMD KOTA BIMA

NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RPJMD KOTA BIMA

Provinsi: .....

Tanggal: .....

Tempat: .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format kesepakatan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD KOTA BIMA

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG RPJMD KOTA BIMA  
NOMOR :  
TANGGAL :

TABEL. F. 15 MISI, TUJUAN,  
DAN SASARAN RPJMD KOTA  
BIMA TAHUN ..... - .....

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator

c. Format kesepakatan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Bima

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG.RPJMD.KOTA BIMA

NOMOR :  
TANGGAL :

TABEL. F. 16 STRATEGI DAN  
ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA  
BIMA TAHUN ..... - .....

Strategi Pencapaian Visi dan Misi:

1. ....
2. ....
3. Dst.....

No	Arah Kebijakan				
	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4

d. Format kesepakatan program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD Kota Bima

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG RPJMD KOTA BIMA  
NOMOR :  
TANGGAL :

TABEL. F.17 REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN SIDANG-SIDANG KELOMPOK  
MUSRENBANG RPJMD TERHADAP PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG  
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA BIMA  
TAHUN ..... - .....

TANGGAL : .....  
TEMPAT : .....

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Urusan Wajib																
	Pendidikan																
	Program.....																
	Program.....																
	Dst .....																
	Kesehatan																
	Program.....																
	Dst .....																
	Dst .....																
	Urusan Pilihan																
	Pertanian																
	Program.....																
	Program.....																
	Dst .....																
	Dst .....																
	Fungsi Penunjang Urusan																
	Perencanaan																
	Program.....																
	Program.....																
	TOTAL																

RANCANGAN BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG

## RKPD KOTA BIMA

Tahun .....

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....bertempat di ....., telah diselenggarakan musrenbang RKPD Kota Bima yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

2. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD
3. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....

seluruh peserta musrenbang RKPD Kota Bima

### MENYEPAKATI

KESATU: sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kota Bima Tahun.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini..

KEDUA: program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Bima Tahun.... beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara

ini.

KETIGA: rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Bima Tahun ..... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kota Bima Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Wali kota Bima  
selaku pimpinan sidang  
RKPD Kota Bima

Tanda tangan

( Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD Kota Bima

Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kota Bima

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG RKPD KOTA BIMA  
NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD KOTA BIMA

Provinsi: .....

Tanggal: .....

Tempat: .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

b. Format kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD

Kota Bima

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG.RKPD KOTA BIMA  
NOMOR :  
TANGGAL :

TABEL. F.18 SASARAN DAN PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RKPD KOTA BIMA  
TAHUN ..... - .....

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah

c. Format kesepakatan program dan kegiatan Perangkat Daerah RKPD  
Kota Bima

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL MUSRENBANG RKPD KOTA  
BIMA  
NOMOR :  
TANGGAL :

TABEL. F. 19 PROGRAM DAN  
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA BIMA  
TAHUN ..... - .....

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan .....													
	Bidang Urusan .....													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program .....													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan .....													
	Program .....													
	dst ...													

d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Bima

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG RKPD KOTA BIMA  
NOMOR :  
TANGGAL :

TABEL. F. 20 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR  
DALAM RANCANGAN RKPD KOTA BIMA  
TAHUN ..... - .....

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kegiatan.....		
		Kegiatan.....		
		dst .....		

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan permasalahan.

Kolom (3) diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan atau Perangkat Daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.
2. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri

musrenbang dokumen rencana daerah.

3. BAPPEDA menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD antara lain kepada DPRD, Perangkat Daerah, kepada Wali kota dan kepada camat dan lurah atas kesepakatan hasil musrenbang RKPD atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media masa.

#### 5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota di wilayah kecamatan. Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan dilaksanakan oleh Camat.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan antara lain:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari:

### 1. Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

### 2. Narasumber

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat BAPPEDA, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.

### 3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

Musrenbang RKPD Kota di kecamatan dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:

1. Persiapan musrenbang RKPD Kota di kecamatan; dan
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota di kecamatan.

### 6. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota Di Kecamatan Dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Pembentukan Tim

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

#### 2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan.

#### 3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan

untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim Penyelenggara dan bahan pembahasan musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan antara lain:

a) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan

Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dokumen rencana daerah yang dikelompokkan menurut Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bahan diperoleh dari BAPPEDA Kota, yang dapat disusun dan disajikan kedalam format tabel sebagai berikut:

Tabel F.19  
Daftar Rencana Kegiatan Prioritas  
Kecamatan Kecamatan .....\*)  
Tahun.....

No.	Prioritas Kota	Sasaran Kota	Program	Kegiatan Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

\*) Isi sesuai dengan nama kecamatan.

Cara Pengisian Tabel Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan, sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.

Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.

Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang

menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada dokumen rencana daerah tahun sebelumnya.

Kolom (6) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.

Kolom (7) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

b) Kompilasi Hasil Musrenbang Kelurahan

Kompilasi hasil musrenbang Kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang kelurahan, dan dikelompokkan menurut Perangkat Daerah, yang disajikan seperti dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel. F.20

Daftar Prioritas Kelurahan menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : .....\*)  
 Kabupaten/Kota : .....\*)  
 Tahun : .....\*)

No	Kegiatan	Lokasi (kelurahan)	Volume	Keterangan	
				Kesesuaian Dengan Prioritas Daerah Ke...	Status Usulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kelurahan.

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kolom (4) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh: 10 km<sup>2</sup>, 100 orang, dan sebagainya.

Kolom (5) diisi dukungan langsung kegiatan tersebut pada urutan prioritas daerah, misalnya: prioritas ke 1, 2, dan seterusnya.

Kolom (6) diisi status usulan kegiatan prioritas, status 0 adalah usulan tahun n (tahun rencana, misalnya 2017); status 1 adalah usulan tahun n-1 yang perlu percepatan.

Catatan: Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas kecamatan, ditetapkan oleh camat setelah disetujui BAPPEDA.

1. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
  2. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada BAPPEDA kota. Dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada BAPPEDA dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang sebagaimana dimaksud pada nomor D.2.6 (jadwal dan agenda musrenbang kecamatan) diatas.
  3. Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.
  4. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD Kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.
7. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pendaftaran peserta;
  2. Acara pembukaan musrenbang;

3. Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang; dan

4. Sidang Kelompok.

- a. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator;
- b. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi;
- c. Verifikasi usulan kegiatan prioritas kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan oleh peserta kelompok; dan
- d. Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan *rating* untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan *rating* dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat. Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah; (2) kepentingan lintas kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas kelurahan.

Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel. F.21  
 Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria

No	Kegiatan	Kriteria					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kesesuaian dengan Ranwal RKPd	Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas pembangunan Kota	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat	Dukungan nilai tambah	Lain-lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.

Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diusulkan.

Kolom (3) diisi dengan angka 1 jika kurang sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana daerah, angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana daerah, dan angka 3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal dokumen rencana daerah. Kesesuaian dengan rancangan awal dokumen rencana daerah dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan Perangkat Daerah.

Kolom (4) diisi dengan angka 1 jika kurang berkontribusi, angka 2 jika cukup berkontribusi, dan angka 3 jika sangat berkontribusi.

Kolom (5) diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika cukup sesuai, angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.

Kolom (6) diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan *outcome* yang direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan

sejenisnya.

Kolom (7) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.

Kolom (8) diisi dengan dengan total skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.

Kolom (9) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

- e. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan awal dokumen rencana daerah.
- f. Selanjutnya dilakukan langkah penyelarasan rancangan kegiatan pada rancangan awal dokumen rencana daerah dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan yang dihasilkan dari langkah pada huruf d diatas.

Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah;
- 2) Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam rancangan kegiatan Perangkat Daerah dirancangan awal dokumen rencana daerah, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif;
- 3) Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan Perangkat Daerah yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah; dan
- 4) Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya

oleh satu Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai kegiatan lintas Perangkat Daerah.

- g. Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari kegiatan Perangkat Daerah, berdasarkan prioritas kecamatan yang telah disepakati dalam diskusi kelompok musrenbang kecamatan.
- h. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan, yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut.
- i. Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat Daerah selanjutnya dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel. F.22

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar Perangkat Daerah

Kecamatan .....  
Tahun.....

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Cara Pengisian Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Berdasar Perangkat Daerah

Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.

Kolom (3) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.

- Kolom (5) diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada dokumen rencana daerah tahun sebelumnya.
- Kolom (6) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran kegiatan.
- Kolom (7) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (8) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh:10 km<sup>2</sup>, 100 orang, dan sebagainya
- Kolom (9) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (10) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- j. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain:

- 1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi;
  - 2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya;
  - 3) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke provinsi; dan
  - 4) alasan lainnya.
- k. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun

dengan cara disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel. F.23  
Daftar Kegiatan yang Belum  
Disepakati Tahun.....\*)  
Kecamatan :  
.....\*)  
Perangkat Daerah  
:.....\*)

No	Kegiatan	Lokasi (Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

\*) isi sesuai dengan tahun/nama kecamatan dan nama Perangkat Daerah

Cara Pengisian Tabel Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati sebagai berikut:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan.
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh:10 km<sup>2</sup>, 100 orang, dsb.
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- m. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.

- n. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.

#### 5) Sidang Pleno II

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:

- 1) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota di kecamatan; dan
  - 2) Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi, dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kota di kecamatan.
5. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.
  6. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibaca kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dokumen rencana kota di kecamatan.
  7. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada wali kota sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kota, dan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang akan dibahas di forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
  8. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampiran terdiri dari:
    - a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang

- dokumen rencana daerah di kecamatan;
- b. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah;
- c. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan; dan
- d. Daftar hadir peserta musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan dengan contoh format sebagai berikut:

Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang  
RKPD Di Kecamatan

RANCANGAN BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG  
RKPD KOTA BIMA  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal .....bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah diselenggarakan musrenbang dokumen rencana daerah kota yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....

J a m : .....

Tempat : .....

musrenbang kecamatan : .....

### MENYEPAKATI

KESATU: Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan ..... Kota Bima Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA: Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten/kota ...\*) Tahun .... - .... beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA: Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan .....Kota Bima Tahun... dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.

KEEMPAT: Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kota Bima ..... Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

( Nama)

Mewakili peserta musrenbang Kecamatan .

NO	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
dst				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

LAMPIRAN I: BERITA ACARA KESEPAKATAN  
 HASIL MUSRENBANG  
 KECAMATAN  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan Kecamatan : .....

Tanggal: .....

Tempat: .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

LAMPIRAN II: BERITA ACARA KESEPAKATAN  
 HASIL MUSRENBANG  
 KECAMATAN  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan: .....

Tahun : .....

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi ( kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

c. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN II: BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL MUSRENBANG  
KECAMATAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati  
Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi (Kelurahan)	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

## **TAHAPAN PERENCANAAN DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)**

### **A. Tahapan input RPJMD.**

1. Bahan yang diperlukan untuk input RPJMD ke dalam SIPD adalah Tabel kebijakan Umum dan Program Pembangunan Berdasarkan Visi dan Misi dan Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai kebutuhan Pendanaan dalam dokumen RPJMD.
2. Buka laman [bima.sipd.kemendagri.go.id](http://bima.sipd.kemendagri.go.id)
3. Pilih **Sistem Informasi Perencanaan Daerah**, kemudian Login menggunakan akun TAPD Perencanaan atau Mitra Bappeda.



4. Kemudian pilih tahun anggaran.
5. Klik **Menu**, kemudian pilih **RPJMD**.
6. Pada halaman **Cascading RPJMD** pilih tombol **+Cascading** setelah itu akan muncul **Form RPJMD**.



7. Klik tombol tanda **Plus (+)** untuk menambah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi.
8. Setelah semua Form RPJMD diinput klik **Simpan**.
9. Ulangi proses nomor 6 (enam) sampai 8 (delapan) hingga semua Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi terisi.

#### **B. Tahapan input Renstra Perangkat Daerah.**

1. Buka laman [bima.sipd.kemendagri.go.id](http://bima.sipd.kemendagri.go.id)
2. Kemudian pilih Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
3. Login menggunakan akun Kepala Perangkat Daerah.
4. Pilih tahun anggaran perencanaan.
5. Klik **Menu**, kemudian klik **RENSTRA**.
6. Untuk menambahkan Renstra Perangkat Daerah, dapat dilakukan dengan klik tombol **+Renstra**. Kemudian akan muncul Form Renstra.



7. Pada Form Renstra, Kepala Perangkat Daerah harus:
  - a. Memilih bidang urusan;
  - b. Memilih program. Program yang muncul merupakan program-program yang sebelumnya sudah masuk ke dalam cascading RPJMD;
  - c. Mengisi indikator program (outcome). Indikator program merupakan indikator program yang sudah masuk ke dalam cascading RPJMD;
  - d. Memilih kegiatan (sesuai dengan program yang sudah dipilih sebelumnya). Daftar kegiatan yang muncul adalah kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  - e. Mengisi tolak ukur indikator kegiatan (output);
  - f. Mengisi target indikator kegiatan (target, satuan dan anggaran) pada 5 (lima) tahun anggaran;
  - g. Memilih sub kegiatan. Sub kegiatan yang dipilih sesuai dengan daftar sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  - h. Mengisi tolak ukur indikator sub kegiatan;
  - i. Mengisi target indikator sub kegiatan (target, satuan dan anggaran) pada 5 (lima) tahun anggaran;
  - j. Memilih perangkat daerah yang berwenang. Daftar perangkat daerah yang muncul pada bagian ini adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan terhadap Bidang Urusan tersebut;

k. Selanjutnya klik **Simpan**.

### C. Tahapan input RKPd dan Renja.

1. Buka laman [bima.sipd.kemendagri.go.id](http://bima.sipd.kemendagri.go.id)
2. Login menggunakan akun TAPD Perencanaan, kemudian buat jadwal untuk Penyusunan RKPd dari proses Rancangan Awal, Rancangan, Musrenbang, Rancangan Akhir dan Penetapan RKPd.
3. Pada jadwal proses input Rancangan Awal RKPd, TAPD Perencanaan juga membuat jadwal untuk input Aspirasi Masyarakat dan input Reses/Pokir Anggota DPRD.
4. Setelah dibuatkan jadwal, Perangkat Daerah Login menggunakan akun **Eselon III** yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan akun **Kepala Perangkat Daerah**.
5. Setelah masuk dengan akun Eselon III, klik **Menu** (garis tiga di bagian kiri atas) kemudian pilih **Sub Kegiatan Belanja**.
6. Setelah terbuka halaman baru, klik tombol **+Kegiatan** untuk menambah sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing bidang termasuk sekretariat pada Perangkat Daerah tersebut.



7. Lengkapi semua isian yang muncul pada **Form Kegiatan**.
8. Setelah semua isian pada **Form Kegiatan** diisi, kemudian klik **Simpan**.

9. Pada **Form Kegiatan**, ada perbedaan input anggaran tergantung pilihan **Mekanisme Pelaksanaan** pada saat pembuatan jadwal RKPD oleh akun TAPD Perencanaan.
10. Apabila dipilih mekanisme pelaksanaan **Menggunakan Rincian Belanja**, maka pada saat akun Eselon III meng-klik **+Kegiatan** yang akan muncul hanya **Anggaran n+1 Sub Kegiatan**. Akan tetapi, apabila mekanisme yang dipilih **Tidak Menggunakan Rincian Belanja** akan muncul **Anggaran Sub Kegiatan** dan **Anggaran n+1 Sub Kegiatan**.
11. Jika mekanisme pelaksanaan RKPD dengan **Menggunakan Rincian Belanja**. Setelah akun **Eselon III** menambah Sub Kegiatan harus men-set operator untuk sub kegiatan tersebut dengan cara klik tombol garis tiga (pada posisi paling kanan) kemudian pilih Set Operator. Tambahkan operator sesuai dengan user **Eselon IV** dan/atau **Staf** yang telah dibuat oleh akun **Kepala Perangkat Daerah**.
12. Selanjutnya untuk menambah rincian belanja pada sub kegiatan, login menggunakan akun **Eselon IV** dan/atau akun **Staf** yang sebelumnya telah diset sebagai **Operator** pada Sub Kegiatan tersebut, kemudian klik **Simpan**.
13. Ulangi langkah nomor 4 (empat) sampai 11 (sebelas) untuk menambah sub kegiatan dan rincian belanja pada sub kegiatan yang lain.

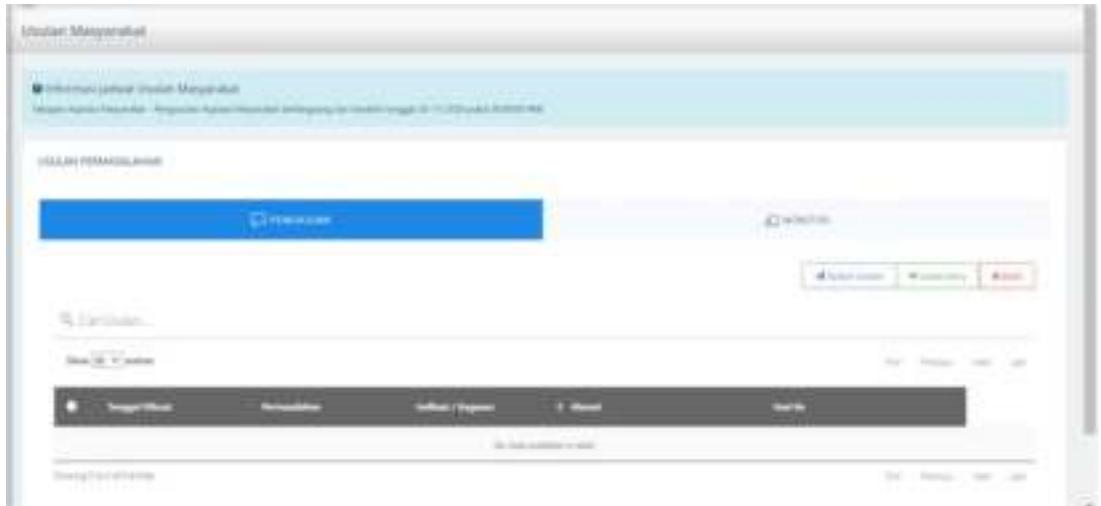
#### **D. Tahapan Musrenbang.**

1. Penyusunan kamus usulan oleh TAPD Perencanaan/Bappeda (sebelum akun masyarakat dan kelurahan menginput usulan, TAPD Perencanaan perlu membuat kamus usulan yang merupakan longlist susulan kegiatan yang dapat dipilih akun masyarakat dan kelurahan).
2. TAPD Perencanaan membuka jadwal usulan perencanaan.
3. Pengisian usulan oleh masyarakat.
  - a. Masyarakat harus membuat akun di SIPD terlebih dahulu baik sebagai lembaga atau individu agar dapat mengajukan usulan, dengan cara:
    - Masuk ke laman sipd.kemendagri.go.id
    - Klik Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

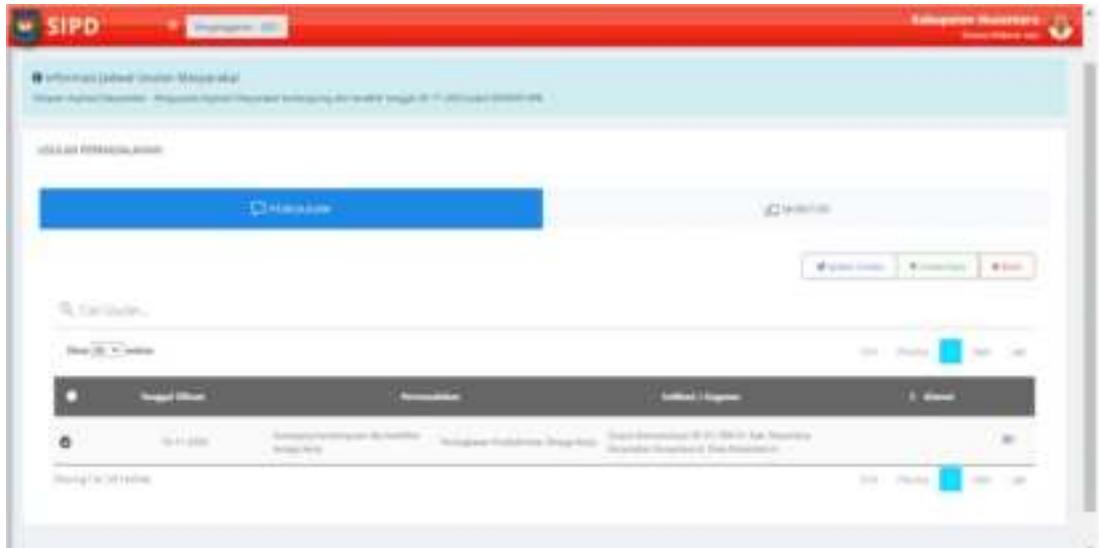
- Pilih provinsi domisili yang dituju.
  - Pilih pemerintah daerah yang dituju.
  - Klik **Pendaftaran** (di pojok kanan atas).
  - Isi Form Registrasi.
  - Pada pilihan jenis profil silahkan dipilih individu/perorangan atau lembaga/organisasi, kemudian lengkapi isian selanjutnya.
- b. Proses input usulan oleh masyarakat dengan cara:
- Masuk ke laman [bima.sipd.kemendagri.go.id](http://bima.sipd.kemendagri.go.id)
  - Klik Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
  - Login menggunakan akun lembaga atau individu.
  - Pilih tahun anggaran.
  - Klik menu **Usulan Masyarakat**.



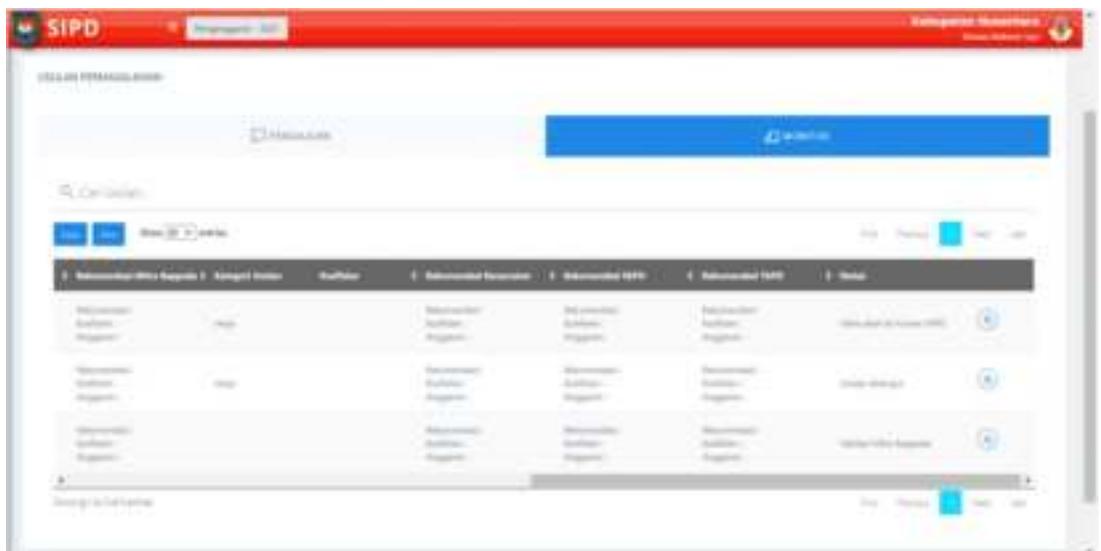
- Kemudian akan muncul halaman usulan masyarakat, klik menu **+Usulan Baru** pada tab **Pengajuan** untuk menginput usulan.



- Kemudian akan muncul **Form Usulan**. Pada pilihan **Usulan**, silahkan pilih daftar usulan yang tersedia berdasarkan permasalahan yang akan diusulkan. Pada pilihan **Permasalahan**, silahkan jelaskan lebih rinci permasalahannya berdasarkan yang sudah dipilih. Kemudian Titikkan (drop pin) lokasi yang diusulkan pada peta dan input alamat yang lebih jelas (RT, RW, kelurahan dll) pada pilihan **Alamat**.
- Setelah semua pilihan yang tersisa telah diisi, terakhir klik **Simpan**.
- Usulan yang sudah disimpan akan muncul di tab **Pengajuan**. Jika tombol **garis tiga** diklik akan muncul menu untuk melihat file yang sudah di-upload sebelumnya.
- Untuk memproses usulan, klik **checklist** pada usulan yang akan diproses, kemudian klik tombol **Ajukan Usulan** untuk mengirim usulan dan klik tombol **Batal** untuk membatalkan usulan.



- Usulan yang sudah dikirim akan masuk ke tab **Monitor**. Pada tab ini pengusul dapat melihat status usulan yang sudah dikirim.

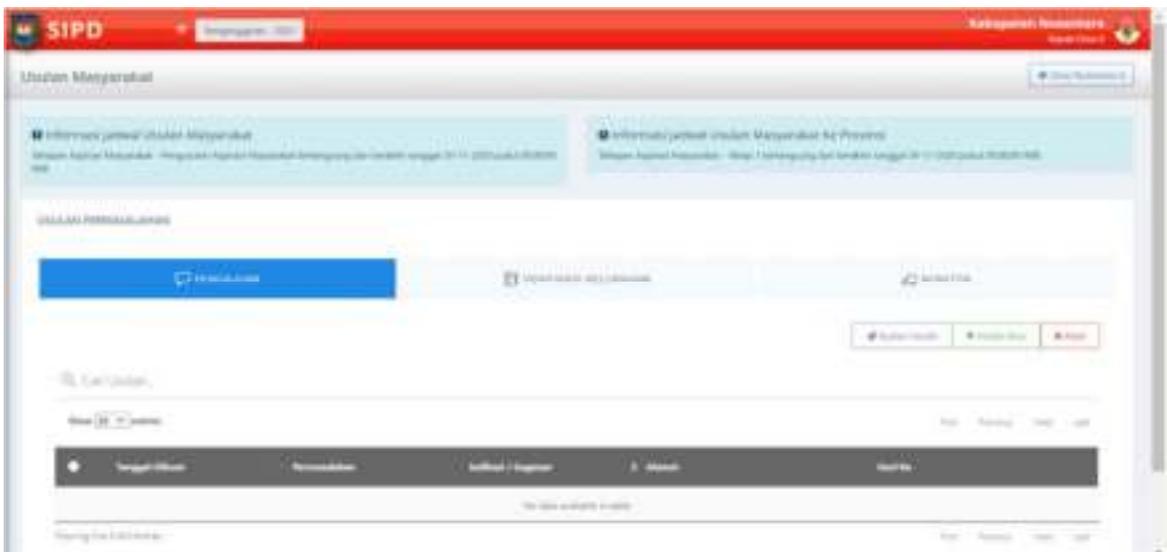


4. Pengisian usulan oleh akun kelurahan.

- Masuk ke laman [bima.sipd.kemendagri.go.id](http://bima.sipd.kemendagri.go.id)
- Login menggunakan username dan password akun kelurahan.
- Pilih tahun anggaran.
- Klik **Menu** kemudian pilih **Usulah Kelurahan/Desa**.

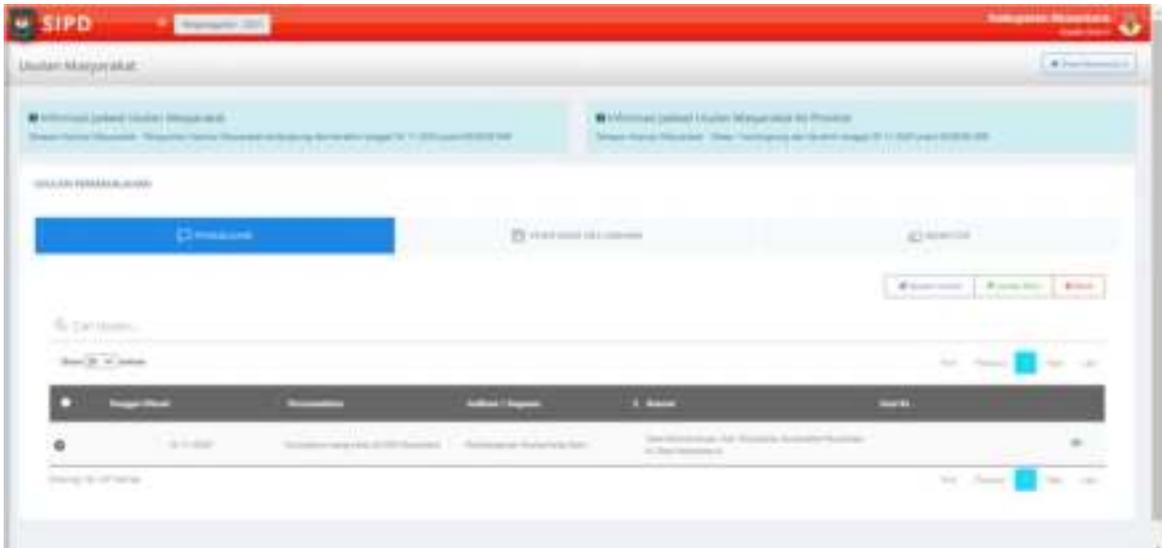


- e. Kemudian akan muncul laman Usulan Masyarakat. Pada tab **Pengajuan**, klik **+Usulan Baru** untuk menginput usulan.

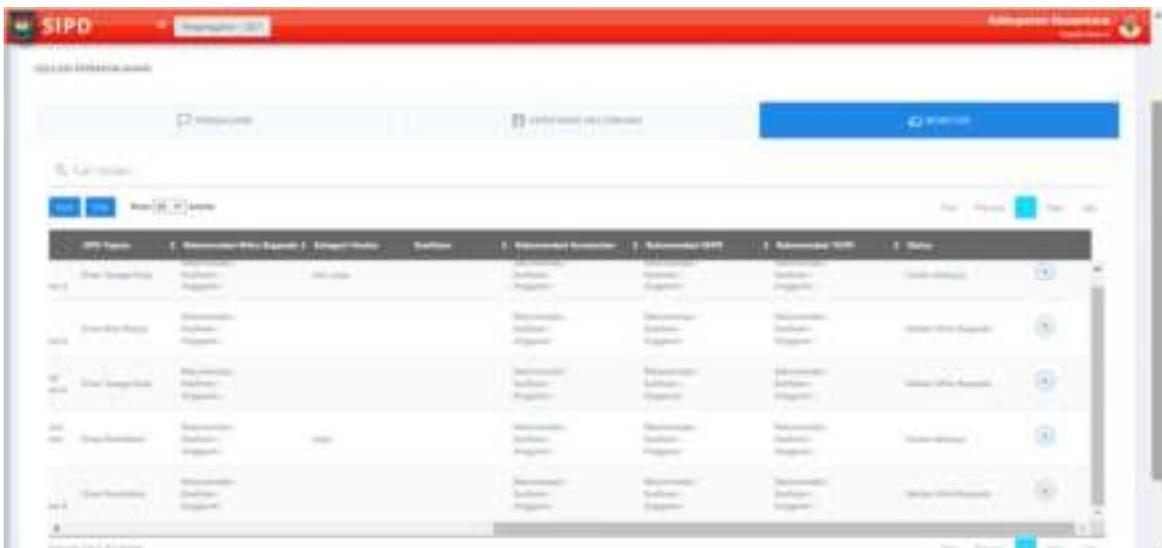


- f. Pada **Form Usulan** yang muncul, pilih provinsi atau kabupaten/kota untuk memilih tingkat kewenangan mana yang akan dijadikan sebagai tujuan untuk usulan yang akan diajukan. Pada pilihan **Usulan**, silahkan dipilih daftar usulan yang tersedia (yang sudah diinput oleh TAPD Bappeda) berdasarkan permasalahan yang akan diusulkan. Pada pilihan **Permasalahan**, silahkan jelaskan lebih rinci permasalahannya berdasarkan yang sudah dipilih. Kemudian Titikkan (drop pin) lokasi yang diusulkan pada peta dan input alamat yang lebih jelas (RT, RW, kelurahan dll) pada pilihan **Alamat**.

- g. Setelah semua pilihan yang tersisa telah diisi, terakhir klik **Simpan**.
- h. Usulan yang sudah disimpan akan muncul di tab **Pengajuan**. Jika tombol **garis tiga** diklik akan muncul menu untuk melihat file yang sudah di-upload sebelumnya.
- i. Untuk memproses usulan, klik **checklist** pada usulan yang akan diproses, kemudian klik tombol **Ajukan Usulan** untuk mengirim usulan dan klik tombol **Batal** untuk membatalkan usulan.

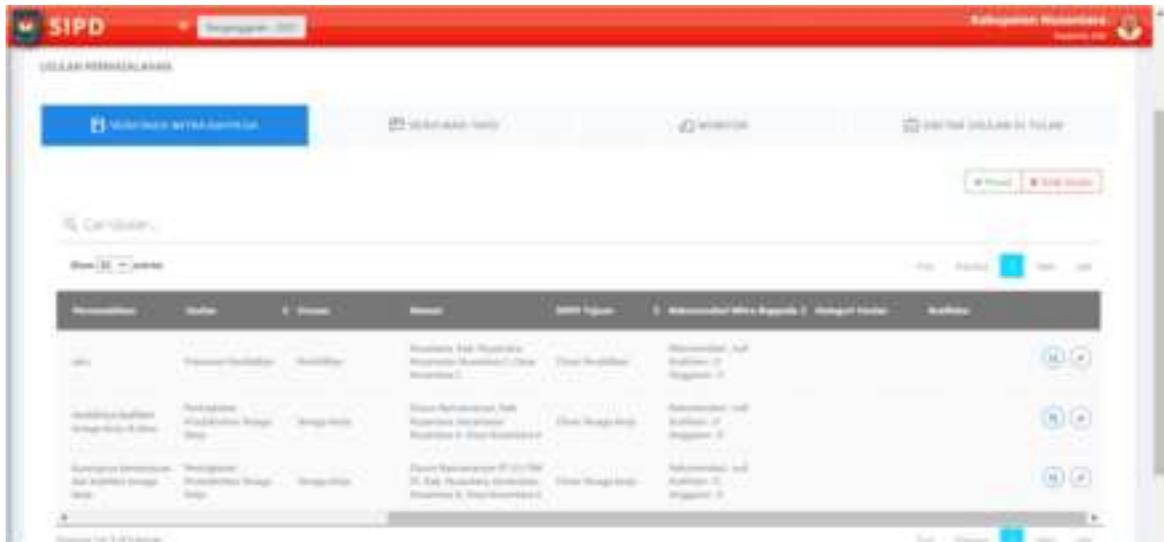


- j. Usulan yang sudah dikirim akan masuk ke tab **Monitor**. Pada tab ini pengusul dapat melihat status usulan yang sudah dikirim.

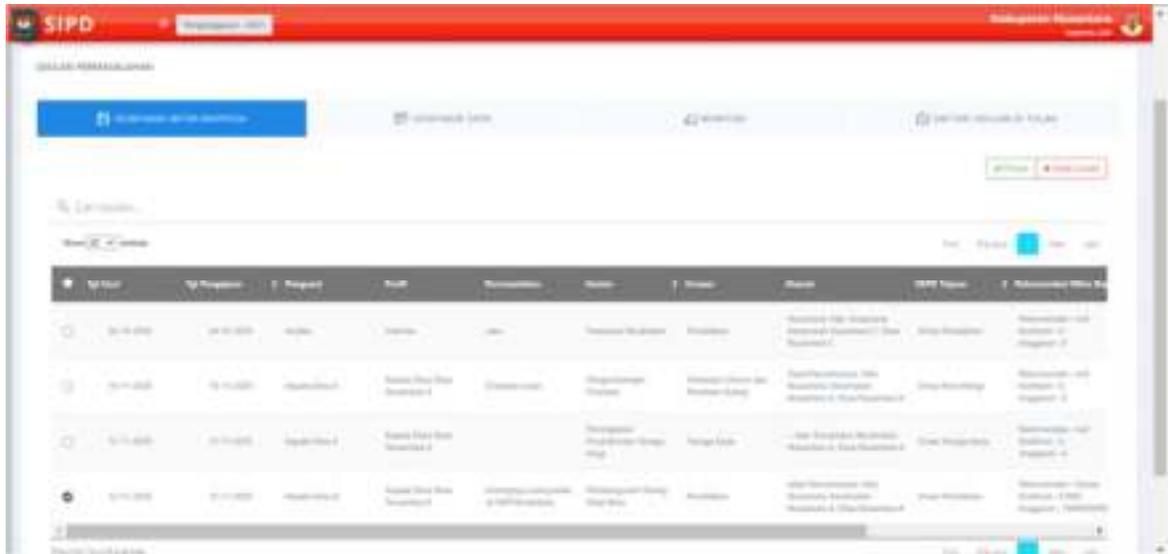


- 5. Verifikasi usulan oleh Mitra Bappeda.
  - a. Login sebagai **Mitra Bappeda**, input username dan password yang sudah diberikan.

- b. Pilih menu **Verifikasi Usulan**, kemudian klik **Masyarakat**.
- c. Usulan yang sudah diinput oleh akun masyarakat akan muncul pada tab **Verifikasi Mitra Bappeda**.

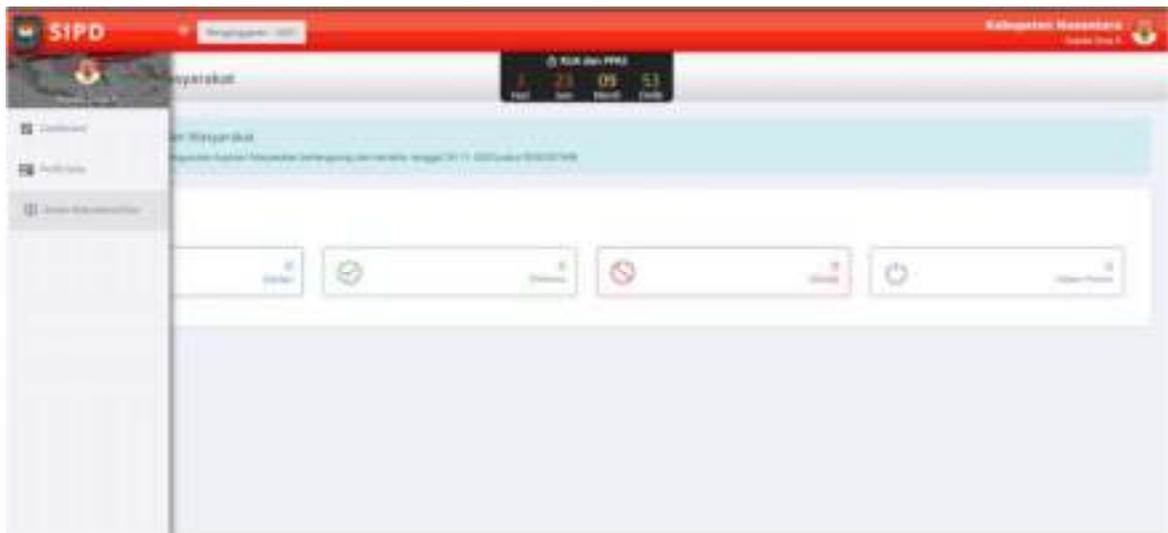


- d. Akun Mitra Bappeda harus memberikan **rekomendasi usulan** pada setiap usulan masyarakat. Klik menu bergambar **Pensil** pada usulan yang akan diproses, kemudian akan muncul Form Rekomendasi Usulan.
- e. Akun Mitra Bappeda perlu menginput kelompok belanja usulan masyarakat tersebut, memilih sub kegiatan yang sesuai dengan usulan masyarakat tersebut, memberikan rekomendasi usulan dan memberikan rekomendasi volume kegiatan dan anggaran.
- f. Usulan yang sudah diberikan rekomendasi dapat diproses dengan men-checklist usulan yang akan diproses kemudian klik tombol **Proses**.

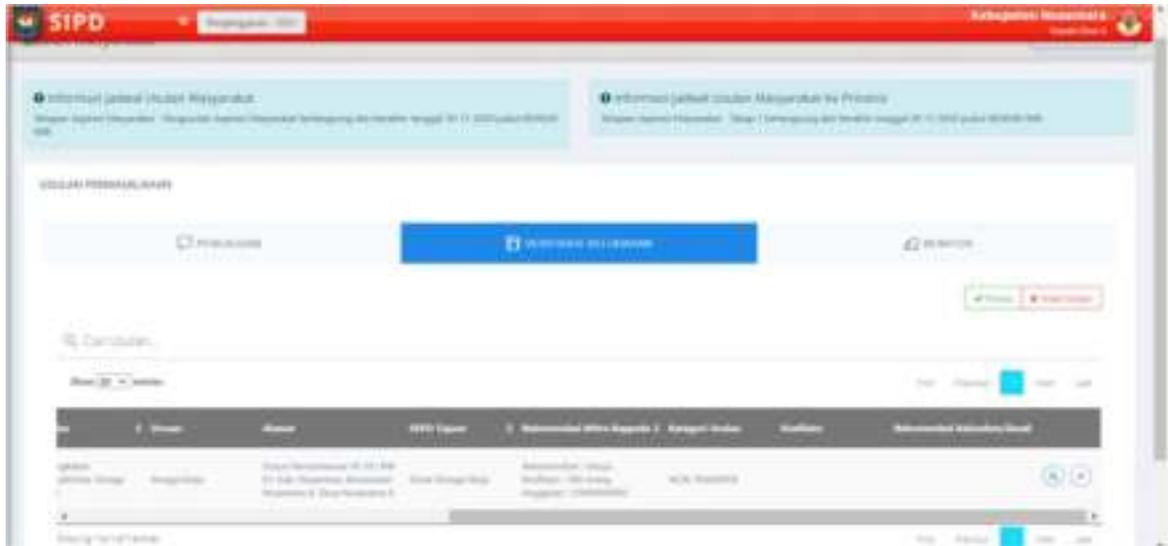


6. Verifikasi usulan oleh kelurahan.

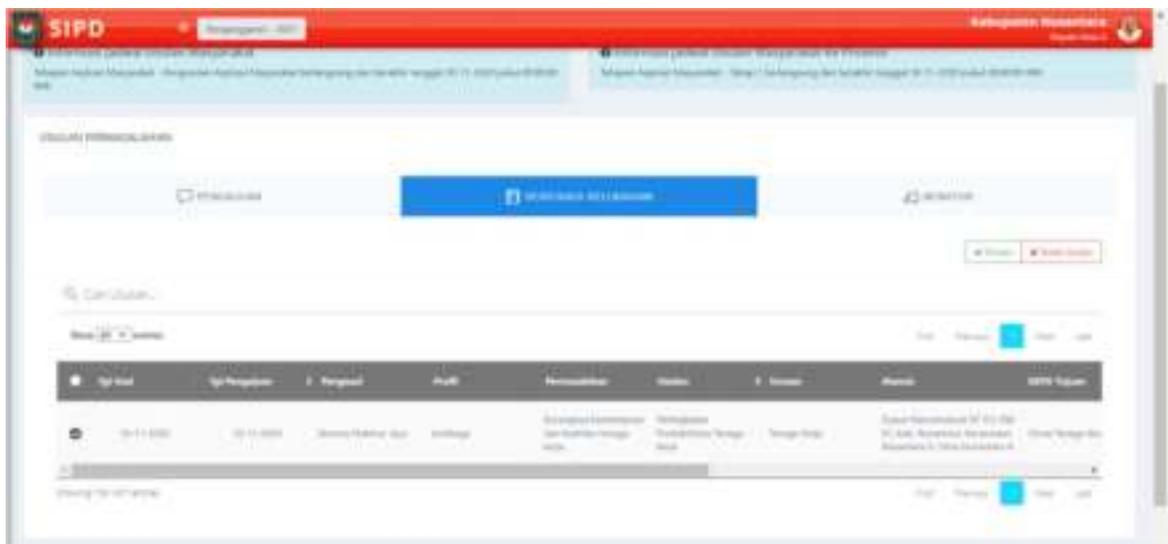
- a. Login menggunakan akun kelurahan, input username dan password yang sudah diberikan.
- b. Pilih menu Usulan Kelurahan/Desa



- c. Usulan yang perlu diverifikasi oleh akun Kelurahan/Desa akan muncul pada tab **Verifikasi Usulan**.

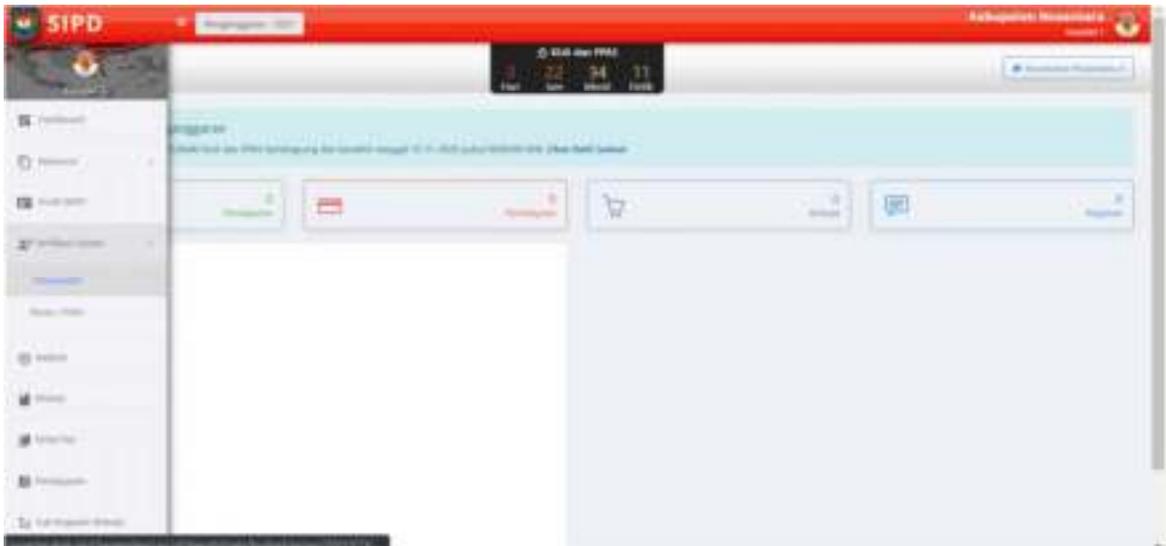


- d. Akun kelurahan/desa harus memberikan **rekomendasi usulan** pada setiap usulan masyarakat. Klik menu bergambar **Pensil** pada usulan yang akan diproses kemudian akan muncul Form Rekomendasi Usulan.
- e. Pada form tersebut yang perlu diisi oleh akun kelurahan/desa adalah input uraian rekomendasi, input rekomendasi volume yang diajukan dan input rekomendasi anggaran yang diajukan.
- f. Usulan yang sudah diberi rekomendasi dapat diproses dengan **men-checklist** usulan yang akan diproses kemudian klik tombol **Proses**.

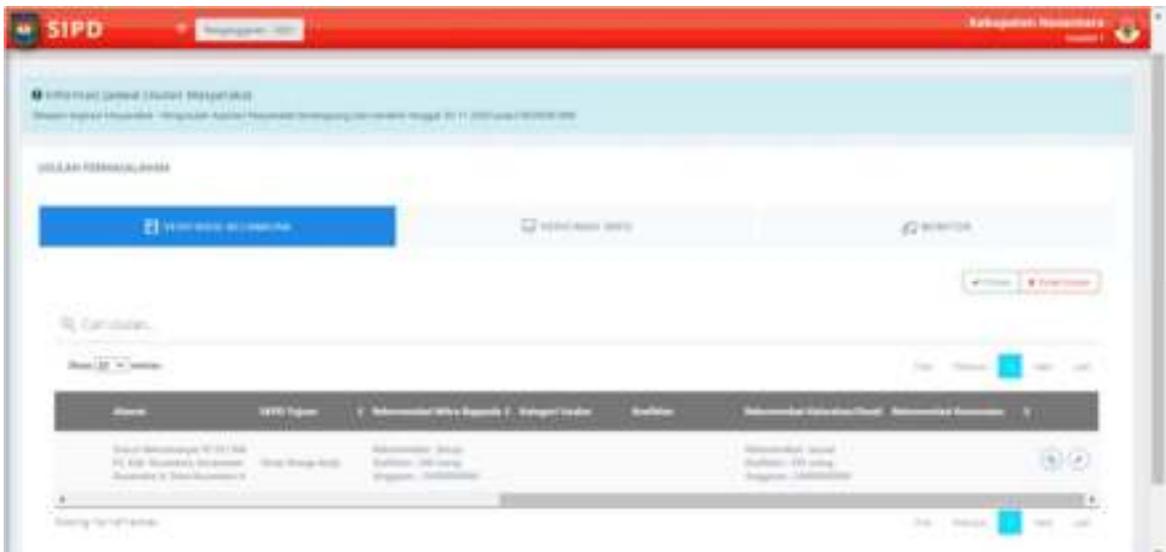


7. Verifikasi usulan oleh kecamatan.
  - a. Login akun setara Kabid/Kasubid/Staf yang sudah di-set untuk memverifikasi usulan, input NIP dan password.

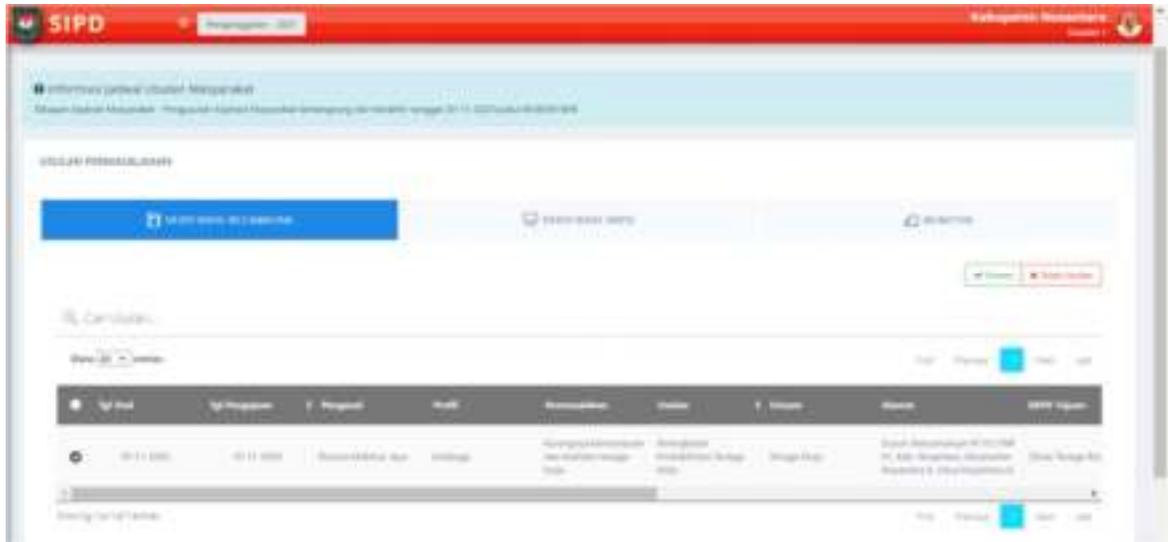
- b. Pilih menu **Verifikasi Usulan**, kemudian klik **Masyarakat**.



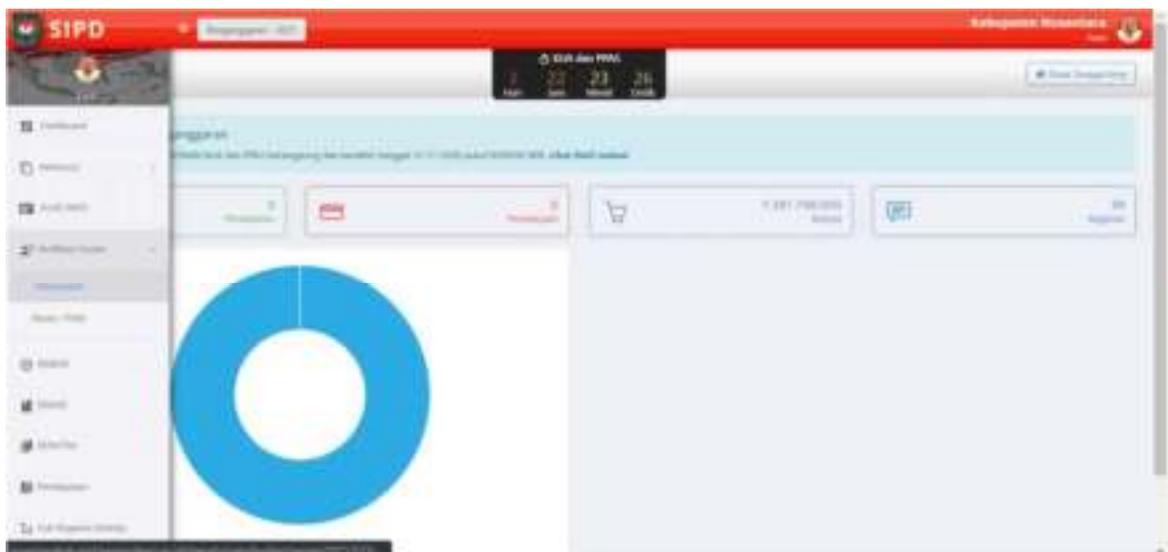
- c. Pada tab **Verifikasi Kecamatan**, kemudian klik tombol gambar **Pensil** untuk memberikan rekomendasi pada usulan.



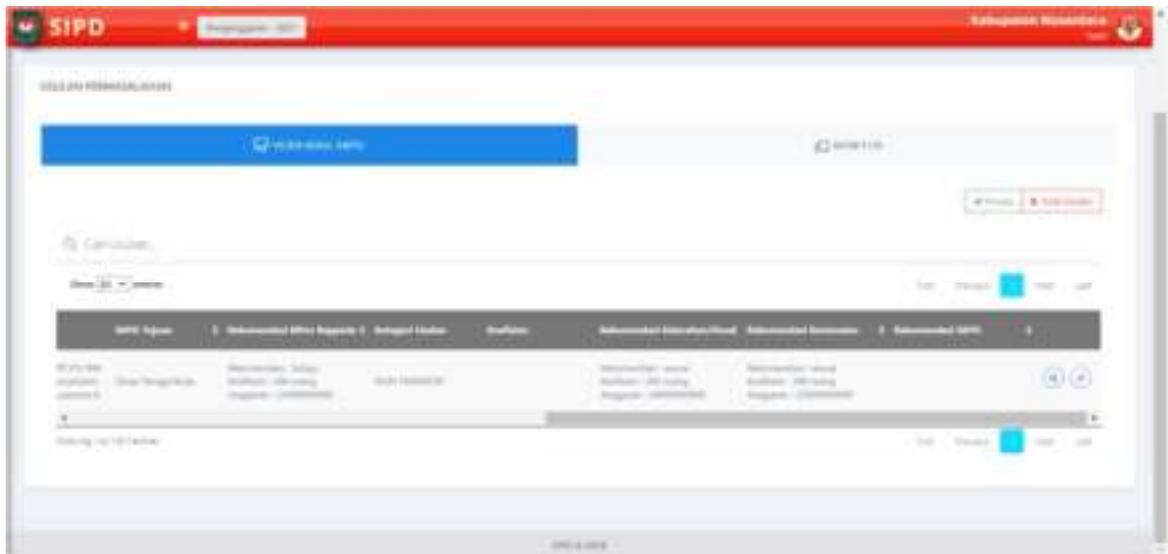
- d. Kemudian akan muncul **Form Rekomendasi Usulan**. Akun kecamatan perlu memberi rekomendasi berupa pilih kelompok belanja transfer atau non transfer, input uraian rekomendasi, input rekomendasi volume yang diajukan dan input rekomendasi anggaran yang diajukan.
- e. Usulan yang sudah diberikan rekomendasi dapat diproses dengan men-checklist usulan yang akan diproses kemudian klik tombol **Proses**.



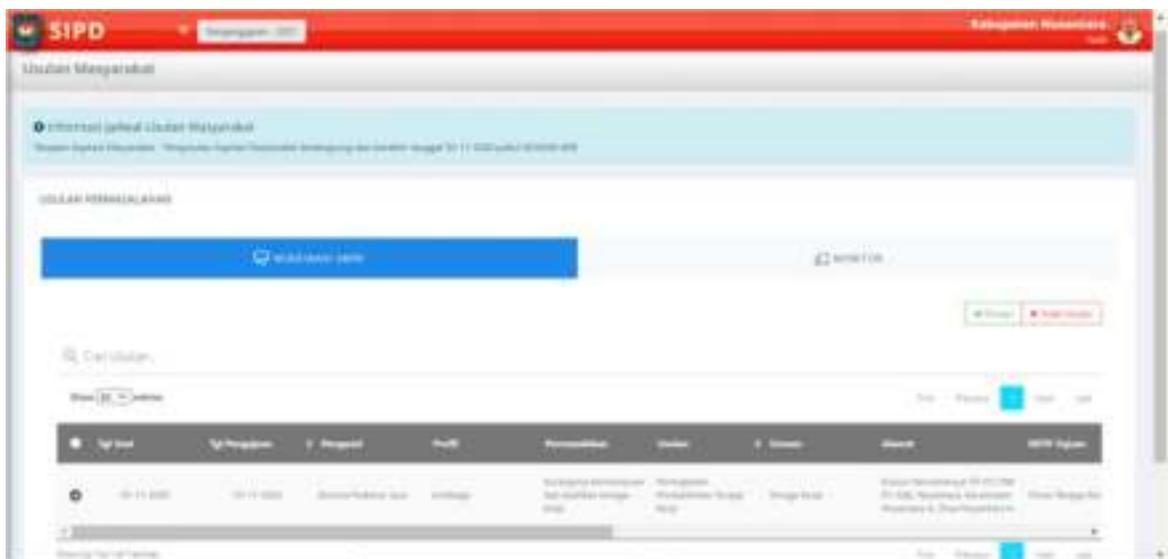
8. Verifikasi usulan oleh Perangkat Daerah Tujuan.
  - a. Login akun setara Kabid/Kasubid/Staf yang sudah di-set untuk memverifikasi usulan, input NIP dan password.
  - b. Pilih menu **Verifikasi Usulan**, kemudian klik **Masyarakat**.



- c. Klik tab **Verifikasi SKPD**, kemudian klik tombol gambar **Pensil** untuk memberikan rekomendasi pada usulan.



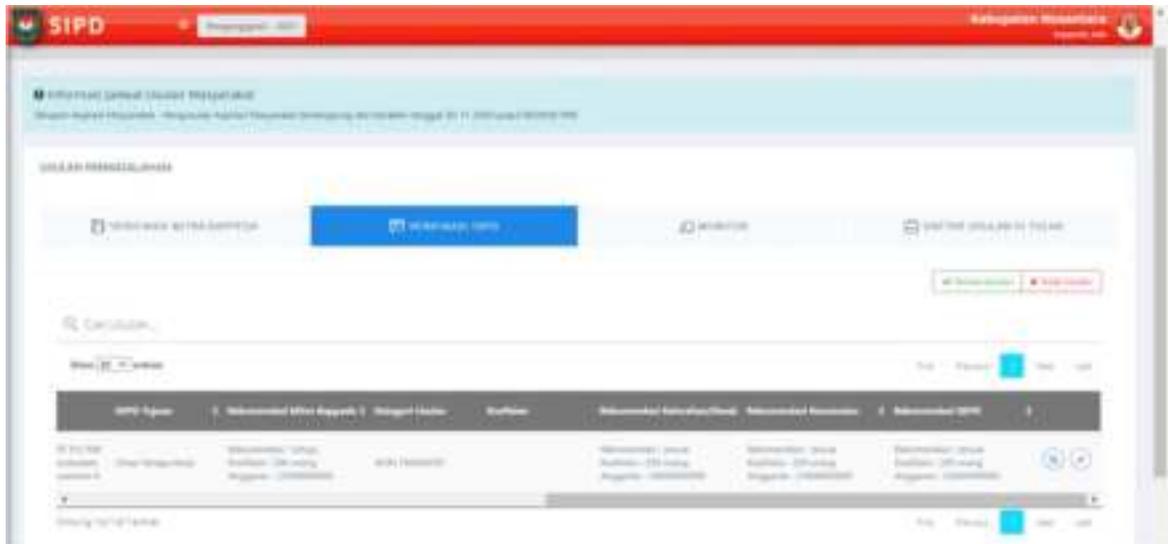
- d. Kemudian akan muncul **Form Rekomendasi Usulan**. Akun Perangkat Daerah perlu memberi rekomendasi berupa mengubah kelompok belanja yang sebelumnya sudah dipilih Mitra Bappeda, mengubah sub kegiatan yang sebelumnya sudah dipilih Mitra Bappeda, menginput usulan rekomendasi usulan dan menginput rekomendasi volume kegiatan dan anggaran.
- e. Usulan yang sudah diberikan rekomendasi dapat diproses dengan men-checklist usulan yang akan diproses kemudian klik tombol **Proses**.



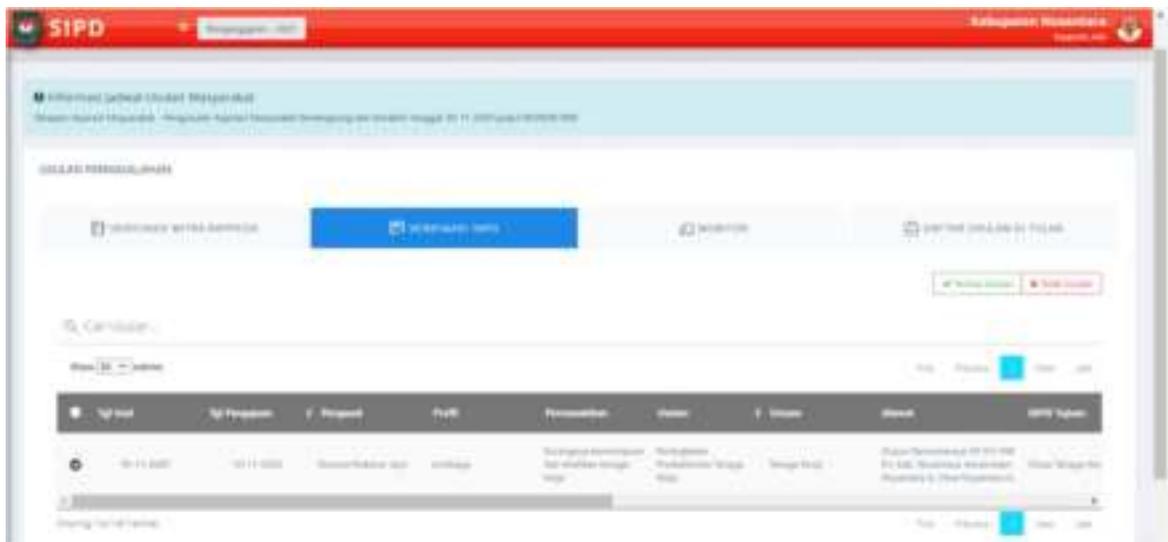
9. Verifikasi usulan oleh TAPD.

- a. Login akun TAPD Perencanaan, input NIP dan password.

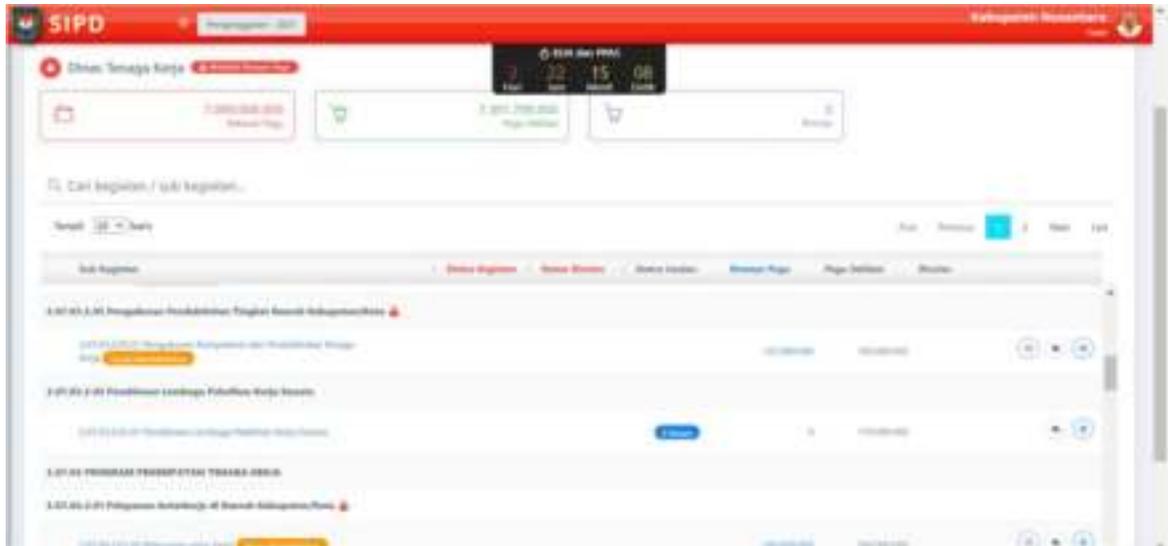
- b. Pilih menu **Verifikasi Usulan**, kemudian klik **Masyarakat**.
- c. Klik tab **Verifikasi TAPD**, kemudian klik tombol gambar **Pencil** untuk memberikan rekomendasi pada usulan.



- d. Kemudian akan muncul Form Usulan. TAPD Bappeda dapat mengubah rekomendasi yang sebelumnya sudah di-input dan memfinalisasinya.
- e. Usulan yang sudah sesuai dapat diterima dan disetujui dengan checklist usulan dan kemudian klik tombol **Terima Usulan**. Jika tidak, dapat ditolak dengan klik tombol **Tolak Usulan**.



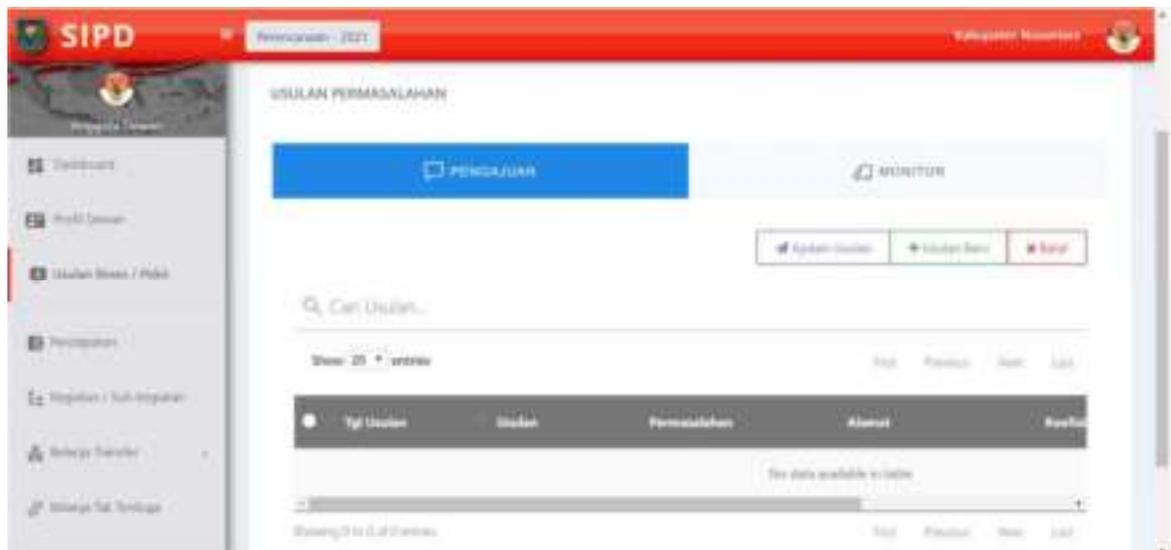
- f. Usulan yang sudah diverifikasi oleh TAPD, akan masuk ke dalam sub kegiatan yang sudah dipilih sebelumnya dan akan muncul notifikasi berupa Aspirasi **Masyarakat (Asmas)**.



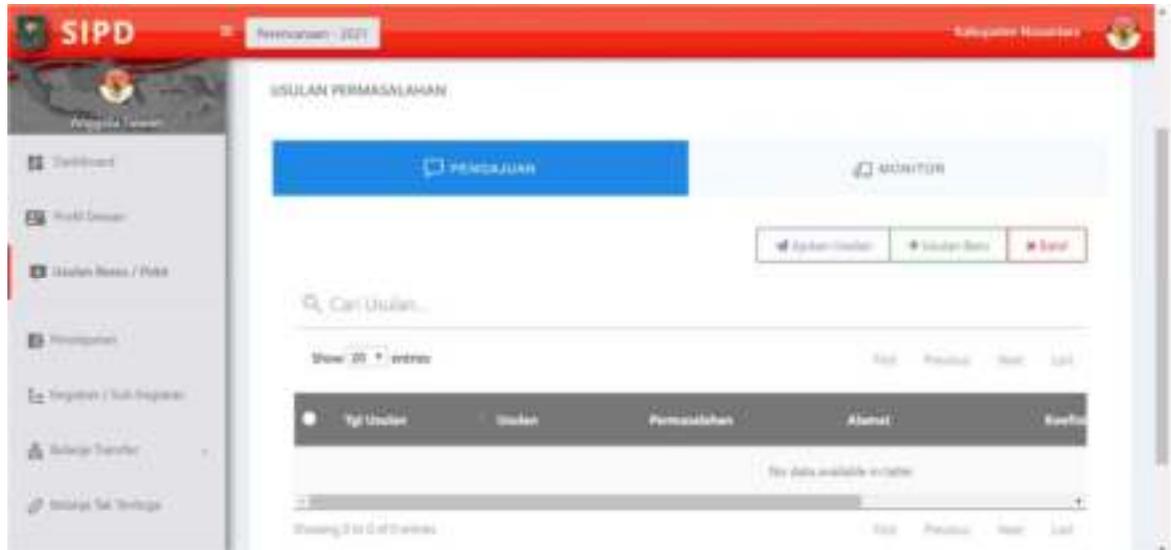
g. Apabila usulan ditolak di tahap verifikasi tertentu, usulan akan berhenti pada tahap tersebut dan akun masyarakat dan kelurahan/desa akan mendapat notifikasi.

#### **E. Tahapan input usulan Reses/Pokir Anggota DPRD.**

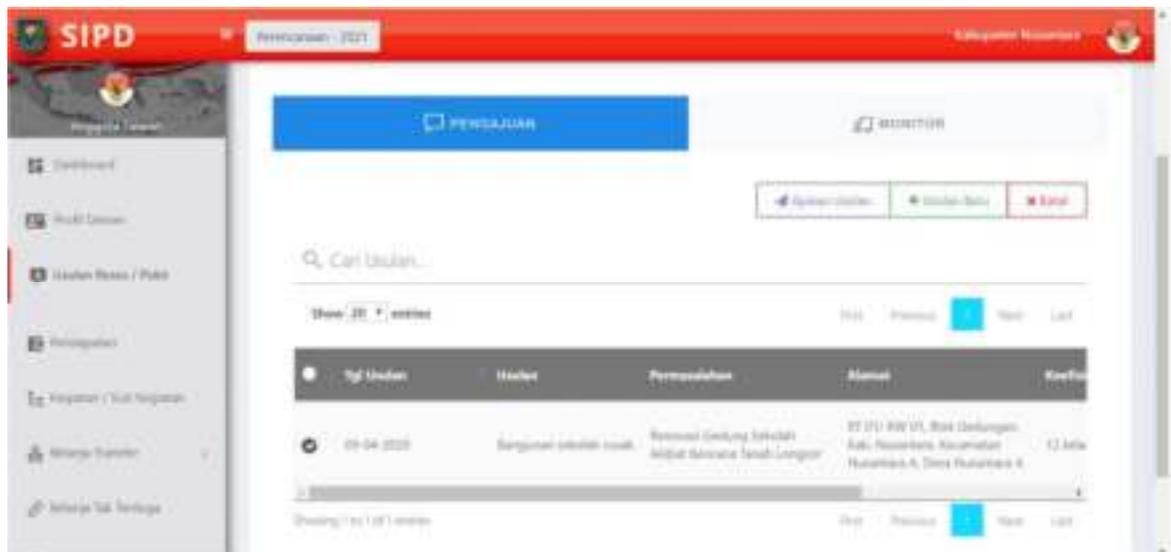
1. Buka laman [bima.sipd.kemendagri.go.id](http://bima.sipd.kemendagri.go.id)
2. Klik **Sistem Informasi Pembangunan Daerah**.
3. Login menggunakan akun anggota DPRD.
4. Klik **Menu** (garis tiga di pojok kiri atas), kemudian klik **Usulan Reses/Pokir**.



5. Pada halaman **Usulan Reses/Pokok Pikiran**, untuk membuat usulan klik tombol **+Usulan Baru**.

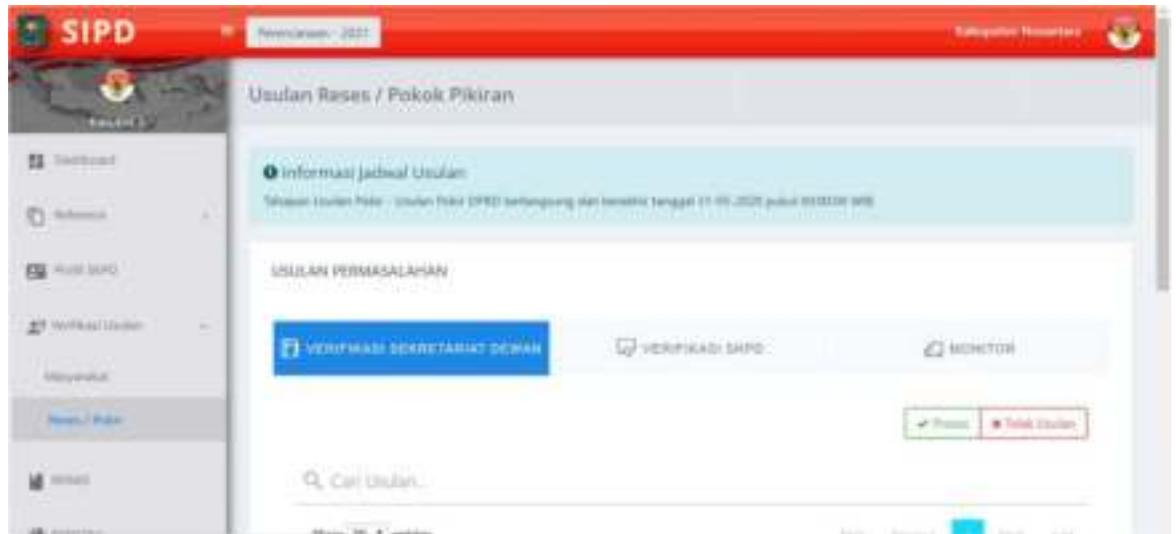


6. Kemudian akan muncul **Form Usulan**. Lengkapi form usulan yang ada kemudian klik **Simpan**.
7. Ulangi langkah nomor 4 (empat) dan 5 (lima) untuk menginput usulan lain.
8. Jika semua usulan sudah diinput, selanjutnya centang semua usulan dengan cara klik tanda bulat yang berada di posisi paling kiri pada masing-masing usulan kemudian klik tombol **Ajukan Usulan**.

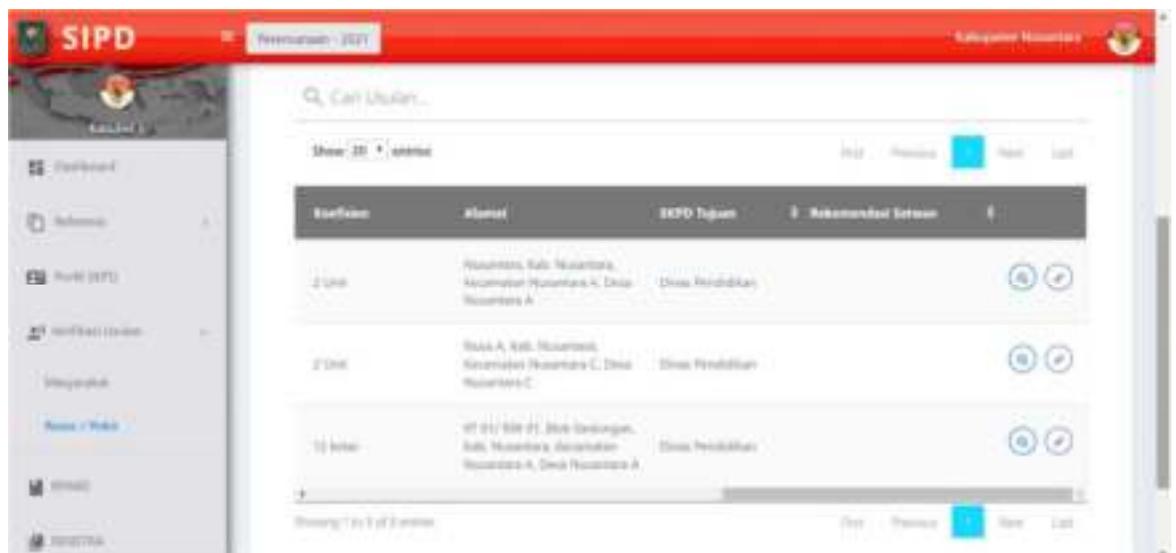


9. Pada notifikasi yang muncul klik **Ya, Lanjut!**.
10. Klik tab **MONITOR** untuk melihat status usulan yang telah diajukan.
11. Proses selanjutnya adalah verifikasi oleh **Sekretariat DPRD**, dengan cara:

- a. Login menggunakan akun setara kasubid yang sebelumnya telah diset.
- b. Pilih menu **Verifikasi Usulan** kemudian klik **Reses/Pokir**.

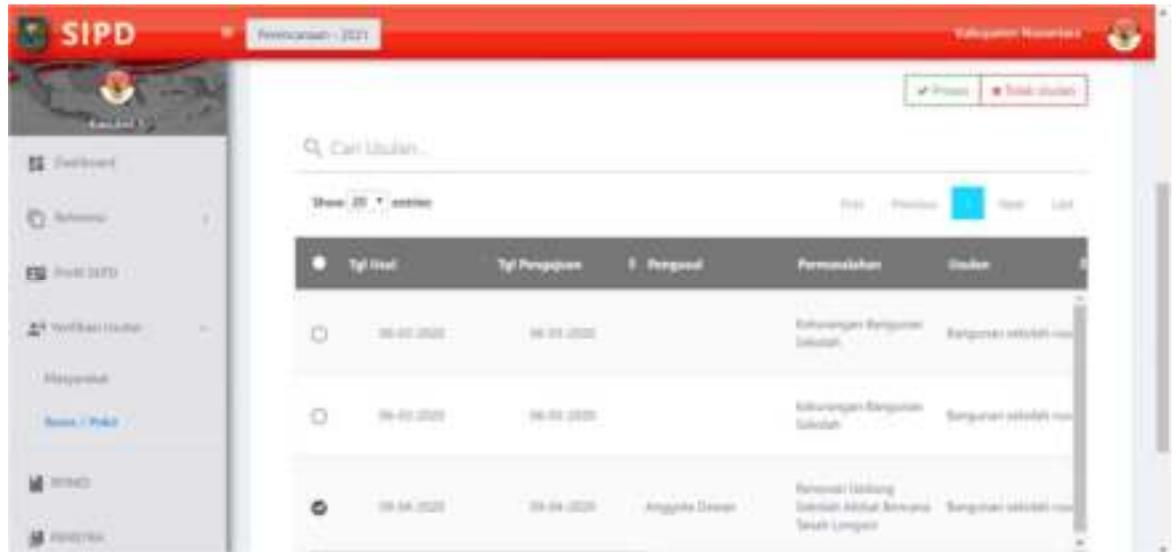


- c. Usulan yang telah diinput oleh anggota DPRD akan muncul pada tab **Verifikasi Sekretariat Dewan**.
- d. Akun kasubid harus memberikan **Uraian Rekomendasi** dan **Rekomendasi Anggaran** pada setiap Usulan Pokir dengan mengklik gambar **Pensil** pada usulan yang akan diproses. Kemudian akan muncul **Form Rekomendasi Usulan**.



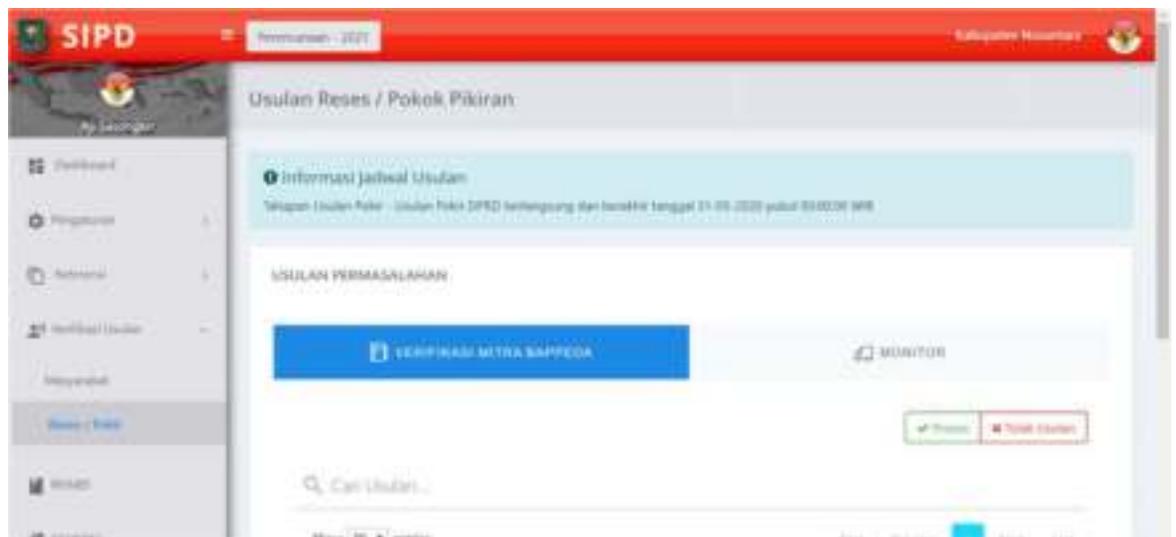
- e. Rekomendasi yang sudah diinput akan muncul pada kolom **Rekomendasi Setwan**.

- f. Usulan yang sudah diberi rekomendasi, dapat diproses dengan mec-checklist usulan yang akan diproses kemudian klik **Proses**.

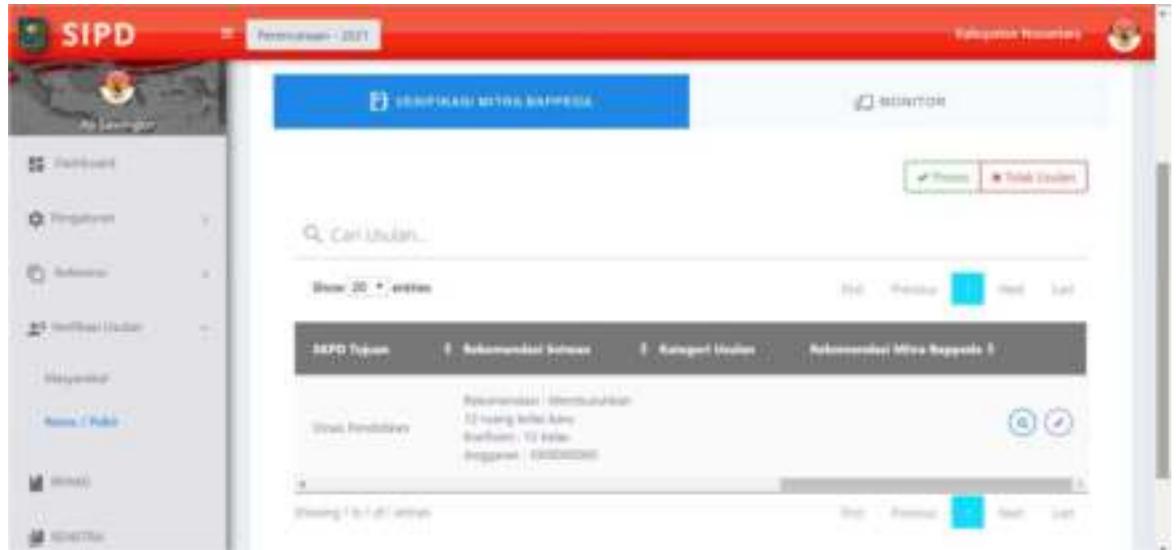


12. Kemudian akan dilakukan verifikasi oleh akun Mitra Bappeda, dengan cara:

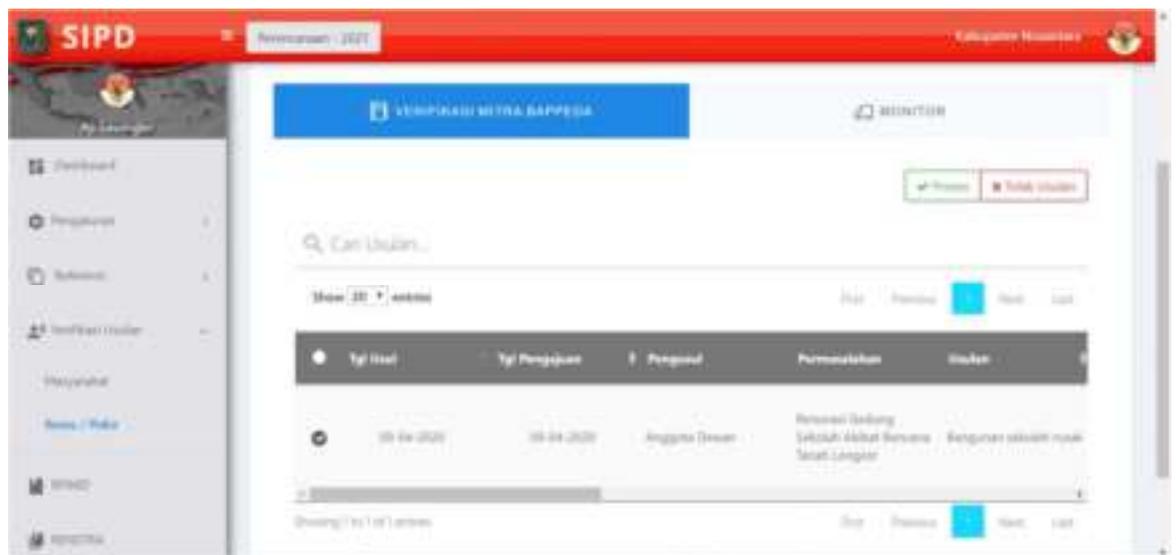
- a. Login menggunakan akun **Mitra Bappeda** (setara eselon III).
- b. Pilih menu **Verifikasi Usulan**, kemudian klik **Reses/Pokir**.



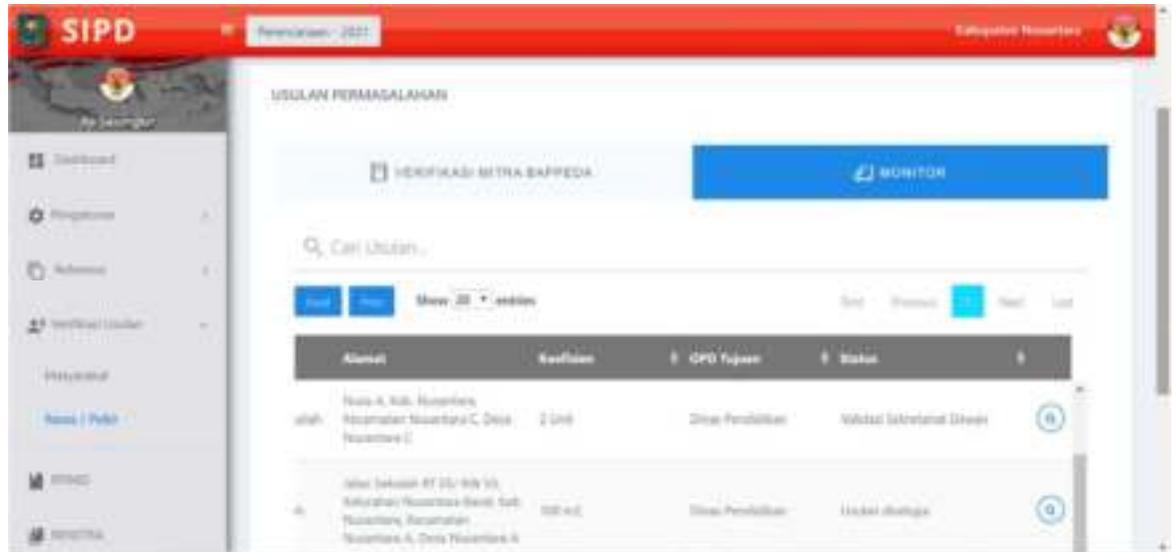
- c. Usulan yang sebelumnya sudah diproses oleh akun Kasubid Sekretariat DPRD akan muncul pada tab Verifikasi Bappeda.
- d. Akun Mitra Bappeda harus memberikan Uraian Rekomendasi dan Rekomendasi Anggaran pada setiap usulan Pokir dengan mengklik gambar **Pensil** pada usulan yang akan diproses, kemudian akan muncul Form Rekomendasi Usulan.



- e. Rekomendasi yang sudah diinput akan muncul pada kolom **Rekomendasi Mitra Bappeda**.
- f. Usulan yang sudah diberi rekomendasi dapat diproses dengan men-checklist usulan yang akan diproses kemudian klik **Proses**.

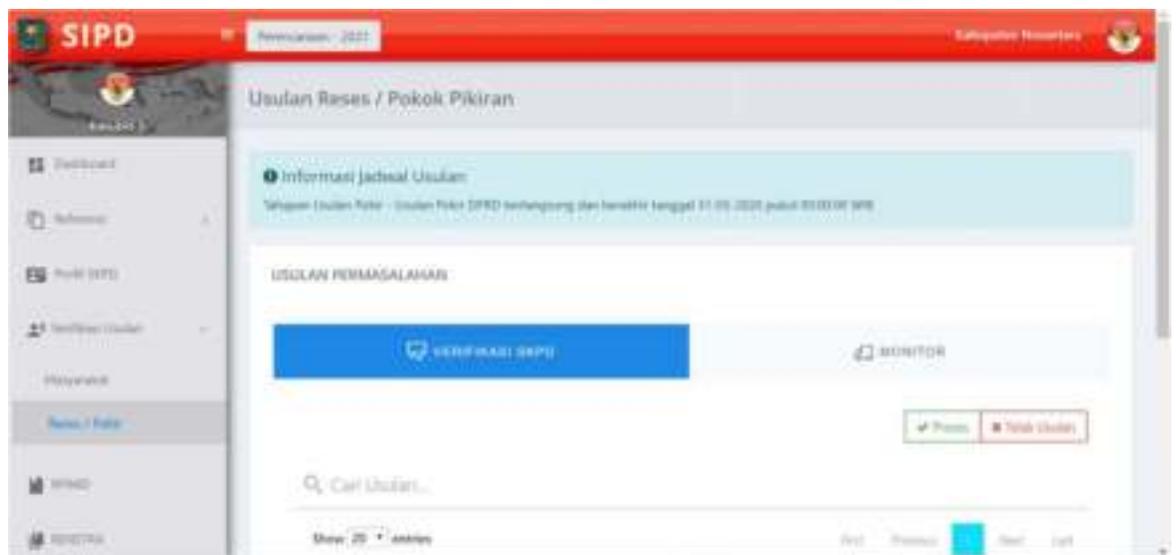


- g. Usulan yang sudah diproses akan pindah ke tab **MONITOR** dan dapat dimonitor status usulan pada kolom status.

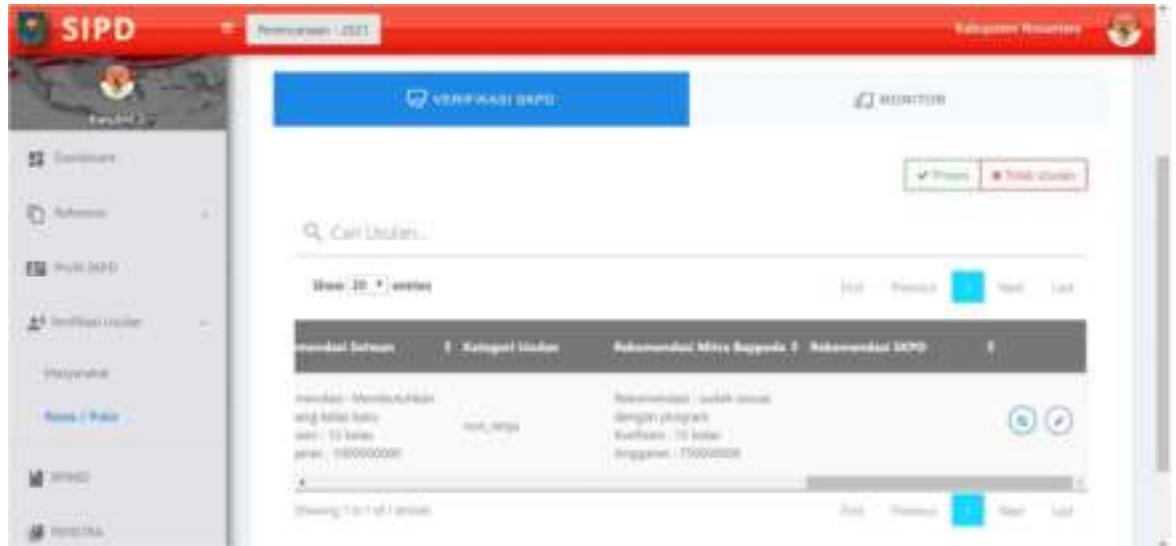


13. Selanjutnya proses Verifikasi oleh OPD, dilakukan dengan cara:

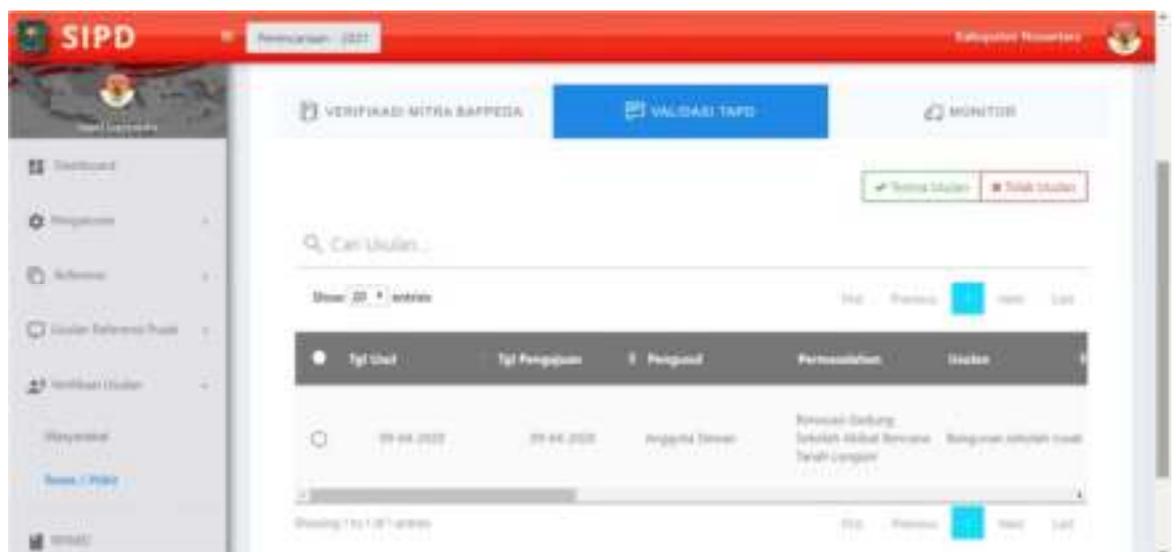
- a. Login menggunakan akun setara kasubid.
- b. Pilih menu **Verifikasi Usulan** kemudian klik **Reses/Pokir**.



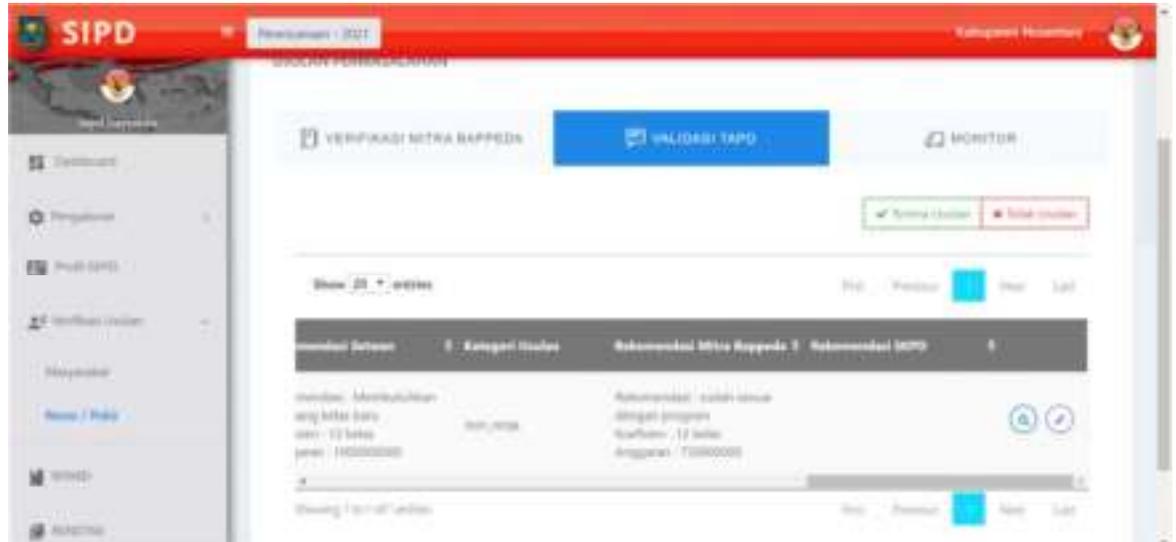
- c. Usulan yang sebelumnya sudah diverifikasi oleh Mitra Bappeda akan muncul pada tab **Verifikasi SKPD**.
- d. Akun Kasubid OPD harus memberikan Uraian Rekomendasi dan Rekomendasi Anggaran pada setiap usulan Pokir dengan mengklik gambar Pensil pada usulan yang akan diproses kemudian akan muncul Form Rekomendasi Usulan.



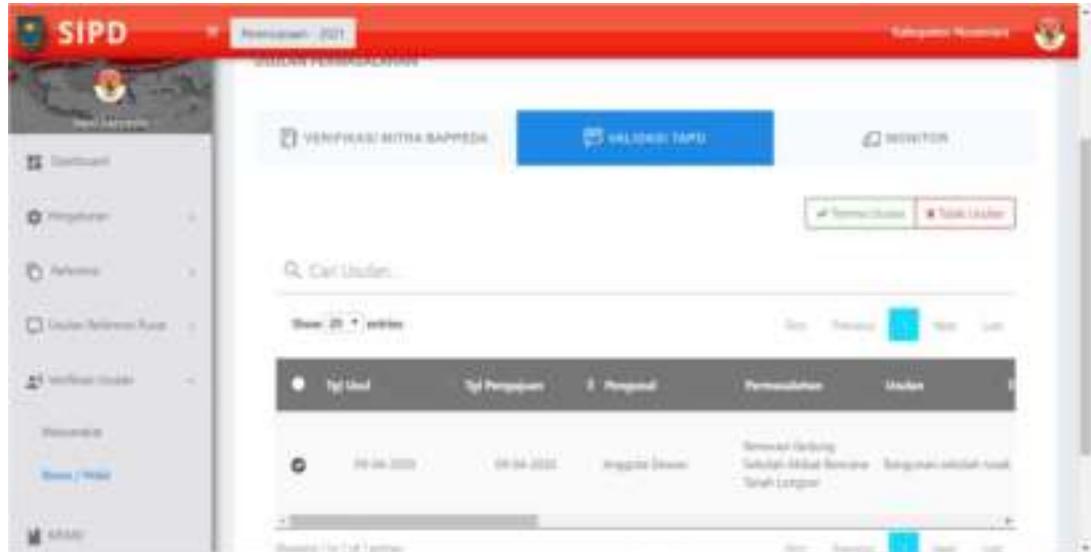
- e. Rekomendasi yang sudah diinput akan muncul pada kolom **Rekomendasi SKPD**.
  - f. Usulan yang sudah diberik rekomendasi dapat diproses dengan men-checklist usulan yang akan diproses kemudian klik **Proses**.
  - g. Usulan yang sudah diproses akan pindah ke tab **MONITOR** dan dapat dmonitor status usulannya pada kolom Status.
14. Proses terakhir yaitu Verifikasi yang dilakukan oleh TAPD, dengan cara:
- a. Login menggunakan akun TAPD Bappeda.
  - b. Pilih menu **Verifikasi Usulan** kemudian klik **Reses/Pokir**.
  - c. Usulan yang sebelumnya sudah diverifikasi oleh SKPD akan muncul pada tab **Validasi TAPD**.



- d. TAPD Bappeda dapat mengubah **Uraian Rekomendasi** dan **Rekomendasi Anggaran** pada setiap usulan pikir dengan cara klik gambar **Pensil** pada usulan yang akan diproses, kemudian akan muncul **Form Rekomendasi Usulan**.



- e. Usulan yang sudah sesuai dapat diterima dan disetujui dengan men-checkhlist usulan dan kemudian klik **Terima Usulan**.



- f. Usulan yang sudah diproses akan pindah ke tab Monitor dan dapat dimonitor status usulannya pada kolom **Status**.

